



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)
LHOKSEUMAWE TAHUN 2021**



Walikota

Wakil Walikota

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2020**



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2020**



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021;
- c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68)
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRK.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota, DPRK dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 1 (satu) tahun, dan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2021.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota
- Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota
- Bab VII Penutup

Pasal 6

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

- a. Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2021;
- b. Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Dokumen Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021.



Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RKPK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RKPK.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPK menggunakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Kota Tahun 2021:

- a. Pemerintah Kota menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2021 sebagai bahan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Kota pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Kota dengan DPRK;
- b. Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kota dengan DPRK.

Pasal 10

Indikasi program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam matrik Program Pembangunan Daerah dari RKPK ini yang telah disepakati dalam forum Musrenbang bersama DPRK, Stakeholder dan Perangkat Daerah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan aturan perundang-undangan.



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

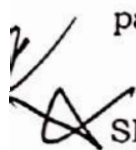
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

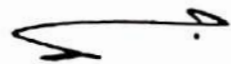
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2020 M
11 Rabi'ul Akhir 1442 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2020 M
11 Rabi'ul Akhir 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR....

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-7
1.4 Sistematika Dokumen RPKP.....	1-8
1.5 Maksud dan Tujuan	1-9
BAB II Gambaran Umum Kondisi Kota	1-11
2.1 Kondisi Umum Kondisi Kota.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	II - 11
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 11
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 11
2.1.3.1.1 Pertumbuhan PDRB	II - 11
2.1.3.1.2 Laju Inflasi.....	II - 11
2.1.3.1.3 PDRB Per kapita	II - 16
2.1.3.1.4 Indeks Rasio Gini	II - 17
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II - 18
2.1.3.2.1 Pendidikan	II - 18
2.1.3.2.2 Kesehatan	II - 21
2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II - 40
2.1.3.3.1 Kebudayaan	II - 40
2.1.3.3.2 Pemuda dan Olahraga	II - 41
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 41
2.1.4.1 Fokus Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II - 41
2.1.4.1.1 Pendidikan	II - 41
2.1.4.1.2 Kesehatan	II - 46
2.1.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....	II - 91
2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II - 98

2.1.4.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta	
Perlindungan Masyarakat	II -99
2.1.4.1.6 Sosial	II -101
2.1.4.2.3 Penanaman Modal.....	II -118
2.1.4.2.4 Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak.....	II -119
2.1.4.2.5 Pangan	II -124
2.1.4.2.6 Pertanahan.....	II -125
2.1.4.2.7 Lingkungan Hidup.....	II -126
2.1.4.2.8 Administrasi Kependudukan dan	
Pencacatan Sipil.....	II -130
2.1.4.2.9 Pemberdayaa Masyarakat dan Desa	II -133
2.1.4.2.10 Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
Berencana.....	II -143
2.1.4.2.11 Perhubungan	II -144
2.1.4.2.14 Kepemudaan dan OlahRaga.....	II -154
2.1.4.2.15 Statistik	II -155
2.1.4.2.16 Kebudayaan	II -156
2.1.4.2.17 Perpustakaan	II -158
2.1.4.2.18 Kearsipan	II -159
2.1.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan	II -160
2.1.4.3.1 Pariwisata	II -160
2.1.4.3.2 Pertanian	II -163
2.1.4.3.3 Perdagangan.....	II -165
2.1.4.3.4 Perindustrian	II -165
2.1.4.3.5 Kelautan dan Perikanan	II -166
2.1.4.4. Fokus Urusan Penunjang Urusan	
Pemerintahan.....	II -168
2.1.4.4.1 Perencanaan	II -168
2.1.4.4.2 Keuangan.....	II -170
2.1.4.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ..	II -171
2.1.4.4.4 Pengawasan	II -174
2.1.4.5. Fokus Urusan Keistimewaan dan	
Kekhususan	II -177
2.1.4.5.1 Syariat Islam	II -177
2.1.4.5.2 Majelis Ulama.....	II -178
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah	II -180

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II -180
2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	II -181
2.1.5.3. Fokus Iklim Investasi	II -182
2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II -182
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta	
Realisasi RPJMK	II -188
2.2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2018	II -188
2.2.2. Realisasi terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan	II -191
2.2.2.1 Realisasi Pendanaan	II -191
2.2.2.2. Realisasi Pendapatan	II -192
2.2.2.3. Realisasi Belanja	II -195
2.2.2.4. Realisasi Pembiayaan	II -198
2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
serta Realisasi RPJMK Lhokseumawe.....	II -199
2.2.3.1 Metode Evaluasi	II -199
2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe.....	II -301
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi	II -11
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II -11
2.2.1.2 Laju Imflasi	II -15
2.2.1.3 PDRB Per Kapita.....	II -16
2.2.1.4 Indeks Rasio Gini	II -17
2.2.1.5 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan ...	II -17
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II -18
2.2.2.1 Pendidikan	II -18
2.2.2.2 Kesehatan	II -21
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II -40
2.2.3.1 Kebudayaan	II -40
2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga	II -41
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II -41
2.4.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan	
dengan Pelayanan Dasar	II -41
2.3.1.1. Pendidikan	II -41
2.3.1.2. Kesehatan	II -46
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II -92
2.3.1.6. Sosial	II -102
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan	
dengan Pelayanan Dasar	II -107

2.3.2.1. Tenaga Kerja.....	II -107
2.3.2.2. Komunikasi dan Informatika	II -116
2.3.2.3. Penanaman Modal.....	II -119
2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II -120
2.3.2.5. Pangan	II -125
2.3.2.6. Pertanian.....	II -126
2.3.2.7. Lingkungan Hidup.....	II -127
2.3.2.8. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	II -131
2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II -134
2.3.2.10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II -144
2.3.2.11. Perhubungan.....	II -145
2.3.2.12. Komunikasi dan Informatika	II -152
2.3.2.13. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	II -153
2.3.2.15. Kepemudaan dan Olahraga.....	II -156
2.3.2.16. Statistik.....	II -157
2.3.2.17. Kebudayaan	II -158
2.3.2.18. Perpustakaan	II -60
2.3.2.19. Kearsipan	II -161
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	II -162
2.3.3.1. Pariwisata.....	II -162
2.3.3.3. Perdagangan.....	II -167
2.3.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II -169
2.3.4.1. Perencanaan	II -169
2.3.4.2. Keuangan	II -172
2.3.4.3. Kepengawain, Pendidikan dan Pelatihan	II -173
2.3.4.4. Pengawasan.....	II -176
2.3.5. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan	II -179
2.3.5.1. Syariat Islam	II -179
2.3.5.2. Majelis Ulama.....	II -180
2.3.6. Aspek Daya Saing Daerah.....	II -182
2.3.6.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II -182
2.3.6.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II -183
2.3.6.3. Fokus Iklim Investasi	II -184
2.3.6.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II -187

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III -1
3.1.1	Kondisi Perekonomian Nasional dan Aceh	III -1
3.1.2	Kondisi Perekonomian Kota Lhokseumawe.....	III -3
3.1.3	Perkiraan Perekonomian Tahun 2020	III -10
3.1.4	Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2020 dan Tahun 2021	III -13
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Kota	III -15
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe .	III -15
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe	III -22
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe....	III -27
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe.....	
3.2.5	3.3 Kerangka Pendanaan	III -24
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III -24
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III -29

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV -1

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2	Sasaran dan Prioritas Tahun 2021 Kota Lhokseumawe ...	IV - 9

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA V - 1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA

LHOKSEUMAWE	VI - 1

BAB VII PENUTUP VII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-rata Temperatur Maksimum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -9
Tabel 2.2	Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -9
Tabel 2.3	Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -10
Tabel 2.4	Arah Angin , Kecepatan Rata-rata, dan Kecepatan Angka Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -10
Tabel 2.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -11
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -13
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Kontan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -14
Tabel 2.8	Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -15
Tabel 2.9	Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota Tetangga Tahun 2015- 2019	II -17
Tabel 2.10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -41
Tabel 2. 11	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -42
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murnai (APM) Kota lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -44
Tabel 2. 13	Angka Putus Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -45
Tabel 2.14	Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2019	II -46
Tabel 2.15	Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -47
Tabel 2. 16	AKHB dan AKB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -47

Tabel 2. 17 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -49
Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -50
Tabel 2. 19 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -51
Tabel 2. 20 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -52
Tabel 2. 21 Rasio Pukesmas, Poliklinik ,Pustu Per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -54
Tabel 2. 22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -55
Tabel 2. 23 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -56
Tabel 2. 24 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -57
Tabel 2. 25 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -58
Tabel 2. 26 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kopetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -60
Tabel 2. 27 Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .	II -61
Tabel 2. 28 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -62
Tabel 2. 29 Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..	II -63
Tabel 2. 30 Cakupan Persentase Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -64
Tabel 2. 31 Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -65
Tabel 2. 32 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -66
Tabel 2.33 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -67
Tabel 2. 34 Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -68

Tabel 2. 35 Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -69
Tabel 2. 36 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -70
Tabel 2. 37 Cakupan Penderita Diare yang ditangani Kota lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -71
Tabel 2. 38 Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -72
Tabel 2. 39 Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -73
Tabel 2. 40 Proporsi Anak Balita dengan Demam yang di obati Dengan Obat Anti Malaria yang tepat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -74
Tabel 2. 41 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -75
Tabel 2. 42 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -76
Tabel 2. 43 Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan dan Pukesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -77
Tabel 2. 44 Cakupan Pukesmas dan Pembantu Pukesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -77
Tabel 2. 45 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -79
Tabel 2. 46 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumaw Tahun 2015-2019	II -81
Tabel 2. 47 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -83
Tabel 2. 48 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -84
Tabel 2. 49 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -87
Tabel 2. 50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -88
Tabel 2. 51 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -89

Tabel 2. 52 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -91
Tabel 2. 53 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Km)	II -92
Tabel 2. 54 Jenis,kondisi,Kelas,dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -93
Tabel 2. 55 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -95
Tabel 2. 56 Panjang Jalan dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -96
Tabel 2. 57 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -96
Tabel 2. 58 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -97
Tabel 2. 59 Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -98
Tabel 2. 60 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Limnas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -99
Tabel 2. 61 Jumlah penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -100
Tabel 2. 62 Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -101
Tabel 2. 63 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial.....	II -102
Tabel 2. 64 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Pontensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -103
Tabel 2. 65 Persentase Pante Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -104
Tabel 2. 66 Disabilitas yang Menerima Bantuan Tahun 2015-2019	II -105
Tabel 2. 67 Angka partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -106
Tabel 2. 68 Tingka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -107
Tabel 2. 69 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -107

Tabel 2. 70 Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -108
Tabel 2. 71 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -109
Tabel 2. 72 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -110
Tabel 2. 73 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -111
Tabel 2. 74 Angka Sengketa Pengusaha –Pekerja Per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -111
Tabel 2. 75 Besaran Kasur yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -112
Tabel 2. 76 Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -113
Tabel 2. 77 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -114
Tabel 2. 78 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijkskn Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019..	II -115
Tabel 2. 79 Rasio Warnet Terhadap Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -115
Tabel 2. 80 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -117
Tabel 2. 81 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -118
Tabel 2. 82 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -119
Tabel 2. 83 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -120
Tabel 2. 84 Proporsi Kursi yang di Duduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -121
Tabel 2. 85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -121
Tabel 2. 86 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -123

Tabel 2. 87 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -124
Tabel 2. 88 Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -125
Tabel 2. 89 Luas Lahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019.....	II -126
Tabel 2. 90 Persentase Timbulan Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -127
Tabel 2. 91 Persentase Jumlah Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -128
Tabel 2. 92 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -129
Tabel 2. 93 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -130
Tabel 2. 94 Rasio Bayi Ber akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -131
Tabel 2. 95 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -133
Tabel 2. 96 Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2015-2019	II -134
Tabel 2. 97 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -134
Tabel 2. 98 Data Penyaluran Dana Ke Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -135
Tabel 2. 99 Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -136
Tabel 2.100 Data Badan Usaha Milik Gnpung (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -137
Tabel 2.101 Cakupan Pembinaan Badan Usah milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -138
Tabel 2.102 Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-019	II -139
Tabel 2.103 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -140
Tabel 2.104 Presentase PKK aktif di Kota Lhkseumawe Tahun 2015-2019	II -141

Tabel 2.105 Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -142
Tabel 2.106 Strata Posyandu di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019..	II -142
Tabel 2.107 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -143
Tabel 2.108 Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -144
Tabel 2.109 Rasio Izin Trayek Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019	II -145
Tabel 2.110 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019	II -146
Tabel 2.111 Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -147
Tabel 2.112 Kepemilikan KIR Angkutan Umun Tahun 2015-2019	II -148
Tabel 2.113 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umun (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -148
Tabel 2.114 Pemasangan Rambu-rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -149
Tabel 2.115 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2019	II -150
Tabel 2.116 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2019	II -150
Tabel 2.117 Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -151
Tabel 2.118 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019	II -151
Tabel 2.119 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019..	II -152
Tabel 2.120 Jumlah investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019	II -153
Tabel 2.121 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tashun 2015-2019	II -153
Tabel 2.122 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -153
Tabel 2.123 Persentase organisasi pemuda yang aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II - 154
Tabel 2.124 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II - 154

Tabel 2.125 Cakupan pelatih yang bersertifikasi Kota Lhokseumawe	
Tahun 2015-2019	II - 155
Tabel 2.126 Penyelenggara festival seni budaya Kota Lhokseumawe	II - 157
Tabel 2.127 Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II - 158
Tabel 2.128 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kota	
Lhokseumawe tahun 2015-2019	II - 159
Tabel 2.129 Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II - 160
Tabel 2.130 Objek wisata Kota Lhokseumawe	II - 161
Tabel 2.131 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe	
Tahun 2015-2019	II -162
Tabel 2.132 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -163
Tabel 2.133 Kontribusi Kelompok Tani Terhadap PDRB Kota	
Lhokseumawe Tahun 2019	II -164
Tabel 2.134 Produktivitas Komunitas Pangan Kota Lhokseumawe	
Tahun 2015-2019	II -164
Tabel 2.135 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2016	II -165
Tabel 2.136 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -166
Tabel 2.137 Produksi Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun	
2015-2019	II -166
Tabel 2.138 Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -171
Tabel 2.139 Presentase Pejabat ASN yang Mengikuti DIKLAT	
Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -172
Tabel 2.140 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan	
Administrasi,Jabatan Pengawas,Jabatan Fungsional	
tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe	
Tahun 2015-2019	II -173
Tabel 2.141 Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi	
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -174
Tabel 2.142 Capaian Kapabilitas APIP Pemerinta Kota Lhokseumawe	
Tahun 2015-2019	II -175
Tabel 2.143 Capaian Tingkat Kematangan SPIP Kota Lhokseumawe	
Tahun 2015-2019	II -176

Tabel 2.144	Tipe Dayah,Kepemilikan ,dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -177
Tabel 2.145	Jumlah Hafiz –Hafizah yang di Bina Tahun 2015-2019.....	II -178
Tabel 2.146	Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -179
Tabel 2.147	Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -179
Tabel 2.148	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -181
Tabel 2.149	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -182
Tabel 2.150	Angka Kriminalitas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -183
Tabel 2.151	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -184
Tabel 2.152	Presentasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019	II -185
Tabel 2.153	Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019	II -186
Tabel 2.154	Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -187
Tabel 2.155	Capaian Indikator Makro Tahun 2018 terhadap Target RKPK Tahun 2019.....	II -188
Tabel 2.156	Realisasi Pendanaan RKPK Smester 2 Tahun 2019.....	II - 192
Tabel 2.157	Realisasi Pendapatan RKPK Smester 2 Tahun 2019.....	II - 194
Tabel 2.158	Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung RKPK Smester 2 Tahun 2019	II - 196
Tabel 2.159	Rincian Realisasi Menurut Jenis Belanja RKPK Smester 2 Tahun 2019	II - 197
Tabel 2.160	Realisasi Pembiayaan RKPK Smester 2 Tahun 2019	II - 198
Tabel 2.161	Tingkat Capaian Realisasi OPD terhadap RKPK 2019 DAN RPJMK.....	II - 202
Tabel 2.162	Tingkat Capaian Realisasi OPD terhadap RKPK 2019 dan RPJMK.....	II - 207
Tabel 2.163	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 Smester II	II -208
Tabel 2.164	Tingkat Capaian Kinerja	II -296

Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe.....	III -18
Tabel 3.1.a	Proyeksi / Target Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022	III -19
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020..	III -24
Tabel 3.2.a	Proyeksi / Target Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022	III -26
Tabel 3.3.	Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021.....	III -28
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	IV – 4
Tabel 4.2	Target Capaian Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2021.....	IV – 9
Tabel 4.3	Sinkronisasi Isu Strategis, Tujuan/Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Lhokseumawe	IV – 15
Tabel 4.4	Program Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2021	IV - 18
Tabel 5.1.	Rencana Kerja Pendanaan Kota Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021	V -2
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Makro Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2021.....	VI- 1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2021.....	VII- 6
Tabel 7.1 A	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021-2022 Pemerintah Kota Lhokseumawe	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018- 2020	VII-5
Tabel 7.2 A	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021- 2022	VII- 27
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022.....	VIII- 3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022.....	VIII- 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Wilayah Kota Lhokseumawe.....	II -2
Gambar 2. 2	Peta Kemiringan Kota Lhokseumawe	II -3
Gambar 2. 3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe.....	II -4
Gambar 2. 4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II -5
Gambar 2. 5	Pengunaan Lahan Kota Lhokseumawe.....	II -6
Gambar 2. 6	Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II -8
Gambar 2. 7	Laju Pertumbuhan Ekonomi lhokseumawe Tahun 2015 – 2019 (%).....	II -12
Gambar 2. 8	PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	II - 16
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2019	II -18
Gambar 2.10	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -19
Gambar 2.11	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -20
Gambar 2.12	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -21
Gambar 2.13	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -22
Gambar 2. 14	Indeks Perkembangan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -23
Gambar 2. 15	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -24
Gambar 2. 16	Prevalensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -25
Gambar 2. 17	Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -26

Gambar 2. 18 Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan	
Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -27
Gambar 2. 19 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan	
Persalinan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -28
Gambar 2. 20 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan	
Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Lhokseumawe Tahun	
2015-2019	II -29
Gambar 2. 21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -30
Gambar 2. 22 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang	
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -31
Gambar 2. 23 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining	
Kesehatan Sesuai Standar.....	II -32
Gambar 2. 24 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas	
Mendapatkan Skiring Kesehatan Sesuai Standar Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -33
Gambar 2. 25 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan	
Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun	
2015-2019	II -34
Gambar 2. 26 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan	
Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun	
2015-2019	II -35
Gambar 2. 27 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan	
Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kota Lhokseumawe	
Tahun 2015-2019	II -36
Gambar 2. 28 Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan	
TBC Sesuai Standar Kota Lhokseumae Tahun 2015-2019	II -37
Gambar 2. 29 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	
mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar	
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -38
Gambar 2. 30 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	
DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -39
Gambar 2. 31 Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -40
Gambar 2. 32 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota	
Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -167

Gambar 2. 33 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -181
Gambar 2. 34 Struktur Pendapatan Kota Lhokseumawe Smester 2 Tahn 2019.....	II- 195
Gambar 2.35 Struktur Belanja Kota Lhokseumawe Smester 2 Tahun 2019	II -198
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Aceh Tahun 2017-2019	III -2
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2015- 2018 (Persen)	II I-5
Gambar 3.3 Laju pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 (Persen).....	III -6
Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, dan Banda Aceh Desember 2018- Desember 2019.....	III -7
Gambar 3.7 Proporsi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 11
Gambar 3.8 Proporsi Komponen Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 12
Gambar 3.9 Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 13
Gambar 3.10 Pertumbuhan AssetKota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019	III- 17
Gambar 3.11 Balance Sheet Ratio Kota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019	III- 19
Gambar 3.12 Realisasi Silpa Kota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019	III- 23
Gambar 5.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	V- 4
Gambar 5.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	V- 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Kota Lhokseumawe atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2021 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Selain itu, penyusunan RKPK mengacu pada dokumen RPJM Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan merupakan implementasi penjabaran tahun keempat dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2021 juga tidak lepas dari kebutuhan dan dinamika yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hal lain yang harus menjadi pedoman dalam proses Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang mengatur rambu-rambu umum dan proses penyusunan RKPK secara teknis, pedoman lain yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan terwujudnya integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Proses integrasi tersebut diimplementasikan dalam bentuk e-planning integrated melalui sebuah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya Penyusunan RKPK Lhokseumawe juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dokumen RKPK Lhokseumawe mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe merupakan acuan bagi Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KU-APBK) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2021 disusun dengan mengangkat tema pembangunan yang terdapat dalam Dokumen RPJM Kota Lhokseumawe yaitu “Memperkuat Kerjasama Pembangunan Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing SDM”. Serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2021 yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Upaya terus dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang handal sebagai tenaga kerja

professional serta akses lapangan kerja akan terus meningkat mengingat telah beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Arun. Keberadaan beberapa Universitas baik negeri maupun swasta dapat mendukung peningkatan SDM dan memperkuat posisi Kota Lhokseumawe sebagai sentra pelayanan pendidikan regional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe antara lain Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (Musrenbang RKPK), Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) dengan Peraturan Walikota dan selanjutnya dapat dijadikan Pedoman Penyempurnaan Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Oleh karena itu, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka tahapan yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe tahun ini telah dilakukan yakni pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 dengan tujuan untuk membahas rancangan awal RKPK agar sinergi dengan berbagai permasalahan yang ada di Kota Lhokseumawe sehingga dapat memperoleh masukan-masukan dan saran-saran terhadap prioritas dan sasaran prioritas tahun 2021 untuk penyempurnaan rancangan awal RKPK. Pada Forum Konsultasi Publik (FKP) tersebut banyak diterima masukan dan saran untuk perencanaan pembangunan kedepan yang diharapkan dapat dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021. Saran dan masukan diberikan oleh para tamu undangan dari berbagai unsur yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Ranwal RKPK Tahun 2021. Tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan Musrenbang RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dengan tujuan untuk membahas rancangan RKPK Kota Lhokseumawe dalam rangka:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan di Kota Lhokseumawe
- b. Menyepakati prioritas pembangunan di Kota Lhokseumawe
- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dalam rencana pembangunan di Kota Lhokseumawe
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi Aceh
- e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Kota Lhokseumawe dengan program dan kegiatan ditingkat Gampong yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang di seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe.

Hasil Musrenbang RKPK Kota Lhokseumawe akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPK Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan Musrenbang tahun ini sedikit berbeda dengan tahun lalu mengingat negara dilanda pandemi wabah Covid-19 secara nasional maka pelaksanaan “*Opening Ceremonial*” Musrenbang RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang melakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Namun pelaksanaan Musrenbang tetap dilaksanakan melalui Desk Usulan Pembangunan yakni Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) yang bertujuan untuk menampung dan memusyawarahkan setiap usulan-usulan Masyarakat dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan dan usulan-usulan Pokir DPRK agar bisa masuk kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD untuk dilaksanakan dalam rencana pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2021.

Pelaksanaan Forum OPD tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang dihadiri oleh Wakil Walikota, seluruh Kepala OPD dan Jajarannya yang terkait dengan usulan-usulan masyarakat, dihadiri juga oleh Akademisi, Anggota Komisi DPRK Kota

Lhokseumawe dan para bidang koordinasi Bappeda Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan Forum OPD tersebut di bagi kedalam 3 Pokja yakni Pokja Sarana dan Prasarana, Pokja Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Pokja Keistimewaan dan Sosial Budaya. Pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya dan semua hasil yang didapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan RKPK menjadi Rancangan Akhir RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2021 sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan berkualitas untuk pembangunan di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu Rancangan Akhir RKPK yang telah disusun ini selanjutnya akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD untuk dilakukan pembahasan bersama dan meneliti kembali apakah semua Program dan Kegiatan sudah tertampung dalam rancangan akhir ini. Hasil pembahasan bersama akan disempurnakan kembali untuk disampaikan kepada Inspektorat untuk di Reviu sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipedomani dalam penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;

19. Qanun Aceh Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh no 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BaguHasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahun keempat dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2021 disusun sebagai upaya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPK berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2021. Penyusunan RKPK bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dengan perencanaan pembangunan Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu substansi RKPK harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kota sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Lhokseumawe.

Hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) memuat program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penjabaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk tahun yang bersangkutan. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) dilakukan bersamaan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

1.4 Sistematika Dokumen RKPK

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPK
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Kota
 - 2.1.1 Aspek Geografi
 - 2.1.2 Aspek Demografi
 - 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA

BAB VII PENUTUP

1.5 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kota dan DPRK Lhokseumawe dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan kedalam KUA dan PPAS Tahun 2021 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2021.

B. Tujuan

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA

2.1. Kondisi Umum Kondisi Kota

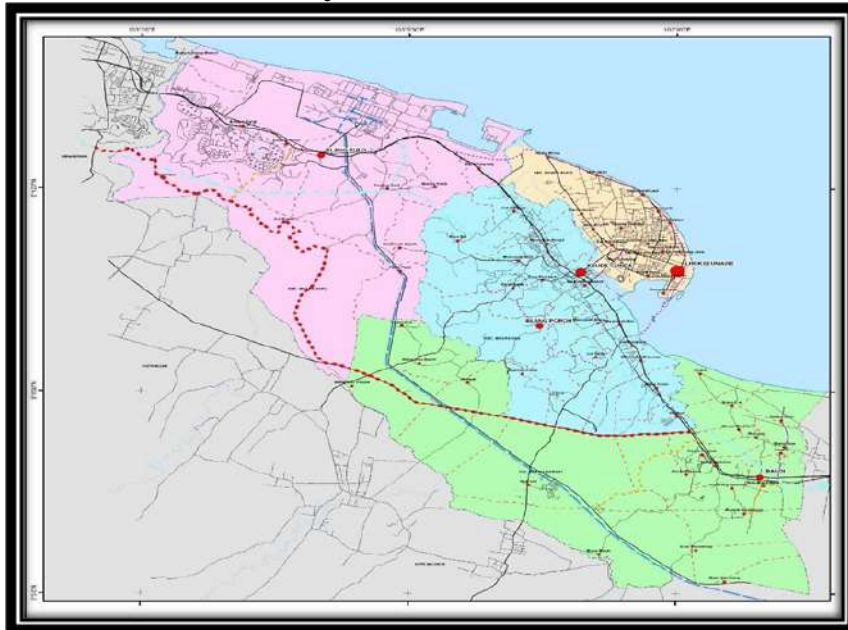
2.1.1 Aspek Geografi

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20' –97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

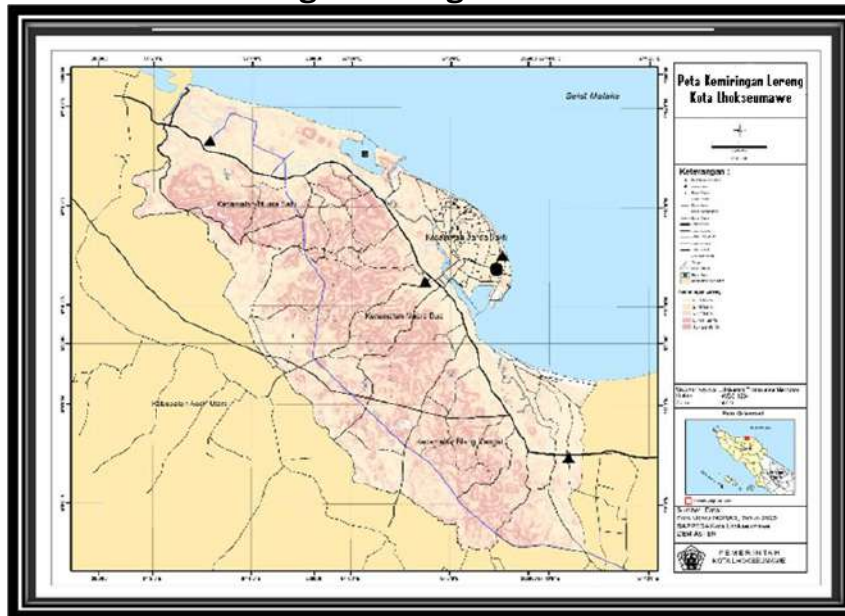
Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

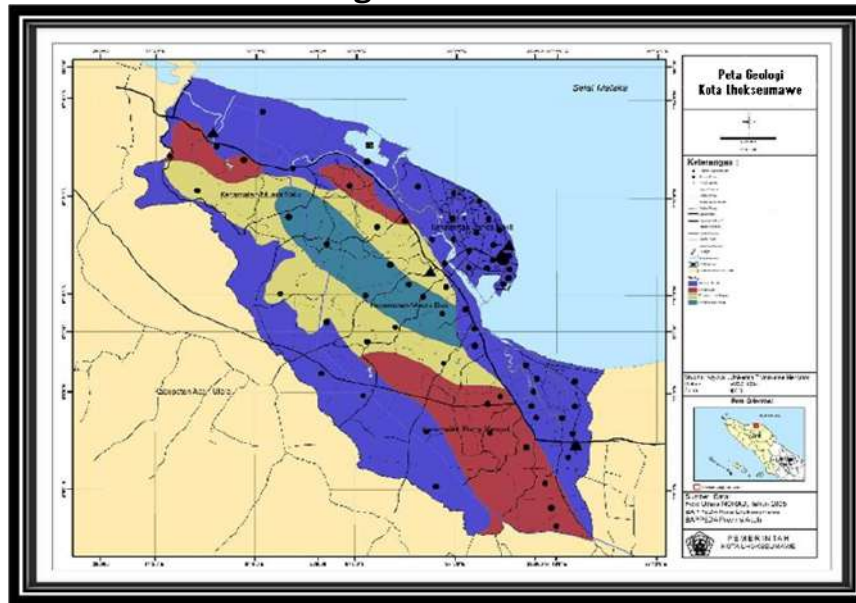
Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeue dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluvial berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeue berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

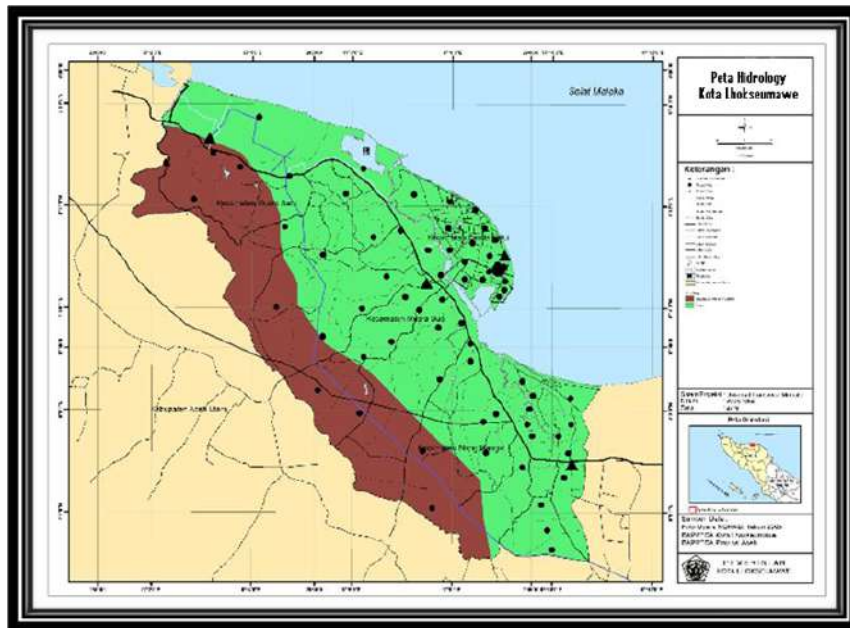
Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

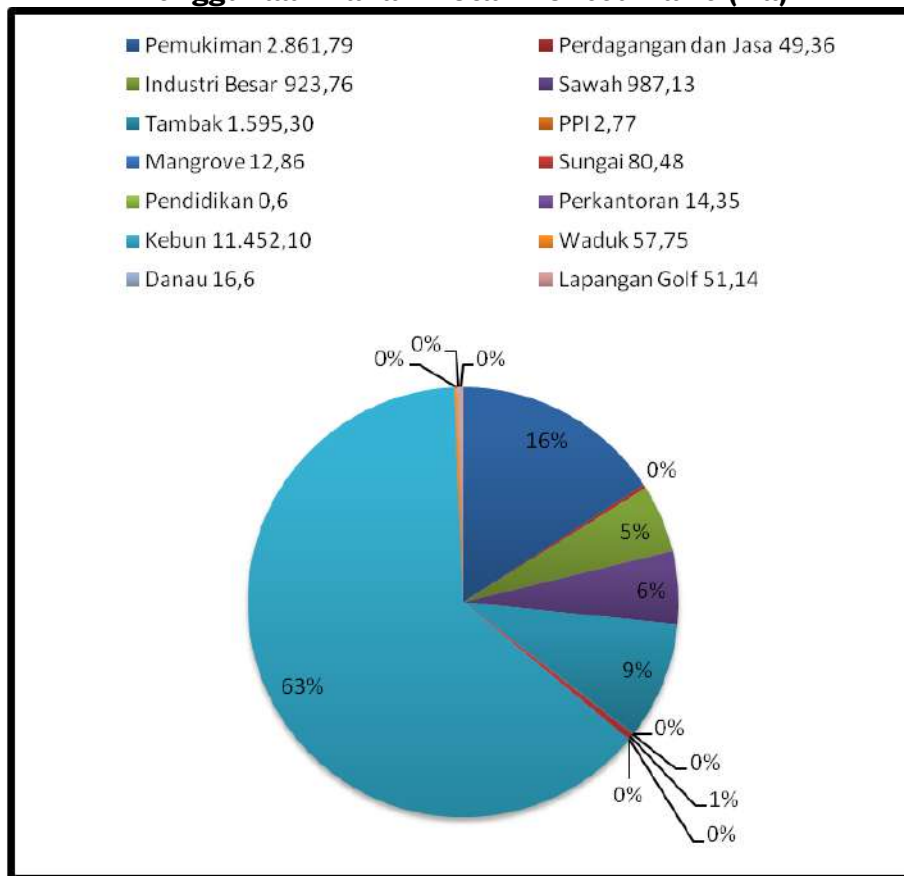
Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)



Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020.

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:

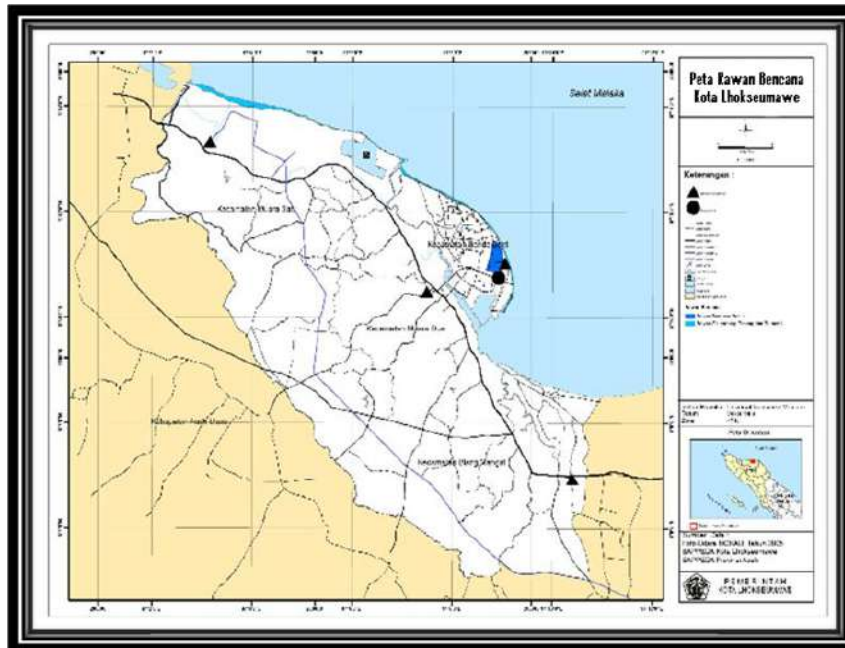
1. zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
 - zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
 - zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;

- zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
- 2. zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
- 3. zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

Sementara itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam.

Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan kawasan yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Berikut Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2019, rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe berkisar antara 21⁰C dan suhu udara maksimum 33⁰C dan rata rata kelembapan udara berkisar 81% sampai dengan 86%. Dan rata rata tekanan udara berkisar 1.009 mb sampai dengan 1011 mb. Lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Maret sebesar 77 hingga 78 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 12 dan 5 hari. Sementara itu, jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 50 persen yang terjadi pada Bulan Oktober dengan jumlah hari hujan yaitu 21 hari sedangkan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar 85 persen dan terendah terjadi pada Bulan Juli yaitu sekitar 78 persen. Berikut tabel temperatur suhu Kota Lhokseumawe Tahun 2019:

Tabel 2.1
Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Temperatur (°C)				
	07.00 WIB	13.00 WIB	18.00 WIB	Max	Min
Januari	23,6	29,2	27,8	33,0	21,0
Februari	23,1	30,0	28,5	31,1	22,3
Maret	23,6	31,0	29,4	32,0	23,0
April	24,3	31,4	29,1	35,0	22,4
Mei	24,5	31,0	28,7	33,6	21,4
Juni	24,3	31,5	30,2	34,9	22,0
Juli	24,5	31,5	29,8	34,7	22,0
Agustus	24,2	31,0	29,5	36,6	21,0
September	23,6	30,5	28,3	33,2	22,0
Oktober	23,9	29,6	27,7	32,4	22,3
November	23,8	29,4	27,7	32,6	21,8
Desember	23,7	29,3	27,7	33,0	22,0

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

Tabel 2.2
Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	97	15	47
Februari	63	11	69
Maret	14	7	77
April	101	13	66
Mei	170	22	64
Juni	63	9	56
Juli	120	13	63
Agustus	79	7	64
September	97	22	50
Oktober	258	14	47
November	296	24	47
Desember	74	19	48

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

Tabel 2.3
Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Rata-rata	Tekanan Udara (mb)
Januari	87	1 010,9
Februari	80	1 011,8
Maret	80	1 010,8
April	82	1 009,4
Mei	83	1 009,8
Juni	83	1 008,9
Juli	81	1 009,7
Agustus	81	1 009,4
September	86	1 010,8
Oktober	88	1 010,3
November	88	1 010,2
Desember	86	1 010,9

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

Tabel 2.4
Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Arah Angin	Kecepatan Rata-rata	Kecepatan Maksimum	Arah Maksimum
Januari	E	4	14	100
Februari	NE	3	14	110
Maret	SW	4	10	080
April	SW	4	23	120
Mei	NE	4	11	060
Juni	SE	3	10	130
Juli	SW	4	12	040
Agustus	SE	4	13	290
September	SE	4	14	110
Oktober	SW	4	9	020
November	SE	4	12	060
Desember	SE	5	14	090

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

2.1.2 Aspek Demografi

Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah 203.284 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 101.290 jiwa laki-laki dan 101.994 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda Sakti sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Blang Mangat. Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Lebih jelas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Pria	Wanita	Total
Blang Mangat	56,12	13.865	13.893	27.758
Muara Dua	57,80	28.303	28.847	57.150
Muara Satu	55,90	16.827	16.980	33.807
Banda Sakti	11,24	41.827	41.766	83.593
Jumlah	181,06	100.822	101.486	202.308
2018		101.290	101.994	203.284
2017		99,282	99,698	198,980
2016		95.277	96.136	191.413
2015		93.403	94.052	187.455

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

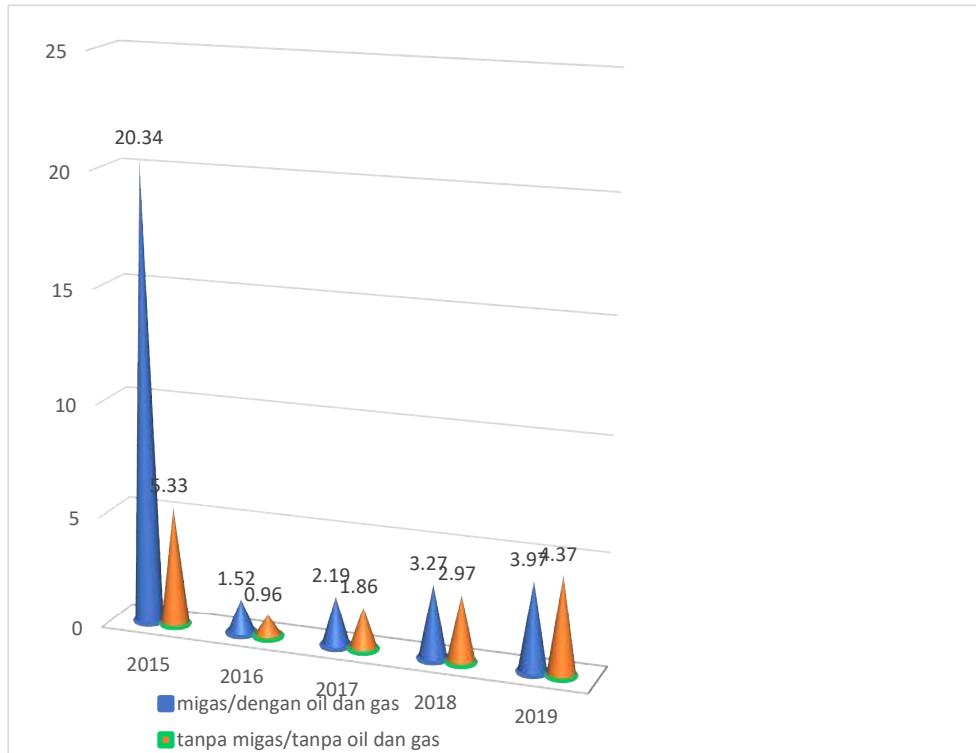
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2015-2019), pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Lhokseumawe

mengalami pertumbuhan negatif pada Tahun 2016 serta pertumbuhan positif pada Tahun 2017 s.d 2019. Hal ini terjadi karena kategori migas (yang dulunya merupakan sektor unggulan) banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga Tahun 2016.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2015-2019 (%)



Gambar 2.7, menunjukkan pada Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 3,97 persen (dengan migas) dan 4,37 persen (tanpa migas). Kondisi ini merupakan mulainya terjadi kecenderungan pergeseran sektor ekonomi unggulan migas ke non migas di Lhokseumawe. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan

asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017r	2018*	2019**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	585,236.90	627,308.70	663,601.10	716,657.90	773,164.4
B.	Pertambangan dan Penggalian	31,916.10	32,890.70	33,766.00	31,421.90	31,042.6
C.	Industri Pengolahan	3,672,013.00	1,513,054.40	1,414,675.50	1,531,142.40	1,647,162.8
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,035.50	8,804.20	11,658.00	13,228.70	14,274.5
E.	Limbah dan Daur Ulang	591	761.6	904.6	1,074.10	1,169.4
F.	Konstruksi	1,055,271.00	1,273,495.90	1,229,442.50	1,164,292.90	1,203,060.6
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,662,981.10	1,726,605.50	1,791,550.10	1,838,542.20	1,893,363.2
H.	Transportasi dan Pergudangan	927,598.30	942,195.10	916,351.20	935,595.30	919,140.8
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70,462.20	80,582.00	96,713.60	123,630.1	153,969.5
J.	Informasi dan Komunikasi	247,459.10	255,998.10	264,954.80	273,712.60	277,653.3
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	160,021.50	178,477.70	202,674.40	228,855.50	239,533.8
L.	Real Estat	253,958.30	279,709.30	317,347.20	349,956.90	382,065.6
M,N.	Jasa Perusahaan	59,073.30	65,885.60	71,312.50	76,904.20	83,800.4
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	252,867.20	279,188.60	305,594.60	334,118.20	359,410.4
P.	Jasa Pendidikan	74,785.60	85,824.30	95,294.20	105,822.60	117,643.3
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185,836.50	205,683.50	224,546.90	246,355.70	262,299.1
R,S,T,U.	Jasa lainnya	72,931.30	79,267.20	88,510.00	98,938.90	106,660.6
PDRB dengan Migas		7,635,732,3	7,728,897,1	8,070,275,2	8,465,414,3	8,907,082,9
PDRB tanpa Migas		6,270,951.3	6,473,133.40	6,718,166,2	7,005,287.00	7,425,846.4

r Angka revisi/Revised Figures

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017r	2018*	2019**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	516,413.70	529,818.90	542,672.70	567,783.3	599,904.7
B.	Pertambangan dan Penggalan	29,305.90	29,857.20	27,727.50	26,592.5	27,489.5
C.	Industri Pengolahan	1,301,452.30	1,154,623.10	1,201,613.00	1,288,992.0	1,315,362.0
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,223.70	11,926.10	12,564.70	13,316.5	14,156.5
E.	Limbah dan Daur Ulang	577.3	634.3	688.8	733.7	867.6
F.	Konstruksi	1,042,918.80	994,918.80	933,175.20	948,908.2	1,005,316.5
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,508,861.40	1,515,851.60	1,523,096.20	1,546,120.1	1,584,878.4
H.	Transportasi dan Pergudangan	840,006.40	830,707.60	851,160.80	866,183.1	882,442.3
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63,638.10	71,993.80	86,988.00	103,331.0	114,294.1
J.	Informasi dan Komunikasi	242,641.00	249,796.20	257,346.60	262,761.7	271,300.0
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	132,617.10	144,292.90	158,068.40	160,749.20	175,548.9
L.	Real Estat	242,647.00	262,646.50	284,661.60	302,105.40	321,543.0
M,N.	Jasa Perusahaan	57,146.90	60,521.40	64,184.50	68,494.10	71,928.5
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	233,876.90	248,964.70	266,250.30	281,251.90	292,765.0
P.	Jasa Pendidikan	72,951.90	77,781.10	83,029.90	89,603.90	96,365.5
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187,051.70	201,196.60	218,896.80	230,950.00	247,507.4
R,S,T,U.	Jasa lainnya	68,819.60	74,877.30	81,367.20	86,819.30	94,525.0
PDRB dengan Migas		6,550,150.00	6,450,408.2	6,591,663.2	6,844,695.7	7,116,194.7
0PDRB tanpa Migas		5,367,681.40	5,419,221.0	5,520,251.7	5,691,510.6	5,940,023.5

r Angka revisi/Revised Figures

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

PDRB Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku (ADHB) selama lima Tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari Tahun 2015, PDRB meningkat sebesar 1,27 triliun rupiah menjadi 8,91 triliun rupiah pada Tahun 2019. Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,29 triliun rupiah perTahun. PDRB ADHB Tahun 2019 mencapai 7,43 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,42 triliun rupiah dari Tahun 2018. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2015-2018 mengalami peningkatan dari 6,27 menjadi 7,01 triliun rupiah.

2.1.3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan nilai harga (barang/jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Perkembangan Laju inflasi berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 menunjukkan bahwa inflasi di Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Kota Banda Aceh dan Nasional. Berbeda pada Tahun sebelumnya, laju inflasi Kota Lhokseumawe sangat tinggi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (%)

Bulan	Lhokseumawe	Banda Aceh	Nasional
Januari	0,14	0,43	0,32
Februari	-0,68	-0,54	-0,08
Maret	-0,45	-0,44	0,11
April	0,64	0,36	0,44
Mei	0,86	1,48	0,68
Juni	0,30	0,38	0,55
Juli	0,22	-0,24	0,31
Agustus	-0,54	0,20	0,12
September	-0,42	-0,55	-0,27
Oktober	0,53	0,07	0,02
November	0,02	-0,10	0,14
Desember	0,60	0,46	0,34
JUMLAH			
2018	2.05	1,93	2,50
2017	2.87	4.86	3.61
2016	5.6	3.13	3.02
2015	2.44	1.27	3.35

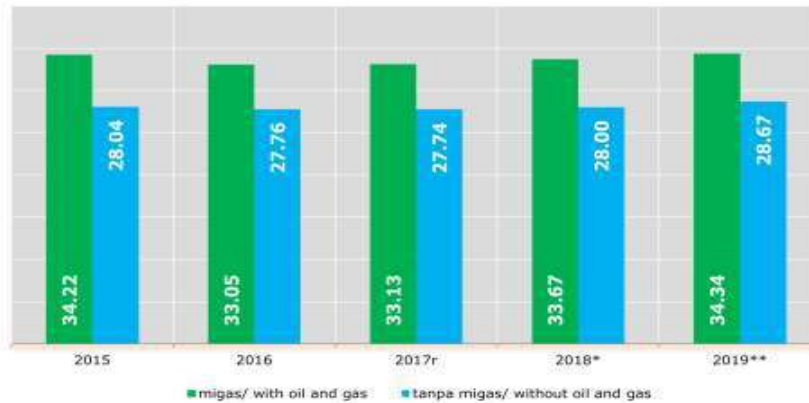
Sumber : BPS, Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020.

Dari tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Inflasi di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 0,57% dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 0,86%. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Mei 2019, umumnya menunjukkan peningkatan terutama pada item kelompok sandang.

2.1.3.1.3 PDRB Per Kapita

Berdasarkan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 dalam gambar 2.8 dibawah ini:

Gambar 2.8
PDRB Per Kapita ADHK
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, 2015-2019

Dari gambar 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB per kapita harga konstan dengan migas mengalami penurunan pada Tahun 2015 ke 2016, tapi mulai meningkat sejak Tahun 2017. Sedangkan untuk PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilainya tumbuh positif namun sangat kecil. Tahun 2015 PDRB per kapita ADHK dengan migas sebesar 34,22 juta rupiah seTahun dan menurun mencapai angka 33,05 juta rupiah di Tahun 2016, lalu mulai meningkat di Tahun 2017 hingga 2019 sebesar 33,13 juta rupiah seTahun hingga 34,34 juta rupiah seTahun. Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita Tahun 2015 sebesar 28,04 juta rupiah dan berturut-turut Tahun 2016-2018 bernilai 27,76 juta rupiah seTahun, 27,74 juta rupiah seTahun dan 28 juta rupiah seTahun. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 28,67 juta rupiah seTahun.

2.1.3.1.4 Indeks Rasio Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan individu. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0-1 dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Tabel 2.9
Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi
Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga
Tahun 2015-2019

Kabupaten/Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Lhokseumawe	0.324	0.291	0,291	0,305	0,310
Aceh Utara	0.271	0.270	0,266	0,292	0,312
Kota Langsa	0.356	0.359	0,342	0,356	0,363
Aceh	0.334	0.333	0,329	0,325	0,319

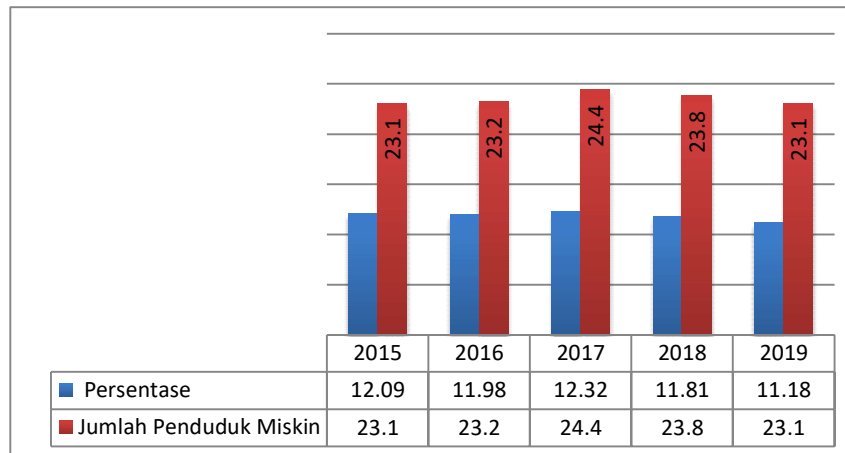
Sumber: Analisis Indeks Gini Kab/Kota Provinsi Aceh, 2020.

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Rasio Gini Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Kota Langsa dan Provinsi Aceh masih dibawah 0,4 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah.

2.2.1.2. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.9 dibawah ini:

Gambar 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe
Tahun 2014 - 2019



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2020.

Berdasarkan gambar 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2015-2019 bergerak secara dinamis, terlihat bahwa pada Tahun 2015 persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 12.09 % dan Tahun 2019 mengalami penurunan yakni 11,18 % atau 23.1 jiwa.

Gambaran di atas merupakan hasil kerja dan jerih payah semua pihak serta bentuk partisipasi yang tinggi dari masyarakat guna mengatasi kemiskinan Kota Lhokseumawe. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian. Disamping itu terdapat program-program unggulan yang ikut memberi pengaruh besar dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan menurun.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.3.2.1 Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

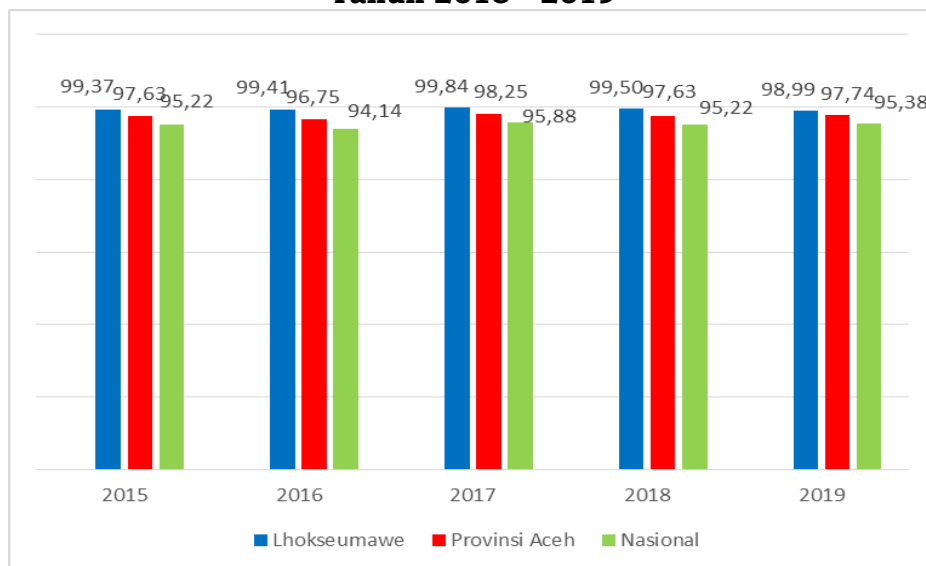
Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020, Angka Melek Huruf (AMH) Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebesar 98,99% dan sudah berada di atas rata-rata AMH Nasional dan AMH Aceh, dimana pada Tahun 2019 rata-rata AMH Nasional adalah 95,38% sedangkan rata-rata AMH Aceh 97,74%.

Berikut gambar 2.10 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019:

Gambar 2.10
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019

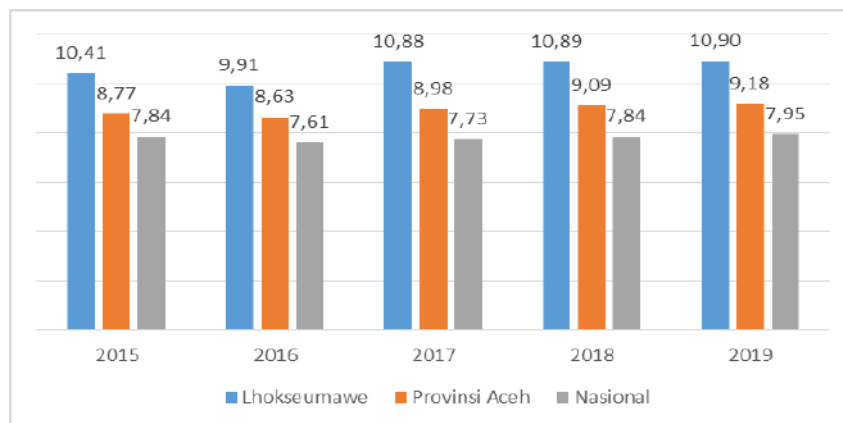


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2020.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah. Makin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut ini:

Gambar 2.11
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



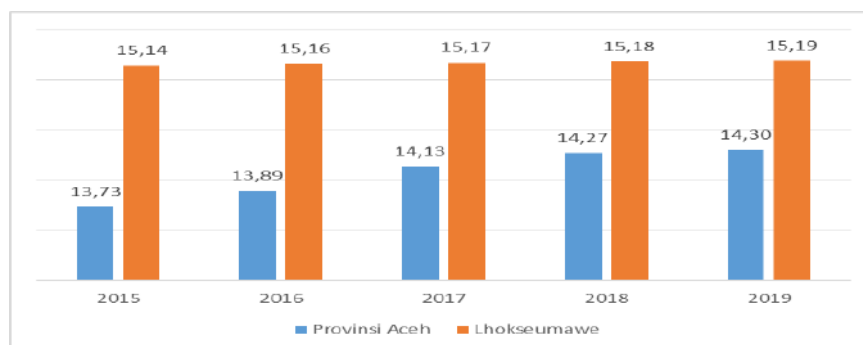
Sumber : BPS Aceh, 2020.

Dari Gambar 2.11 dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2019 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi dan nasional, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 10.90% sedangkan provinsi sebesar 9,18% dan nasional tercatat hanya sebesar 7,95%.

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah sudah berada di atas rata-rata nasional (12,29). Berikut angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe dalam gambar 2.12 berikut ini:

Gambar 2.12
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Aceh, 2020.

Gambar 2.12 di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 15,14% meningkat menjadi 15,19% pada akhir Tahun 2019. Angka ini juga menunjukkan bahwa bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe masih di atas angka provinsi yang hanya mencapai 13,73% pada Tahun 2015 dan 14,30% pada Tahun 2019.

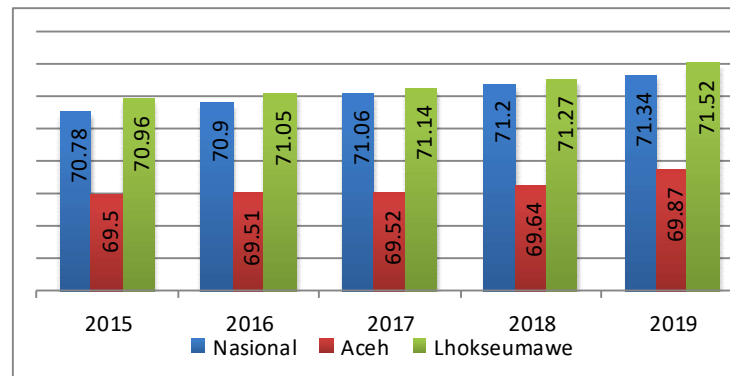
2.1.3.2.2 Kesehatan

A. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.

Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 Tahun merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup produktif dan mandiri. Berikut gambar 2.13 berkenaan dengan angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sampai dengan 2019:

Gambar 2.13
Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019.



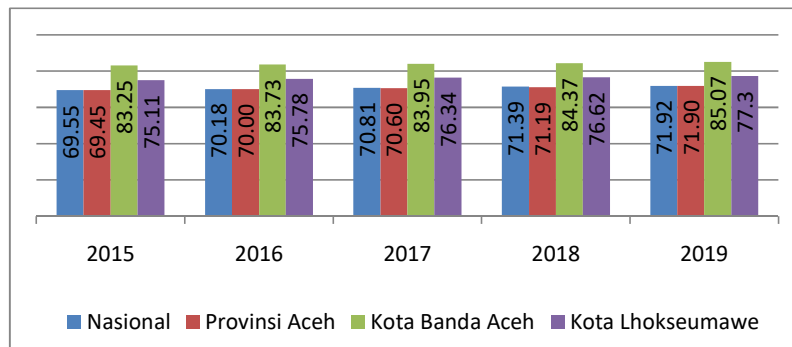
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

Jika dilihat dari Gambar di atas rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 terjadi peningkatan setiap Tahunnya. Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rata-rata 70,96 kemudian di Tahun 2016 menjadi rata-rata 71,05. Sedangkan Tahun 2017 meningkat menjadi rata-rata 71.14 dan di Tahun 2018 mencapai rata-rata 71,27. Pada Tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe rata-rata 71.52 Tahun lebih tinggi dibandingkan Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Aceh yang rata-rata 69.87 Tahun dan Angka Usia Harapan Hidup Nasional yang rata-rata 71.34 Tahun.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut gambar 2.14 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe antara Tahun 2015-2019:

Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019



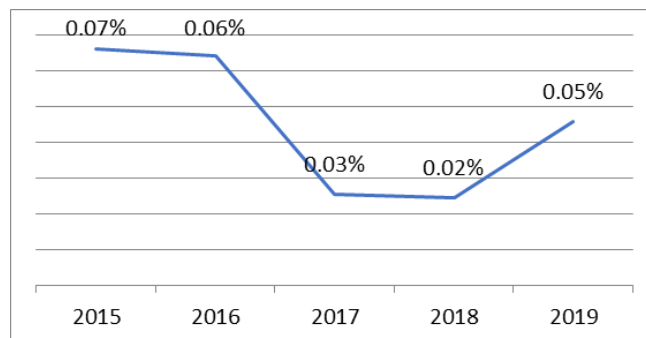
Sumber : BPS Aceh, 2020.

Jika dilihat dari nilainya, Provinsi Aceh memperoleh nilai IPM sebesar 71.90 pada Tahun 2019, sedangkan untuk IPM Kota Banda Aceh mempunyai nilai yang sangat tinggi sebesar 85.07 dan disusul dengan Kota Lhokseumawe sebesar 77.30 di Tahun 2019.

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk [mengetahui status gizi](#) yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Berikut gambar Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019:

Gambar 2.15
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

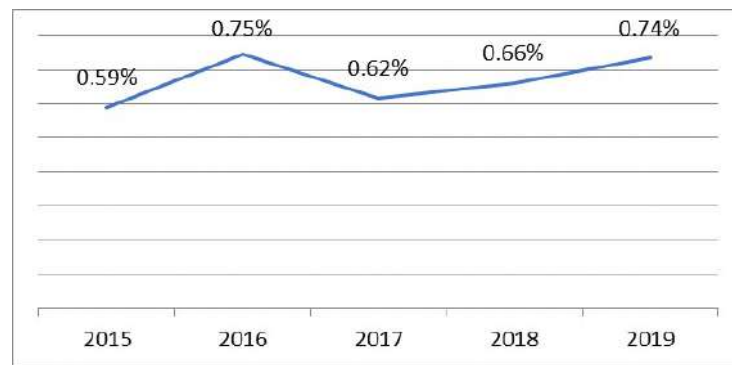
Dari Gambar 2.15 di atas dapat dilihat Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2015 Persentase Balita Gizi Buruk 0.07% dan Tahun 2016 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 0.06%, selanjutnya di Tahun 2017 dapat dituruni menjadi 0,03% dan pada Tahun 2018 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe turun lagi menjadi 0,02%, namun pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0.05%.

D. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat, dan karenanya merupakan issue fundamental dalam kesehatan masyarakat (Emerson, 2005; Mendez, 2005). Status gizi pada balita dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek. Gizi kurang pada balita, membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental, yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Akibat lainnya adalah penurunan daya tahan, menyebabkan hilangnya masa hidup sehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah timbulnya kecacatan, tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian.

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar World Health Organization (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Berikut gambar Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019:

Gambar 2.16
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

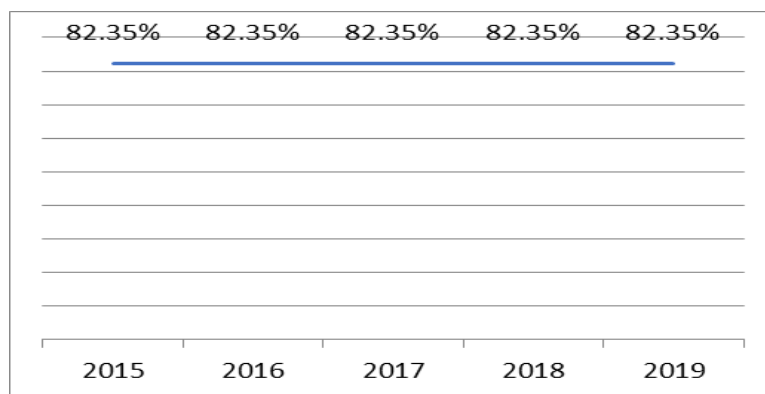
Dari Gambar 2.16 di atas dapat dilihat bahwa Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 s.d 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2016 Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe adalah tertinggi 0.75% yang naik dari Tahun 2015 sebesar 0.59% dan Tahun 2017 sebesar 0.62%. Selanjutnya pada Tahun 2018 dan 2019 Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan menjadi masing-masing sebesar 0.66% pada Tahun 2018 dan 0,74% pada Tahun 2019.

E. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Konsep desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu (Depkes 2009). Berikut gambar Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019:

Gambar 2.17
Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



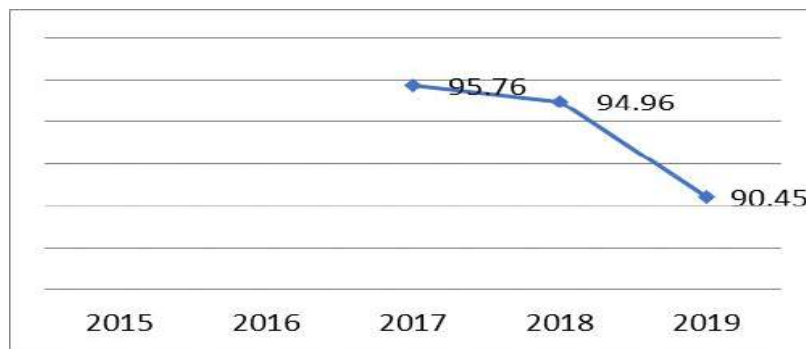
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.17 di atas dapat dilihat Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 adalah 82.35%. Dari 68 Desa di Kota Lhokseumawe, jumlah desa siaga yang dibentuk adalah sebanyak 56 desa siaga. Dari 59 desa siaga yang dibentuk semua desa siaga tersebut berstatus aktif.

F. Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil perlu dijaga dengan baik karena akan berpengaruh terhadap janin di dalam kandungannya. Bahkan ada pedomannya tersendiri untuk menjaga kesehatan selama masa kehamilan, sehingga ibu hamil membutuhkan program pelayanan kesehatan bernama *antenatal care*. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga profesional kepada wanita selama masa hamil sesuai standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas puskesmas dan rumah sakit. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2009).

Gambar 2.18
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



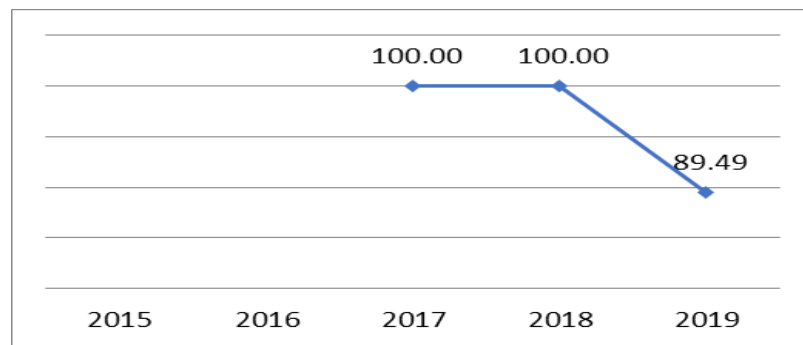
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.18 di atas Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2017 tertinggi sebesar 95,76 persen, pada Tahun 2018 sebesar 94,96 persen dan selanjutnya pada Tahun 2019 sebesar 90,45 persen. Persentase ibu hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu Hamil setiap Tahunnya bergantung kepada jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dan jumlah sasaran ibu hamil.

G. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan, pada penjelasan lain disebutkan Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Gambar 2.19
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019



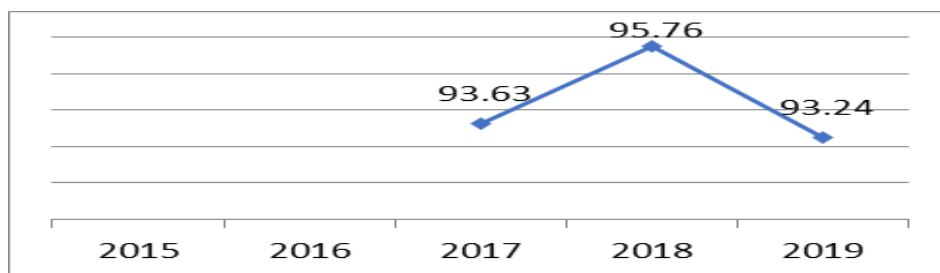
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.19 di atas dapat kita lihat Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 100 persen dimana jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan terlayani seluruhnya dari jumlah sasaran Ibu bersalin. Sedangkan pada Tahun 2019 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sebesar 89,49%.

H. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun”. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.20
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019



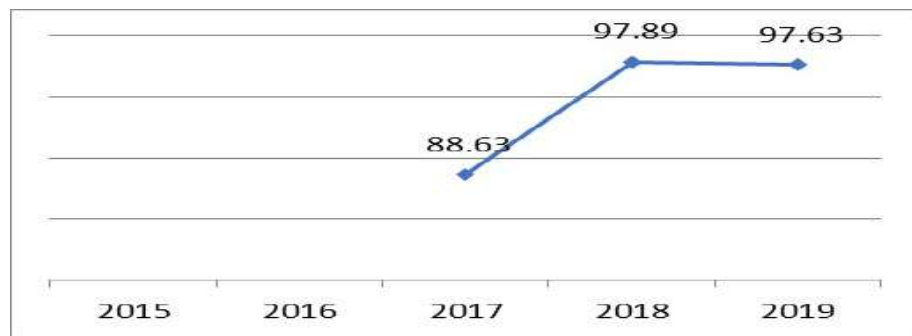
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari gambar 2.20 di atas dapat kita lihat Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada Tahun 2015 s.d 2019 di Kota Lhokseumawe tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 95,76% diikuti Tahun 2017 sebesar 93,63% dan Tahun 2019 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 93,24%.

I. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.21
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



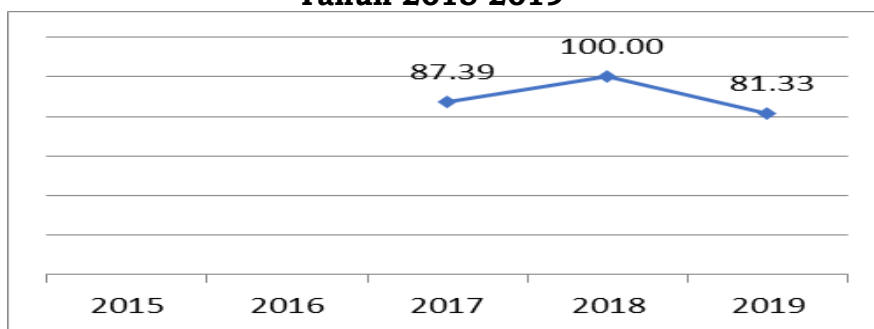
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada gambar 2.21 di atas. Pada Tahun 2018 Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Lhokseumawe adalah yang tertinggi sebesar 97,89%, pada Tahun 2017 sebesar 88,63% dan pada tahun 2019 sebesar 97,63%.

J. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Pernyataan Standar " Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ". Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu Tahun ajaran.

Gambar 2.22
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari gambar 2.22 di atas dapat kita lihat Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 adalah sebesar 87,39%, pada Tahun 2018 sebesar 100% dan di Tahun 2019 sebesar 81,33%. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar sangat tergantung pada jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan jumlah semua anak usia pendidikan dasar.

K. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar”. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 Tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 Tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 Tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.23
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

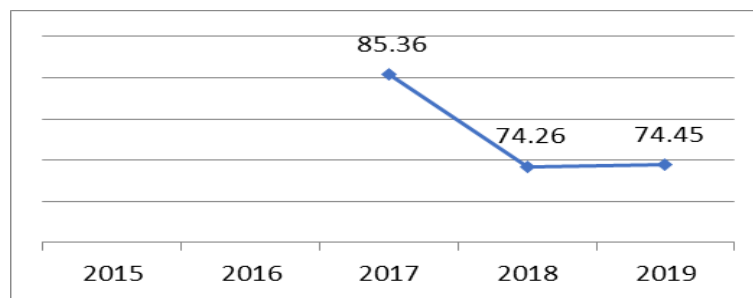
Dari gambar 2.23 di atas Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 37,57%, pada Tahun 2018 sebesar 92,06% dan pada Tahun 2019 sebesar 93,30%.

L. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 Tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 Tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.24
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

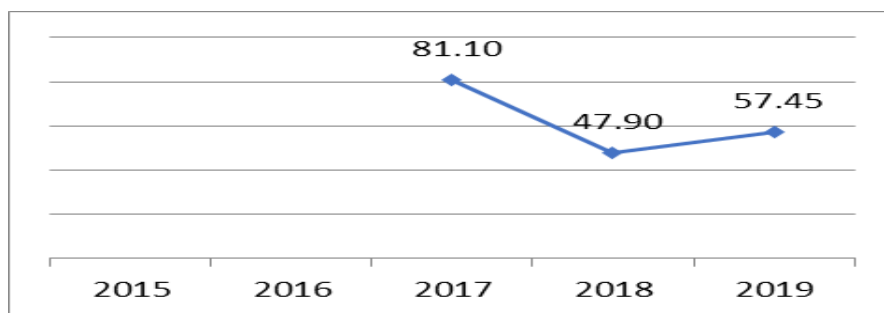
Dari gambar 2.24 di atas dapat di lihat Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 85,36% , namun pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 74,26% dan Tahun 2019 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 74,45%

M. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah : penduduk usia 15 Tahun ke atas Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di dapat dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun dibagijumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktub satu Tahun pada Tahun yang sama.

Gambar 2.25
Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



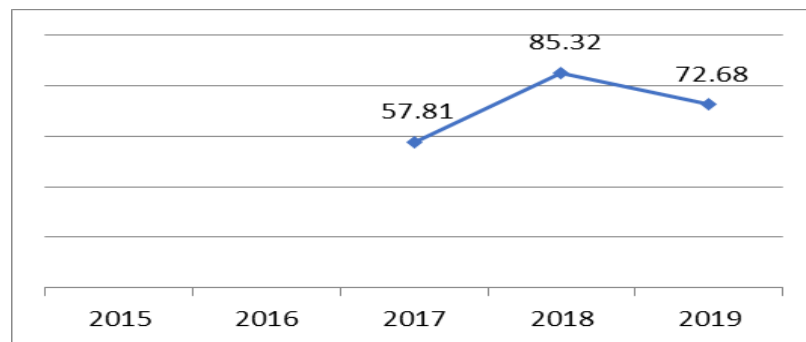
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.25 di atas terlihat bahwa Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 81,10%, pada Tahun 2018 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 47,90% dan pada Tahun 2019 sebesar 57,45%

N. Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu Tahun pada Tahun yang sama.

Gambar 2.26
Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

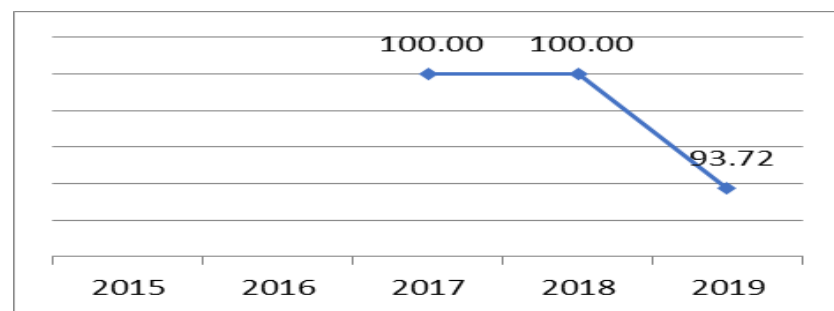
Dari gambar 2.26 di atas dapat dilihat Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Tahun 2018 meningkat menjadi 85,32% dari Tahun 2017 sebesar 57,81% dan pada Tahun 2019 sebesar 72,68%.

O. Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah : Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu Tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu Tahun yang sama.

Gambar 2.27
Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



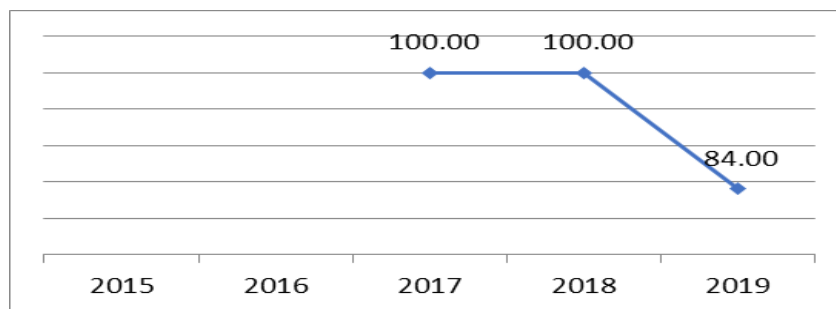
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Pada gambar 2.27 pada grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai target 100% pada Tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 93,72%. Kontribusi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya juga Kontribusi Swasta/Masyarakat, Praktek swasta sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

P. Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Gambar 2.28
Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

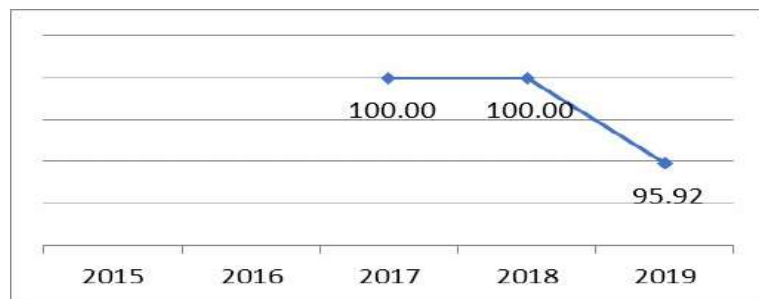
Kalau dilihat dari gambar 2.28 di atas pada Tahun 2017 dan 2018 Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar sebesar 100%, tetapi Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84%. Kedepannya petugas kesehatan pada umumnya, menanggung jawab program TB pada khususnya agar tetapmeningkatkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada tersangka TB untuk dapat memeriksakan Suspek TB Ke fasyankes serta meningkat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program Tb-Paru.

Q. Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.29
Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.29 pada Tahun 2017 dan 2018 Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar adalah sebesar 100% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,92%. Hal ini disebabkan tidak semua orang yang berisiko terinfeksi HIV mau dilakukan screening HIV jadi harus dilakukan penyuluhan HIV kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV.

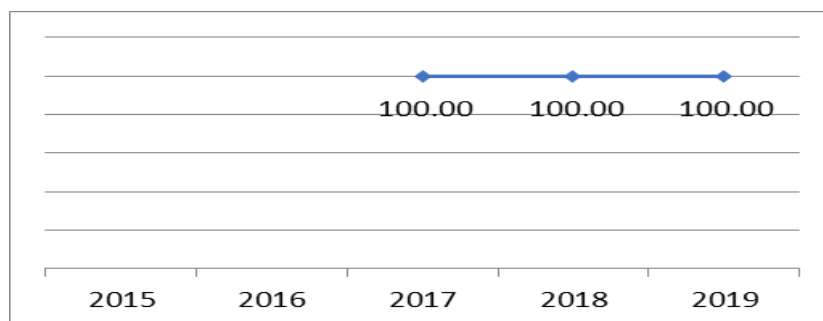
R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang cenderung meningkat jumlah pasien serta semakin luas penyebarannya. Hal ini karena masih tersebar nya nyamuk *Aedes aegypti* (penular penyakit DBD) di seluruh pelosok tanah air, kecuali pada daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.

Untuk memberantas penyakit ini diperlukan pembinaan peran serta masyarakat yang terus menerus dalam memberantas nyamuk penularnya dengan cara 3 M yaitu : menguras tempat penampungan air (TPA), menutup TPA dan mengubur/menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Cara pencegahan tersebut juga dikenal dengan istilah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Upaya memotivasi masyarakat untuk melaksanakan 3M secara terus menerus telah dan akan dilakukan Pemerintah melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral termasuk tokoh masyarakat dan swasta.

Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu Tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu Tahun yang sama. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini,

Gambar 2.30
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari gambar 2.30 di atas di atas dapat dilihat Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017-2019 adalah 100%.

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi seni budaya dan olahraga di Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan melalui perkembangan seni budaya dan pemuda dan olahraga yang selalu mengalami perkembangan dinamis dan memerlukan peran pemerintah dalam peningkatan kualitasnya.

2.1.3.3.1 Kebudayaan

Di Kota Lhokseumawe Gedung Kesenian hingga Tahun 2016 belum memiliki aset gedung kesenian sendiri. Namun sejak Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mulai membangun Gedung Kesenian dengan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) walaupun sampai dengan akhir 2019 gedung tersebut belum tuntas pembangunannya. Direncanakan gedung tersebut akan tuntas dibangun pada Tahun 2019 dengan sumber dana DOKA. Selama ini pagelaran kesenian yang diselenggarakan Kota Lhokseumawe menggunakan Gedung KNPI dan Stadion Tunas Bangsa. Sementara itu jumlah grup kesenian terus tumbuh setiap Tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut ini:

Gambar 2.31
Group Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari gambar 2.31 dapat dilihat bahwa jumlah group kesenian pada Tahun 2015 sebanyak 138 group, terus meningkat setiap Tahunnya hingga Tahun 2019 mencapai 188 group.

2.1.3.3.2 Pemuda dan Olahraga

Sementara itu, Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Berdasarkan data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, jumlah klub olahraga sampai dengan Tahun 2019 yang ada di Kota Lhokseumawe berjumlah 125 Klub. Jumlah tersebut terdiri dari klub sepak bola sebanyak 75 klub, futsal sebanyak 15 klub, klub voli berjumlah 12 klub, klub sepeda sebanyak 8 klub, klub panahan 1 klub, klub menembak sebanyak 8 klub dan klub tenis lapangan sebanyak 6 klub. Kota Lhokseumawe saat ini memiliki gedung olahraga sebanyak 1 unit yaitu Gedung Olahraga ARUN yang terletak di Komplek Perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG).

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.1.4.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke pedesaan. Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebanyak 138 Sekolah Negeri & Swasta dengan jumlah murid 5020 orang.

Tabel 2.10
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Kecamatan	Sekolah			Jumlah Siswa		
	Negeri	Swasta	N+S	L	P	L+P
Muara Dua	1	39	40	562	914	1476
Banda Sakti	1	47	48	1056	1013	2069
Blang Mangat	1	24	25	345	343	688
Muara Satu	2	23	25	404	383	787
Jumlah	5	133	138	2367	2653	5020

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Dari tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa jumlah PAUD di Kota Lhokseumawe tersebar di empat kecamatan. PAUD terbanyak berada di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 48 PAUD dengan jumlah murid mencapai 2069 orang. Sedangkan PAUD yang paling sedikit berada di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu dengan masing-masing 25 PAUD dan jumlah murid masing-masing 688 orang di Kecamatan Blang Mangat dan 787 orang di Kecamatan Muara Satu.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai jenjang pendidikan tersebut, APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1.3	APK SD/MI	122.73	105.14	103.41	102.09	105.63
2	SMP/MTs					
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2.3	APK SMP/MTs	104,39	104.57	103.6	100.61	101
3	SMA/MA/SMK					

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361
3.3	APK SMA/MA/SMK	108,13	106.18	97,56	91.87	91.8

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Dari tabel 2.11 diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI/ Paket A tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 122.73. Sedangkan terendah pada Tahun 2018 sebesar 102.09 artinya dari tabel diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/ MTs seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah menengah pertama telah memperoleh pendidikan tertinggi terlihat pada Tahun 2016 Angka partisipasi kasar sebesar 104.57 dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 100.61. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA/ Paket C tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 108,13 dan terendah sebesar 91.80 yang terjadi pada Tahun 2019.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 Tahun (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini,

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1,1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1,2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1,3	APM SD/MI	98,76	95,83	96,91	96,65	93,66
2	SMP/MTs					
2,1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2,2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2,3	APM SMP/MTs	82,1	85,49	87,8	88,05	79,05
3	SMA/MA/SMK					
3,1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3,2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361
3,3	APM SMA/MA/SMK	88,41	71,64	78,09	74,91	70,5

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Dalam tabel 2.12 diatas, menunjukkan Angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 98,76. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 93,66. Pada tingkat SMP/MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu 88,05. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 79,05. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 88,41. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 70,5.

D. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 Tahun). Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin,

dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini,

Tabel 2.13
Angka Putus Sekolah (APS)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/ MI	0.15	0.12	0.49	0.05	0.03
2	SMP/ MTs	0.06	0	0	0.008	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Angka putus sekolah jenjang SD/MI di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada kisaran angka di bawah 1. Dan kecenderungan menurun setiap Tahunnya. Angka tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan nilai mencapai 0,49 dan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 dengan nilai 0,03. Sedangkan Angka putus sekolah jenjang SMP/ MTs di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada pada angka 0. Dan ini terjadi pada Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2019. Angka putus sekolah tertinggi hanya mencapai angka 0,06 saja.

E. Ruang Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik

Kondisi Sekolah SD/MI Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Pada Tahun 2017 kondisi sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terdapat 517 ruang kelas bekondisi baik, 115 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan, sedangkan pada Tahun 2018 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik sebanyak 562 ruang kelas, untuk kondisi rusak ringan sebanyak 112 ruang kelas. Selanjutnya pada Tahun 2019 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik 587 ruang kelas, 107 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan.

Sedangkan jumlah ruang kelas baik pada tingkat SMP dan SMA semakin baik untuk tiap Tahun. Pada Tahun 2019, untuk tingkat SMP/MTs 365 ruang kelas dengan kondisi baik dan rusak ringan 55 ruang. Untuk tingkat Sekolah Menengah terdapat 426 ruang kelas dengan kondisi baik, dan 15 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2019

No	Jenjang Pendidikan	2017		2018		2019	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	SD/ MI	517	115	562	112	587	107
2	SMP/ MTs	-	-	-	-	365	55
3	SMA	-	-	-	-	426	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

2.1.4.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang di lakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Pada gambar dibawah ini dapat dilihat dalam kurun waktu lima (5) Tahun terdapat AKB yang tinggi 7,5% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2015 AKB kota Lhokseumawe 6,3% dan terjadi penurunan setiap Tahun nya menjadi 6% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 menjadi 4,2% dan 3,3% pada Tahun 2018.

Tabel 2.15
Angka Kematian Bayi (AKB) (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Lhokseumawe	6,3	6	4,2	3,3	7,5

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi dapat dilihat dari Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) (berumur kurang 1 Tahun) pada satu Tahun tertentu. Dan membandingkan jumlah Angka Kelahiran Hidup Bayi (AKHB) pada satu Tahun tertentu.

Angka kematian bayi (AKB), merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Berdasarkan tabel dibawah laporan jumlah kematian bayi menurut kecamatannya di Kota Lhokseumawe. AKB yang didapat dalam Tahun 2015 : $21/4102 \times 1000$ Tahun 2016 : $26/4103 \times 1000$, Tahun 2017 : $17/4270 \times 1000$ Tahun 2018 : $14/4199 \times 1000$ dan Tahun 2019 $32/4215 \times 1000$. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat AKB terendah adalah pada Tahun 2018 sebesar 14 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB tertinggi adalah pada Tahun 2019 sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.16
AKHB dan AKB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKB	AKHB
2015	Banda Sakti	5	1.844	21	4102
	Muara Dua	4	1.043		
	Muara Satu	7	747		
	Blang Mangat	5	468		
2016	Banda Sakti	6	1.844	26	4103
	Muara Dua	4	1.043		
	Muara Satu	7	747		
	Blang Mangat	9	468		
2017	Banda Sakti	8	1.933	17	4270

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKB	AKHB
2018	Muara Dua	3	1.097	14	4199
	Muara Satu	3	797		
	Blang Mangat	3	443		
	Banda Sakti	8	1.941		
2019	Muara Dua	3	1.129	32	4215
	Muara Satu	2	697		
	Blang Mangat	1	432		
	Banda Sakti	13	1.958		
2019	Muara Dua	8	1.144	32	4215
	Muara Satu	7	624		
	Blang Mangat	4	489		
	Banda Sakti	13	1.958		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan sehingga berdampak ungukit besar terhadap penurunan AKB dan AKABA di Lhokseumawe.

Angka kematian balita (AKABA) yang terendah dilaporkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup, di ikuti Tahun 2017 adalah sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan dengan AKABA tertinggi adalah pada Tahun 2016 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.17
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian BALITA usia 5 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKBA	AKHB
2015	Banda Sakti	0	NA	0	0
	Muara Dua	0	NA		
	Muara Satu	0	NA		
	Blang Mangat	0	NA		
2016	Banda Sakti	6	1844	26	4102
	Muara Dua	4	1043		
	Muara Satu	7	747		
	Blang Mangat	9	468		
2017	Banda Sakti	8	1933	17	4216
	Muara Dua	3	1043		
	Muara Satu	3	797		
	Blang Mangat	3	443		
2018	Banda Sakti	8	1941	18	4199
	Muara Dua	4	1129		
	Muara Satu	2	697		
	Blang Mangat	4	432		
2019	Banda Sakti	0	1958	1	4215
	Muara Dua	1	1144		
	Muara Satu	0	624		
	Blang Mangat	0	489		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

D. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0 – 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi.

Pada Tahun 2018 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 13 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4.199 jiwa. Pada Tahun 2019 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 12 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4.215

jiwa. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

E. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 Kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2015 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 97.5 ($4/4102 \times 100.000$). Tahun 2016 Angka kematian ibu meningkat menjadi 186.6 ($8/4282 \times 100.000$), Tahun 2017 kembali menurun menjadi 140.5 ($6/4269 \times 100.000$) dan Tahun 2018 dapat diturunkan kembali menjadi 119.1 ($5/4199 \times 100.000$) serta Tahun 2019 naik kembali menjadi 142.3 ($6/4215 \times 100.000$). Cara efektif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional difasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan kontrasepsi paska persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

Tabel 2.18
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Tahun	4	8	6	5	6
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	4102	4282	4269	4199	4215
Persentase		97.5	186.8	140.5	119.1	142.3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait (Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006). Rasio posyandu per 1000 balita di Kota Lhokseumawe tinggi pada Tahun 2019 yaitu dengan rasio 7,78 di pengaruhi oleh bertambahnya jumlah posyandu dan jumlah Balita. Sedangkan Rasio posyandu terendah Tahun 2015 dengan rasio 6,03.

Tabel 2.19
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Posyandu	100	100	101	101	125
2	Jumlah Balita	16.571	15.106	15.732	16.355	15.863
Rasio		6,03	6,61	6,42	6,17	7,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

Rasio posyandu per 1000 balita perkecamatan Tahun 2015 s.d Tahun 2018 tertinggi di Kecamatan Blang Mangat dengan rasio masing-masing 13,8 pada Tahun 2015, 14,0 pada Tahun 2016, 13,7 pada Tahun 2017 dan 13,6 pada Tahun 2018. Dan terendah di Kecamatan Banda Sakti dari Tahun 2015 s.d 2019 dengan rasio masing-masing 4,48 pada Tahun 2015, rasio 4,95 pada Tahun 2016, rasio 4,42 pada Tahun 2017 dan rasio 2,72 pada Tahun 2018 serta rasio 6,43 Tahun 2019, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk perkecamatan dan anggota KB aktif di kecamatan tersebut.

Tabel 2.20
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2015	Muara Dua	24	4305	5,57
	Banda Sakti	32	7140	4,48
	Blang Mangat	29	2100	13,8
	Muara Satu	15	3026	4,95
2016	Muara Dua	24	3574	6.71
	Banda Sakti	32	6450	4,96
	Blang Mangat	29	2065	14,0
	Muara Satu	15	3017	4,97
2017	Muara Dua	24	3430	6,99
	Banda Sakti	32	7229	4.42
	Blang Mangat	29	2110	13,7
	Muara Satu	15	2963	5,06
2018	Muara Dua	24	3591	6,68
	Banda Sakti	21	7710	2.72
	Blang Mangat	29	2123	13.6
	Muara Satu	15	2931	5,12
2019	Muara Dua	48	2494	19.2
	Banda Sakti	33	5130	6,43
	Blang Mangat	29	1745	16.6
	Muara Satu	15	2130	7,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk

Puskesmas dan jaringannya, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat

pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib yang terdiri :

1. upaya promosi kesehatan
2. upaya kesehatan lingkungan
3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
4. upaya perbaikan gizi
5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. upaya pengobatan

Jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 6 Puskesmas. Pada Tahun 2019 bertambah 1 Puskesmas menjadi sebanyak 7 puskesmas. Adapun Rasio Puskesmas dari Tahun 2015-2019 semakin tinggi. Berdasarkan rasio kecukupan Puskesmas secara Nasional sebesar 28.000 penduduk/Puskesmas. Berarti ketersediaan Puskesmas di Kota Lhokseumawe belum memadai, jumlah penduduk terus meningkat dari Tahun keTahun. Begitu juga dengan sarana kesehatan lainnya hal ini perlu mendapat perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan yang mencukupi dan memelihara kondisi fisik bangunan dan sanitasinya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari Puskesmas. Pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah.

Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan Puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada diwilayah kerja.

Tabel 2.21
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	7
2	Jumlah Poliklinik	8	8	10	10	10
3	Jumlah Pustu	22	22	22	22	22
4	Jumlah Penduduk	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0.032	0.030	0.030	0.029	0.034
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0.042	0.040	0.050	0.049	0.048
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	0.117	0.112	0.110	0.108	0.107

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

H. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 11 (Sebelas) Rumah Sakit (RS), terdiri dari 1 Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 10 Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud.

Tabel 2.22
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	8	8	10	10	10
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	11	11	11
7	Jumlah Penduduk	187.4 55	195.1 86	198.9 80	203.2 84	204.2 84
Rasio		0.04 8	0.04 6	0.05 5	0.054	0.053

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

I. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendaya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas

serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus ASN, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta.

Adapun rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan satu (1) orang dokter harus melayani pada Tahun 2015 seorang dokter harus melayani 31.243 penduduk, Tahun 2016 adalah seorang dokter harus melayani 11.482 penduduk, Tahun 2017 adalah seorang dokter harus melayani 3.553 penduduk, Tahun 2018 adalah seorang dokter harus melayani 4.620 penduduk, dan di Tahun 2019 adalah seorang dokter harus melayani 3.783 penduduk, sedangkan menurut KEPNAKES/SK/I/2004 tentang indikator Indonesia sehat 2010 seorang dokter harus melayani 2500 setiap penduduk dilihat dari PERMENKES tersebut Kota Lhokseumawe masih kekurangan dokter.

Tabel 2.23
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter Umum	6	17	56	44	54
2	Jumlah Penduduk	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Rasio	0.03	0.08	0.28	0.22	0.26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

J. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas difasilitas pelayanan kesehatan dimasyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah menggunakan indikator rasio.

Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Perubahan terjadi pada Tahun 2017 jumlah tenaga medis 127 orang meningkat dari Tahun 2015 dan 2016 sebanyak 47 orang dan Tahun 2018 mengalami penurunan sehingga jumlah tenaga medis menjadi 99 orang dan pada Tahun 2019 tenaga medis meningkat menjadi 120 orang, jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Penurunan terjadi karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis pada Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Medis	47	47	127	99	120
2	Jumlah Penduduk	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
Rasio		0.25	0.24	0.63	0.48	0.58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma kecelakaan. Komplikasi kebidanan antara lain pecah ketuban dini, pendarahan, pervaginasi, hipertensi dalam kehamilan (systole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju dan infeksi masa nifas).

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi.

Berdasarkan data bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani untuk Tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar 64.98%, pada Tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan menjadi 51.08%. Pada Tahun 2018 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 57.78% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 55.51%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja	618	618	496	561	549
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	951	951	971	971	989
Persentase		64.98	64.98	51.08	57.78	55.51

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020

L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu Dokter Spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), Dokter Umum dan Bidan serta diupayakan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya adalah kemitraan Bidan dan Dukun, peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program persalinan, model rumah tunggu dengan Puskesmas didaerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan.

Revitalisasi Bidan koordinator melalui pelaksanaan supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan. Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik.

Cakupan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/Nakes dari Tahun 2015-2019 dengan rasio 0.9 atau 90%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes	Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Rasio
2015	Muara Dua	1049	1179	0.9
	Banda Sakti	1840	1955	
	Blang Mangat	466	575	
	Muara Satu	749	828	
2016	Muara Dua	1049	1179	0.9
	Banda Sakti	1840	1955	
	Blang Mangat	466	575	
	Muara Satu	749	828	
2017	Muara Dua	1097	1991	0.92
	Banda Sakti	1930	1198	
	Blang Mangat	443	0	
	Muara Satu	795	587	
2018	Muara Dua	1127	1197	0.9
	Banda Sakti	1944	1992	
	Blang Mangat	433	587	
	Muara Satu	694	859	
2019	Muara Dua	1141	1209	0.99
	Banda Sakti	1960	2027	
	Blang Mangat	489	598	
	Muara Satu	622	405	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai umurnya. Pada kondisi ini diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat berkerja secara optimal. Namun demikian pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 1 awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut *drop out Rate* DPT/HB1 Campak.

UCI adalah gambaran suatu desa atau kelurahan dimana pada Tahun 2015 dan 2016 desa UCI sebanyak 41 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 60,3% dan pada Tahun 2017 desa uci sebanyak 38 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 55.9%, pada Tahun 2018 terdapat 30 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe yaitu 44.1% dan pada Tahun 2019 terdapat 68 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Jumlah Desa	Desa/Kelurahan UCI%				
			Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	68	41	41	38	30	68
Persentase			60.3	60.3	55.9	44.1	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

N. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dari anak usianya. Rata-rata berat badannya hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal. Ciri-ciri klinis yang biasanya menyertainya antara lain: kenaikan berat badan berkurang bahkan terus menurun, ukuran lingkaran lengan atas menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tinggi normal atau cenderung menurun, tebal lipatan kulit normal atau semakin berkurang. Seluruh balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 s.d 2019 seluruhnya mendapat perawatan mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	10	10	5	4	7
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	10	10	5	4	7
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet(ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak – anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, di laporkan jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun sebanyak 3.386 jiwa dengan persentase 78.38%, data ini lebih tinggi di banding Tahun 2019 yang sebesar 2.574 jiwa atau 59.8%. Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun tertinggi pada Tahun 2017 sebanyak 3.803 atau 91.46%, namun pada Tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 3.499 atau 80.93%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun	3.386	3.386	3.803	3.499	2.574
2	Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama	4.320	4.320	4.158	4.323	4.303
Persentase		78.3 8	78.3 8	91.4 6	80.9 3	59.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 Tahun, ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang di duga kasus polio sampai di buktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada Tahun 2015-2017 kasus SFP non polio yang di laporkan di Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kasus atau 0.003% dan pada Tahun 2018-2019 menurun menjadi 1 Kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	2	2	2	1	1
2	jumlah penduduk < 15 Tahun	61.8 60	61.8 60	59.6 94	63.2 00	29.0 66
Persentase		0.00 3	0.00 3	0.00 3	0.00 1	0.00 3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang ini disebabkan oleh kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi).

Adapun cakupan balita pneumonia dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Pada Tahun 2015 dan 2016 sebesar 4.21 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 79 kasus, adapun perkiraan pneumonia capaian yang terendah terdapat pada Tahun 2018 sebesar 2.54 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 55 kasus dengan perkiraan pneumonia pada balita 2.163 kasus. Pada Tahun 2019 terdapat 73 kasus atau 8.23% dengan perkiraan penderita pneumonia balita sebanyak 886 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	79	79	79	55	73
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.87 5	1.87 5	2.15 4	2.16 3	886
Persentase		4.21	4.21	3.6	2.54	8.23

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberculosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat diukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pada Tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA positif (BTA+) yang tinggi sebanyak 418 kasus, namun pada Tahun 2016 s.d 2017 terjadi penurunan jumlah penderita baru TBC BTA (+) masing-masing 198 kasus dan 152 kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 198 kasus dan 152 kasus atau mencapai 100%. Pada Tahun 2018 terdapat 161 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 679 perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 23,7%. Sementara pada Tahun 2019 terdapat 136 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 102 kasus perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 133%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita
Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	418	198	152	161	136
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama	418	198	152	679	102
Persentase		100	100	100	23.7	133

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

S. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 334% dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 679 kasus dan Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe terendah adalah pada Tahun 2019 sebesar 42.58% dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 87 kasus dari jumlah penduduk 204.284 pada Tahun tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	443	367	328	679	87
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
Persentase		236.3	188	164.8	334	42.58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

T. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 tuberkulosis di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 0% dengan tidak adanya pasien TB yang meninggal. Pada Tahun 2017 dan 2018 di Kota Lhokseumawe terdapat 2 kasus pasien TB yang meninggal atau dengan tingkat kematian sebesar 1% dan 0.98%. Sedangkan pada Tahun 2019 tingkat kematian karena Tuberkulosis menurun sebesar 0.48% dengan kasus kematian hanya 1 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	0	0	2	2	1
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Persentase	0	0	1	0.98	0.48

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

U. Proporsi kasus tuberculosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS

Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA(+) adalah salah satu upaya mengendalikan TB Paru yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan, Yaitu angka keberhasilan pengobatan ini di bentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap ada. Pada Tahun 2015 persentase sembuh sebesar 106% dari 418 pasien baru TB paru yang di perkirakan 443 pasienBTA mendapat pengobatan melalui DOTS. Kemudian pada Tahun 2016 dari 367 pasie baru yang diperkirakan 198 pasien BTA mendapat pengobatan atau 54%. Begitu juga pada Tahun 2017 dan 2018 persentase sembuh sebesar 46% dan 76%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun

		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	443	198	152	518	136
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	418	367	328	679	102
Persentase		106	54	46	76	133

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

V. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk keperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, misalnya *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang Tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Pada Tahun 2016 jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 280 kasus, terjadi peningkatan dibanding jumlah kasus pada Tahun 2015 sebanyak 115 kasus, pada Tahun 2017 menurun menjadi 95 kasus, namun Tahun 2018 meningkat kembali sehingga 111 kasus dan Tahun 2019 terdapat 84 kasus penderita DBD yang tertangani. Kesimpulan pada dari jumlah kasus tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	115	280	95	111	84
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	115	280	95	111	84
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

W. Penderita Diare Di Temukan Dan Ditangani

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering di sertai kematian. Seseorang di katakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya atau air besar lebih dari tiga kali dan berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah perilaku hidup sehat yang belum baik masih banyak sampah yang buang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak dijamnab serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak didahului dengan cuci tangan terlebih dahulu. Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani disarana kesehatan pada suatu wilayah.

Gambaran tabel di bawah ini menunjukan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus tertinggi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2015 sebesar 54.4% dengan jumlah penderita

diare 4.200 kasus dari jumlah perkiraan penderita 7.704 kasus. Sedangkan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 34.3% dengan jumlah penderita diare sebanyak 1.887 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5.489 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun	4.200	3.931	2.146	1.887	2.555
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	7.704	8.022	5.372	5.489	5.516
	Persentase	54.5	49.0	39.9	34.3	46.3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

X. Angka Kesakitan Malaria Per 100.000 Penduduk

Malaria adalah penyakit infeksi yang di sebabkan oleh Plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, di tularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki atau pun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Pengobatan malaria harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan yang efektif adalah pemberian ACT (artemisin-based combination therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus di minum habis dalam 3 hari.

Pada Tahun 2015 ada Angka Kejadian Malaria sebesar 111 kasus, Tahun 2016 dan 2017 Angka Kejadian Malaria meningkat menjadi sebesar 635 kasus dan 644 kasus. Angka Kejadian Malaria pada Tahun 2018 turun menjadi sebesar 275 kasus, sedangkan pada

Tahun 2019 Angka Kejadian Malaria di Kota Lhokseumawe meningkat dari Tahun 2018 menjadi sebesar 296 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang menderita malaria pada Tahun tertentu	115	635	644	275	296
2	Jumlah penduduk pada pertengahan Tahun	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
Persentase		61.3	325.3	323.6	135.3	144.9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

Y. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 belum ditemukan angka kematian akibat malaria di Kota Lhokseumawe.

Z. Proporsi Anak Balita Yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida

Tabel 2.39
Proporsi Anak Balita Yang Tidur dengan Kelambu
Berinsektisida Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun

		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida	0	0	0	0	0
2	Jumlah Balita	16.571	15.106	15.732	16.355	15.863
	Persentase	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 belum ditemukan Anak Balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida di Kota Lhokseumawe.

AA. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang di Obati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui tiga tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali (tertiana) atau 4 hari sekali (kuartana).

Malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat antimalaria. Obat-obatan ini perlu disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan, atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali penderita. Kasus Anak Balita yang demam yang diobati dengan Obat

Anti Malaria yang tepat ada 100% pada Tahun 2018 dengan jumlah penderita yang diobati sebanyak 111 kasus. Sedangkan Tahun 2015 s.d 2017 dan Tahun 2019 tidak terdapat kasus anak Balita yang demam yang diobati dengan oabat anti malaria yang tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang di Obati Dengan Obat
Anti Malaria yang Tepat Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 Tahun	0	0	0	111	0
2	Jumlah penderita positif dalam 1 Tahun	0	280	0	111	0
Persentase		0	0	0	100	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

BB. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Humam Immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat di ketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan voluntary,counseling, and testing (VCT), sero survey, dan survei terpadu biologis dan prilaku (STBP).

Gambaran kasus HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 s.d 2019 meningkat. Dari Tahun 2015 dan 2016 terdapat 5 Kasus Pasien HIV/AIDS, pada Tahun 2017 bertambah menjadi 8 Kasus Pasien HIV/AIDS dan pada Tahun 2018 dan 2019 bertambah kembali masing-masing menjadi 12 kasus dan 24 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x	5	5	8	12	24
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
Persentase		0.0026	0.0025	0.0040	0.0059	0.0117

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

CC. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe

Tahun 2015 adalah 175.4 dan Tahun 2016 adalah 76.2, pada Tahun 2017 adalah 161.5, pada Tahun 2018 sebesar 159.1 dan pada Tahun 2019 sebesar 151.8, dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang-ulang dalam kisaran setahun melebihi dari kunjungan rata-rata pada Tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	329.526	148.656	321.422	316.624	302.016
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	187.455	195.186	198.980	198.980	198.980
Persentase		175.8	76.2	161.5	159.1	151.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

DD. Cakupan Kunjungan Bayi

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2019 Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe mencapai 99,9% dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 100%. Sedangkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 Cakupan kunjungan bayi masing-masing 99,6 dan 99,4. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Puskesmas	Kunjungan Bayi									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Banda	Banda	127	103,	1350	99,	1360	100	1380	100	1384	99,

	Sakti	Sakti	2	4		5						9
		Mongeu ng	572	100	562	100	573	100	561	100	573	100
2	Muara Dua	Muara Dua	104 3	100	1072	99	1097	100	1129	100	1143	99, 7
3	Muara Satu	Muara Satu	747	100	788	100	769	100	697	100	624	100
4	Blang Mangat	Blang Mangat	304	100	299	100	271	100	279	100	306	100
		Blang Cut	163	99,4	193	100	172	100	153	100	183	100
Jumlah			410 1	99,9	4264	99, 6	4242	99.4	4199	100	4213	99, 9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

EE. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas

Pada Tahun 2019 jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe 7 unit dengan cakupan puskesmas 175% dan pustu sebanyak 22 unit dengan cakupan puskesmas pembantu sebesar 32,35%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Desa	Jumlah Pembantu Puskesmas
1	Muara Dua	2	17	4
2	Banda Sakti	2	18	8
3	Blang Mangat	2	22	7
4	Muara Satu	1	11	3
Jumlah		7	68	22
Persen		175%		32,35%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

FF. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil di wujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang – kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama (usia 0 - 12 minggu), minimal 1 kali pada trisemester kedua

(usia kehamilan 12 – 24 minggu) dan minimal 2 kali pada trisemester ke tiga (usia kehamilan 24 minggu – lahir).

Standart waktu pelayanan tersebut di anjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal di upayakan agar memenuhi standar kualitas yaitu:

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pengukuran lingkar lengan atas (LILA)
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi
- f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
- h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)
- i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (HB), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) dan tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat di nilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun.

Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamilyang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang di anjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan.

Dari tabel di bawah ini terlihat pada Tahun 2012 K4 meningkat sebesar 96,24% menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang di berikan oleh tenaga kesehatan. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari Tahun ke Tahun relatif tidak terlalu stabil. Tahun 2015 sebesar 93,8%, Tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 93,7%, sementara pada Tahun 2017 sebesar 93,5% dan Tahun 2018 sebesar 91,2% selanjutnya Tahun 2019 sebesar 90,4%.

Tabel 2.45
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	4460	4552	4537	4426	4472
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4754	4857	4855	4855	4944
Persentase		93,8	93,7	93,5	91,2	90,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

GG. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang di lakukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang di anjurkan yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan

pada hari ke - 4 sampai dengan hari ke - 28 pasca persalinan pada hari ke -29 sampai dengan hari ke - 42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

- a. pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,nadi,nafas dan suhu)
- b. pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- c. pemeriksaan lochia dan cairan pervaginam lain
- d. pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
- e. pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana
- f. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
- g. keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas di ukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan nifas (KF3) dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung naik, pada Tahun 2015 Cakupan Pelayanan Nifas sebesar 90,39%, pada Tahun 2016 sebesar 90,59% dan Tahun 2017 naik lagi menjadi 91.88%. Capaian indikator KF merupakan hasil yang baik dari upaya yang di lakukan oleh petugas dan juga termasuk peran masyarakat.

Tabel 2.46
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019

1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4.104	4.201	4.259	0	0
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	4.537	4.637	4.635	0	0
Persentase		90,39%	90,59%	91.88%	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

HH. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pada usia yang rentan ini, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Tanpa penanganan yang tepat bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan resiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini dilakukan

untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum diberikan pada saat lahir.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada 3 – 7 hari, 1 kali pada 8 – 28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu Tahun. Capaian KN lengkap sesuai dengan tabel di bawah ini adalah Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 69,10%, Tahun 2016 meningkat menjadi 118,88% dan Tahun 2017 turun menjadi 36,71%.

Tabel 2.47
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019

1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	425	642	235	NA	NA
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	615	540	640	NA	NA
Persentase		69.10	118.88	36,71		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

II. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Kehidupan anak, usia di bawah lima Tahun memperoleh bagian yang sangat penting, usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga masyarakat dan kehidupan secara umum.

Kesehatan bayi dan balita harus di pantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya lihat. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Untuk itu di pakai indikator – indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita di lakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh:

1. pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam setahun)
2. pemberian vitamin A, dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus

3. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita minimal 2x kali dalam setahun.
4. pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Adapun capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan 8 kali yaitu pada Tahun 2015 sebesar 91,1 persen capaian ini menurun di bandingkan Tahun 2016 menjadi sebesar 88,4 persen, dan Tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebesar 91,5%

Tabel 2.48
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	15.09 5	15.14 7	15.28 7	0	0
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	16.57 1	17.13 8	16.71 4	0	0
Persentase		91,1%	88,4%	91,5%	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

JJ. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Usia masuk sekolah merupakan hal yang penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan

menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/ sederajat kelas 1. Pemeriksaan kesehatan di laksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil).

Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah di latih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil. Hal ini di maksud agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya.

Kegiatan penjangkaran kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah – masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat di lakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehtan anak sekolah maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjangkaran kesehatan ini terdiri dari:

1. pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
2. pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri
3. pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
4. pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
5. pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan

6. pengukuran kebugaran jasmani
7. deteksi dini masalah mental emosional

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi adalah pada Tahun 2016 : $2583/4165 \times 100$, sebesar 62,02 persen mengalami penurunan dibandingkan cakupan Tahun 2015 yang sebesar 76,51 persen dan Tahun 2017 yang sebesar 84,99 persen. Sementara pada Tahun 2019 sebesar 91,93 persen mengalami kenaikan disbanding Tahun 2018 sebesar 71,34 persen. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi berarti pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat untuk mempertahankan gigi cukup baik melalui upaya pencegahan.

Tabel 2.49
Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kes oleh tenaga terlatih disatu	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam	Persenta se

		wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	kurun waktu yang sama	
2015	Banda Sakti	1602	1902	76,51
	Muara Dua	197	447	
	Muara Satu	0	0	
	Blang Mangat	100	133	
2016	Banda Sakti	1594	1785	62,02
	Muara Dua	136	1073	
	Muara Satu	433	771	
	Blang Mangat	420	536	
2017	Banda Sakti	1033	1305	84,99
	Muara Dua	678	806	
	Muara Satu	420	455	
	Blang Mangat	406	419	
2018	Banda Sakti	1288	1864	71,34
	Muara Dua	700	1115	
	Muara Satu	660	797	
	Blang Mangat	423	529	
2019	Banda Sakti	1817	1828	91.93
	Muara Dua	687	772	
	Muara Satu	541	762	
	Blang Mangat	610	614	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

KK. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Penduduk atau masyarakat sasaran program yang telah ditetapkan oleh KEMENKES dan Dinas Kesehatan kab/kota setempat. Seluruh penduduk umumnya di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe terlindung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapat subsidi pemerintah dan pemda di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain: puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015 adalah 1420.3

dan Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 638.2, pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi 1317.3, selanjutnya pada Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 1325.9 serta 2019 sebesar 1310.3, dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang-ulang dalam kisaran setahun melebihi dari kunjungan rata-rata pada Tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	329.5 26	148.5 65	321.42 2	316.62 4	302.0 16
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	23.20 0	23.28 0	24.400	23.880	23.05 0
Cakupan pelayanan		1420. 3	638.2	1317.3	1325.9	1310. 3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

LL. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 741/VII/2008 SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dengan 18 Indikator. Salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM-K) adalah pelayanan kesehatan rujukan. Ada 2 Indikator untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu :

1. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS), Puskesmas (PKM) dan sarana kesehatan lainnya.
2. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki

Dokter Umum *on site* (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualitas GELS (*General Emergency life support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma life support*) serta ACLS (*Advance Cardiac life support*) yang di lengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015-2019 adalah mencapai 100%.

Tabel 2.51
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	8	7	8	10	10
2	Jumlah Rumah Sakit	8	7	8	10	10
Persentase		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

MM. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi $\leq$ 24 Jam

Kejadian luar biasa (KLB) adalah kejadian atau peristiwa dalam masyarakat atau wilayah dari suatu kasus penyakit tertentu yang secara nyata melebihi dari jumlah yang di perkirakan. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang berjangkit wabah sebagai daerah wabah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004).

Kriteria KLB adalah kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Direktur jenderal Nomor 451/91 tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Menurut aturan itu suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika unsur :

1. timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
2. peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
3. peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, Tahun)
4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata – rata perbulan dalam Tahun sebelumnya.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ≤ 24 jam pada tabel di bawah ini menggambarkan ada terjadi KLB tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 15 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2016 sebesar 14 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2017 dan 2018 sebesar 5 dengan penanganan 100, Tahun 2019 sebesar 0 dengan penanganan 0 persen.

Tabel 2.52
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang	5	14	5	15	0

	ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu					
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	5	14	5	15	0
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	0%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

2.1.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari Tahun ke Tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan. Dari data yang terbaru Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Meter dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel 2.53 berikut ini.

Tabel 2.53
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Km)

Tahun	Jalan Kota		Jalan Propinsi	
	Kondisi Baik	Total	Kondisi Baik	Total
2015	N/A	N/A	624	1781,72
2016	N/A	N/A	1009,52	1847,91

2017	98,248	340,573	444,24	1701,82
2018	102,652	340,573	624	1781,72
2019	108,157	412,468	741,78	1781,72

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap Tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, kondisi jalan negara yang berada pada wilayah Kota Lhokseumawe dengan total panjang 23,20 Km secara umum dalam kondisi baik, begitu pula dengan ruas jalan propinsi dengan panjang 4,60 Km secara umum juga dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan kota dengan panjang 412,468 Km yang terbagi pada 4 (empat) kecamatan ini masih memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang tercipta karena kondisi *drain hole* yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan *tonase* dari truck yang melintasi jalan tersebut. Berikut tabel 2.55 Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.54
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Jenis, Kondisi, Kelas	Status														
	Jalan Negara					Jalan Provinsi					Jalan Kabupaten/ Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jenis Permukaan															
Aspal	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	231.06	286.89	229.44	231.06	286.89
Paklah (kerikil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.253	71.988	75.494	74.253	71.988
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.714	51.851	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	2.240	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	340.73	412.68	339.41	340.73	412.68
Kondisi Jalan															
Baik	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	95.411	108.57	95.240	95.411	108.57
Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.967	131.95	119.85	117.967	131.95

Jenis, Kondisi, Kelas	Status														
	Jalan Negara					Jalan Provinsi					Jalan Kabupaten/ Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Rusak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.403	107.554	99.511	101.403	107.554
Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.792	65.122	24.805	25.792	65.122
Jumlah	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	340.573	412.428	339.141	340.573	412.428
Kelas Jalan															
Kelas I	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	231.606	286.389	229.544	231.606	286.389
Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.253	71.988	75.494	74.253	71.988
Kelas III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.714	51.851	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	2.240	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	340.573	412.468	339.141	340.573	412.468

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pengelompokan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Dimana pengelompokan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah panjang jalan di wilayah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Berikut tabel panjang jalan dilalui roda empat:

Tabel 2.55
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Panjang Jalan (KM)	301.082	373.439	299.882	301.082	373.439
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	191.407	195.186	187,455	191,407	195,186
	Rasio	1.572	1.913	1.599	1.572	1.913

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020

Dari tabel 2.55 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk pada Tahun 2016 sebesar 1.913 meningkat dibandingkan dua Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017 sebesar 1.599 dan Tahun 2018 sebesar 1.572.

C. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan < 10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang (40-80 km/jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Tabel 2.56
Panjang Jalan Dilalui Roda 4
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (>40 KM/Jam)	n/a	n/a	63,5	64,46	58,14

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.56 di atas dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang terjadi fluktuatif, dimana pada Tahun 2017 sepanjang 63,5 km, Tahun 2018 meningkat menjadi 64,46 km dan Tahun 2019 kondisinya menurun menjadi 58,14 km.

D. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.57
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

NO	URAIAN	2019		
		JUMLAH	LUAS	DAYA TAMPUNG
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	68	5,000	2,000
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	204	10,200	2,040
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	2	2,500	1,000
4	Lain – Lain	-	-	-
	Jumlah Tempat Pemakaman	274	17.700	5,040
6	Jumlah Penduduk (Jiwa)			195,186
	Rasio TPU Per Satuan Penduduk (1/6)			25.82

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.57 di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2019 jumlah Tempat Pemakaman yang ada di Kota Lhoskeumawe sebanyak 274 tempat, dengan rincian 68 Tempat Pemakaman Umum, 204 Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan 2 Tempat Pemakaman Khusus dengan total rasio sebesar 25.82.

E. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.223 jiwa/Km², Blang Mangat 479 jiwa/Km², Muara Satu 930 jiwa/Km², Muara Dua 597 jiwa/Km². Jumlah ibadah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 8 unit Mesjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 13 unit Mesjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mesjid	50	50	50	50	50
2	Mushalla	93	93	93	93	93
3	Meunasah	68	68	68	68	68
4	Gereja	3	3	3	3	3
5	Vihara	1	1	1	1	1
a	Jumlah Rumah Ibadah	215	215	215	215	215
b	Jumlah Penduduk (Jiwa)	191,407	195,186	187,455	191,407	195,186
b/a	Rasio	1.123	1.101	1.146	1.123	1.101

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2020

Dari tabel 2.58 di atas dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 terdapat sebanyak 2015 Unit Rumah Ibadah yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Jumlah mesjid sebanyak 50 unit, Mushalla sebanyak 93 unit, Meunasah sebanyak 68 unit, Gereja 3 unit, dan Vihara sebanyak 1 Unit.

2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Rasio Permukiman Layak Huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di Kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, kompleks perumahan PT. Arun, perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save the Children*, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya kompleks PT. Arun saja yang memiliki fasilitas pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pusat kuliner serta sarana olah raga seperti, stadion bola kaki, kolam renang, tenis *out door*, *volyball*, basket, badminton, *joging track* dan golf.

B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:

Tabel 2.59
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	Keude Punteut	4.99	Blang Mangat	Sedang
2	Keude Cunda	4.00	Muara Dua	Sedang
3	Pusong	6.66	Banda Sakti	Sedang
4	Pusong	9.71	Banda Sakti	Sedang
5	Jawa	4.23	Banda Sakti	Sedang
	Jumlah	29.59		

Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2019.

Dari tabel 2.59 di atas dapat dilihat bahwa sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebar di 5 titik. Luas keseluruhan Kawasan kumuh yaitu 29.59 Ha.

2.1.4.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019, Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Lhokseumawe memiliki rasio sebesar 11,25 persatuan penduduk. Keberadaan jumlah Polisi Pamong Praja terus meningkat setiap Tahunnya guna menunjang kelancaran tugas penegakan Perda di Kota Lhokseumawe. Sedangkan jumlah Linmas di Kota Lhokseumawe Tahun 2018 sebanyak 88 orang dan pada Tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 528. Penambahan Linmas ini ditujukan guna menambah tugas pengamanan Pilkada Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	101	124	147	206	213
2	Jumlah Linmas	606	606	88	88	528
3	Jumlah Penduduk	179.807	181.976	187.455	188.221	189.384
Rasio Polisi Pamong Praja		5.62	6.81	7.84	10.94	11.25
Rasio Jumlah Linmas		33.70	33.30	4.69	4.67	27.88

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2020.

B. Penegakan PERDA/QANUN

Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.61
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penegakan PERDA	10	15	15	15	15
2	Jumlah Pelanggaran	85	49	141	133	862
Persen		11	30	10	11	17

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017.

Jumlah Penegakan PERDA dan pelanggaran PERDA di Tahun 2015 sebesar 11 persen atau sebanyak 10 penegakan PERDA dari jumlah pelanggaran sebanyak 85 pelanggaran dan pada Tahun 2019 sebesar 17 persen atau sebanyak 15 penegakan PERDA dari jumlah pelanggaran sebanyak 862 pelanggaran. Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat secara maksimal mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe.

C. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe tetap dilakukan dalam proporsi yang sama. Patroli ini merupakan kegiatan rutin guna melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah waktu patroli	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
2	Jumlah Kegiatan patroli	3x sehari	3x sehari	3x sehari	3x sehari	3x sehari
Rasio		0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017.

Dari tabel 2.62 dapat dilihat bahwa patroli penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan rutin oleh Satpol PP Kota Lhokseumawe berdurasi 2 jam dengan jumlah kegiatan patroli dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Patroli ini sangat penting sekali dilakukan untuk keberlangsungan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan kenyamanan ketertiban umum.

2.1.4.1.6 Sosial

A. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf H menetapkan “setipa orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan upaya melalui pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
PMKS yang memperoleh bantuan sosial

No	Jenis Masalah	Jumlah Penerima				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Bayi Terlantar					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	-	1	2	1
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	1	2	1
2	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	58	97	58	37
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	58	97	58	37
3	Anak yang memerlukan perlakuan Khusus (AMPK)					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	63	105	61	51
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	-	-	-
4	Anak Jalanan, Anak Terlantar					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	-	-	18	45
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	-	-	25
5	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	-	-	37	32
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	-	-	-
6	Lanjut Usia (LANSIA)					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	1.600	1.800	2.337	2.426	2.397
	- Jumlah yang diberikan bantuan	1.600	1.800	2.337	-	2.397

B. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang terdata pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sejumlah 1.560 jiwa, jumlah ini terus naik hingga pada Tahun 2019 berjumlah 2.346 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kota Lhokseumawe telah memberikan jaminan sosial sehingga pencapaiannya mencapai 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.64 dibawah ini:

Tabel 2.64
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 Tahun	1,560	1,575	1,724	1,870	2,346
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) Tahun	1,560	1,575	1,724	1,870	2,346
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020.

C. Persentase Panti Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana Setiap Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Saat ini terdapat 13 (Tiga Belas) Panti Asuhan yang mampu menampung 858 (delapan ratus lima puluh delapan) Orang.

Selain keberadaan panti asuhan, Kota Lhokseumawe juga memiliki 2 (dua) panti jompo yaitu Panti Jompo Darussa'dah dan Panti Jompo An-Nur sebagai sarana sosial untuk orang lanjut usia yang mana jumlahnya semakin meningkat pada setiap Tahunnya. Kedua panti jompo ini mampu menampung 45 (empat puluh lima) lansia.

Tabel 2.65
Persentase Panti Asuhan/Jompo yang menerima bantuan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panti Asuhan	13	13	13	13	13
2	Panti Jompo	2	2	2	2	2
a	Jumlah Seluruh Panti Asuhan/Jompo	15	15	15	15	15
b	Jumlah Penghuni Panti asuhan/Jompo yang menerima bantuan	908	908	908	908	908
c	Jumlah Penghuni Panti Asuhan/Jompo	1,030	1,099	1,128	1,224	1,320
	Persentase (b/c*100)	88	83	80	74	69

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.65 di atas dapat dijelaskan bahwa belum seluruhnya penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2019 jumlah persentase penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan sebesar 69 persen, turun dari Tahun-Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penghuni panti yang mengalami peningkatan setiap Tahunnya sedangkan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya untuk 908 orang penghuni panti asuhan/jompo.

D. Disabilitas yang menerima bantuan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 disebutkan tentang “Penyandang Cacat”. Penyandang Cacat seakan subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan dengan istilah “Cacat” berkonotasi sesuatu yang negative. Kata “Penyandang” memberikan predikat. Berikut tabel disabilitas yang menerima bantuan.

Tabel 2.66
Disabilitas yang menerima bantuan
Tahun 2015-2019

No	Jenis Alat Bantu	Jumlah Penerima				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kursi Roda	20	64	70	47	43
2	Tongkat Ketiak	2	15	-	-	-
3	Alat Bantu Jalan Segi Empat	-	-	-	9	6
4	Tongkat Siku	-	-	-	7	-
5	Sepeda Motor Modifikasi	-	-	-	1	-
6	Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-	4
	Jumlah	22	79	70	64	53

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020.

Disabilitas yang menerima bantuan Kursi Roda pada Tahun 2015 berjumlah 20 orang, Tahun 2016 berjumlah 64 orang, Tahun 2017 berjumlah 70 orang, Tahun 2018 berjumlah 47 orang dan tahun 2019 berjumlah 43 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Tongkat ketiak pada Tahun 2015 berjumlah 2 orang, Tahun 2016 berjumlah 15 orang. Disabilitas yang menerima Alat Bantu Jalan Segi Empat pada Tahun 2018 berjumlah 9 dan pada Tahun 2019 berjumlah 6 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Tongkat Siku pada Tahun 2018 berjumlah 7 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Sepeda Motor Modifikasi pada Tahun 2018 berjumlah 1 orang. Disabilitas yang menerima bantuan sepeda motor roda tiga pada Tahun 2019 berjumlah 4 orang.

2.1.4.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.1.4.2.1 Tenaga Kerja

A. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan angkatan kerja 15 Tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dikalikan seratus persen. Berikut tabel Angka Partisipasi Angkatan kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.67
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan kerja 15 Tahun keatas	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
2	Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas	130.931	133.821	136.757	140.076	143.173
Persentase		60%	65%	63%	58%	62%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) dikalikan seratus persen. Berikut tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk Angkatan kerja	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)	125.810	128.500	131.221	134.380	137.091
Persentase		63%	67%	66%	60%	65%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.69
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	11.122	18.207	9.046	10.144	9.881
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
Persentase		14%	21%	11%	13%	11%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

D. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat dengan membandingkan penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.70
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang bekerja	67.857	68.157	77.021	70.852	79.430
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
Persentase		86%	79%	89%	87%	89%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

E. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dapat dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Bruto dengan jumlah tenaga kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.71
Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produk Domestik Bruto	6.550.1500.000	6.450.410.000	6.591.660.000	6.844.700.000	7.116.190.000
2	Jumlah tenaga kerja	125	140	1885	833	2206
	Persentase	5240120000%	4607435714%	349690186%	821692677%	322583409%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

F. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas merupakan perbandingan antara kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dikalikan seratus persen. Berikut tabel Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.72
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kesempatan Kerja	9	12	16	17	20
2	Jumlahpenduduku sia 15 Tahun keatas	130.93 1	133.82 1	136.75 7	140.07 6	143.17 3
Persentase		0,007 %	0,009 %	0,012 %	0,012 %	0,014 %

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

G. Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dengan total kesempatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.73
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja
Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	63.230	68.017	75.011	69.879	75.339
2	Total kesempatan kerja	9	12	16	17	20
Persentase		702.556%	566.808%	468.819%	411.053%	376.695%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

H. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun.

Angka sengketa merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dengan jumlah perusahaan per Tahun dalam suatu wilayah dikalikan 1000. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sebanyak 17 perusahaan. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebanyak 19 perusahaan, Tahun 2017 sebanyak 21 perusahaan dan pada Tahun 2018 sebanyak 24 perusahaan, namun di Tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis hanya 8 perusahaan saja yang terdaftar. Sementara itu, jumlah sengketa pengusaha pekerja pada Tahun 2015 sebanyak 267 dan diTahun ini merupakan angka tertinggi. Jumlah sengketa pekerja terus mengalami penurunan hingga pada Tahun 2016 hanya terdapat 75 kasus, Tahun 2017 terdapat 56 kasus, Tahun 2018 terdapat 48 kasus dan hingga di Tahun 2019 hanya terdapat 25 kasus . Berikut tabel Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.74
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja PerTahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	267	75	56	48	25
2	Jumlah Perusahaan	17	19	21	24	8
Rasio		15.706	3.947	2.667	2.000	3.125

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

I. Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dengan jumlah kasus yang dicatatkan dikalikan seratus persen. Berikut tabel Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.75
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	29	17	51	40	25
2	Kasus Yang Dicatatkan	30	25	51	40	25
Persentase		97	68	100	100	100

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 dari kasus yang dicatatkan sebanyak 30 kasus dan diTahun itu juga kasus dapat ditangani sebanyak 29 kasus atau penanganan kasus mencapai 97%, pada Tahun 2016 kasus yang dicatatkan sebanyak 25 kasus dan dapat ditangani sebanyak 17 kasus atau mencapai 68% penanganan kasus. Untuk Tahun 2017-2019 dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanding dengan kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) hingga penanganan kasus dapat mencapai 100%. Secara garis besar pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan pencapaian penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB) di Tahun 2017-2019 hingga 100%, dalam arti kata semua kasus yang dicatatkan dapat diselesaikan.

J. Keselamatan dan Perlindungan Pekerja.

Tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan ditempat kerja agar mendapatkan perlindungan dalam bekerja yang layak. Pada Tahun 2015-2017 penerapan keselamatan kerja mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2015 hanya mencapai 15 perusahaan saja yang menerapkan keselamatan kerja dari 30 perusahaan yang terdata atau mencapai 50% penerapan keselamatan kerja, pada Tahun 2016 mencapai 20 perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja dari 25 perusahaan atau mencapai 80% penerapan keselamatan kerja dan pada Tahun 2017 meningkat hingga 83% atau 53 perusahaan telah menerapkan keselamatan kerja dari 64 jumlah perusahaan. Berikut tabel Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.76
Keselamatan dan Perlindungan Pekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja	15	20	53	63	301
2	Jumlah perusahaan	30	25	64	82	386
Persentase		50%	80%	83%	77%	78%

Sumber : DPMTSP Naker, 2020.

K. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta program Jamsostek dapat dihitung dengan membanding antara jumlah pekerja/buruh Jamsostek dengan jumlah pekerja/buruh dikalikan seratus persen. Berikut tabel Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.77
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pekerja/Buruh JAMSOSTEK	-	-	38	47	54
2	Jumlah Pekerja/Buruh	-	-	-	-	-
Persentase		-	-	38%	47%	54%

Sumber : DPMTSP Naker, 2020.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2017-2019 jumlah pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek terus meningkat dari Tahun ke Tahun dan keseluruhan pekerja/buruh tersebut dari Tahun 2017-2019 terdaftar sebagai peserta program Jamsostek. dari Tahun 2017 hanya mencapai 38 orang

L. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2015-2019 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah terjadi kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2015 mencapai 29 kasus terselesaikan dari 30 kejadian kasus atau mencapai 97%, pada Tahun 2016 turun hingga 68% penyelesaian kasus dari 25 kejadian kasus hanya 17 kasus terselesaikan dan pada Tahun 2017 s.d 2019 kembali meningkat hingga 100% di Tahun 2019. Pada Tahun 2017 mencapai 71% penyelesaian kasus dari 51 kejadian kasus 36 kasus terselesaikan dan meningkat lagi di Tahun 2018 hingga 73% penanganan kasus dari 40 kejadian kasus 29 kasus terselesaikan dan terus meningkat lagi hingga mencapai 100% penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah kasus di Tahun 2019. Berikut tabel Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.78
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dgn kebijakan Pemda	29	17	36	29	25
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	30	25	51	40	25
Persentase		97%	68%	71%	73%	100%

Sumber : DPMTSP Naker, 2020.

2.1.4.2.2 Komunikasi dan Informatika

A. Rasio Warnet Terhadap Penduduk

Teknologi informasi saat ini mulai berkembang dengan pesat sehingga mempermudah setiap orang untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi tanpa harus terbatas oleh waktu dan tempat. Salah satu cara untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi saat ini adalah jasa di bidang internet.

Tabel 2.79
Rasio Warnet Terhadap Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Warnet	76	78	80	82	88
2	Jumlah Penduduk	191.407	195.186	198.98	198.98	196.132
Rasio		0.039	0.040	0.402	0.412	0.044

Sumber : Lhokseumawe dalam angka, 2020.

Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio warnet terhadap penduduk Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rasionya 0.039 sedangkan Tahun 2019 rasionya sebesar 0.044 dengan perhitungan rasio per seribu jumlah penduduk.

B. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

C. Pameran/Expo

Pameran/ Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk Tahun 2015-2019 telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam Pameran meliputi pameran pembangunan dan pameran pendidikan.

D. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok informasi masyarakat (kim) merupakan program dari kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di indonesia. Kim dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan, salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Tujuan kelompok informasi masyarakat (kim) adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan.

Selain dari tujuan tersebut, kim berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota kim, dari kim kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, kim sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Kim sebagai sarana peningkatan literasi anggota kim dan masyarakat dibidang informasi dan media masa. Kim sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	3 (Tiga) Kelompok	4 (Empat) Kelompok	4 (Empat) Kelompok	4 (Empat) Kelompok	4 (Empat) Kelompok
2	Jumlah Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan
Persentase		75%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel diatas pada Tahun 2015 jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe hanya 3 (tiga) kelompok dari empat kecamatan yang ada dalam Kota Lhokseumawe sedangkan untuk Tahun 2016 s.d 2019 sudah berbadang dari 4 (empat) KIM dan 4 (empat) Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

2.1.4.2.3 Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA).

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dari Tahun 2015-2019 jumlah investor untuk PMDN di Kota Lhokseumawe semakin meningkat tiap Tahunnya. Jumlah seluruh investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.458 investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor.

Tabel 2.81
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Investor	215	297	302	312	332

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Dari tabel diatas jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 Tahun, dimana angka tertinggi mencapai 3.389.251.025.247 pada Tahun 2019. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA).

Tabel 2.82
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	URAIAN	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2015	Jumlah Investasi	2.237.000.000.00 0	-	2.237.000.000.00 0
2016	Jumlah Investasi	3.370.451.771.24 7	-	3.370.451.771.24 7
2017	Jumlah Investasi	3.373.624.221.24 7	-	3.373.624.221.24 7
2018	Jumlah Investasi	3.379.911.000.24 7	-	3.379.911.000.24 7
2019	Jumlah Investasi	3.389.251.025.24 7	-	3.389.251.025.24 7

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

2.1.4.2.4 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting. baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.83
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pekerja Perempuan di Instansi Pemerintah	2.695	2.752	2.844	3.100	3.400
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	68002	69900	70875	71645	72891
Persentase		3.96	3.93	4.012	4.32	4.66

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.83 diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah pada Tahun 2015 sebanyak 2.695 pekerja perempuan atau 3.96%, pada Tahun 2019 terus meningkat menjadi 3.400 pekerja perempuan atau 4.66%

B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.84
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laki-laki	23	23	23	23	21
2.	Perempuan	2	2	2	2	4
Jumlah		25	25	25	25	25
Persentase		8%	8%	8%	8%	16%

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, Tahun 2020.

Dari tabel 2.84 diatas proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada periode 2014-2019 sebanyak 2 orang atau 8% dan pada periode 2019-2024 menurun proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR meningkat jadi 4 orang atau 16%. Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Lhokseumawe masih rendah selain belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat undang-undang ini terlihat dari tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berikut data dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut ini:

Tabel 2.85
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pekerja Perempuan di instansi Swasta	904	962	1.020	1.085	1.366
2	Jumlah Pekerja Perempuan	68002	69900	70875	71645	72891
Persentase		1.32	1.37	1.44	1.51	1.87

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di lembaga swasta pada Tahun 2015 sebanyak 904 dari 68002 pekerja perempuan atau sebesar 1.32%, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 962 dari 69900 pekerja perempuan atau 1.37% dan Tahun 2019 partisipasi perempuan di lembaga swasta menjadi 1.366 dari 72891 pekerja perempuan atau 1.87%.

D. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio KDRT tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.86
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KDRT	-	12	6	7	37
2	Jumlah RT	53717	52344	53068	53600	53535
	Rasio KDRT	0	0.022	0.011	0.013	0.067

Sumber : P2TP2A Tahun 2020.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari rasio KDRT yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada Tahun 2015 angka KDRT nol dan Tahun 2019 angka KDRT di Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada angka 0,067.

E. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat, yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.84 berikut:

Tabel 2.87
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh
Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kota Lhokseumawe 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	12	8	24	19	22
2	Jumlah Pengaduan	12	8	24	19	22
Rasio		100	100	100	100	100

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Rasio penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Lhokseumawe sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seluruh pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada Tahun 2015-2019 semuanya dapat diselesaikan.

2.1.4.2.5 Pangan

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras (padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi). Sampai saat ini Kota Lhokseumawe tidak memiliki permasalahan ketahanan pangan.

Tabel 2.88
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan Utama (%)
2015	0,76	191.407	0.0040
2016	0.076	195.186	0.00039
2017	0.074	198.98	0.00037
2018	0.074	198.98	0.00037
2019	0.075	196.123	0.00038

Sumber : DKPPP Kota Lhokseumawe 2020.

2.1.4.2.6 Pertanahan

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 Tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 2.89
Luas Lahan Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019
1	Luas lahan bersertifikat milik pemerintah Kota Lhokseumawe	±255.169 m ²
2	Luas lahan bersertifikat milik masyarakat adalah :	17,370
	- Hak milik (HM) seluas	17.370.000 m ²
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	316.598 m ²
3	Luas Wilayah	181,06 Ha

Sumber : Kantor Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2020.

2.1.4.2.7 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi.

Kota Lhokseumawe mempunyai masalah dengan lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah cair. Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya masih sangat minim sekali.

A. Persentase Timbulan Sampah yang ditangani

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Semua sampah dari sumber masing-masing akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Sumur Batu.

Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu :

1. sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga
2. sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga misalnya limbah dari proses industri.

Tabel 2.90
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton)	46.716	46.407	47.447	45.888	44.769
2	Total timbulan sampah (ton)	58.769	56.953	57.841	56.282	55.335
Persentase		79.49	81.48	82.03	81.53	80.90

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Persentase Timbulan sampah pada setiap tahunnya terjadi penurunan walaupun tidak begitu signifikan, pada Tahun 2015 persentase timbulan sampah sebesar 79.49%, Tahun 2016 persentase timbulan sampah sebesar 81.48%, Tahun 2017 persentase timbulan sampah sebesar 82.03%, Tahun 2018 persentase timbulan sampah sebesar 81.53% dan pada Tahun 2019 persentase timbulan sampah sebesar 80.90%.

B. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis.. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penanganan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih dirasa sangat minim, terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah sampah yang tertangani 79.49 ton, pada tahun 2016 jumlah sampah yang tertangani 81.48 ton, pada tahun 2017 jumlah sampah yang tertangani 82.03 ton, pada tahun 2018 jumlah sampah yang tertangani 81.53 ton dan pada tahun 2019 jumlah sampah yang tertangani 80.90 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.80

Tabel 2.91
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	79,49	81,48	82,03	81,53	80,90
2	Total jumlah timbulana sampah diKab/Kota (ton)	100	100	100	100	100

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020

C. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman sebagian besar diselesaikan di lokasi sumber sampah dengan cara dibakar dan hanya sebagian yang dikumpulkan oleh pengumpul sampah informal untuk didaur ulang. Penanganan sampah di Kota Wates yang meliputi pertokoan dan pasar sudah mencapai 100%, artinya semua timbunan sampah setiap harinya sudah dapat diangkut ke TPA.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti tempat penampungan sampah sementara (kontainer, bin/tong, bak permanen), alat pengangkut (gerobak, dumptruck, becak sampah), dan sebagainya.

Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah.

Tabel 2.92
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha)	100,00	110,00	120,00	130,00	150,00
2.	Luas area kabupaten/kota (km ² /ha)	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06
Persentase		55.23	60.75	66.27	71.80	82.84

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2015 sebesar 55.23%, pada Tahun 2016 persentase cakupan area pelayanan sebesar 60.75%, pada Tahun 2017 persentase cakupan area pelayanan sebesar 66.27%, pada Tahun 2018 persentase cakupan area pelayanan sebesar 71.80% dan pada Tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan sebesar 82.84%.

2.1.4.2.8 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin wajib memilikinya.

Pada Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Program KTP-elektronik atau e-KTP dengan empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Dengan adanya kewajiban perekaman KTP berbasis Elektronik, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengetahui jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang telah melakukan perekaman dan pembuatan KTP. Namun jumlah warga yang membuat KTP di usia 17 tidak terlalu naik begitu pesat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, di samping itu jumlah penduduk juga tidak begitu banyak terjadi penambahannya. Berikut Rasio penduduk ber KTP di Kota Lhokseumawe :

Tabel 2.93
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	95.579	105.487	107.793	116.032	122.958
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	127.094	130.027	131.931	132.038	128.230
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0.75	0.81	0.82	0.88	0.96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir 2015-2019, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 0.96. Sedangkan pada Tahun 2015 rasio ini mengalami penurunan menjadi 0.75.

B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat bahwa pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske dinas terkait. Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota Lhokseumawe dari tahun 2015 sampai dengan 2019:

Tabel 2.94
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	14.687	17.183	18.010	18.279	18.311
2	Jumlah Bayi	19.454	20.000	20.245	20.269	20.996
Rasio		0.75	0.86	0.89	0.88	0.87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.

Tabel diatas menggambarkan bahwa selama tiga tahun terakhir 2015-2019 rasio bayi ber akta kelahiran sangat fluktuatif. Pada Tahun 2015 rasio bayi ber akta kelahiran sebesar 0.75%, Tahun 2017 sebesar 0.86 % dan Tahun 2018-2019 menurun sebesar 0.88% dan 0.87%

C. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan paling lambat akhir Tahun 2011, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun 2006. Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

D. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlaku nya KTP adalah 5 Tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Tabel 2.95
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	95.579	105.487	107.293	116.032	122.988
2	Jumlah penduduk wajib KTP	127.094	130.027	131.931	132.038	128.230
	Persentase	75	81	82	88	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan KTP di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 75%. Persentase ini sedikit menurun dibanding Tahun 2019 yang mencapai 96%.

2.1.4.2.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dengan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang terlihat dari kondisi kantor Geuchik. Sampai dengan Tahun 2019 masih terdapat gampong dengan kondisi kantor yang rusak dan belum memiliki kantor. Pemerintahan gampong yang kondisi bangunannya rusak maupun yang tidak memiliki kantor dalam menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan sarana prasarana gampong lainnya seperti bangunan yang ada di masjid, meunasah, gedung pertemuan maupun ruangan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Kondisi kantor Geuchik dan mukim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.96
Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah Kondisi Kantor Geuchik					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kantor Dalam Kondisi Baik	49	51	38	54	58	
2	Kantor Dalam Kondisi Rusak	7	6	22	5	4	Alue Awe, Kota Lhokseumawe, Uteun Bayi, Cot Trieng
3	Belum Memiliki Kantor	12	11	8	9	6	Hagu Teungoh, Tumpok Teungoh, Jambo Timu, Blang Panyang, Batuphat Timur, Ujung Pacu
Jumlah		68	68	68	68	68	

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Sedangkan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%. Sejak Tahun 2015-2019 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	2015		2016		2017		2018		2019	
			Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana
1	Muara Dua	17	12	70,58%	13	76,47%	13	76,47%	13	76,47%	16	94,11%
2	Banda Sakti	18	15	8,33%	16	88,88%	16	88,88%	16	88,88%	14	77,77%
3	Blang Mangat	22	16	72,72%	16	72,72%	17	72,72%	18	81,81%	21	95,45%
4	Muara Satu	11	6	54,54%	6	54,54%	6	54,54%	7	63,63%	7	63,63%
	Jumlah	68	49	72,05%	51	75%	52	76,47%	54	79,41%	58	85%

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik mulai dari pada Tahun 2015 sebesar 72,05% dan pada Tahun 2019 meningkat mencapai 85%. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), sedangkan sumber dana dari APBK Kota Lhokseumawe melalui SKPD terkait tidak mengalokasikan anggaran pembangunan kantor keuchik.

B. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Yang Baik

Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap tahun telah memfasilitasi dana untuk gampong dengan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong dilaksanakan dari APBK melalui dana Alokasi Dana Gampong (ADG). Sejak tahun 2015 pemerintah pusat mulai APBN menyalurkan Dana Desa (DD). Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyalurkan dana bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gampong. Adapun besaran dana yang disalurkan untuk gampong sejak tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.98
Data Penyaluran Dana Ke Gampong
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Realisasi Penyaluran Dana Ke Gampong				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG	23.131.280.796	45.225.461.961	54.176.102.429	47.393.135.135	49.971.344.117
2	Dana Desa (DD)	19.510.027.000	43.536.057.800	54.679.330.666	53.475.677.300	58.773.329.996
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	-	544.265.970	928.342.385	973.164.381	-
	Jumlah	42.641.307.796	89.305.785.731	109.783.775.480	101.841.976.816	108.744.674.113

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sejak tahun 2015 sebesar Rp. 42.641.307.796,- dan Tahun 2019 menjadi Rp. 108.744.674.113 atau mengalami peningkatan yang cukup besar. Dana APBG tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Dengan semakin besarnya dana APBG yang dikelola oleh pemerintah gampong perlu adanya pembinaan secara berkesinambungan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur gampong yang baik di bidang pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2019 telah melakukan pembinaan kepada pemerintah gampong dengan melakukan penyusunan produk hukum gampong, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset gampong serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.99
Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah Gampong Yang Dibina				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Muara Dua	17	17	17	17	17	17
2	Banda Sakti	18	18	18	18	18	18
3	Blang Mangat	22	22	22	22	22	22
4	Muara Satu	11	11	11	11	11	11
	Jumlah	68	68	68	68	68	68

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dalam pembinaan perencanaan salah satunya mengarahkan gampong dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan prioritas Dana Desa dengan memperhatikan status desa. Adapun data klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sudah tidak ada desa dengan status tertinggal, 52 gampong menjadi desa berkembang, 14 gampong dengan status maju dan hanya 2 gampong yang mandiri.

Prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan memberdayakan desa dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. Pada tahun 2017 pemerintah gampong melalui APBG mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk belanja penyertaan modal gampong guna mendukung modal awal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pembinaan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap BUMG sebagai upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tumbuh kembangnya usaha guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan warga gampong dan Pendapatan Asli Gampong (PAG).

Selama tahun 2015-2019 data pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.100
Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun Pendirian dan Penyertaan Modal Gampong					Penyertaan Modal Gampong	BUMDESMA
		2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Muara Dua			2.603.335.927	1.142.419.844	200.775.956	3.946.531.727	1.600.000.000
2.	Banda Sakti			1.110.463.792	2.587.587.257	869.201.942	4.567.252.991	-
3.	Blang Mangat			2.998.218.862	1.662.496.248		4.660.715.110	-
4.	Muara Satu			1.981.842.693	655.567.327	90.000.000	2.727.410.020	-
JUMLAH				8.693.861.274	6.048.070.676	1.159.977.898	15.901.909.848	1.600.000.000

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMG di awal Tahun 2017 sebesar Rp. 8.693.861.274,- dan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 1.1159.977.898,-. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada BUMG sangat besar dan guna mencapai tujuan pendirian perlu adanya pembinaan BUMG tersebut dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.101
Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah BUMG					
			2015	2016	2017	2018	2019	BUMDESMA
1	Muara Dua	17	-	-	14	17	17	1
2	Banda Sakti	18	-	-	7	16	18	-
3	Blang Mangat	22	-	-	16	21	21	-
4	Muara Satu	11	-	-	9	10	11	-
	Jumlah	68	-	-	46	64	67	1

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah BUMG yang ada di Kota Lhokseumawe pertumbuhan mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebanyak 46 unit sampai tahun 2019 sebanyak 67 unit. 1 gampong yang belum mendirikan BUMG yaitu gampong Tunong disebabkan adanya permasalahan dari pemerintah gampong itu sendiri sehingga menghambat jalannya pendirian BUMG. Pada tahun 2019 telah berdiri Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) di Kecamatan Muara Dua yang anggota nya terdiri dari 16 gampong yang ada di Kecamatan Muara Dua.

C. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP-PKK Kecamatan sampai TP-PKK Gampong dan dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Selanjutnya TP-PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan Kelompok-kelompok Masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma dan lain-lain. Jumlah kelompok Dasa Wisma adalah bagian dari jumlah Kelompok PKK Dusun yang ada di Gampong.

Tabel 2.102
Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No.	TP PKK Kecamatan	Jumlah TP-PKK Gampong	Kelompok Binaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Muara Dua	17	13	6	2	2	1
2.	Banda Sakti	18	14	5	4	3	2
3.	Blang Mangat	22	15	4	2	1	0
4.	Muara Satu	11	10	3	2	3	1
	Jumlah	68	52	18	10	9	4

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2015 jumlah yang dibina sebanyak 52 kelompok dan Tahun 2019 menjadi 5 kelompok yang tersebar di 4 Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan sejak adanya dukungan dari pemerintah gampong melalui APBG baik dari Alokasi Dana Gampong (ADG) maupun Dana Desa (DD) kelompok TP-PKK Gampong berjalan dengan sendirinya menjalankan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di gampong masing-masing. Sedangkan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui APBK sangat kurang dalam mengalokasikan anggaran untuk pembinaan TP-PKK Gampong melalui instansi terkait.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK diperoleh dari perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Selama Tahun 2015-2019 data kelompok binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No.	TP PKK Kecamatan	Jumlah TP-PKK Gampong	Kelompok Binaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Muara Dua	17	13	6	2	2	1
2.	Banda Sakti	18	14	5	4	3	2
3.	Blang Mangat	22	15	4	2	1	0
4.	Muara Satu	11	10	3	2	3	1
	Jumlah	68	52	18	10	9	4

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

D. Persentase PKK Aktif

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan. TP-PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. TP-PKK Kota Lhokseumawe aktif menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dan dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Dana ADG dan Dana Desasejak tahun 2015 sampai dengan saat ini lebih meningkatkan peran aktif TP-PKK dalam pembangunan gampong khususnya pembinaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase PKK aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah PKK dikali 100%. Selama tahun 2015 s/d 2019 jumlah binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104
Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No .	Kecamatan	Jumlah TP-PKK Aktif	Persentase (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Muara Dua	17	100	100	100	100	100
2	Banda Sakti	18	100	100	100	100	100
3	Blang Mangat	22	100	100	100	100	100
4	Muara Satu	11	100	100	100	100	100
	Jumlah / Persentase	68	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

E. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang Kesehatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui serta wanita usia subur. Oleh karena itu kegiatan posyandu sangat penting dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.

Persentase posyandu aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu dikali 100%. Selama tahun 2015 s/d 2019 jumlah posyandu aktif Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105
Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persentase (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Muara Dua	24	24	100	100	100	100	100
2	Banda Sakti	32	32	100	100	100	100	100
3	Blang Mangat	29	29	100	100	100	100	100
4	Muara Satu	15	15	100	100	100	100	100
	Jumlah / Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dilihat bahwa jumlah posyandu aktif dalam Kota Lhokseumawe sampai dengan saat ini berjumlah 100 unit yang tersebar di 4 Kecamatan. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah posyandu aktif paling tinggi, mengingat jumlah penduduk yang banyak dan padat. Posyandu dalam Kota Lhokseumawe memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 strata posyandu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.106
Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Strata Posyandu	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pratama	0	0	0	0	0
2	Madya	10	10	10	10	12
3	Purnama	78	78	78	78	87
4	Mandiri	1	1	1	1	1
	Jumlah	89	89	89	89	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

2.1.4.2.10 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Gerakan KB Nasional selama ini telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum merata. Makin tinggi pertumbuhan penduduk semakin mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.107
Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak	95.273	95.868	97.340	98.771	96.481
2	Jumlah	53.717	52.344	53.068	53.600	53.535
	Rata-Rata jumlah anak per Keluarga	1,78	1.83	1.83	1.84	1.80

Sumber: DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe hanya 2 orang per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di kota Lhokseumawe telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

2.1.4.2.11 Perhubungan

A. Jumlah kendaraan dan arus penumpang angkutan umum

Permasalahan Transportasi di Kota Lhokseumawe kita hanya akan membicarakan Transporasi darat karena Kota Lhokseumawe tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi.

Tabel 2.108
Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Naik	Turun
2015	33,188	146,936	150,395
2016	33,200	146,946	152,221
2017	107.220	454.805	390.893
2018	100.853	147.352	130.589
2019	129.575	172.154	165.189

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Pada tabel diatas, bahwa jumlah unit kendaraan mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2015 jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe 33,188 unit, Tahun 2016 terdapat 33,200 unit, Tahun 2017 mencapai 107,220 unit, Tahun 2018 mencapai 100,853 unit dan pada Tahun 2019 mencapai 129,575 unit. Adapun dengan Jumlah Penumpang yang naik turun di Terminal Kota Lhokseumawe mengalami penurunan yang signifikan atau dapat dikatakan mengalami fluktuasi yang sangat signifikan dimana pada Tahun 2015 jumlah penumpang yang naik 146,936 penumpang dan turun 150,395 penumpang, pada Tahun 2016 penumpang yang naik 146,946 penumpang dan turun 152,221, pada tahun 2017 penumpang yang naik 454,805 penumpang dan yang turun 390,893 penumpang, pada Tahun 2018 penumpang yang naik 147,352 penumpang dan yang turun 130,589 sedangkan pada Tahun 2019 penumpang yang naik 172,154 penumpang dan yang turun 165,189 penumpang. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan penumpang yang datang ke Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya.

B. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rasio Ijin trayek sebesar 0,005, Tahun 2016 rasio izin trayek sebesar 0,009, Tahun 2017 rasio izin trayek sebesar 0,008, Tahun 2018 rasio izin trayek sebesar 0,008 sedangkan pada Tahun 2019 rasio izin trayek terjadi penurunan sebesar 0,007. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.109
Rasio Ijin Trayek Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Izin Trayek	895	1.745	1.636	1.636	1.636
2	Jumlah penduduk	191,407	195.186	198.980	203.284	207.202
	Rasio Izin Trayek	0,005	0,009	0,008	0,008	0,007

Sumber : Dinas Perhubungan, Jumlah Penduduk: Sumber BPS Lhokseumawe

C. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Di Kota Lhokseumawe, Uji Kir Angkutan Umum terlihat bahwa Jumlah angkutan yang di uji Kir sangat stabil dimana hampir semua kendaraan mengikuti Uji Kir setiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2015 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 1,12 pada Tahun 2016 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 0,80 pada Tahun 2017 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 1,05 pada tahun 2018 yang mengikuti Uji Kir adalah 1,02 dan pada Tahun 2019 yang mengikuti Uji Kir adalah 1,02 kendaraan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.110
Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kendaraan	2490	2639	2.350	2.381	2.558
2	Kendaraan Yg Diuji	2795	2107	2.234	2.330	2.496
Rasio		1,12	0,80	1,05	1,02	1,02

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

D. Jumlah Pelabuhan Udara/Laut/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Terminal Bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Di Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Oleh Karena itu tidak ada penambahan fasilitas Pelabuhan Baik Udara maupun Laut di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.111
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-
2	Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
3	Terminal Bis/Barang	3	3	3	3	3

Sumber Dinas Perhubungan, 2020

E. Kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum cukup baik dimana hampir setengah dari kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum memiliki Kir atau tidak melakukan uji Kir. Tapi bila terlihat bahwasanya setiap tahunnya kendaraan yang belum memiliki Kir semakin berkurang seperti terlihat pada tabel dibawah ini bahwa pada Tahun 2015 persentase Kir adalah 112% sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 97%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.112
Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkutan Umum yang memiliki KIR	2795	2107	2.234	2.330	2.496
2	Jumlah Angkutan Umum	2490	2639	2.350	2.381	2.558
Persentase		112	80	99	97	97

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

F. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di kota Lhokseumawe dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.113
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
2	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

G. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin dicari oleh para pendatang/ wisatawan ketika berkunjung disuatu kota/kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen kota Lhokseumawe yaitu 300 hanya tersedia 83 rambu, pada Tahun 2016 jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia yaitu 212 hanya tersedia 78 sedangkan Tahun 2019 jumlah rambu-rambu yang seharusnya 152 hanya tersedia 60 rambu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.114
Pemasangan Rambu-rambu
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	83	78	0	0	60
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	300	212	212	212	152
Persentase		27	36	0	0	39

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

H. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagu jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus truk, dan sepeda motor.

Panjang Jalan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 yaitu 340 km, jumlah kendaraan 56.946 unit terjadi peningkatan ditahun 2019 panjang jalan 412 km sedangkan jumlah kendaraan 52.402 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.115
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan	340	340	412	412	412
2	Jumlah Kendaraan	56.946	56.597	62.325	50.340	52.402
Rasio		0.006	0.006	0.007	0.008	0.008

Sumber: Panjang Jalan: Dinas PUPR, Jumlah kendaraan: SAMSAT LHOKSEUMAWE 2020

I. Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.116
Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	5.452	6.428	6.954	7.236	7.510

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel diatas jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2015 sebesar 5.452 ton, pada Tahun 2016 sebesar 6.428 ton, pada Tahun 2017 sebesar 6.954 ton, pada Tahun 2018 sebesar 7.236 ton dan pada Tahun 2019 sebesar 7.510 ton.

J. Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.117
Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (Orang)	297.331	599.167	845.698	277.941	337.343

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 sangat fluktuatif. Pada Tahun 2015 Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal sebanyak 297.331 orang, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 599.167 orang, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan 845.698, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 277.941 dan pada Tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 337.343 orang.

2.1.4.2.12 Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah belum

A. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe dari Tahun ke Tahun terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.118
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Aktif	120	100	105	100	100
2	Jumlah Koperasi	299	257	251	251	251
	Persentase	40,13	38,91	41,83	39,84	39,84

Sumber: Disperindagkop, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 persentase koperasi aktif di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 39.84 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan jumlah koperasi dari Tahun-Tahun sebelumnya.

B. Jumlah BPR / LKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan terus terjadi penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UKM Non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe terus meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.119
Jumlah BPR/LKM
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Seluruh UKM	1318	2314	2361	2372-	2372
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	10	15	15

Sumber: Disperindagkop, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 jumlah Usaha Kecil Menengah mencapai 2372 UKM, terjadi peningkatan dari Tahun-Tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada Tahun 2015 sebanyak 4 BPR dan bertambah menjadi 15 di Tahun 2019.

2.1.4.2.13 Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tabel 2.120
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Investor	154	205	257	266	270

Sumber: DPMTSPNAKER, 2020.

Pada Tahun 2015 jumlah investor untuk PMDN berjumlah 154 hingga Tahun 2019 semakin meningkat dengan jumlah 270. Khusus untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor.

B. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 Tahun di Kota Lhokseumawe. Angka tertinggi mencapai Rp.3.386.437.000.000 pada Tahun 2016. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.121
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	URAIAN	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2015	Jumlah investasi	2.237.000.000.000	-	2.237.000.000.000
2016	Jumlah investasi	3.370.451.771.247	-	3.370.451.771.247
2017	Jumlah investasi	3.373.624.221.247	-	3.373.624.221.247
2018	Jumlah investasi	3.379.911.000.247		3.379.911.000.247
2019	Jumlah investasi	3.389.251.025.247	-	3.389.251.025.247

Sumber: DPMTSPNAKER, 2020.

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMDN/PMA setiap Tahunnya semakin meningkat dengan jumlah PMDN/PMA yang juga meningkat setiap Tahunnya.

Tabel 2.122
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMA/PMDN	4	251	93	7.989	7.757
		4.00	8.96	5.17	76.09	8.76

Sumber: DPMTSPNAKER, 2020.

2.1.4.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain. Organisasi pemuda di Kota Lhokseumawe hingga Tahun 2019 berjumlah 50 namun yang tidak aktif berjumlah 10 yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Gampong. Berikut data Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.123
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	32	36	38	42	50
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	44	48	50	53	60
Persentase		72	75	76	79	83

Sumber: Disporapar, 2020.

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.124
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	4	5	10	11	11
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar	38	39	39	40	40
Persentase		10.52	12.82	25.64	27.5	27.5

Sumber: Disporapar, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pembinaan cabang olahraga di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 27.5 persen dari total cabang olahraga yang ada di Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 32 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2016 adalah 146. Berikut tabel 2.123 cakupan pelatih yang bersertifikasi:

Tabel 2.125
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pelatih bersertifikat	32	32	33	33	33
2	Jumlah seluruh pelatih	132	146	146	146	148
Persentase		24.24	21.91	22.60	22.60	22.29

Sumber: Disporapar, 2020.

2.1.4.2.15 Statistik

A. Buku “Kabupaten/Kota Dalam Angka”

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan pada setiap Tahun merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

B. Buku “PDRB Kabupaten/Kota”

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap Tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

2.1.4.2.16 Kebudayaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya serta benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.126
Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe

No	Kegiatan
1	Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
2	Pengirim Tim Kesenian Ke LN
3	Anugerah Budaya
4	Audisi Paduan Suara GBN
5	Festival dan Lomba Karya Seni
6	Festival Permainan Rakyat
7	Hari Kesenian Daerah
8	Festival Rapai Uroeh
9	Festival Seudati
10	Festival Cut Bang Cut Kak
11	Festival Lomba Seni Lukis
12	Festival Lomba Lagu Qasidah
13	Festival Seni Budaya Islami
14	Festival Lomba Syiar Budaya Islam
15	Festival Seni Budaya Antar Sekolah
16	Audisi Penyanyi Cilik
17	Pelatihan Pengembangan Kesenian
	Total

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Dari tabel diatas dapat tergambarkan bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 17 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan untuk tiap Tahunnya.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.125 berikut ini:

Tabel 2.127
Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No	Lokasi	Makam	Tugu	Monumen/ Museum	Benteng	Tempat Bersejarah	Jlh
1	Kec. Banda Sakti	1 Tgk. Lsm 2 Tgk. Chik Ditunong			1 Kurok- Kurok	1 Meriam Belanda 2 Tiang Gantung Tgk. Chik Ditunong 1 Mon Tujuh	5
2	Kec. Muara Dua	1 Tgk. Chik Buket Krueng	1 Pahlawan TKR	1 P. Ramli			4
3	Kec. Blang Mangat	1 Tgk. Abdul Jalil	1 Tgk. Abdul Jalil				2
4	Kec. Muara Satu	1 Taufik saleh 2 Putroe Neng 3 Tgk. Siah Hudam 4 Tgk. Chik Dipaloh 5 Tgk. Jeurat Meuindram				1 Gua Jepang	6
Jumlah		9	2	1	1	4	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki situs/bangunan cagar budaya untuk makam terdapat sebanyak 9 (sembilan), tugu sebanyak 2 (dua), benteng sebanyak 1 (satu) unit dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat), jadi jumlah situs/ bangunan cagar budaya Kota Lhokseumawe seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) unit.

2.1.4.2.17 Perpustakaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 5 jenis perpustakaan di Kota Lhokseumawe. Rincian data jumlah gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.128
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Nama Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2
3	Perpustakaan Sekolah	26	26	26	26	26
4	Perpustakaan Rumah Ibadah	9	9	9	9	9
5	Perpustakaan Pesantren	2	2	2	2	2
	Jumlah Perpustakaan	40	40	40	40	40
	Jumlah Penduduk	191,407	195,186	198.980	203.284	203.284
	Rasio	0.0209	0.0205	0.0201	0.0197	0.0197

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020.

Tabel di atas menjelaskan bahwa sejak Tahun 2015-2019 jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe terdapat 40 perpustakaan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio perpustakaan terhadap satuan penduduk mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2015 rasio sebesar 0.0209, Tahun 2016 rasio sebesar 0.0205, Tahun 2017 rasio sebesar 0.0201, Tahun 2018 rasio sebesar 0.0197 dan Tahun 2019 rasio sebesar 0.0197.

2.1.4.2.18 Kearsipan

A. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan memegang peran penting bagi kelancarannya organisasi, dimana pengelolaan arsip secara baku dapat menjadi sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Kearsipan merupakan suatu proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, bahwa dari periode 2012-2016 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku hanya 15.6% dari Jumlah 32 SKPD. Berikut tabel data jumlah pengelolaan arsip secara baku di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.129
Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah Pengunjung				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku	5	5	5	5	5
2	Jumlah SKPD	32	32	33	33	34
Persentase		15.63	15.63	15.15	15.15	14.71

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020.

2.1.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.4.3.1 Pariwisata

A. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.130
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lokasi	Ket
1.	Wisata Alam a. Pantai Ujon Blang b. Pulau semadu c. Pantai pulo daruet	Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Muara Satu Kecamatan Muara Dua	
2.	Wisata Budaya/Spiritual a. Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang b. Gua Jepang cot Panggoi c. Meriam Belanda d. Tugu Pahlawan TKR e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng f. Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong g. Mon tujuh h. Makam Tgk. Dihokseumawe i. Makam Tgk. Chik Ditunong j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng k. Makam Mualim Taufik Shaleh l. Makam Putroe Neng m. Makam Tgk. Syiah Hudam n. Makam Tgk. Chik Dipaloh o. Makam Tgk. Jrad Meuindram p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng q. Museum P. Ramli	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) Gp. Blang Panyang (Muara Satu) Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat) Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) Gp. Mesjid (Blang Mangat) Gp. Banda Masen (Banda Sakti) Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) Gp. Blang Buloh (Blang Mangat) Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Paloh (Muara Dua)	
3.	Wisata Buatan a. Reservoir (Waduk) b. Taman Riyadah c. Taman Mangat Cerita d. Waduk Jeulikat	Gp. Pusong (Banda Sakti) Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Blang Mangat Kecamatan Blang Mangat	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

B. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe secara terus-menerus berusaha mengaktifkan dan mendorong semua sektor agar masing-masing sektor dapat memberi masukan yang optimal. Salah satu sektor yang perlu didorong secara terus-menerus adalah sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.131
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	70462.2	80582	96713.6	123630.1	153969.5
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
	Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)	0.92	1.04	1.20	1.46	1.73
	Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)	1.12	1.24	1.44	1.76	2.07

Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa Migas sejak Tahun 2012-2016 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2012 kontribusi pariwisata terhadap PDRB Tanpa Migas sebesar 1.05 persen turun hingga menjadi 1.01 persen pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 1.09 persen. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB Migas cenderung mengalami kenaikan setiap Tahunnya sejak 2012 hingga Tahun 2016.

2.1.4.3.2 Pertanian

A. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika memasukkan komponen migas pada Tahun 2014 dan 2015 masih didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih belum begitu mengembirakan. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti terdiskripsikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.132
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	516413.7	529818.9	542572.7	567783.3	599904.7
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		6.76	6.86	6.72	6.71	6.74
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		8.24	8.18	8.08	8.11	8.08

Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

B. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kelompok petani yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB dengan migas dan PDRB non migas pada Tahun 2016 adalah Kecamatan Blang Mangat, yaitu sebesar 33,98% dan Kecamatan Muara Dua sebesar 30,10%. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Blang Mangat di dominasi sektor pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.133
Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Sektor	PDRB Migas		PDRB Non Migas	
	2019		2019	
	Kel	%	Kel	%
Kecamatan Banda Sakti	23	10.6%	23	10.6%
Kecamatan Muara Satu	56	25.7%	56	25.7%
Kecamatan Muara Dua	69	31.7%	69	31.7%
Kecamatan Blang Mangat	70	32.1%	70	32.1%
Jumlah	218	100%	218	100%
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas	0,001		0,002	

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, BPS 2020.

C. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima Tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi sejak 2015 hingga 2019. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2016 dan 2017, sementara itu, pada Tahun 2018 dan 2019 komoditi padi menurun secara signifikan hingga sebesar sepertiga dari kondisi sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.134
Produktivitas Komoditas Pangan
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019

No.	KOMODITI	PRODUKSI (Kg)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	10578000	15333000	15333000	9954000	9954000
2	Jagung	-	198000	198000	-	-
3	Ubi Kayu	2550000	317000	317000	1764000	1764000
4	Ubi Jalar	24000	-	-	-	-
5	Kedelai	-	20000	20000	-	-

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2016-2020.

2.1.4.3.3 Perdagangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2012 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 15,76% dengan migas, sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 29,29%. Angka ini terus mengalami peningkatan yang berarti khususnya pada sektor migas, sementara itu kontribusi pada tanpa migas mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.135
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sektor Perdagangan	1508861.4	1515851.6	1523096.2	1546120.1	1548878.4
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		19.76	19.61	18.87	18.26	17.39
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		24.06	23.42	22.67	22.07	20.86

Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

2.1.4.3.4 Perindustrian

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 3,66%. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan memasukkan migas

hampir setengahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.136
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sektor Industri	1301452.3	1154623.1	1201646	1288992	1315362
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		17.04	14.94	14.89	15.23	14.77
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		20.75	17.84	17.89	18.40	17.71

Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

2.1.4.3.5 Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel produksi perikanan:

Tabel 2.137
Produksi Perikanan Budidaya
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi Ikan (ton)	2.914.500	2.990.800	3.182.490	3.703.650	3.604.500
2	Target Daerah (ton)	3.850.600	3.980.700	3.900.420	4.035.000	4.450.000
Persentase		75.69%	75.13%	81.59%	91.79%	81.00%

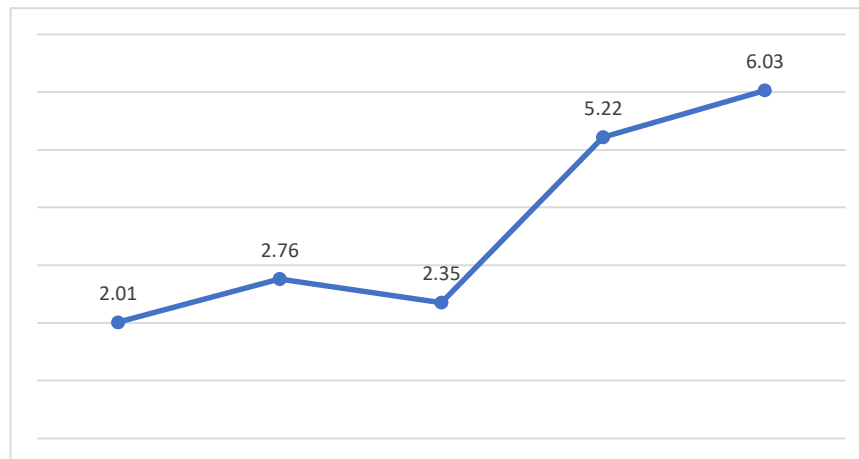
Sumber: DKPPP, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi perikanan budidaya sejak Tahun 2015-2019 terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 91.79%, Semakin tinggi produksi budidaya ikan akan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian masyarakat. Untuk jenis ikan yang umumnya dilakukan petani tambak di wilayah Kota Lhokseumawe adalah ikan bandeng, selebihnya ikan mujair dan Sebagian kecil berbagai jenis udang.

B. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Sub kategori perikanan rata-rata tiap tahun nilainya terus meningkat dikarenakan wilayah Lhokseumawe yang berbatasan dengan lautan/pantai. Pengembangan sub kategori perikanan di Kota Lhokseumawe harus menjadi sektor unggulan untuk jangka waktu pendek, menengah maupun Panjang yang akan memberikan dampak peningkatan perekonomian Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Gambar 2.32
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe, 2015-2019.

2.1.4.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.4.4.1 Perencanaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang

bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7 Tahun 2019.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud guna mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara rutin dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh Organisasi perangkat daerah sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap Tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD.

Selama periode 2017 sampai dengan 2022 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), dimana RKPD tersebut merupakan penjabaran dari program RPJMD Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD merupakan bahan penyusunan RAPBD. Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. RKPD berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan OPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD.

D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah serta menjadi acuan lokasi investasi kota baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Disamping itu, RTRW dimaksudkan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serta arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2014.

2.1.4.4.2 Keuangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh *fraud* tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), berbeda dari Tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat permasalahan pada Tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara Neraca *unaudited* dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reviu Inspektorat.

2.1.4.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal

Tabel 2.138
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	177			
2	Jumlah Total ASN	4311	4351			
Persentase		0.14	4.07			

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 dari 4311 orang ASN di Kota Lhokseumawe baru 0.14% yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal atau hanya 6 orang ASN.. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur.

B. Persentase Pejabat ASN Mengikuti DIKLAT Struktural

Jumlah total jabatan struktural dalam wilayah Kota Lhokseumawe tiap tahunnya terus meningkat dari tahun 2015 hanya 454 orang hingga di tahun 2019 mencapai 518 orang. Sejak periode 2015-2019 jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural di tahun 2016 hanya mencapai 27.57% yang merupakan angka tertinggi dengan 134 orang yang mengikuti diklat struktural tersebut dari total jabatan 486 dan tahun 2015 merupakan angka terendah hanya mencapai 2.86% dari total jabatan 454 hanya 13 orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural.

Pada tahun 2017 s.d 2019 terus terjadi penurunan persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural hingga mencapai 21.43% tahun 2017, 18.70% tahun 2018 dan hanya mencapai 15.64% di tahun 2019. Berikut tabel persentase pejabat ASN mengikuti Diklat Struktural Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019.

Tabel 2.139
Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota
Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti					
	- PIM II	-	3	3	2	2
	- PIM III	6	26	20	20	17
	- PIM IV	7	105	91	70	62
2	Jumlah Total Jabatan	454	486	532	492	518
Persentase		2,86%	27,57%	21,43%	18,70%	15,64%

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020.

C. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan struktural dan struktural di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2018 menunjukkan penambahan setiap tahunnya, namun di tahun 2019 terjadi penurunan. Total jumlah jabatan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu pada tahun 2015 mencapai 1.190 merupakan jumlah terendah, tahun 2016 mencapai 1.242, tahun 2017 mencapai 2.256, tahun 2018 mencapai 2.433 orang yang merupakan jumlah tertinggi dan pada tahun 2019 turun hingga mencapai 2.105 orang. Posisi dan jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kota Lhokseumawe ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut tabel Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.140
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	29	31	31	31	31
2	Jabatan Administrasi	115	127	124	124	120
3	Jabatan Pengawas	310	348	327	330	330
4	Jabatan Fungsional Tertentu	736	736	1.774	1.948	1.624
	Jumlah Jabatan	1.190	1.242	2.256	2.433	2.105

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020.

2.1.4.4.4 Pengawasan

A. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Tabel.141
Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	CC	CC	CC

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 terus menerus memperoleh predikat CC. Untuk kedepan akan diupayakan terus perbaikan predikat agar dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

B. Level Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan kementerian/lembaga pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel.2.142
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2 dengan Catatan	Level 2 dengan Catatan	Level 3 dengan catatan	Level 3

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat tingkat Capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 berada pada tingkat level 2 dimana prose audit dilakukan secara tetap, rutin, beruang namun sebagian telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi, Tahun 2018-2019 berada pada level 3 hal ini menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome apip mampu menilai efiesiesi, efektifitas dan ekonomis suatu program mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

C. Tingkat Kematangan SPIP

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan secara memadai diperbaharui untuk memenui keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola. Untuk capaian tingkat kematangan SPIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.143
Capaian Tingkat Kematangan SPIP Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Level Kapabilitas APIP	-	-	Level 1	Level 2	Level 2

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat Capaian tingkat kematangan SPIP dari Tahun 2015-2016 belum ada pencapaian, sedangkan pada Tahun 2017 pada level 1, dan Tahun 2018-2019 berada pada level 2. Peningkatan ini terus diupayakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

2.1.4.5 Fokus Urusan Keistimewaan dan Kekhususan

2.1.4.5.1 Syariat Islam

A. Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah

Perkembangan dayah di Kota Lhokseumawe dari Tahun ke Tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan Agama Islam. Kondisi ini sudah mencapai rata-rata jumlah dayah seluruh Aceh. Jika merujuk pada RPJMA 2017-2022 jumlah dayah seluruh Aceh pada Tahun 2014 adalah 1.065 dayah, sehingga untuk jumlah dayah di Kota Lhokseumawe sudah cukup baik. Berikut tabel yang merinci jumlah dayah, kepemilikan, dan guru dayah di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.144
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

Tipe	Kepemilikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Yayasan	7	9	11	12	14
	Pribadi	0	0	0	0	0
B	Yayasan	6	9	9	14	15
	Pribadi	0	0	0	0	0
C	Yayasan	30	29	36	35	36
	Pribadi	0	0	0	0	0
D	Yayasan	0	0	0	0	0
	Pribadi	0	0	0	0	0
Jumlah Dayah		43	47	56	61	65
Jumlah Guru Dayah		423	487	492	512	550

Sumber: Dinas Syariat Islam, 2020.

Tabel di atas menggambarkan kondisi jumlah dayah dan guru dayah di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2019. Dayah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 berjumlah 43 dayah yang terdiri dari 7 dayah tipe A, dan 6 dayah tipe B dengan jumlah guru berjumlah 423 orang. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2019 jumlah dayah di Kota Lhokseumawe berjumlah 65 dayah, dengan tipe A sebanyak 14 dayah, Tipe B 15 dayah, dan Tipe C sebanyak 36 dayah, dengan jumlah guru sebanyak 550 orang. Keseluruhan dayah tersebut semuanya berada di bawah kepemilikan yayasan.

B. Jumlah Hafiz Hafizah yang di Bina

Tabel 2.145
Jumlah Hafiz Hafizah yang diBina
Tahun 2015-2019

NO	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hafizh hafizah	20	20	10	15	15
Jumlah Hafizh Hafizhah		20	20	10	15	15

Sumber: Dinas Syariat Islam, 2020.

Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah hafiz hafizah Kota Lhokseumawe yang mendapat pembinaan ditahun 2015 sebanyak 20 orang, tahun 2016 sebanyak 20 orang, tahun 2017 sebanyak 10 orang, tahun 2018 sebanyak 15 orang dan tahun 2020 sebanyak 15 orang

2.1.4.5.2 Majelis Ulama

Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah Ulama dan Sosialisasi Fatwa.

A. Pendidikan Kader Ulama (PKU)

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe telah menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak dua kali, yaitu pada Tahun 2015 dan 2019, dimana pada Tahun 2015 peserta yang mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak 12 orang, peserta yang ikut berpartisipasi dalam PKU semuanya laki-laki. Pada Tahun 2019 Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU), jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 30 orang, semua peserta umumnya laki-laki. Berikut tabel data pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Tabel 2.146
Jumlah Peserta PKU
Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019

No	Tahun	Jumlah Peserta		Keterangan
		Lk	Pr	
1	2015	12 (Orang)	-	
2	2016	20 (Orang)	-	
3	2017	30 (orang)	-	
4	2018	30 (orang)	-	
5	2019	30 (orang)	-	

Sumber : MPU 2020

B. Musyawarah Ulama

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.142 dibawah ini:

Tabel 2.147
Kegiatan Musyawarah Ulama
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sidang Paripurna Ulama	36	42	30	32	40	180
2	Rapat koordinasi MPU	0	3	3	2	2	10
4	Nadwah/Muhasah Ilmiah	1	1	1	1	1	5
5	Muzakarah masalah Keagamaan	1	1	1	1	1	5
6	Pengkajian Aliran Sempalan	-	-	-	-	-	-
7	Rapat Pimpinan MPU	8	7	6	7	5	33
	Jumlah	46	54	41	43	49	233

Sumber : Sekretariat MPU, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2015-2019 kegiatan musyawarah ulama di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sebanyak 233 kali, dimana pada Tahun 2015 sebanyak 46 kali, Tahun 2016 sebanyak 54 kali, dan Tahun 2019 sebanyak 49 kali. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi Sidang Paripurna Ulama dilakukan sebanyak 180 kali, Rapat Koordinasi MPU sebanyak 10 kali, Nadwah/Muhasah Ilmiah sebanyak 5 kali, Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 5 kali, dan Rapat Pimpinan MPU sebanyak 33 kali.

C. Sosialisasi Fatwa

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe hingga saat ini belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa hasil dari kesepakatan para ulama terkait masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, dikarenakan MPU Kota Lhokseumawe belum pernah mengeluarkan fatwa. Karena fatwa – fatwa tentang fenomena sekarang yang berkembang dalam masyarakat sudah dikeluarkan oleh MUI dan MPU Aceh, serta disosialisasikan oleh MUI Pusat dan MPU Aceh, melalui media televisi, surat kabar ataupun media sosial.

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita. PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan, Tahun 2012 Rp.930.300, dan Tahun 2016 Rp.1.054.900-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Lhokseumawe semakin meningkat, namun nilai ini masih dibawah rata- rata Provinsi Aceh (Tahun 2016; Rp 1.108.347,-) Pengeluaran perkapita per bulan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam grafik pada gambar 2.32 berikut:

Gambar 2.33
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

2.1.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kodisi Kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitas wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah rumah tangga Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 yang mendapat akses air bersih melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 1.719 rumah tangga atau sebesar 3.89 persen. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih karena PDAM baru membuat jaringan pipa air untuk wilayah kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.143 berikut ini:

Tabel 2.148
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT)
Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	-	-	-	-	1,719
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	4.35	4.23	4.22	3.97	3.89

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

B. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan yang sangat berarti yaitu sebesar 12,32 persen, pada Tahun 2015 persentase rumah tangga yang berlistrik sebesar 99,14 persen, sedangkan pada Tahun 2009 yaitu 86,82 persen, dengan demikian jumlah rumah tangga yang belum menggunakan listrik di Aceh sebanyak 9.830 unit atau sebesar 0,86 persen. Secara rinci persentase rumah tangga berlistrik di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe)	34,978	36,081	37,632	39,267	40,828
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	88.42	88.81	92.40	90.67	92.44

Sumber : Publikasi PLN (analog & upb) 2020.

2.1.5.3 Fokus Iklim Investasi

Kondisi iklim investasi di Kota Lhokseumawe dapat diamati dengan melihat beberapa faktor antara lain angka kriminalitas yang tertangani, angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka

A. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tindak kejahatan yang terjadi di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami peningkatan, tindak kejahatan yang terjadi dikelompokkan dalam dua katagori besar yaitu kelompok tindakan kriminal biasa yang merupakan kasus pencurian, penipuan, perompakan, pembunuhan, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain, sedangkan yang dikelompokkan dalam kelompok Kriminal Narkoba yang berupa kasus Ganja dan Sabu-sabu dan zat adiktif lainnya.

Tabel 2.150
Angka Kriminalitas
Kota Lhoksumawe Tahun 2015-2019

Uraian Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pembakaran	7	20	-	3	0
Kebakaran	11	20	-	0	2
Penculikan	2	4	-	1	0
Penghinaan	1	3	-	2	0
pembunuhan	3	2	6	4	0
Penganiayaan	43	37	1	3	20
Pencurian	131	6	83	6	90
Pemerasan	15	12	2	2	0
Pengelapan	29	0	84	1	12
Penipuan	82	0	3	7	11
KDRT	19	33	1	1	3
perjudian	11	0	-	5	0
Perkosaan	7	1	3	4	0
perzinaan	1	3	5	8	0
Jumlah/Total	362	141	188	47	119
Jumlah Penduduk	191.407	195.186	198.980	203.284	203.284
Angka Kriminalitas (Per 10.000)	18.91	7.22	9.44	2.31	5.85

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 cenderung meningkat di Tahun 2019 untuk kasus pencurian dan penganiayaan. Kondisi ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi iklim investasi di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2015 angka kriminalitas per satuan penduduk sebesar 18.91, hingga akhir Tahun 2019 menurun menjadi 5.85. Masih tetap dibutuhkan usaha-usaha yang konkrit dari semua elemen pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif dalam rangka mendorong iklim investasi.

B. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Melihat angka partisipasi angkatan kerja ditentukan melalui perbandingan antara yang bekerja dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas pada suatu daerah. Dari Tahun 2015-2019 Angka partisipasi angkatan kerja Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.151
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	190.75	197.91	199.12	200.27	201.15
	Usia 15 Tahun	0	5	0	6	6
2	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Ke Atas	58.804	65.454	67.388	67.857	77.021
Angka Partisipasi Angkatan Kerja		30.83	33.07	33.84	33.88	38.29

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya menunjukkan peningkatan. Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2019 sebesar 38.29 meningkat dari Tahun sebelumnya yang mencapai 33.38.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe berkurang drastis pada Tahun 2019. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Berikut tabel 2.151 data tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.152
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	TPT	10,88	7,46	11,20	13,06	10,51
2	TPAK	55,34	56,77	59,10	59,38	60,22

Sumber : Statistik daerah, BPS Lhokseumawe 2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak Tahun 2018-2019 menunjukkan angka penurunan, dimana pada Tahun 2018 TPT sebesar 13.06 turun menjadi 10.51 pada Tahun 2019. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya sejak Tahun 2015-2019. TPAK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah 60.22. Indikator yang menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) dari penduduk usia kerja ini meningkat dari Tahun sebelumnya yang mencapai 59.38.

2.1.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam aspek daya saing suatu daerah. Beberapa hal yang menjadi indikator dalam mengamati kondisi sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe antara lain Rasio Ketergantungan dan Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

A. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumae dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.153
Rasio Ketergantungan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Ketergantungan	50,91	53,10	52,33	52,13	51,90

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2020.

Tabel di atas menjelaskan bahwa Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe menunjukkan penurunan. Tahun 2019 Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe mencapai 51.90 persen, turun dari Tahun sebelumnya yang mencapai 52.13 persen.

B. Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang disusun untuk kurun waktu 20 Tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain:

- a. dalam Konteks Nasional Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- b. fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan kota-kota *hinterland* disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi.

Dengan demikian sistem pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.154
Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2015- 2019

No	Fungsi Pelayanan	Pusat Kegiatan	Keterangan
1	Pusat Kegiatan Nasional	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya (wilayah Kab. Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara dan Muara Batu)
2	Pusat Pelayanan Kota	Keude Cunda	Kecamatan Muara Dua
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	Lhokseumawe	Pusat Kecamatan Banda Sakti
		Kandang	Pusat Kecamatan Muara Dua
		Batuphat Timur	Pusat Kecamatan Muara Satu
		Keude Peunteuet	Pusat Kecamatan Blang Mangat
4	Pusat Lingkungan	Lhokseumawe Selatan	Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan
		Lhokseumawe Utara	Pusat Mukim Lhokseumawe Utara
		Kandang	Pusat Mukim Kandang
		Cunda	Pusat Mukim Cunda
		Paloh Timur	Pusat Mukim Paloh Timur
		Paloh Barat	Pusat Mukim Paloh Barat
		Meuraksa	Pusat Mukim Meuraksa
		Peunteuet	Pusat Mukim Peunteuet
		Mangat Makmu	Pusat Mukim Mangat Makmu

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2023

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi RPJMK

2.2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2018

Untuk melihat keberhasilan pembangunan Kota Lhokseumawe Secara makro ditunjukkan oleh tingkat capaian indikator pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target indikator pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2019 digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan Kota Lhokseumawe.

Terdapat 7 (tujuh) jenis indikator yang ditetapkan dalam dokumen RKPA Tahun 2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan sebagian dari yang diproyeksikan pada Tahun 2018 telah mencapai target (warna hijau) sedangkan sebagian indikator lainnya tidak tercapai (warna kuning). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.155

Tabel 2.155
Capaian Indikator Makro Tahun 2018 terhadap Target RKPK 2019

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Target	Capaian
		2016	2017	2018	2018
PDRB (ADHK)					
Migas	Rp (Milyar)	6.460.408,2	6.591.663,2	6.763.080,6	6.837.195,7
Tanpa Migas	Rp (Milyar)	5.429.221,0	5.520.251,7	5.650.624,6	5.684.010,6
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (ADHK)					
Migas	%	-1,52	2,19	4,2	3,72
Tanpa Migas	%	0,96	1,86	5,5	2,97
Tingkat Inflasi	%	2,25	1,69	2,60	1,05
Struktur PDRB Pendekatan Produksi/Sektoral					
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	8,59	8,88	0,33	9,02
Pertambangan dan Penggalian	%	0,44	0,39	0,01	0,36
Industri Pengolahan	%	18,30	18,97	-2,08	19,48
Pengadaan Listrik, Gas	%	0,15	0,16	0,04	0,17

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Target	Capaian
		2016	2017	2018	2018
Pengadaan Air	%	0,01	0,01	0,00	0,01
Konstruksi	%	15,91	14,43	-0,54	14,23
Perdagangan Besar dan Ecaran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	23,18	22,78	0,44	22,39
Transportasi dan Pergudangan	%	11,88	11,50	0,08	10,87
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	%	1,25	1,53	0,14	1,82
Informasi dan Komunikasi	%	3,43	3,39	0,37	3,28
Jasa Keuangan	%	2,62	2,84	0,07	2,83
Real Estate	%	4,11	4,34	0,18	4,52
Jasa Perusahaan	%	0,92	0,95	0,07	0,99
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	%	3,95	4,14	0,29	4,25
Jasa Pendidikan	%	1,23	1,31	0,09	1,39
Jasa Kesehatan	%	2,91	3,05	0,26	3,10
Jasa Lainnya	%	1,15	1,23	0,11	1,26
Struktur PDRB Pengeluaran					
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	%	52,07	53,09	2,40	53,30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	%	1,20	1,27	0,06	1,31
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	%	17,99	17,36	0,22	17,03
Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	50,14	46,37	-1,05	45,94
Perubahan Inventori	%	0,36	1,89	0,08	1,89
Ekspor Neto	%	-21,75	-19,97	-19,47	0,00
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu orang	23,28	24,40	22,48	23,88
Tingkat Pengangguran	%	-	10,51	6,70	12,52

Sumber : BPS

Nilai PDRB Migas dan PDRB Tanpa Migas Kota Lhokseumawe dihitung berdasarkan harga konstan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.450.408,2 juta naik pada tahun 2018 menjadi Rp. 6.837.195,7 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp. 376.787,5 juta.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan harga konstan terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar -1,52 persen naik pada tahun 2018 sebesar 3,72 persen, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari kinerja sektor-sektor diantaranya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang memiliki andil besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe, diikuti sektor jasa pendidikan, sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik dan gas.

Dari sisi pengeluaran, dalam kurun waktu 2016 s.d 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih mendominasi perekonomian Kota Lhokseumawe dengan kontribusinya pada tahun 2018 sebesar 53,30 persen dan menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa membaiknya daya beli masyarakat didorong oleh pola konsumsi masyarakat yang meningkat. Komponen pembentukan modal bruto memiliki distribusi terbesar kedua sebesar 45,94 persen pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2016. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki distribusi terbesar ketiga sebesar 17,03 persen dan mengalami penurunan sejak tahun 2016.

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat ada beberapa hal yang diperhatikan berkaitan dengan capaian indikator pembangunan tersebut, antara lain:

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (ADHK)

Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 3,72 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target proyeksi RKPK Tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKPK Tahun 2019 sebesar 4,2 persen yang berarti bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Upaya pengentasan kemiskinan belum mencapai target, jumlah penduduk miskin yang ditargetkan akan dikurangi pada tahun 2018 belum berhasil dilakukan. Apabila dibandingkan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin telah berkurang dari 24,40 ribu orang turun menjadi 23,88 ribu orang pada tahun 2018.

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang ditargetkan dalam RKPK Tahun 2019 belum bisa mencapai target sebesar 6,70 persen, tingkat pengangguran tahun 2018 sebesar 12,52 persen dan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 10,51 persen ini berarti bahwa pemerintah Kota Lhokseumawe perlu bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

2.2.2. Realisasi terhadap proyeksi kebijakan Keuangan

2.2.2.1. Realisasi Pendanaan

Realisasi pendapatan daerah semester 2 Tahun 2019 sebesar Rp. 854.946.044.977,55,- atau sebesar 1,08 persen dari target proyeksi RKPK tahun 2019 yang sebesar Rp. 791.817.866.000,60,-. Realisasi pendapatan ini meningkat, jika dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 786.821.025.020,00,-. Di sisi belanja daerah, realisasi belanja Kota Lhokseumawe semester 2 Tahun 2019 mencapai Rp.864.514.148.988,45,- atau 1,05 persen dari target proyeksi RKPK Tahun 2019 yang sebesar sebesar Rp. 820.523.489.357,38,-. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada semester 2 tahun 2019 tersebut menyebabkan terjadinya defisit terhadap anggaran sebesar Rp 9,568.104.010,90,-.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.156

Tabel 2.156
Realisasi Pendanaan RKPK Semester 2 Tahun 2019

No	URAIAN	Proyeksi 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Semester 2)	
			(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	791.817.866.000,60	854.946.044.977,55	1,08
2	BELANJA	820.523.489.357,38	864.514.148.988,45	1,05
3	SURPLUS / DEFISIT	(28.705.623.356,78)	(9.568.104.010,90)	0,33

Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)

2.2.2.2. Realisasi Pendapatan

Tingkat realisasi pendapatan semester 2 tahun 2019 terhadap target proyeksi tahun 2019 mencapai 1,08 persen. Jumlah realisasi Pendapatan tertinggi berasal dari Pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 186.246.680.740,69,- atau sebesar 1,81 persen dari total target yang ditentukan., diikuti oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp. 607.297.641.452,- Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe yang mencapai sebesar Rp. 61.401.722.784,86,-.

Pada umumnya Pendapatan Kota Lhokseumawe masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari proyeksi besarnya Pendapatan Kota Lhokseumawe, besarnya persentase Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Total Pendapatan/Penerimaan Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 7,2 persen dari Total Pendapatan hal ini menunjukkan bahwa daerah masih tergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- a. Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen. Sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
- b. Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
- d. Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai diatas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target proyeksi pada RKPK Tahun 2019 mencerminkan bahwa keuangan Kota Lhokseumawe masih tergolong dalam kriteria rendah sekali (kriteria 0-25 persen “rendah sekali”) atau sebesar 8,7 persen dari pagu Pendapatan Kota Lhokseumawe, demikian pula jika dilihat dari capaian realisasi semester 2 tahun 2019 tercatat pendapatan asli daerah sebesar 7,2 persen dari total Pendapatan Kota Lhokseumawe yang berarti bahwa keuangan Kota Lhokseumawe masih tergolong dalam kriteria rendah sekali. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai realisasi pendapatan, dapat dilihat Tabel 2.157

Tingkat realisasi pendapatan semester 2 tahun 2019 terhadap proyeksi RKPK Tahun 2019 diketahui bahwa pendapatan berasal dari pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai pendapatan yang memiliki realisasi tertinggi sebesar 1,81 persen, diikuti oleh Dana Perimbangan sebesar 0,98 persen, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,90 persen.

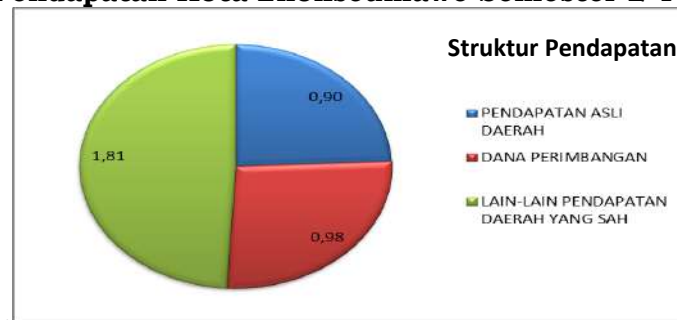
Tabel 2.157
Realisasi Pendapatan RKPK Semester 2 Tahun 2019

No	URAIAN	Proyeksi	REALISASI 2019 (Semester 2)	
		2019 (Rp)	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN	791.817.866.000,60	854.946.044.977,55	1,08
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.518.296.378,29	61.401.722.784,86	0,90
	Pendapatan Pajak Daerah	29.491.475.000,00	28.474.959.318,27	0,97
	Hasil Retribusi Daerah	4.896.105.000,00	3.756.566.496,00	0,77
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.122.200.000,00	5.108.664.333,00	0,39
	Zakat dan Infaq		7.589.863.717,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.008.516.378,29	16.471.668.920,59	0,78
2	DANA PERIMBANGAN	620.259.659.000,00	607.297.641.452,00	0,98
	Transfer Umum	517.467.289.000,00	504.262.665.312,00	0,97
	Transfer Khusus	102.792.370.000,00	103.034.976.140,00	1,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103.039.910.622,31	186.246.680.740,69	1,81
	Pendapatan Hibah	22.842.104.000,00	11.885.280.000,00	0,52
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.292.744.632,31	26.704.399.171,69	1,15
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.905.061.990,00	147.566.670.653,00	2,59
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	90.100.000,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		230.916,00	0,00

Sumber : BPKD Lhokseumawe(diolah)

Berdasarkan strukturnya, realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe semester 2 tahun 2019 didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dengan peranannya sebesar 1,01 persen, diikuti oleh pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dengan peranannya sebesar 0,98 persen, pendapatan asli Kota Lhokseumawe dengan peranannya sebesar 0,90 persen. Gambar 4.1 berikut memberikan gambaran struktur realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe semester 2 tahun 2019

Gambar 2.34
Struktur Pendapatan Kota Lhokseumawe Semester 2 Tahun 2019



Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)

2.2.2.3. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe pada semester 2 tahun 2019 ini mencapai 1,05 persen dari proyeksi. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 0,90 persen lebih rendah dibandingkan Belanja Langsung 1,25 persen terhadap proyeksi RKPK tahun 2019. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.158

Tabel 2.158
Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
RKPK Semester 2 Tahun 2019

No	URAIAN	Proyeksi 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Semester 2)	
			(Rp)	(%)
2	BELANJA	820.523.489.357,38	864.514.148.988,45	1,05
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	459.063.419.072,39	412.032.782.757,45	0,90
2.2	BELANJA LANGSUNG	361.460.070.284,99	452.481.366.231,00	1,25

Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)

Jumlah realisasi Belanja Kota Lhokseumawe semester 2 Tahun 2019 sebesar Rp.864.514.148.988,45,- atau mencapai 1,05 persen dari proyeksi RKPK 2019 yang ditetapkan sebesar Rp.820.523.489.357,38,-. Jumlah realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 412.032.782.757,45,- atau sebesar 0,90 persen rendah dari realisasi belanja langsung yang tercatat sebesar Rp. 452.481.366.231,00 atau sebesar 1,25 persen terhadap proyeksi RKPK 2019.

Realisasi Belanja Tidak Langsung tertinggi berasal dari bantuan sosial, yaitu sebesar 1,62 persen atau sebesar Rp. 7.695.849.500,45,- dari Total Realisasi Belanja Tidak Langsung, diikuti oleh Belanja Hibah sebesar 1,15 persen atau sebesar Rp. 6.228.895.000,00,-, belanja bantuan keuangan kepada Prov/kab/kota dan Pemerintah Desa sebesar 0,91 persen atau sebesar Rp. 109.095.151.414,00,-, dan belanja pegawai sebesar 0,89 persen atau sebesar Rp. 288.883.934.479,00,-.

Realisasi Belanja Langsung tertinggi berasal dari Belanja modal, yaitu sebesar 1,62 persen atau sebesar Rp. 201.817.865.446,00 dari Total Realisasi Belanja Langsung, diikuti oleh Belanja Pegawai sebesar sebesar 1,21 persen atau sebesar Rp.59.380.624.300,00,- dan Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 1,02 persen atau Rp. 191.282.876.485,00,-. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.159

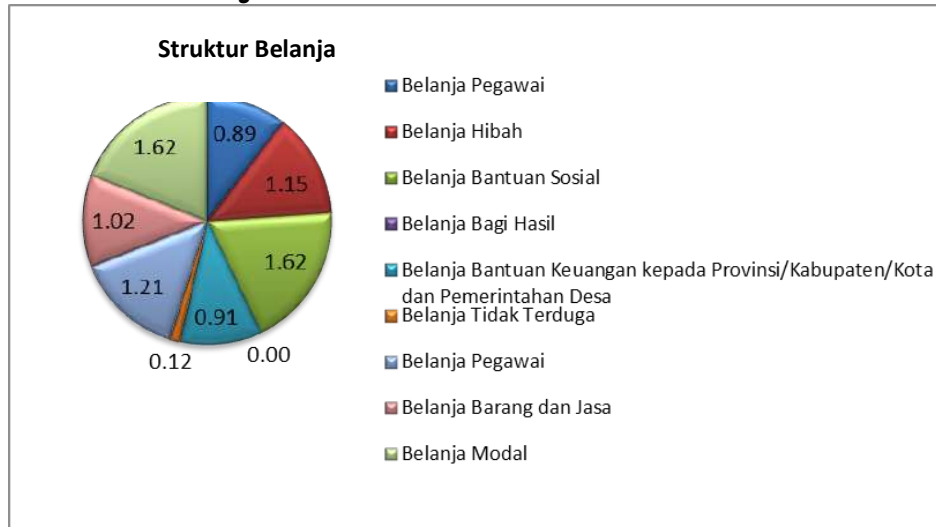
Tabel 2.159
Rincian Realisasi Menurut Jenis Belanja
RKPK Semester 2 Tahun 2019

No	URAIAN	Proyeksi 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Semester 2)	
			(Rp)	(%)
2	BELANJA	820.523.489.357,38	864.514.148.988,45	1,05
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	459.063.419.072,39	412.032.782.757,45	0,90
1	Belanja Pegawai	324.038.661.813,09	288.883.934.479,00	0,89
2	Belanja Hibah	5.400.943.800,00	6.228.895.000,00	1,15
3	Belanja Bantuan Sosial	4.751.202.972,67	7.695.849.500,45	1,62
4	Belanja Bagi Hasil	3.438.758.000,00		0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	120.333.852.486,63	109.096.151.414,00	0,91
6	Belanja Tidak Terduga	1.100.000.000,00	127.952.364,00	0,12
2.2	BELANJA LANGSUNG	361.460.070.284,99	452.481.366.231,00	1,25
1	Belanja Pegawai	49.048.819.070,42	59.380.624.300,00	1,21
2	Belanja Barang dan Jasa	188.091.122.203,91	191.282.876.485,00	1,02
3	Belanja Modal	124.320.129.010,66	201.817.865.446,00	1,62

Sumber : BPKD Lhokseumawe(diolah)

Berdasarkan realisasi semester 2 tahun 2019, struktur realisasi belanja Kota Lhokseumawe didominasi oleh Bantuan Sosial bantuan sosial, yaitu sebesar 1,62 persen, diikuti oleh Belanja modal, yaitu sebesar 1,62 persen, Belanja Pegawai sebesar sebesar 1,21 persen, Belanja Hibah sebesar 1,15 persen, Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 1,02 persen, dan belanja pegawai sebesar 0,89 persen pada Belanja Tidak Langsung.

Gambar 2.35
Struktur Belanja Kota Lhokseumawe Semester 2 Tahun 2019



Sumber : BPKD Lhokseumawe (diolah)

2.2.2.4. Realisasi Pembiayaan

Pada semester 2 tahun 2019, penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu. Dari jumlah yang di proyeksikan sebesar Rp. 29.955.623.357,- terealisasi sebesar Rp 26.959.045.994,79 atau 0,90 persen dari Proyeksi RKPK tahun 2019. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.160

Tabel 2.160
Realisasi Pembiayaan RKPK Semester 2 Tahun 2019

No	URAIAN	Proyeksi 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Semester 2)	
			(Rp)	(%)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.955.623.357	26.959.045.994,79	0,90
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.955.623.357	26.959.045.994,79	0,90
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.250.000.000	1.000.000.000,00	0,80
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.250.000.000	1.000.000.000,00	0,80
	PEMBIAYAAN NETTO	28.705.623.357,00	25.959.045.994,79	0,90

Sumber : BPKD (diolah)

2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi RPJMK Lhokseumawe

2.2.3.1. Metode Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap semester oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPK wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPK setiap semester berdasarkan realisasi DPA SKPK. Evaluasi Hasil RKPK

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap semester berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK.
- b. Evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPK Tahun Berjalan atau RKPK Tahun berikutnya.
- c. Formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah seperti dapat dilihat pada tabel 4.4 yang menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja.

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.

- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 1		Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 2	
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
45,5% ≤ 50%	Sangat tinggi	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
38% ≤ 45%	Tinggi	76% ≤ 90%	Tinggi
33% ≤ 37,5%	Sedang	66% ≤ 75%	Sedang
25,5% ≤ 32,5%	Rendah	51% ≤ 65%	Rendah
≤ 25%	Sangat Rendah	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- 2) Hasil Sedang. Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Khusus Untuk Evaluasi hingga Triwulan ke II, nilai capaian kinerja K dan Rp. Harus dikalikan 2 terlebih dahulu sebelum melihat skala penilaian kinerja.

Catatan :

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.
2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

Setelah Formulir Evaluasi Hasil RKPK diisi, maka diketahuilah tingkat capaian kinerja untuk masing-masing program, masing-masing urusan maupun masing-masing SKPK.

1. Hasil Evaluasi

A. Capaian Anggaran

Capaian anggaran RPJMK 2018-2022 berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 untuk Tahun 2019 yang merupakan tahun kedua masa RPJMK sebesar 64,7 persen dengan kriteria nilai rendah. Kriteria rendah dikarenakan pelaksanaan anggaran masih dalam tahap kedua pelaksanaan RPJMA 2017-2022.

Sedangkan Capaian anggaran RKPK 2019 semester 2 sebesar 71,9 persen dengan kriteria nilai sedang ini disebabkan karena banyak kegiatan yang terdapat dalam renstra OPD yang tidak terlaksana pada tahun 2019. Secara lebih terperinci mengenai kondisi penggunaan anggaran untuk membiaya program/kegiatan (Belanja Langsung) selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.161

Bila dilihat dari konsistensi antara RKPK dan Renstra dalam melaksanakan kegiatan, maka sebanyak 73,3% dari total kegiatan tahun 2019 dilaksanakan oleh OPD konsisten terhadap renstra, serta sebanyak 19,9% dari total kegiatan tahun 2019 masih belum melaksanakan kegiatan yang direncanakan dalam renstra dan sebanyak 6,8% dari total kegiatan tahun 2019 yang melaksanakan kegiatan yang tidak direncanakan dalam renstra tabel 2.162

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, untuk realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target berdasarkan keuangan sebanyak 1178 kegiatan dari 1524 kegiatan seluruh OPD dan realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target berdasarkan keuangan sebanyak 345 kegiatan dari 1524 kegiatan dan hanya 1 kegiatan yang realisasi kegiatannya melebihi target keuangan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.163

Tabel 2.161
Tingkat Capaian Realisasi OPD terhadap RKPK 2019 dan RPJMK

No	Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran RPKMK 2017- 2022	Target Anggaran RKPK Tahun 2019	Realisasi RKPK Semester II Tahun 2019	Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2019 (%)	Predikat Capaian Kinerja RKPK 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMK (2017 s.d Semester II Tahun 2019 (%))
						Rp	Rp	Rp
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	153.061.914.660	71.275.340.605	69.744.042.159	89.460.436.395	79,3%	T	46,1%
2	DINAS KESEHATAN	91.796.698.527	46.298.475.866	36.283.333.552	64.468.752.737	48,1%	SR	59,4%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	792.490.477.840	168.339.830.627	162.182.323.606	277.238.757.806	71,7%	S	21,7%
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.989.562.205	1.201.099.673	1.052.129.694	1.889.640.432	61,1%	R	19,0%
5	Satpol PP & WH	25.420.638.389	6.013.565.447	5.779.841.951	10.801.467.277	56,0%	R	28,2%
6	DINAS SOSIAL	20.097.707.070	2.640.750.822	2.471.133.675	7.666.310.758	80,0%	T	32,6%
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	10.864.456.892	1.723.419.875	1.645.956.950	3.328.434.047	62,2%	R	23,9%

No	Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran RPKMK 2017-2022	Target Anggaran RKPK Tahun 2019	Realisasi RKPK Semester II Tahun 2019	Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2019 (%)	Predikat Capaian Kinerja RKPK 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMK (2017 s.d Semester II Tahun 2019 (%)
						Rp	Rp	Rp
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.978.774.323	4.198.592.725	3.798.737.202	6.615.864.023	63,2%	R	64,1%
9	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	125.779.858.508	5.770.657.227	4.540.266.371	5.528.884.573	26,0%	SR	295,4%
10	DINAS PERTANAHAN	-	402.950.000	384.798.140	384.798.140	81,7%	T	0,0%
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	135.401.345.403	27.611.514.531	27.159.819.583	54.731.064.601	69,3%	S	27,5%
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.423.002.489	2.448.647.200	2.288.430.182	3.961.181.206	75,3%	T	42,3%
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	12.183.880.294	2.078.737.825	1.941.245.670	4.001.677.465	89,1%	T	54,5%
14	DINAS PERHUBUNGAN	17.795.967.301	7.961.866.900	7.806.737.449	10.178.523.354	65,5%	S	89,6%

No	Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran RPKMK 2017-2022	Target Anggaran RKPK Tahun 2019	Realisasi RKPK Semester II Tahun 2019	Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2019 (%)	Predikat Capaian Kinerja RKPK 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMK (2017 s.d Semester II Tahun 2019 (%)
						Rp	Rp	Rp
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	5.808.906.106	3.394.215.265	3.276.290.308	4.234.761.241	83,2%	T	48,1%
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	42.431.916.844	6.428.633.108	5.461.423.284	2.418.182.059	46,2%	SR	377,6%
17	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	11.151.527.598	4.904.151.750	4.250.570.622	6.732.594.310	50,7%	R	52,6%
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.896.887.708	2.277.310.025	1.232.407.194	1.704.588.694	94,7%	ST	39,2%
19	SEKRETARIAT DAERAH	474.252.165.118	54.382.016.706	50.317.205.498	79.762.457.037	90,0%	T	29,3%
20	SEKRETARIAT DPRK	67.043.952.004	19.287.344.696	17.188.483.445	31.440.677.325	86,6%	T	43,9%
21	KECAMATAN BANDA SAKTI	4.109.924.845	920.583.900	903.183.153	1.560.069.318	98,6%	ST	43,8%
22	KECAMATAN BLANG MANGAT	3.323.050.904	917.548.484	714.830.350	1.340.278.925	97,6%	ST	43,5%
23	KECAMATAN MUARA SATU	9.449.737.396	981.167.060	540.057.663	558.878.044	65,0%	R	11,1%

No	Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran RPKMK 2017-2022	Target Anggaran RKPK Tahun 2019	Realisasi RKPK Semester II Tahun 2019	Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2019 (%)	Predikat Capaian Kinerja RKPK 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMK (2017 s.d Semester II Tahun 2019 (%)
						Rp	Rp	Rp
24	KECAMATAN MUARA DUA	12.001.941.695	2.383.354.458	2.347.919.421	3.307.542.267	96,2%	ST	129,7%
25	BADAN PENANGGULANGAN BENDACAN DAERAH	13.046.411.124	3.126.148.588	2.848.459.437	13.533.609.407	66,4%	S	28,9%
26	INSPEKTORAT	11.493.718.932	3.176.308.620	3.102.434.556	5.246.312.360	97,4%	ST	60,8%
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.861.281.389	4.873.350.192	4.201.220.050	7.137.292.475	24,3%	SR	23,8%
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	52.904.305.068	9.157.973.512	3.328.644.867	15.504.615.163	57,9%	R	71,9%
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.383.988.425	1.021.557.080	922.622.110	1.538.105.052	80,4%	T	69,0%
30	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	55.542.076.954	13.617.198.550	13.229.733.560	24.520.050.447	60,9%	R	214,1%
31	SEKRETARIAT MPU	9.708.587.864	1.801.447.100	1.775.754.189	3.407.661.058	78,4%	T	31,3%
32	SEKRETARIAT BAITUL MAL	103.075.231.922	29.271.360.430	19.054.626.204	30.589.419.393	92,4%	ST	26,3%

No	Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran RPKMK 2017-2022	Target Anggaran RKPK Tahun 2019	Realisasi RKPK Semester II Tahun 2019	Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2019 (%)	Predikat Capaian Kinerja RKPK 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMK (2017 s.d Semester II Tahun 2019 (%)
						Rp	Rp	Rp
33	SEKRETRIAT MAA	11.620.785.908	797.287.800	754.632.765	1.321.027.415	55,5%	R	14%
34	SEKRETARIAT MPD	3.472.477.688	901.094.745	881.518.250	1.483.412.650	95,0%	ST	36%
	Jumlah (Rp)	2.349.863.159.393	511.585.501.392	463.410.813.110	777.597.327.454			
	Persentase (%)					71,9%	S	64,7%

Ket :ST = (Sangat tinggi / $91\% \leq 100\%$)

T = (Tinggi / $76\% \leq 90\%$)

S = (Sedang / $66\% \leq 75\%$)

R = (Rendah / $51\% \leq 65\%$)

SR = (Sangat Rendah / $\leq 50\%$)

Tabel 2.162
Tingkat Capaian Realisasi OPD terhadap RKPK 2019 dan RPJMK

No	Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran RPKMK 2017-2022	Target Anggaran RKPK Tahun 2019	Realisasi RKPK Semester II Tahun 2019	Realisasi Anggaran RPJMK (2018 s.d Semester II Tahun 2019)	direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra	direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam renja	tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam Renja
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	153.061.914.660	71.275.340.605	69.744.042.159	89.460.436.395	63	0	26
2	DINAS KESEHATAN	91.796.698.527	46.298.475.866	36.283.333.552	64.468.752.737	68	9	6
3	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	792.490.477.840	168.339.830.627	162.182.323.606	277.238.757.806	32	17	7
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.989.562.205	1.201.099.673	1.052.129.694	1.889.640.432	26	12	2
5	Satpol PP & WH	25.420.638.389	6.013.565.447	5.779.841.951	10.801.467.277	29	20	1
6	DINAS SOSIAL	20.097.707.070	2.640.750.822	2.471.133.675	7.666.310.758	30	3	6
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	10.864.456.892	1.723.419.875	1.645.956.950	3.328.434.047	29	16	2
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.978.774.323	4.198.592.725	3.798.737.202	6.615.864.023	36	18	1
9	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	125.779.858.508	5.770.657.227	4.540.266.371	5.528.884.573	31	57	4
10	DINAS PERTANAHAN	-	402.950.000	384.798.140	384.798.140	0	0	15
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	135.401.345.403	27.611.514.531	27.159.819.583	54.731.064.601	29	6	3
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.423.002.489	2.448.647.200	2.288.430.182	3.961.181.206	37	6	1
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	12.183.880.294	2.078.737.825	1.941.245.670	4.001.677.465	23	6	0
14	DINAS PERHUBUNGAN	17.795.967.301	7.961.866.900	7.806.737.449	10.178.523.354	33	9	3
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	5.808.906.106	3.394.215.265	3.276.290.308	4.234.761.241	29	4	0
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	42.431.916.844	6.428.633.108	5.461.423.284	2.418.182.059	29	9	3
17	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	11.151.527.598	4.904.151.750	4.250.570.622	6.732.594.310	25	8	11
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.896.887.708	2.277.310.025	1.232.407.194	1.704.588.694	29	0	1
19	SEKRETARIAT DAERAH	474.252.165.118	54.382.016.706	50.317.205.498	79.762.457.037	97	16	2
20	SEKRETARIAT DPRK	67.043.952.004	19.287.344.696	17.188.483.445	31.440.677.325	39	1	0
21	KECAMATAN BANDA SAKTI	4.109.924.845	920.583.900	903.183.153	1.560.069.318	24	0	0
22	KECAMATAN BLANG MANGAT	3.323.050.904	917.548.484	714.830.350	1.340.278.925	24	0	0
23	KECAMATAN MUARA SATU	9.449.737.396	981.167.060	540.057.663	558.878.044	24	6	0
24	KECAMATAN MUARA DUA	12.001.941.695	2.383.354.458	2.347.919.421	3.307.542.267	25	1	0
25	BADAN PENANGGULANGAN BENDACAN DAERAH	13.046.411.124	3.126.148.588	2.848.459.437	13.533.609.407	21	1	0
26	INSPEKTORAT	11.493.718.932	3.176.308.620	3.102.434.556	5.246.312.360	30	0	2
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.861.281.389	4.873.350.192	4.201.220.050	7.137.292.475	52	32	1
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	52.904.305.068	9.157.973.512	3.328.644.867	15.504.615.163	66	23	2
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.383.988.425	1.021.557.080	922.622.110	1.538.105.052	35	0	3
30	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	55.542.076.954	13.617.198.550	13.229.733.560	24.520.050.447	35	19	1
31	SEKRETARIAT MPU	9.708.587.864	1.801.447.100	1.775.754.189	3.407.661.058	23	1	1
32	SEKRETARIAT BAITUL MAL	103.075.231.922	29.271.360.430	19.054.626.204	30.589.419.393	19	0	0
33	SEKRETARIAT MAA	11.620.785.908	797.287.800	754.632.765	1.321.027.415	21	8	1
34	SEKRETARIAT MPD	3.472.477.688	901.094.745	881.518.250	1.483.412.650	22	1	0
Jumlah (Rp)		2.349.863.159.393	511.585.501.392	463.410.813.110	777.597.327.454	1135	309	105
Persentase (%)						73,3%	19,9%	6,8%

Sumber: Hasil evaluasi (diolah)

Tabel 2.163
Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2019 Semester II

Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan yang direncanakan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2019 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Rp	Rp	Rp	Semester 1	Semester 2		Rp	Rp				Rp	Rp	Realisasi > =/<
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16			
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas		1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bln	14,100,000	2,220,000	2,190,000	996,000	996,000	1,992,000	91.0%	<	4,212,000	29.9%	P&K
		1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	1,860,441,480	111,516,024	231,760,000	61,072,208	78,614,506	139,686,714	60.3%	<	251,202,738	13.5%	P&K
		1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	1,744,047,375	286,723,875	348,843,875	121,832,875	171,969,000	293,801,875	84.2%	<	580,525,750	33.3%	P&K
		1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bln	220,750,000	36,848,273	44,150,000	21,886,498	14,495,000	36,381,498	82.4%	<	73,229,771	33.2%	P&K
		1	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	90,000,000	17,993,000	17,000,000	8,421,085	3,000,000	11,421,085	67.18%	<	29,414,085	32.7%	P&K
		1	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar Daerah	Bln	689,885,136	179,133,500	147,500,000	59,505,500	87,932,400	147,437,900	99.96%	<	326,571,400	47.3%	P&K
		1	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Jenis	489,099,000	85,850,000	115,500,000	-	108,826,000	108,826,000	94.2%	<	194,676,000	39.8%	P&K
		1	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				115,000,000		102,758,120	102,758,120	89.4%	<	102,758,120	0.0%	P&K
		1	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	UB	175,000,000	33,196,200	53,200,000	21,557,650	31,620,800	53,178,450	99.96%	<	86,374,650	49.4%	P&K
		1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Gedung	185,907,500		151,125,000	-	123,879,000	123,879,000	82.0%	<	123,879,000	66.6%	P&K
		1	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	buku	2,638,520	1,200,000	1,200,000	-		-	0.0%	<	1,200,000	45.5%	P&K

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	1	01	07	02	Penyusunan Perencanaan Otsus/TDBH Migas Urusan Pendidikan	Keg	20,000,000		296,839,000	151,181,200	144,199,000	295,380,200	99.5%	<	295,380,200	1476.9%	P&K
		1	01	10	01	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	buku	32,800,000	-	2,560,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	P&K
		1	01	15	15	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Sekolah	200,000,000		945,000,000		932,650,700	932,650,700	98.7%	<	932,650,700	466.3%	P&K
		1	01	15	18	Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa	Paket	1,024,226,000	552,462,700	775,500,000		772,587,070	772,587,070	99.6%	<	1,325,049,770	129.4%	P&K
		1	01	15	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir		20,000,000		100,000,000		99,402,000	99,402,000	99.4%	<	99,402,000	497.0%	P&K
		1	01	15	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Sekolah	192,000,000	38,000,000	100,000,000		99,372,000	99,372,000	99.4%	<	137,372,000	71.5%	P&K
		1	01	15	71	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Otsus)				1,050,000,000		1,022,057,500	1,022,057,500	97.3%	<	1,022,057,500	0.0%	P&K
		1	01	15	88	Peningkatan Kompetensi Guru Pengelola PAUD Kota Lhokseumawe (OTSUS)				528,910,000		492,310,000	492,310,000	93.1%	<	492,310,000	0.0%	P&K
		1	01	16	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Unit	5,165,343,404	2,490,871,250	1,499,920,000.00	36,944,500	1,451,751,794	1,488,696,294	99.3%	<	3,979,567,544	77.0%	P&K
		1	01	16	14	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Sekolah	284,971,000	359,121,000	205,000,000.00	1,500,000	202,866,203	204,366,203	99.7%	<	563,487,203	197.7%	P&K
		1	01	16	15	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Sekolah		613,594,000	996,500,000.00	-	993,592,000	993,592,000	99.7%	<	1,607,186,000	0.0%	P&K
		1	01	16	18	Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa	Paket	597,500,000	1,195,920,994	2,215,000,000.00	-	2,207,135,650	2,207,135,650	99.6%	<	3,403,056,644	569.5%	P&K
		1	01	16	19	Pengadaan Meubeler Sekolah	Sekolah	987,548,000	486,013,000	600,000,000.00	395,850,000	202,358,320	598,208,320	99.7%	<	1,084,221,320	109.8%	P&K
		1	01	16	20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sekolah	987,548,000	486,013,000	301,000,000.00		299,598,720	299,598,720	99.5%	<	785,611,720	79.6%	P&K
		1	01	16	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	Paket	50,704,800	50,704,800.0	280,000,000	-	278,774,000	278,774,000	99.6%	<	329,478,800	649.8%	P&K
		1	01	16	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir		992,059,424		200,000,000	6,000,000	193,300,000	199,300,000	99.7%	<	199,300,000	20.1%	P&K
		1	01	16	80	Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan SD/MI dan SMP/MTs (OTSUS)				500,000,000	-	489,689,200	489,689,200	97.9%	<	489,689,200	0.0%	P&K
		1	01	16	82	Pengadaan Mobiler Sekolah (OTSUS)				1,110,786,947	-	1,109,573,217	1,109,573,217	99.9%	<	1,109,573,217	0.0%	P&K
		1	01	16	83	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Otsus)				2,677,500,000	-	2,619,392,150	2,619,392,150	97.8%	<	2,619,392,150	0.0%	P&K

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	01	16	87	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung (OTSUS)				1,050,000,000.00	-	980,057,500	980,057,500	93.3%	<	980,057,500	0.0%	P&K
		1	01	16	88	Pelatihan Calon Pengawas Sekolah Tingkat Sd/SMP Kota Lhokseumawe (OTSUS)				600,000,000.00	-	541,492,000	541,492,000	90.2%	<	541,492,000	0.0%	P&K
		1	01	16	89	Pelatihan Guru Tingkat SD dan SMP Kota Lhokseumawe (OTSUS)				546,780,000.00	-	544,980,000	544,980,000	99.7%	<	544,980,000	0.0%	P&K
		1	01	16	92	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (OTSUS)				3,871,500,000.00	-	3,868,278,948	3,868,278,948	99.9%	<	3,868,278,948	0.0%	P&K
		1	01	16	93	Penyelenggaraan UN dan UAS	hari	533,075,000	60,000,000.0	60,000,000	50,070,000	9,180,000	59,250,000	98.8%	<	119,250,000	22.4%	P&K
		1	01	16	96	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (DAK)	sekolah		689,934,000.0	1,783,750,000	-	1,769,700,423	1,769,700,423	99.2%	<	2,459,634,423	0.0%	P&K
		1	01	16	100	Penambahan Ruang Guru Sekolah (Otsus)	sekolah			525,000,000.00	-	513,881,250	513,881,250	97.9%	<	513,881,250	0.0%	P&K
		1	01	16	101	Pelatihan Calon Kepala Sekolah Tingkat SD/SMP Kota Lhokseumawe (Otsus)	Keg			750,000,000.00	-	707,054,800	707,054,800	94.3%	<	707,054,800	0.0%	P&K
		1	01	16	105	Pelatihan Operator Dapodik Tingkat SD dan SMP Kota Lhokseumawe (Otsus)	Keg			540,235,000.00	-	539,485,000	539,485,000	99.9%	<	539,485,000	0.0%	P&K
		1	01	16	109	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung	sekolah	4,039,934,800	677,650,800.0	325,000,000	-	322,900,000	322,900,000	99.4%	<	1,000,550,800	24.8%	P&K
		1	01	16	118	Pembagunan RKB (DAK)	ruang	6,604,500,000	2,234,905,000.0	2,355,169,000	-	2,341,704,700	2,341,704,700	99.4%	<	4,576,609,700	69.3%	P&K
		1	01	16	127	Pengadaan Sarana PJOK dan / Atau Seni Budaya (DAK)	Paket	200,000,000	119,622,000.0	401,000,000	-	399,241,600	399,241,600	99.6%	<	518,863,600	259.4%	P&K
		1	01	16	133	Liga Sepak Bola (GALA) SMP	Keg	510,780,000		60,000,000	27,630,000	32,070,000	59,700,000	99.5%	<	59,700,000	11.7%	P&K
		1	01	16	141	Pengadaan peralatan Laboratorium IPA (DAK)	Paket	224,680,000		301,350,000	-	228,419,800	228,419,800	75.8%	<	228,419,800	101.7%	P&K
		1	01	16	144	Penyusunan Qanun Kurikulum Anti Narkotika Untuk Jenjang Pendidikan Dasar	Sekolah	220,000,000		55,000,000	20,000,000	-	20,000,000	36.4%	<	20,000,000	9.1%	P&K
		1	01	18	24	Pengembangan pendidikan Kecakapan Hidup (Otsus)				588,425,000	25,000,000	551,175,000	576,175,000	97.9%	<	576,175,000	0.0%	P&K
		1	01	18	41	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK)	Paket	230,000,000		50,000,000	25,000,000	24,600,000	49,600,000	99.2%	<	49,600,000	21.6%	P&K
		1	01	18	42	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK)	Paket	1,421,400,000		293,550,000	25,000,000	268,334,550	293,334,550	99.9%	<	293,334,550	20.6%	P&K
		1	01	18	43	Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	Paket	1,421,400,000		50,000,000		49,400,000	49,400,000	98.8%	<	49,400,000	3.5%	P&K
		1	01	18	44	Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB (DAK)				520,861,014	25,000,000	493,694,054	518,694,054	99.6%	<	518,694,054	0.0%	P&K

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	01	18	47	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan (DAK Non Fisik)				829,400,000	25,000,000	167,635,000	192,635,000	23.2%	<	192,635,000	0.0%	P&K
		1	01	20	22	Beasiswa Bagi siswa Berprestasi	Keg			15,000,000	-		-	0.0%	<	-	0.0%	P&K
		1	01	20	22	Pengembangan Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi (OTSUS)	Keg			540,627,523	-	539,927,523	539,927,523	99.9%	<	539,927,523	0.0%	P&K
		1	01	20	53	Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan SMP	Orang	120,000,000		50,000,000	-	47,150,000	47,150,000	94.3%	<	47,150,000	39.3%	P&K
		1	01	20	54	Pelatihan Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran di Kelas	Orang	120,000,000		40,000,000	-	39,700,000	39,700,000	99.3%	<	39,700,000	33.1%	P&K
		1	01	22	40	Belanja Hibah Bansos	Buku	20,000,000		20,000,000	-		-	0.0%	<	-	0.0%	P&K
		2	01	16	11	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Bulan			10,000,000		9,960,000	9,960,000	99.6%	<	9,960,000	0.0%	P&K
		2	01	16	43	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK Non Fisik)	Bulan			450,000,000	4,661,800	355,848,200	360,510,000	80.1%	<	360,510,000	0.0%	P&K
		2	01	17	13	Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	Kegiatan	693,952,000		50,000,000		46,930,000	46,930,000	93.9%	<	46,930,000	6.8%	P&K
		2	01	18	06	Pembinaan Sagar Seni Kota Lhokseumawe	Bulan	106,705,791	94,462,000	50,000,000		48,990,000	48,990,000	98.0%	<	143,452,000	134.4%	P&K
		2	01	18	07	Dewan Kesenian Aceh			97,602,000	25,000,000			-	0.0%	<	97,602,000	0.0%	P&K
		2	01	18	08	Penyelenggaraan Even Adat dan Budaya			97,602,000	229,400,000		227,240,000	227,240,000	99.1%	<	324,842,000	0.0%	P&K
		02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bln	30,000,000	1,200,000	1,494,000	600,000	694,000	1,294,000	86.6%	<	2,494,000	8.3%	Dinkes
		02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	2,370,668,000	447,384,924	624,000,000	343,391,831	264,795,516	608,187,347	97.5%	<	1,055,572,271	44.5%	Dinkes
		02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	1,164,096,000	360,167,639	360,167,639	119,567,639	236,100,000	355,667,639	98.8%	<	715,835,278	61.5%	Dinkes
		02	01	01	08	Penyedia jasa kebersihan kantor	bln	33,840,000	3,432,300	11,750,000	-	3,210,450	3,210,450	27.3%	<	6,642,750	19.6%	Dinkes
		02	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	bln	388,784,475	35,881,863	35,940,816	21,818,790	14,103,525	35,922,315	99.9%	<	71,804,178	18.5%	Dinkes
		02	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bln	104,340,000	2,799,655	2,570,000	-	2,563,000	2,563,000	99.7%	<	5,362,655	5.1%	Dinkes
		02	01	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan perundang undangan	Eks	64,500,000	3,630,000	3,954,000	-	3,204,000	3,204,000	81.0%	<	6,834,000	10.6%	Dinkes

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	bln	127,464,000	32,607,500	29,882,500	-	28,412,500	28,412,500	95.1%	<	61,020,000	47.9%	Dinkes
		02	01	01	20	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	OB	10,516,520,000	2,784,622,558	4,431,087,000	1,847,647,000	2,139,550,000	3,987,197,000	90.0%	<	6,771,819,558	64.4%	Dinkes
		02	01	01	28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran (DBH-PR)				198,000,000	-	197,192,500	197,192,500	99.6%	<	197,192,500	0.0%	Dinkes
		02	01	01	29	Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal				250,000,000	-	235,082,844	235,082,844	94.0%	<	235,082,844	0.0%	Dinkes
		02	01	02	11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	481,408,000	64,281,600	100,000,000	40,900,000	32,694,000	73,594,000	73.6%	<	137,875,600	28.6%	Dinkes
		02	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	58,241,500	34,248,220	30,000,000	-	29,900,000	29,900,000	99.7%	<	64,148,220	110.1%	Dinkes
		02	01	02	23	Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Ub	72,865,725	36,722,750	36,890,000	27,116,000	4,790,000	31,906,000	86.5%	<	68,628,750	94.2%	Dinkes
		02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Ub	962,518,575	539,563,500	623,619,290	209,713,600	249,684,000	459,397,600	73.7%	<	998,961,100	103.8%	Dinkes
		02	01	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Bln	123,320,000	38,172,250	43,110,000	-	39,892,500	39,892,500	92.5%	<	78,064,750	63.3%	Dinkes
		02	01	02	48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH-CHT)	Jenis	1,600,000,000	123,059,500	-	-	-	-	0.0%	<	123,059,500	7.7%	Dinkes
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pasang	2,580,000,000	-	815,491,000	-	784,215,500	784,215,500	96.2%	<	784,215,500	0.0%	Dinkes
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan	02	01	05	60	Penetapan Angka Kredit (DBH-PR)	periode	356,000,000	-	75,297,900	-	72,147,900	72,147,900	95.8%	<	72,147,900	20.3%	Dinkes
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan	02	01	06	11	Penyusunan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	buku	139,000,000	-	17,330,000	-	17,320,000	17,320,000	99.9%	<	17,320,000	12.5%	Dinkes
		02	01	07	02	Penyusunan rencana kerja (renja) satuan kerja perangkat daerah	buku	68,456,000	-	1,180,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	15	07	Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (DAK)	Bulan	10,953,293,503	1,307,382,720	2,853,293,000	-	2,664,589,435	2,664,589,435	93.4%	<	3,971,972,155	36.3%	Dinkes

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	15	17	Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Kelayakan Operasional Alkes (DBH-PR)	Kali	381,000,000	186,657,000	198,000,000	-	6,737,500	6,737,500	3.4%	<	193,394,500	50.8%	Dinkes
		02	01	16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Bulan	2,233,931,994	14,971,860,217.0	14,172,778,215	1,285,521,910	9,637,111,728	10,922,633,638	77.1%	<	25,894,493,855	1159.1%	Dinkes
		02	01	16	28	Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (DBH-PR)	Peserta	45,995,040	-	59,980,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	16	29	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	bulan	242,076,000	121,038,000.0	199,000,000	65,637,000	129,184,000	194,821,000	97.9%	<	315,859,000	130.5%	Dinkes
		02	01	16	32	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Jampersal) (DAK NON FISIK)	bulan	3,051,214,000	9,093,700	577,000,000	-	14,677,380	14,677,380	2.5%	<	23,771,080	0.8%	Dinkes
		02	01	16	33	Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	Puskesmas	1,998,000,000	504,274,275.0	648,000,000	122,516,400	280,605,600	403,122,000	62.2%	<	907,396,275	45.4%	Dinkes
		02	01	16	35	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular kepada masyarakat (DBH-PR)	Peserta	422,500,000	-	65,220,000	-	6,951,900	6,951,900	10.7%	<	6,951,900	1.6%	Dinkes
		02	01	16	36	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH-PR)	Peserta	492,894,000	46,095,595.0	116,680,000	15,000,000	19,290,000	34,290,000	29.4%	<	80,385,595	16.3%	Dinkes
		02	01	16	134	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DBH-PR)	bulan			130,000,000	-	49,700,000	49,700,000	38.2%	<	49,700,000	#DIV/0!	Dinkes
		02	01	16	135	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK NON FISIK)	Bulan	555,160,000		109,580,000	25,600,000	78,080,000	103,680,000	94.6%	<	103,680,000	18.7%	Dinkes
		02	01	16	136	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota (DAK NON FISIK)	Bulan	4,796,466,000		574,000,000	14,440,000	78,109,550	92,549,550	16.1%	<	92,549,550	1.9%	Dinkes
		02	01	16	137	Penyehatan Pangan	kali	1,006,410,000	-	216,410,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	16	138	Pelatihan Perawat CMHN (DBH-PR)	Peserta	661,875,000	-	61,875,000	-	61,774,000	61,774,000	99.8%	<	61,774,000	9.3%	Dinkes
		02	01	16	139	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK NON FISIK)	Bulan	17,120,839,555		3,168,000,000	178,250,900	1,262,917,950	1,441,168,850	45.5%	<	1,441,168,850	8.4%	Dinkes

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	17	14	Pelatihan Peningkatan mutu pangan untuk industri rumah tangga (DBH-PR)	Orang	1,183,945,000	-	133,945,000	-	42,010,000	42,010,000	31.4%	<	42,010,000	3.5%	Dinkes
		02	01	19	40	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Pertama (DBH-PR)	Orang	1,043,500,000	-	74,497,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	19	46	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tinggi (DBH-PR)	Orang	218,900,000	-	53,900,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	19	48	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Dasar (DBH-PR)	peserta	969,500,000	-	69,497,000	-	65,995,000	65,995,000	95.0%	<	65,995,000	6.8%	Dinkes
		02	01	19	53	Pengadaan Media Promosi Kesehatan (DBH-PR)	Jenis	390,000,000	193,810,000	195,000,000	191,800,000	-	191,800,000	98.4%	<	385,610,000	98.9%	Dinkes
		02	01	19	54	Hari Kesehatan Nasional (HKN) (DBH-PR)	Org	196,072,500	95,017,700	50,100,000	-	45,739,500	45,739,500	91.3%	<	140,757,200	71.8%	Dinkes
		02	01	19	69	Peningkatan Pengetahuan Tentang GERMAS di Institusi Menengah Atas (DBH-PR)	Org	681,600,000	-	45,600,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian karena Penyakit DBH-PR	02	01	20	15	Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu (DBH-PR)	Posyandu	43,975,000	197,992,200.0	198,000,000	79,029,600	103,938,000	182,967,600	92.4%	<	380,959,800	866.3%	Dinkes
		02	01	20	16	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (DBH-PR)	Puskesmas	43,975,000	633,669,000.0	663,934,584	149,175,000	382,144,400	531,319,400	80.0%	<	1,164,988,400	2649.2%	Dinkes
		02	01	20	17	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) ; Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro dan Lainnya	Kasus	282,600,000	-	119,998,250	-	71,685,600	71,685,600	59.7%	<	71,685,600	25.4%	Dinkes
		02	01	21	18	Pengukuran Kebugaran Jasmani (DBH-PR)	Peserta	-	-	70,650,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	21	19	Pelatihan Fasilitator STBM (DBH-PR)	Peserta	803,450,000	-	53,450,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	21	20	Pendataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan (DBH-PR)	Peserta	2,027,495,000	-	23,218,137	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	22	62	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (DBH-PR)	Desa	463,658,000	14,249,250.0	234,329,000	-	15,448,800	15,448,800	6.6%	<	29,698,050	6.4%	Dinkes
		02	01	22	84	Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS (DBH-PR)	sekolah	227,500,000	105,350,000.0	79,200,000	-	-	-	0.0%	<	105,350,000	46.3%	Dinkes

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	22	105	Pemilihan Duta Anti Narkoba	Peserta	230,000,000	113,030,000.0	114,000,000	45,868,000	48,910,000	94,778,000	83.1%	<	207,808,000	90.4%	Dinkes
		02	01	22	110	Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS)	Peserta	450,000,000		50,950,000	-	44,116,500	44,116,500	86.6%	<	44,116,500	9.8%	Dinkes
		02	01	22	116	Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Kesehatan Tentang Imunisasi (DBH-PR)	Peserta			108,990,000	99,606,000	-	99,606,000	91.4%	<	99,606,000	0.0%	Dinkes
		02	01	22	125	Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas dan Jejaring dalam Penanggulangan Penyakit Tuberculosis (DBH-PR)	Petugas			50,840,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	22	126	Pengendalian Penyakit (DAK)	PAket			85,017,000	-	58,349,000	58,349,000	68.6%	<	58,349,000	0.0%	Dinkes
		02	01	23	13	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan (DBH-PR)	Orang		-	120,880,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	23	14	Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDMK (DBH-PR)	Orang			66,460,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	25	32	Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan (Dana DAK)	Jenis	8,673,225,660	3,989,235,233	2,204,437,000	-	2,170,855,646	2,170,855,646	98.5%	<	6,160,090,879	71.0%	Dinkes
		02	01	25	42	Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringan (DBH-CHT)	Jenis		420,796,817	358,075,000	-	328,414,183	328,414,183	91.7%	<	749,211,000	0.0%	Dinkes
		02	01	25	47	Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan (OTSUS)	Jenis			3,768,117,235	-	3,631,802,555	3,631,802,555	96.4%	<	3,631,802,555	0.0%	Dinkes
		02	01	25	48	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan (DBH-PR)				45,000,000	-	44,650,000	44,650,000	99.2%	<	44,650,000	0.0%	Dinkes
		02	01	25	49	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan (DBH-PR)				490,000,000	-	394,250,000	394,250,000	80.5%	<	394,250,000	0.0%	Dinkes

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	25	50	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH-PR)				98,000,000	-	91,819,684	91,819,684	93.7%	<	91,819,684	0.0%	Dinkes
		02	01	26	31	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana PSC (OTSUS)	Gedung			2,040,000,000	-	1,959,861,000	1,959,861,000	96.1%	<	1,959,861,000	0.0%	Dinkes
		02	01	26	33	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kesehatan (OTSUS)	Jenis			2,132,000,000	-	2,047,420,000	2,047,420,000	96.0%	<	2,047,420,000	0.0%	Dinkes
		02	01	28	15	Pelayanan Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR)	Anak			135,650,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	28	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana UTD Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jenis			-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	32	19	Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) (DBH-PR)	Org		-	60,350,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	32	34	Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah (DBH-PR)	sekolah		-	72,800,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	32	45	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS (DBH-PR)	Bulan		-	30,305,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	34	17	Penilaian mandiri kualitas data rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Peserta	79,300,000	39,650,000	-	-	-	-	0.0%	<	39,650,000	50.0%	Dinkes
		02	01	34	21	Peningkatan sistem informasi publik kesehatan terpadu terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBR-PR)	Paket	840,000,000	390,121,319	290,000,000	52,502,513	230,224,000	282,726,513	97.5%	<	672,847,832	80.1%	Dinkes
		02	01	34	34	Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBH-PR)	Orang	74,685,000	34,097,500	-	-	-	-	0.0%	<	34,097,500	45.7%	Dinkes
		02	01	34	38	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kesehatan (DBH-PR)	Periode			98,000,000	-	15,044,096	15,044,096	15.4%	<	15,044,096	0.0%	Dinkes
		02	01	34	43	Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR)	Laporan			-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	35	02	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DBH-PR)	Orang			30,610,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinkes
		02	01	35	04	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan (DBH-PR)	Orang			49,510,000	43,831,750	3,500,000	47,331,750	95.6%	<	47,331,750	0.0%	Dinkes
		02	01	35	05	Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan (DBH-PR)	Orang			50,000,000	-	20,942,102	20,942,102	41.9%	<	20,942,102	0.0%	Dinkes
		03	01	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Bulan	13,553,322	1,164,000	2,205,000	-	1,155,000	1,155,000	52.4%	<	2,319,000	17.1%	DPUPR
		03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	1,359,972,076	143,022,706	189,560,000	60,948,107	99,252,767	160,200,874	84.5%	<	303,223,580	22.3%	DPUPR
		03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	331,929,250	53,761,300	97,061,325	13,000,025	83,845,025	96,845,050	99.8%	<	150,606,350	45.4%	DPUPR
		03	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bulan	50,061,820	8,196,750	7,900,000	3,581,700	4,294,100	7,875,800	99.7%	<	16,072,550	32.1%	DPUPR
		03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	13,919,628	2,280,000	2,280,000	-	1,800,000	1,800,000	78.9%	<	4,080,000	29.3%	DPUPR
		03	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Bulan	21,978,360	3,600,000	25,000,000	-	24,430,000	24,430,000	97.7%	<	28,030,000	127.5%	DPUPR
		03	01	01	18	Rapat-rapat Koodiriasi Dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bulan	366,306,000	208,923,700	347,000,000	97,619,160	249,154,600	346,773,760	99.9%	<	555,697,460	151.7%	DPUPR
		03	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	unit	3,950,188,527	686,210,000	179,612,000	-	177,424,000	177,424,000	98.8%	<	863,634,000	21.9%	DPUPR
		03	01	02	11	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	unit	767,926,340	179,484,400	158,371,000	-	155,959,480	155,959,480	98.5%	<	335,443,880	43.7%	DPUPR
		03	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	162,395,660	21,200,000	26,500,000	12,100,000	14,252,950	26,352,950	99.4%	<	47,552,950	29.3%	DPUPR
		03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	897,316,410	106,360,600	75,400,000	41,500,000	22,740,500	64,240,500	85.2%	<	170,601,100	19.0%	DPUPR
		03	01	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	39,686,400	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		03	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pasang	200,000,000		128,107,690	-	127,710,000	127,710,000	99.7%	<	127,710,000	63.9%	DPUPR
		03	01	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	bulan	400,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		03	01	06	11	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	buku	27,413,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		03	01	15	03	Pembangunan Jalan		133,407,009,146	32,213,686,121	25,886,925,780	531,408,600	25,224,620,731	25,756,029,331	99.5%	<	57,969,715,452	43.5%	DPUPR
		03	01	15	05	Pembangunan Jembatan	Unit	1,733,482,094	-	549,164,500	14,459,500	532,272,900	546,732,400	99.6%	<	546,732,400	31.5%	DPUPR

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Unit	348,075,000			-				<			DPUPR
		03	01	15	07	Pembangunan Jalan (DAK)	Ruas	84,376,587,034	15,028,929,572	28,755,268,000	-	28,018,267,418	28,018,267,418	97.4%	<	43,047,196,990	51.0%	DPUPR
		03	01	15	09	Pembangunan Jalan (OTSUS)		-	-	15,282,942,953	-	14,824,422,779	14,824,422,779	97.0%	<	14,824,422,779	0.0%	DPUPR
		1	03	16	02	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong	dokumen	862,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	16	03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	unit	26,110,516,500	8,419,717,582	10,203,525,523	222,107,600	9,942,691,943	10,164,799,543	99.6%	<	18,584,517,125	71.2%	DPUPR
		1	03	16	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	dokumen	322,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	16	05	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (OTSUS)		-		10,250,000,000	-	9,926,890,250	9,926,890,250	96.8%	<	9,926,890,250	0.0%	DPUPR
		1	03	17	02	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong	dokumen	862,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	17	03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	talud	26,889,354,592	5,785,547,000.0	4,531,003,000	121,203,500	4,390,220,361	4,511,423,861	99.6%	<	10,296,970,861	38.3%	DPUPR
		1	03	17	05	Pembangunan Turap/Talud?Brojon (OTSUS)		-	-	7,000,000,000	-	6,937,630,600	6,937,630,600	99.1%	<	6,937,630,600	0.0%	DPUPR
		1	03	18	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	paket	1,835,285,775	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	18	06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Air	unit	2,167,200,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	26	01	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	unit	-	49,460,000	655,000,000	15,609,000	625,710,900	641,319,900	97.9%	<	690,779,900	0.0%	DPUPR
		1	03	27	01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	paket	18,519,336,612	5,972,997,100	4,714,860,500	92,305,400	4,596,616,839	4,688,922,239	99.4%	<	10,661,919,339	57.6%	DPUPR
		1	03	27	10	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)	paket	19,479,000,000	906,540,000	1,561,045,000	-	1,524,401,500	1,524,401,500	97.7%	<	2,430,941,500	12.5%	DPUPR
		1	03	28	07	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	paket	523,274,196	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	29	01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	DED	2,963,323,800	422,080,000	5,331,707,137	1,591,961,800	1,909,295,400	3,501,257,200	65.7%	<	3,923,337,200	132.4%	DPUPR
		1	03	29	04	Revitalisasi Kawasan	paket	7,397,409,546	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	03	29	06	Verifikasi penerima bantuan hibah dan bansos pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	0	-	-	50,000,000	-	46,400,000	46,400,000	0.0%	<	46,400,000	0.0%	DPUPR
		1	03	31	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Qanun	800,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	31	11	Revisi rencana tata ruang	dokumen	750,000,000	-	70,000,000	-	68,683,300	68,683,300	0.0%	<	68,683,300	9.2%	DPUPR
		1	03	31	13	Survey dan pemetaan	dokumen	800,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	32	07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	dokumen	800,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	33	01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	dokumen	800,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	33	02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	dokumen	700,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
		1	03	33	05	Pengawasan pemanfaatan ruang	kegiatan	800,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPUPR
	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar	1	04	15		Program Pengembangan Perumahan		45,278,093,685	-	6,049,934,000	-	5,911,485,000	5,911,485,000	97.7%	<	5,911,485,000	13.1%	DPUPR
		1	04	15	14	Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat kurang Mampu	unit	45,278,093,685	-	5,918,684,000	-	5,784,365,000	5,784,365,000	97.7%	<	5,784,365,000	12.8%	DPUPR
		1	04	15	15	Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat kurang Mampu (DAK)	unit	-		131,250,000	-	127,120,000	127,120,000	96.9%	<	127,120,000	0.0%	DPUPR
		1	04	16	07	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jalan	53,602,155,129	15,093,932,619	7,560,630,402	178,953,500	7,346,446,721	7,525,400,221	99.5%	<	22,619,332,840	42.2%	DPUPR
		1	04	21	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	unit	85,929,322,200	26,619,663,000	20,574,903,124.00	215,131,400	20,179,800,900	20,394,932,300	99.1%	<	47,014,595,300	54.7%	DPUPR
		1	04	21	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (Otsus)	Paket	-	-	12,128,335,693.00	-	10,057,180,400	10,057,180,400	82.9%	<	10,057,180,400	0.0%	DPUPR
		05	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	402,683,542	74,449,424	93,695,800	21,061,000	60,210,790	81,271,790	86.7%	<	155,721,214	38.7%	Kesbangpol
		05	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	195,201,944	39,020,699	51,156,423	36,237,808	14,843,971	51,081,779	99.9%	<	90,102,478	46.2%	Kesbangpol
		05	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Bulan	62,450,000	8,250,000	8,250,000	1,807,700	6,416,350	8,224,050	99.7%	<	16,474,050	26.4%	Kesbangpol
		05	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	52,857,800	4,804,000	4,698,000	3,630,000	937,300	4,567,300	97.2%	<	9,371,300	17.7%	Kesbangpol
		05	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	117,000,000	18,987,000	19,000,000	14,722,000	3,911,500	18,633,500	98.1%	<	37,620,500	32.2%	Kesbangpol
		05	01	01	020	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	OB	940,173,323	156,147,600	247,687,200	93,735,000	59,973,100	153,708,100	62.1%	<	309,855,700	33.0%	Kesbangpol

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	01	02	022	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Bulan	37,496,000	3,000,000	3,000,000	3,200,000	(350,000)	2,850,000	95.0%	<	5,850,000	15.6%	Kesbangpol
		05	01	02	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	32,204,713	4,775,000	4,950,000	3,230,000	1,480,000	4,710,000	95.2%	<	9,485,000	29.5%	Kesbangpol
		05	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Psg	-		53,390,000	-	53,000,000	53,000,000	99.3%	<	53,000,000	0.0%	Kesbangpol
		05	01	15	011	Peringatan Hari Bela Negara	Hari	61,051,000	9,892,000	22,451,700	-	19,309,900	19,309,900	86.0%	<	29,201,900	47.8%	Kesbangpol
		05	01	15	022	Pelatihan Dasar Bela Negara				45,000,000	-	41,553,400	41,553,400	92.3%	<	41,553,400	0.0%	Kesbangpol
		05	01	17	10	Verifikasi ORMAS, ORSOS, LSM	Hari	106,241,775		13,485,775	-	12,350,450	12,350,450	91.6%	<	12,350,450	11.6%	Kesbangpol
		05	01	17	12	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (PPKI) Kota Lhokseumawe	Hari	319,656,000		29,632,775	-	20,805,425	20,805,425	70.2%	<	20,805,425	6.5%	Kesbangpol
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Masyarakat	05	01	18	007	Peningkatan Kapasitas Kominda Kota Lhokseumawe	Triwulan	546,034,545	59,987,950	-	-	20,711,350	20,711,350	0.0%	<	80,699,300	14.8%	Kesbangpol
		05	01	18	010	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM)	Hari	483,965,993	44,689,490	20,288,852		19,287,500	19,287,500	95.1%	<	63,976,990	13.2%	Kesbangpol
		05	01	21	006	Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Penyampaian Aspirasi Melalui Parpol	Hari	254,065,560		30,950,000	30,926,450	-	30,926,450	99.9%	<	30,926,450	12.2%	Kesbangpol
		05	01	21	007	Verifikasi Bantuan Parpol	Bulan	166,663,000		19,840,000	-	19,796,100	19,796,100	99.8%	<	19,796,100	11.9%	Kesbangpol
		05	01	23	009	Dukungan terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe	Bulan	208,278,000	53,200,000	104,600,000	96,600,000	7,900,000	104,500,000	99.9%	<	157,700,000	75.7%	Kesbangpol
		05	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	15,472,000	1,491,000	3,498,000	1,410,500	1,884,000	3,294,500	94.2%	<	4,785,500	30.9%	Satpol PP & WH
		05	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	590,962,305	75,608,852	108,500,000	39,172,903	39,413,234	78,586,137	72.4%	<	154,194,989	26.1%	Satpol PP & WH
		05	02	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	16,165,796	7,173,230	5,400,000	2,548,291	2,711,050	5,259,341	97.4%	<	12,432,571	76.9%	Satpol PP & WH
		05	02	01	020	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	OB	12,237,019,319	3,193,682,000	3,523,520,000	1,414,865,000	2,034,305,000	3,449,170,000	97.9%	<	6,642,852,000	54.3%	Satpol PP & WH
		05	02	01	021	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	OB	1,356,492,960	84,539,520	131,414,400	-	89,593,920	89,593,920	68.2%	<	174,133,440	12.8%	Satpol PP & WH
		05	02	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	206,000,000	149,927,124	275,000,000	250,954,970	-	250,954,970	91.3%	<	400,882,094	194.6%	Satpol PP & WH
		05	02	02	011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mobiler, komputer)	Jenis	163,352,400	14,000,000	95,900,000	24,000,000	67,050,000	91,050,000	94.9%	<	105,050,000	64.3%	Satpol PP & WH
		05	02	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	15,031,640	7,000,000	71,000,000	-	70,611,250	70,611,250	99.5%	<	77,611,250	516.3%	Satpol PP & WH
		05	02	02	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	159,840,000	29,280,000	29,300,000	11,829,300	17,309,500	29,138,800	99.4%	<	58,418,800	36.5%	Satpol PP & WH
		05	02	02	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	UB	614,000,000	115,339,300	167,800,000	90,571,900	71,918,300	162,490,200	96.8%	<	277,829,500	45.2%	Satpol PP & WH
		05	02	02	030	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	36,500,000	6,000,000	6,000,000	3,000,000	2,970,000	5,970,000	99.5%	<	11,970,000	32.8%	Satpol PP & WH

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	02	02	042	Rehabilitas Sedang /Berat Gedung Kantor	Unit	70,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	02	044	Rehabilitas Sedang /Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	60,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	02	045	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jenis	91,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	02	046	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Paket	41,202,404	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pasang	717,190,517	117,474,000	609,652,687	-	559,692,053	559,692,053	91.8%	<	677,166,053	94.4%	Satpol PP & WH
		05	02	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	120,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	05	002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	103,267,000	21,248,900	21,817,000	-	20,499,000	20,499,000	94.0%	<	41,747,900	40.4%	Satpol PP & WH
		05	02	05	005	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Orang	272,400,000	82,248,000	82,400,000	11,562,500	70,790,000	82,352,500	99.9%	<	164,600,500	60.4%	Satpol PP & WH
		05	02	05	041	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hari	31,206,902	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	15	003	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Orang	1,005,109,816	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	15	013	Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH	Hari	200,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	15	016	Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun	Kasus	312,251,730	33,193,000	32,940,000	15,000,000	17,900,000	32,900,000	99.9%	<	66,093,000	21.2%	Satpol PP & WH
		05	02	15	018	Pengamanan Pejabat/Tamu-Tamu Negara (VIP)	Kali	100,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	15	019	Pengawasan / Pengendalian Isu-Isu di Lapangan	Kali	166,100,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	15	020	Pengamanan Kantor Walikota / Rumah Dinas/Aset Daerah	Bulan	223,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	02	15	021	Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe	Bulan	230,000,000	-		-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	16	010	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Hari Besar Islam	Bulan	130,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	16	013	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Kali	100,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	16	015	Pengamanan Ketupat Rencong H-7 dan H+4	Hari	57,650,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	16	016	Pengamanan Operasi Lilin Hari Natal dan Tahun Baru	Hari	57,650,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	18	012	Pendukung Kegiatan Acara/Upacara HUT Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	Hari	100,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	19	003	Sosialisasi Peraturan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam	Orang	22,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	19	008	Peningkatan Kerjasama Ulama/Tokoh Masyarakat/Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang	62,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	23	022	Penunjang Tenaga Satlinmas Untuk Pilpres dan Pileg	Orang	104,860,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Satpol PP & WH
		05	02	23	023	Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif	Orang	-	-	80,300,000	59,810,750	19,400,000	79,210,750	98.6%	<	79,210,750	0.0%	Satpol PP & WH
		06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Bulan	632,610,462	65,618,445	95,000,000	-	63,130,001	63,130,001	66.5%	<	128,748,446	20.4%	Dinsos
		06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	1,066,212,549	83,152,800	125,950,000	7,600,000	104,349,600	111,949,600	88.9%	<	195,102,400	18.3%	Dinsos
		06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	152,600,636	25,096,715	67,461,800	23,670,100	43,008,895	66,678,995	98.8%	<	91,775,710	60.1%	Dinsos
		06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Bulan	121,440,000	22,422,050	30,136,091	12,859,950	16,938,900	29,798,850	98.9%	<	52,220,900	43.0%	Dinsos
		06	01	01	13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	Bulan	188,397,080	5,745,000	5,597,216	5,528,000	-	5,528,000	98.8%	<	11,273,000	6.0%	Dinsos

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	01	01	18	Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar daerah	Bulan	402,936,600	87,591,400	187,500,000	-	187,227,900	187,227,900	99.9%	<	274,819,300	68.2%	Dinsos
		06	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	1,398,295,595	103,385,100	137,640,000	49,080,000	70,061,600	119,141,600	86.6%	<	222,526,700	15.9%	Dinsos
		06	01	02	11	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Unit	100,411,800	7,380,000	99,585,500	-	96,485,280	96,485,280	96.9%	<	103,865,280	103.4%	Dinsos
		06	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Bulan	20,146,830	-	23,500,000	-	9,127,000	9,127,000	38.8%	<	9,127,000	45.3%	Dinsos
		06	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	178,903,849	24,765,900	29,400,000	-	26,585,000	26,585,000	90.4%	<	51,350,900	28.7%	Dinsos
		06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Operasional	UB	614,344,002	12,855,100	19,200,000	-	16,920,500	16,920,500	88.1%	<	29,775,600	4.8%	Dinsos
		06	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer dll)	Bulan	33,578,050	4,500,000	13,500,000	-	13,490,000	13,490,000	99.9%	<	17,990,000	53.6%	Dinsos
		06	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pasang	112,612,000		53,397,500	-	51,975,000	51,975,000	97.3%	<	51,975,000	46.2%	Dinsos
		06	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	122,102,000	-	19,000,000	-	9,000,000	9,000,000	47.4%	<	9,000,000	7.4%	Dinsos
		06	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Buku	14,750,000	600,000	595,000	-	495,000	495,000	83.2%	<	1,095,000	7.4%	Dinsos
		06	01	15	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Unit	3,331,959,669	612,990,600	769,003,000	-	757,538,200	757,538,200	98.5%	<	1,370,528,800	41.1%	Dinsos
		06	01	15	16	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	bulan	466,716,918	2,559,768,000	84,291,000	19,442,028	61,527,178	80,969,206	96.1%	<	2,640,737,206	565.8%	Dinsos
		06	01	15	19	Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Orang	467,000,000	57,925,918	26,865,500	-	25,900,014	25,900,014	96.4%	<	83,825,932	17.9%	Dinsos
		06	01	15	32	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan Masyarakat/Gampong	Jenis	4,783,142,848	1,141,682,950	-	-	-	-	0.0%	<	1,141,682,950	23.9%	Dinsos
		06	01	15	37	Pelaksanaan Penyaluran Beras Kesejahteraan (RASTRA/BPNT)	bulan	1,115,000,000		51,500,000	-	51,262,650	51,262,650	99.5%	<	51,262,650	4.6%	Dinsos
		06	01	16	17	Pelatihan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana	Bulan	311,651,070		55,000,000	-	43,615,800	43,615,800	79.3%	<	43,615,800	14.0%	Dinsos

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	01	16	18		Bulan	311,651,070		20,133,495	-	17,079,745	17,079,745	84.8%	<	17,079,745	5.5%	Dinsos
		06	01	16	30	Verifikasi Data Lansia	Buku	73,500,000	13,913,750.0	24,813,140	12,448,920	12,328,970	24,777,890	99.9%	<	38,691,640	52.6%	Dinsos
		06	01	16	34	Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Buku	311,651,070		29,800,000	14,261,850	15,496,000	29,757,850	99.9%	<	29,757,850	9.5%	Dinsos
		06	01	16	36	Observasi Bantuan Pembangunan/Rehab dan Bedah Rumah Duafa	Buku	180,730,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinsos
		06	01	16	38	Respon Kasus (Tanggapan Darurat Anak PMKS)	Kasus	660,100,000	34,493,800	79,500,000	11,863,675	57,565,275	69,428,950	87.3%	<	103,922,750	15.7%	Dinsos
		06	01	16	40	Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (UP-PKSA)	Bulan	693,789,000		49,903,475	10,096,650	35,556,525	45,653,175	91.5%	<	45,653,175	6.6%	Dinsos
		06	01	18	07	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Peserta			-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinsos
		06	01	18	11	Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat	Unit	600,000,000	135,710,755	186,700,800	-	170,524,800	170,524,800	91.3%	<	306,235,555	51.0%	Dinsos
		06	01	19	13	Verifikasi dan Monitoring Panti Asuhan/Panti Jompo	Buku			17,500,000	4,650,000	11,906,272	16,556,272	94.6%	<	16,556,272	0.0%	Dinsos
		06	01	21	10	Tim Terpadu Penanggulangan Bencana	Bulan	358,980,000	48,200,000	59,920,800	13,117,600	45,427,600	58,545,200	97.7%	<	106,745,200	29.7%	Dinsos
		06	01	21	11	Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Bulan			20,000,000	4,609,900	12,522,932	17,132,832	85.7%	<	17,132,832	0.0%	Dinsos
		06	01	21	12	Pendampingan Supervisi Pekerja Sosial Masyarakat	Bulan			25,000,000	12,339,000	10,810,000	23,149,000	92.6%	<	23,149,000	0.0%	Dinsos
		06	01	21	13	Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Lhokseumawe	%			41,000,000	-	39,362,660	39,362,660	96.0%	<	39,362,660	0.0%	Dinsos
		2	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	10,750,000	1,500,000	2,000,000	900,000	1,098,000	1,998,000	99.9%	<	3,498,000	32.5%	DPMTSP & Naker
		2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, Listrik	Bulan	584,499,800	86,596,731	102,200,000	46,327,025	50,418,392	96,745,417	94.7%	<	183,342,148	31.4%	DPMTSP & Naker

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		2	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	110,000,000	20,000,000	19,725,000	3,993,600	15,681,400	19,675,000	99.7%	<	39,675,000	36.1%	DPMTSP & Naker
		2	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	19,823,621	5,509,000	5,153,000	813,225	4,317,695	5,130,920	99.6%	<	10,639,920	53.7%	DPMTSP & Naker
		2	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	136,002,520	27,058,000	31,570,000	5,850,000	24,232,500	30,082,500	95.3%	<	57,140,500	42.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bulan	449,556,836	164,998,550	163,200,000	89,797,050	73,040,700	162,837,750	99.8%	<	327,836,300	72.9%	DPMTSP & Naker
		2	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	763,200,000	177,800,000	207,200,000	90,500,000	97,036,000	187,536,000	90.5%	<	365,336,000	47.9%	DPMTSP & Naker
		2	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	292,994,820	53,900,000	75,000,000	996,000	68,902,100	69,898,100	93.2%	<	123,798,100	42.3%	DPMTSP & Naker
		2	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket	150,000,000	30,000,000	-	-	-	-	0.0%	<	30,000,000	20.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	150,640,000	28,563,742	28,540,000	8,512,740	19,991,400	28,504,140	99.9%	<	57,067,882	37.9%	DPMTSP & Naker
		2	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	142,480,000	30,986,864	31,300,000	11,852,936	18,805,800	30,658,736	98.0%	<	61,645,600	43.3%	DPMTSP & Naker
		2	01	03	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	pasang	200,000,000		90,675,000		90,000,000	90,000,000	99.3%	<	90,000,000	45.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	274,729,500	46,910,000	67,000,000	14,176,900	38,889,000	53,065,900	79.2%	<	99,975,900	36.4%	DPMTSP & Naker
		2	01	15	01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	4 Kecamatan	182,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	15	06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Orang	300,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	15	11	Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha bagi Pencari Kerja	Orang	555,000,000	99,803,250	117,950,000	117,354,000	-	117,354,000	99.5%	<	217,157,250	39.1%	DPMTSP & Naker
		2	01	15	16	Bursa Kerja Online	Orang	115,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	15	17	Pengembangan dan Pelatihan Wirausaha Baru	Orang	612,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Orang	591,347,398	191,196,525	-	-	-	-	0.0%	<	191,196,525	32.3%	DPMTSP & Naker
		2	01	16	05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Gampong	212,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		2	01	16	09	Padat Karya Produktif	Gampong	435,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Perusahaan	212,978,870	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	17	18	Sosialisasi tatacara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Orang	226,740,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	17	29	Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	kasus	226,723,975	-	76,323,350	-	74,133,350	74,133,350	97.1%	<	74,133,350	32.7%	DPMTSP & Naker
		2	01	17	30	Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama	Orang	500,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	17	31	Verifikasi dan Pendataan Jaminan Kesejahteraan Pekerja	Perusahaan	156,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	17	32	Tertib Administrasi Ketenagakerjaan di Perusahaan	Perusahaan	159,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	12	15	12	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Orang	-	-	39,849,700	37,381,400	2,400,000	39,781,400	99.8%	<	39,781,400	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	12	16	12	Sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif	Orang	111,726,552	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	01	Pengawasan dan penyelidikan perizinan	Kali	455,000,000	94,858,300	80,957,600	28,897,600	50,359,500	79,257,100	97.9%	<	174,115,400	38.3%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	04	Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Responden	135,215,000	25,403,900	22,503,500	22,481,500	-	22,481,500	99.9%	<	47,885,400	35.4%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	05	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	kali	115,200,000	30,856,559	20,000,000	11,000,000	8,980,000	19,980,000	99.9%	<	50,836,559	44.1%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	06	Peninjauan lapangan tempat izin	kali	379,400,000	84,480,000	71,000,000	32,120,000	33,190,000	65,310,000	92.0%	<	149,790,000	39.5%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	09	Pengelolaan media pendaftaran perizinan online	Pemohon	107,000,000	31,997,500	18,993,000	-	18,973,000	18,973,000	99.9%	<	50,970,500	47.6%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	15	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Perizinan dan Pengaduan	pemohon izin	96,000,000	11,496,600	12,000,000	-	11,788,100	11,788,100	98.2%	<	23,284,700	24.3%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	16	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan	Berkas	78,419,005	183,604,746	98,800,000	51,854,532	44,696,000	96,550,532	97.7%	<	280,155,278	357.3%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	19	Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan	Orang	71,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		2	12	18	21	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Perizinan	90,000,000		-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	24	Sosialisasi Pelayanan Perizinan, Informasi dan Pengaduan	Orang	88,000,000		33,747,500		33,697,000	33,697,000	99.9%	<	33,697,000	38.3%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	28	Pemutihan IMB	Mesjid			60,000,000		42,800,500	42,800,500	71.3%	<	42,800,500	0.0%	DPMTSP & Naker
		02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	380,240,000	40,677,297	44,134,000	14,087,145	25,410,530	39,497,675	89.5%	<	80,174,972	21.1%	DP3APP&KB
		02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bln	167,615,388	25,915,000	29,783,000	6,994,500	22,758,500	29,753,000	99.9%	<	55,668,000	33.2%	DP3APP&KB
		02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bln	139,826,000	20,000,000	19,805,000	6,988,000	12,772,000	19,760,000	99.8%	<	39,760,000	28.4%	DP3APP&KB
		02	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	695,664,625	164,545,500	177,294,625	57,430,000	104,964,625	162,394,625	91.6%	<	326,940,125	47.0%	DP3APP&KB
		02	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	59,997,046	4,600,000	30,000,000	-	29,850,000	29,850,000	99.5%	<	34,450,000	57.4%	DP3APP&KB
		02	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	127,318,000	25,548,400	25,100,000	7,189,600	16,984,400	24,174,000	96.3%	<	49,722,400	39.1%	DP3APP&KB
		02	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	UB	257,240,000	52,709,400	57,240,000	11,846,600	34,849,100	46,695,700	81.6%	<	99,405,100	38.6%	DP3APP&KB
		02	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	37,500,000	9,840,000	10,000,000	1,460,000	8,230,000	9,690,000	96.9%	<	19,530,000	52.1%	DP3APP&KB
		02	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pasang	5,000,000		44,330,000	-	44,000,000	44,000,000	99.3%	<	44,000,000	880.0%	DP3APP&KB
		02	01	05		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	bulan	205,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	15	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lap	15,060,000			-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	15	05	Hari Anak Nasional	org	209,880,000		53,680,000.00	-	52,463,000.00	52,463,000	97.7%	<	52,463,000	25.0%	DP3APP&KB
		02	01	16	02	Pelayanan Korban P2TP2A	kasus	41,000,000	37,634,500	75,570,000	19,400,500	52,157,500	71,558,000	94.7%	<	109,192,500	266.3%	DP3APP&KB
		02	01	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Bulan	20,000,000	19,985,000	25,000,000	338,500	24,551,500	24,890,000	99.6%	<	44,875,000	224.4%	DP3APP&KB
		02	01	16	18	Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Perempuan di LAPAS	org	49,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	17	17	Perlombaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun DWP	org	100,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	17	19	Kegiatan dalam rangka peringatan hari ibu	keg	145,800,000	55,209,300	51,681,200	-	49,075,900	49,075,900	95.0%	<	104,285,200	71.5%	DP3APP&KB

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	17	22	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Melalui Industri Rumahan	org	11,746,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	17	23	Pelatihan mengasah dan merawat perempuan lansia	org	7,800,000	17,610,000	-	-	-	-	0.0%	<	17,610,000	225.8%	DP3APP&KB
		02	01	17	24	Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Lansia	org	10,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	18	07	Peningkatan Keterampilan Pemberdayaan Perempuan	org	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	18	17	Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe	Bulan	499,625,000	94,879,300	97,696,000	4,900,000	92,717,860	97,617,860	99.9%	<	192,497,160	38.5%	DP3APP&KB
		02	01	18	25	Penghijauan Lingkungan Dengan Penanaman Pohon Pelindung & Tanaman Penghias (DWP Kota Lhokseumawe)	pohon	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	18	26	Seminar Pendidikan (DWP Kota Lhokseumawe)	org	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		02	01	18	29	Seminar Parenting (Psikolog pendidikan orang tua dalam mendidik anak) DWP Kota Lhokseumawe	org	123,750,000	23,850,000	24,790,000	-	22,250,000	22,250,000	89.8%	<	46,100,000	37.3%	DP3APP&KB
		02	01	18	32	Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui industri rumahan (Otsus)	keg	41,825,000	25,000,000	507,372,000	-	498,239,650	498,239,650	98.2%	<	523,239,650	1251.0%	DP3APP&KB
		02	01	18	36	Peningkatan kapasitas pengurus DWP kota Lhokseumawe	org	24,500,000	-	24,826,000	-	22,784,000	22,784,000	91.8%	<	22,784,000	93.0%	DP3APP&KB
		02	01	18	41	Pelatihan Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik Perempuan	org	24,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan	08	01	15	09	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) TK Kota Lhokseumawe	keg	494,830,000	47,754,400	68,325,000	-	68,087,800	68,087,800	99.7%	<	115,842,200	23.4%	DP3APP&KB
		08	01	15	11	Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan program keluarga Berencana (DAK)	Bulan	4,792,000,000	914,924,750	1,080,673,000	-	1,038,872,800	1,038,872,800	96.1%	<	1,953,797,550	40.8%	DP3APP&KB
		08	01	15	17	Penyediaan Kebutuhan Bantuan operasional keluarga berencana (DAK Non Fisik)	bln	6,098,847,429	643,683,190	1,073,017,000	287,007,710	487,606,507	774,614,217	72.2%	<	1,418,297,407	23.3%	DP3APP&KB
		08	01	15	18	Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Faskes	217,800,000	29,755,200	41,800,000	10,758,600	26,820,650	37,579,250	89.9%	<	67,334,450	30.9%	DP3APP&KB
		08	01	15	20	Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan	Faskes	217,800,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		08	01	15	21	Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Faskes	217,800,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		08	01	16	03	Sunat Rasul Anak Pra Sejahtera	Orang	500,000,000	99,766,000	99,017,000	98,788,400	-	98,788,400	99.8%	<	198,554,400	39.7%	DP3APP&KB

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		08	01	16	011	Pelatihan Pembekalan Kesehatan Reproduksi	Orang	-	-		-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		08	01	16	012	Pelatihan Tenaga Konselor PIK Kesehatan Reproduksi Remaja	Orang	-	-		-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		08	01	17	06	Bhakti Sosial KB - TNI (Manunggal KB-Kes)	kecamatan	305,255,000	50,000,000	59,691,100	-	58,591,100	58,591,100	98.2%	<	108,591,100	35.6%	DP3APP&KB
		08	01	23	05	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian KB Lestari	pasangan	200,000,000	39,721,400	22,993,800	22,768,800	-	22,768,800	99.0%	<	62,490,200	31.2%	DP3APP&KB
		08	01	23	06	Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Keluarga Harmonis	pasangan	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		08	01	23	09	Pelatihan Kader BKB Holistik Integratif (BKB HI)	Org	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		08	01	23	10	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa Binaan Terbaik Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	Kecamatan	132,000,000	56,345,400	45,157,000	41,777,000	3,355,000	45,132,000	99.9%	<	101,477,400	76.9%	DP3APP&KB
		08	01	23	11	Kegiatan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	org	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		08	01	23	14	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	kelompok	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DP3APP&KB
		03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	1,186,258,550	105,769,571	285,922,059	64,559,754	78,160,421	142,720,175	49.9%	<	248,489,746	20.9%	DKPPP
		03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	759,930,520	96,839,100	131,040,000	53,520,000	77,040,000	130,560,000	99.6%	<	227,399,100	29.9%	DKPPP
		03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	148,224,720	22,894,715	34,305,776	6,737,656	19,928,070	26,665,726	77.7%	<	49,560,441	33.4%	DKPPP
		03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	119,730,000	20,893,750	28,789,730	7,192,600	21,577,800	28,770,400	99.9%	<	49,664,150	41.5%	DKPPP
		03	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	69,495,000	12,300,000	-	-	-	-	0.0%	<	12,300,000	17.7%	DKPPP
		03	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	2,788,186,600	417,170,000	477,920,100	233,300,000	240,680,000	473,980,000	99.2%	<	891,150,000	32.0%	DKPPP
		03	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Unit	1,018,955,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	212,200,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Unit	326,850,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	02	,11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Unit	488,833,300	5,000,000	81,292,199	-	77,098,750	77,098,750	94.8%	<	82,098,750	16.8%	DKPPP
		03	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Bulan	357,758,105	15,460,000	186,907,801	-	185,791,100	185,791,100	99.4%	<	201,251,100	56.3%	DKPPP
		03	01	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	UB	161,965,000	26,302,250	28,260,000	11,716,100	15,780,000	27,496,100	97.3%	<	53,798,350	33.2%	DKPPP
		03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	637,510,000	82,682,950	143,040,000	42,920,000	64,341,200	107,261,200	75.0%	<	189,944,150	29.8%	DKPPP

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	91,900,000	9,100,000	10,000,000	-	9,700,000	9,700,000	97.0%	<	18,800,000	20.5%	DKPPP
		03	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	unit	700,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	pasang	79,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	05	24	Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	orang	172,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	07	01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	22,416,030	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Buku	23,022,030	-	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	0.0%	<	1,200,000	5.2%	DKPPP
		03	01	07	03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Buku	21,023,730	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	08	01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	hari	40,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	18	12	Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	unit	2,623,859,576	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	18	13	Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)	unit	3,977,207,884	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	01	Pembangunan Jalan Usaha Tani	paket	16,147,807,602	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	07	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	unit	8,250,479,747	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	08	Pengembangan Budidaya Tomat		287,380,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	20	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	unit	280,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	20	40	Lomba Cipta Menu Beragam,Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal	hari	361,727,175	56,600,000	50,000,000	18,803,000	30,397,000	49,200,000	98.4%	<	105,800,000	29.2%	DKPPP
		03	01	20	44	Pekan Daerah (PEDA)	hari	65,094,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	20	49	Bimbingan Teknis Pendataan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga (KAP-RT)		56,637,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	20	50	Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan		240,914,310	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	20	51	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)	hari	908,397,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	16	03	Penanaman Mangrove di Pantai Lhokseumawe		712,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	01	16	04	Sosialisasi Keselamatan Berlayar Kepada Nelayan Lhokseumawe		116,950,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	16	05	Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas Wilayah Laut kepada Nelayan Lhokseumawe		155,937,600	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	17	01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut		49,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	17	03	Pengukuran Gelombang Laut		50,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	19	02	Pelaksanaan Hari Nusantara	hari	190,000,000	-	-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	19	04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan		113,050,000		-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	19	05	Lomba Masak Serba Ikan	hari	286,788,624	37,900,000	150,000,000	21,569,500	127,375,618	148,945,118	99.3%	<	186,845,118	65.2%	DKPPP
		01	01	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	ekor	1,940,291,200		50,000,000	-	49,624,000	49,624,000	99.2%	<	49,624,000	2.6%	DKPPP
		01	01	20	04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	unit	6,960,567,924		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	20	14	Pengukuran Kualitas Air Tambak	bulan	260,000,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	20	15	Pengembangan Budidaya Ikan Tawar (DAK)	paket	1,421,347,961	244,185,287	471,535,488	-	-	-	0.0%	<	244,185,287	17.2%	DKPPP
		01	01	20	17	Penyusunan Updating Data Pembudidayaan Ikan	dokumen	388,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	20	18	Pengembangan Budidaya Udang	bulan	100,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	20	20	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)				118,250,000	-	58,450,000	58,450,000	49.4%	<	58,450,000	0.0%	DKPPP
		01	01	20	21	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya	dokumen	110,000,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	06	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan)	Unit	1,504,286,000		494,752,012	-	216,076,250	216,076,250	43.7%	<	216,076,250	14.4%	DKPPP
		01	01	21	07	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan	Unit	3,190,326,850		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	08	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan (DAK)		969,127,039		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	09	Motorisasi Armada Perikanan dalam upaya Peningkatan daya jelajah dan Produktifitas Nelayan	buah	69,800,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	10	Pembangunan Pangkalan pendaratan Ikan	Unit	604,800,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	13	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan		703,360,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	14	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (Otsus)		2,250,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	15	Penyusunan Survey Investigasi Design (SID) PPI Ujong Blang		400,000,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	01	21	16	Penyusunan Amdal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Blang		600,000,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	23	04	Perencanaan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		30,080,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	25	01	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	unit	5,895,768,830		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	25	05	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	unit	10,045,000,000		198,742,500	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	26	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat Nelayan	unit	4,062,500,000	-	119,996,000	-	118,875,000	118,875,000	99.1%	<	118,875,000	2.9%	DKPPP
					06	Pengembangan tanaman perkebunan rakyat	bulan	673,589,200	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
					11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan (DAK Pertanian)	bulan	-	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
					13	Pembangunan Jalan Usaha Tani	m	1,850,342,018	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		817,920,000		-		-		0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	16	33	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional		-		-		-		0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	17	23	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan (OTSUS)		-		-		-		0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	01	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Paket	16,147,807,602	902,236,800	762,850,000	-	758,712,500	758,712,500	99.5%	<	1,660,949,300	10.3%	DKPPP
		03	01	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	unit	960,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	13	Pengembangan komoditi perkebunan dalam rangka pemberdayaan komunitas daerah terpencil		200,120,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	23	Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian)	unit	2,150,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	25	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (OTSUS)	unit	179,149,625	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	27	Pengembangan Budidaya Cabe		323,540,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	19	03	Pengembangan Bibit Unggulan Pertanian/Perkebunan				129,923,010	-	129,723,000	129,723,000	99.8%	<	129,723,000	0.0%	DKPPP

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	19	12	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)	unit	4,086,925,150	7,600,000	1,024,097,547	-	1,008,950,000	1,008,950,000	98.5%	<	1,016,550,000	24.9%	DKPPP
		03	01	20	04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK Pertanian)	unit	571,135,000	8,985,000	40,003,453		39,949,452	39,949,452	99.9%	<	48,934,452	8.6%	DKPPP
		01	01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		1,914,400,000		-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		01	01	21	09	Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK)	unit	311,581,000		-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	22	01	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		155,115,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		03	01	22	13	Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu				90,000,000	-	89,500,000	89,500,000	99.4%	<	89,500,000	0.0%	DKPPP
		03	01	22	17	Expo/Kontes Ternak				81,600,000	-	80,800,000	80,800,000	99.0%	<	80,800,000	0.0%	DKPPP
		01	01	24	09	Pengembangan Usaha Peternakan Ayam		12,000,000		-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	DKPPP
		06	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bln	-	-	25,500,000	-	20,899,415	20,899,415	82.0%	<	20,899,415	0.0%	Pertanahan
		06	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	-	-	55,000,000	15,500,000	36,007,550	51,507,550	93.7%	<	51,507,550	0.0%	Pertanahan
		06	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	nlm	-	-	4,800,000	-	4,792,500	4,792,500	99.8%	<	4,792,500	0.0%	Pertanahan
		06	05	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bln	-	-	4,400,000	-	4,361,800	4,361,800	99.1%	<	4,361,800	0.0%	Pertanahan
		06	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	bln	-	-	1,140,000	-	950,000	950,000	83.3%	<	950,000	0.0%	Pertanahan
		06	05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	bln	-	-	15,000,000	2,730,000	12,260,000	14,990,000	99.9%	<	14,990,000	0.0%	Pertanahan
		06	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bln	-	-	87,000,000	29,400,000	56,536,875	85,936,875	98.8%	<	85,936,875	0.0%	Pertanahan
		06	05	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	unit	-	-	70,000,000	-	69,950,000	69,950,000	99.9%	<	69,950,000	0.0%	Pertanahan
		06	05	02	23	Pemeliharaan Ritin/Berkala Mobil Jabatan	UB	-	-	5,700,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Pertanahan
		06	05	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	UB	-	-	3,000,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Pertanahan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bln	13,240,000	1,650,000	2,400,000	-	2,350,000	2,350,000	97.9%	<	4,000,000	30.2%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bln	49,287,948,215	9,992,620,040	11,410,544,976	6,702,386,824	4,697,812,399	11,400,199,223	99.9%	<	21,392,819,263	43.4%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	549,565,250	104,511,750	104,554,750	42,200,000	58,403,150	100,603,150	96.2%	<	205,114,900	37.3%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bln	109,814,425	12,157,625	11,969,300	4,780,050	7,167,250	11,947,300	99.8%	<	24,104,925	22.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	11	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Bln	97,800,000	13,494,500	18,000,000	7,492,000	10,325,000	17,817,000	99.0%	<	31,311,500	32.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	44,913,003,125	8,726,453,741	8,698,295,000	4,176,124,871	4,382,999,742	8,559,124,613	98.4%	<	17,285,578,354	38.5%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	22	Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium	OB	50,999,500	9,187,500	9,999,400	2,400,000	6,947,000	9,347,000	93.5%	<	18,534,500	36.3%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	34,000,000	4,900,000	25,000,000	-	24,900,000	24,900,000	99.6%	<	29,800,000	87.6%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Bulan	24,500,000	6,731,000	5,000,000	-	4,975,000	4,975,000	99.5%	<	11,706,000	47.8%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bulan	198,462,400	37,735,942	38,462,400	10,966,000	25,910,000	36,876,000	95.9%	<	74,611,942	37.6%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	UB	13,434,815,167	2,610,028,680	2,723,877,205	1,123,835,100	1,416,682,350	2,540,517,450	93.3%	<	5,150,546,130	38.3%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	172,307,000	17,066,200	122,307,000	-	117,092,000	117,092,000	95.7%	<	134,158,200	77.9%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Unit	28,000,000	4,785,000	5,000,000	-	4,892,000	4,892,000	97.8%	<	9,677,000	34.6%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	32	Pemeliharaan Lampu Jalan	Bulan	703,000,000	117,838,000	118,000,000	58,759,500	58,650,000	117,409,500	99.5%	<	235,247,500	33.5%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	02	39	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium	Unit	138,026,910	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	psg	3,214,514,591	493,011,000	474,068,000		461,236,000	461,236,000	97.3%	<	954,247,000	29.7%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	6	11	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Buku	15,315,000		3,300,000			-	0.0%	<	-	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	01	07	2	Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	10,376,120	3,155,000	1,200,000		1,187,800	1,187,800	99.0%	<	4,342,800	41.9%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan		-	-	235,080,000		234,630,000	234,630,000	99.8%	<	234,630,000	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	15	15	Penyediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan akhir sampah	Unit	145,500,000	-	12,000,000		11,900,000	11,900,000	99.2%	<	11,900,000	8.2%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	15	17	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)		-	856,123,000.0	420,000,000		416,900,000	416,900,000	99.3%	<	1,273,023,000	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	16	17	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (DAK)		-	79,918,960	349,169,000		345,560,600	345,560,600	99.0%	<	425,479,560	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	16	31	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	Kali	278,813,099	-	55,000,000		54,950,000	54,950,000	99.9%	<	54,950,000	19.7%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	16	32	Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen	61,000,000	-	-			-	0.0%	<	-	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	18	03	Rehabilitasi hutan dan Lahan	Bln	395,915,735	63,675,000.0	376,787,500		376,003,000	376,003,000	99.8%	<	439,678,000	111.1%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Kali	98,000,000.0	-	-			-	0.0%	<	-	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	19	08	Penyusunan status lingkungan hidup daerah	Dokumen	22,000,000.0	-	-			-	0.0%	<	-	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	24	06	Pemeliharaan RTH	Lokasi	803,683,958	319,720,800	123,000,000		121,158,000	121,158,000	98.5%	<	440,878,800	54.9%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	24	11	Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota	Lokasi	761,646,500	229,165,000	15,000,000		14,900,000	14,900,000	99.3%	<	244,065,000	32.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	24	17	Pembangunan Taman dan Penghijauan	Jumlah Taman	550,000,000	-	-			-	0.0%	<	-	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	25	01	Peningkatan Penerangan Fasilitas Umum	Persen	786,803,002	-	-			-	0.0%	<	-	0.0%	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	01	25	02	Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Jumlah	9,352,976,998	2,156,215,680	615,000,000		594,157,500	594,157,500	96.6%	<	2,750,373,180	29.4%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	26	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota	Unit	860,732,408	144,955,800	142,000,000	30,555,000	110,279,000	140,834,000	99.2%	<	285,789,800	33.2%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	27	01	Pengerukan / Pembersihan Jaringan Air Limbah / Kotor	Lokasi	800,000,000	-	100,000,000		41,961,000	41,961,000	42.0%	<	41,961,000	5.2%	Dinas Lingkungan Hidup
		06	01	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bulan	17,500,000	3,500,000	3,500,000	-	2,882,000	2,882,000	82.3%	<	6,382,000	36.5%	Disdukcapil
		06	01	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	708,000,000	86,556,265	141,600,000	41,080,890	42,158,542	83,239,432	58.8%	<	169,795,697	24.0%	Disdukcapil
		06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	108,500,000	28,498,200	28,500,000	6,897,800	21,502,700	28,400,500	99.7%	<	56,898,700	52.4%	Disdukcapil
		06	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	175,000,000	5,000,000	5,000,000	2,393,400	2,561,600	4,955,000	99.1%	<	9,955,000	5.7%	Disdukcapil
		06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	42,000,000	9,000,000	12,000,000	4,150,000	6,150,000	10,300,000	85.8%	<	19,300,000	46.0%	Disdukcapil
		06	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	390,000,000	99,966,525	110,000,000	79,845,750	29,637,400	109,483,150	99.5%	<	209,449,675	53.7%	Disdukcapil
		06	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	1,181,126,682	268,430,000	318,270,000	139,750,000	140,820,000	280,570,000	88.2%	<	549,000,000	46.5%	Disdukcapil
		06	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mobiler, komputer, dll)	Jenis	114,394,192	120,657,600	58,000,000	23,800,000	32,754,000	56,554,000	97.5%	<	177,211,600	154.9%	Disdukcapil
		06	01	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	UB	129,545,035	26,065,000	26,640,000	6,000,000	20,100,000	26,100,000	98.0%	<	52,165,000	40.3%	Disdukcapil
		06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	UB	164,560,000	35,173,600	37,280,000	10,000,000	27,201,000	37,201,000	99.8%	<	72,374,600	44.0%	Disdukcapil
		06	01	02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Unit	59,411,850	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disdukcapil
		06	01	03	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pasang	55,255,000	-	99,470,000	89,000,000	-	89,000,000	89.5%	<	89,000,000	161.1%	Disdukcapil
		06	01	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Bulan	268,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disdukcapil

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	01	05	32	Bimtek Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	Bulan	32,000,000	-	-			-	0.0%	<	-	0.0%	Disdukcapi
		06	01	15	02	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Orang	155,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disdukcapi
		06	01	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Bulan	145,000,000	-	30,000,000	29,950,000	-	29,950,000	99.8%	<	29,950,000	20.7%	Disdukcapi
		06	01	15	11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Orang	164,000,000	-	10,000,000	6,850,000	2,200,000	9,050,000	90.5%	<	9,050,000	5.5%	Disdukcapi
		06	01	15	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bulan	189,000,000	-	20,000,000	-	17,600,000	17,600,000	88.0%	<	17,600,000	9.3%	Disdukcapi
		06	01	15	21	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Orang	235,325,000	-	80,000,000	-	78,474,000	78,474,000	98.1%	<	78,474,000	33.3%	Disdukcapi
		06	01	15	023	Penyusunan Profil Kependudukan(DAK NON FISIK)	Buku	195,800,000	50,000,000	35,000,000	-	27,358,400	27,358,400	78.2%	<	77,358,400	39.5%	Disdukcapi
		06	01	15	042	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK NON FISIK)	Bulan	358,619,000	150,014,434	190,000,000	60,436,000	126,712,400	187,148,400	98.5%	<	337,162,834	94.0%	Disdukcapi
		06	01	15	043	Pelayanan, Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik (DAK NON FISIK)	Triwulan	426,553,800	106,553,800	106,000,000	25,490,000	79,310,000	104,800,000	98.9%	<	211,353,800	49.5%	Disdukcapi
		06	01	15	044	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing	Bulan	160,000,000	-	-	-		-	0.0%	<	-	0.0%	Disdukcapi
		06	01	15	045	Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Akta-akta Pencatatan Sipil	Triwulan	105,000,000	-	54,803,500	-	54,359,200	54,359,200	99.2%	<	54,359,200	51.8%	Disdukcapi
		06	01	15	046	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kali	200,000,000	-	170,800,000	-	147,746,000	147,746,000	86.5%	<	147,746,000	73.9%	Disdukcapi
		06	01	15	047	Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Admnduk	Bulan	180,000,000	-	30,000,000	-	29,496,000	29,496,000	98.3%	<	29,496,000	16.4%	Disdukcapi
		06	01	15	048	Penyusunan Rancangan Qanun Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	Bulan	50,000,000	-	-	-		-	0.0%	<	-	0.0%	Disdukcapi
		06	01	15	049	Sosialisasi Tentang Inovasi dan Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil	Orang	140,000,000	-	32,000,000	-	30,200,000	30,200,000	94.4%	<	30,200,000	21.6%	Disdukcapi

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	01	15	050	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	Orang	170,000,000	-	45,196,500	-	40,292,500	40,292,500	89.1%	<	40,292,500	23.7%	Disdukcapil
		06	01	15	053	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Semester	170,000,000	-	67,000,000	-	65,712,600	65,712,600	98.1%	<	65,712,600	38.7%	Disdukcapil
		06	01	15	54	Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Kependudukan	0	-	-	22,300,000	-	22,271,800	22,271,800	99.9%	<	22,271,800	0.0%	Disdukcapil
		07	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	778,021,678	112,755,180	130,000,000	49,395,755	65,105,377	114,501,132	88.1%	<	227,256,312	29.2%	DPMG
		07	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	547,580,000	107,580,000	107,580,000	42,640,000	63,380,000	106,020,000	98.5%	<	213,600,000	39.0%	DPMG
		07	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	23,635,605	3,090,560	3,484,000	2,500,000	524,445	3,024,445	86.8%	<	6,115,005	25.9%	DPMG
		07	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	Bulan	526,000,000	102,464,300	199,000,000	67,447,598	130,449,178	197,896,776	99.4%	<	300,361,076	57.1%	DPMG
		07	01	01	020	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	609,800,000	157,595,200	177,435,200	81,350,000	88,331,500	169,681,500	95.6%	<	327,276,700	53.7%	DPMG
		07	01	02	023	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	UB	181,600,000	28,728,070	29,160,000	10,105,280	19,026,230	29,131,510	99.9%	<	57,859,580	31.9%	DPMG
		07	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	96,879,761	20,340,810	21,860,000	7,054,925	14,129,550	21,184,475	96.9%	<	41,525,285	42.9%	DPMG
		07	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pasang	200,000,000	-	70,525,000		63,525,000	63,525,000	90.1%	<	63,525,000	31.8%	DPMG
		07	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	61,051,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	4,750,000	9,750,000	97.5%	<	19,750,000	32.4%	DPMG
		07	01	07	002	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	4,884,080	800,000	800,000		795,000	795,000	99.4%	<	1,595,000	32.7%	DPMG
		07	01	15	026	Bimbingan Teknis APBG	Gampong	362,350,615	-	200,000,000	63,900,000	91,810,000	155,710,000	77.9%	<	155,710,000	43.0%	DPMG
		07	01	16	009	Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Gampong	280,000,000	-	143,998,950	14,138,950	127,858,373	141,997,323	98.6%	<	141,997,323	50.7%	DPMG
		07	01	17	011	Pembinaan Pengembangan PKK	Pertemuan	1,710,594,151	423,909,550	328,000,000	67,256,250	256,457,100	323,713,350	98.7%	<	747,622,900	43.7%	DPMG
		07	01	18	010	Satuan Kerja Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong	Pertemuan	3,046,559,625	456,479,625	450,688,750	121,018,825	282,864,509	403,883,334	89.6%	<	860,362,959	28.2%	DPMG
		07	01	18	011	Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.		343,300,000					403,883,334	0.0%	<	403,883,334	117.6%	DPMG

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		07	01	19	012	Rapat Koordinasi PKK	Pertemuan	213,678,500	423,909,550	47,749,925	-	41,978,925	41,978,925	87.9%	<	465,888,475	218.0%	DPMG
		09	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	22,152,000	2,394,000	1,980,000	750,000	1,170,000	1,920,000	97.0%	<	4,314,000	19.5%	Dishub
		09	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	1,461,159,509	90,156,653	107,860,000	42,244,173	59,827,431	102,071,604	94.6%	<	192,228,257	13.2%	Dishub
		09	01	01	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	205,000,000						0.0%	<	-	0.0%	Dishub
		09	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	173,932,000	27,577,100	30,077,400	8,464,100	18,998,700	27,462,800	91.3%	<	55,039,900	31.6%	Dishub
		09	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	288,730,193	58,581,000	71,158,400	7,829,040	55,286,500	63,115,540	88.7%	<	121,696,540	42.1%	Dishub
		09	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	221,374,700	13,925,400	20,165,500	3,952,800	14,005,900	17,958,700	89.1%	<	31,884,100	14.4%	Dishub
		09	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	36,050,000	3,587,500	12,000,000	1,455,000	8,139,000	9,594,000	80.0%	<	13,181,500	36.6%	Dishub
		09	01	01	018	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	564,600,000	138,998,652	190,000,000	79,691,000	109,908,055	189,599,055	99.8%	<	328,597,707	58.2%	Dishub
		09	01	01	020	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	3,113,700,000	974,035,000	1,154,842,000	488,137,000	655,640,000	1,143,777,000	99.0%	<	2,117,812,000	68.0%	Dishub
		09	01	02	011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	155,000,000	15,250,000	57,000,000	48,925,000	8,000,000	56,925,000	99.9%	<	72,175,000	46.6%	Dishub
		09	01	02	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	ub	154,714,160	25,028,200	28,640,000	14,292,500	14,266,150	28,558,650	99.7%	<	53,586,850	34.6%	Dishub
		09	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	ub	1,893,461,188	425,227,000	484,190,000	207,114,900	257,952,400	465,067,300	96.1%	<	890,294,300	47.0%	Dishub
		09	01	02	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler , Komputer dll)	bln	60,000,000	9,700,000	17,500,000	3,950,000	12,800,000	16,750,000	95.7%	<	26,450,000	44.1%	Dishub
		09	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pasangan	200,000,000		113,040,000.00	-	112,500,000.00	112,500,000	99.5%	<	112,500,000	56.3%	Dishub
		09	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Orang	230,000,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dishub

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		09	01	05	043	Pelatihan Pembekalan Petugas Lapangan	Orang	120,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Dishub
		09	01	07	002	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	7,576,120	1,450,000	-			-	0.0%	<	1,450,000	19.1%	Dishub
		09	01	15	002	Penyusunan kebijakan; norma; standar dan prosedur bidang perhubungan	Dokumen	62,312,293						0.0%	<	-	0.0%	Dishub
		09	01	15	004	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Unit	77,822,930						0.0%	<	-	0.0%	Dishub
		09	01	15	007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Bulan	78,000,000	30,500,000	8,989,000	21,489,000	30,478,000	99.9%	<	30,478,000	39.1%	Dishub	
		09	01	16	005	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Traffic dan Rambu-Rambu LLAJ	bln	205,267,360	37,900,000	60,000,000	15,058,000	44,643,000	59,701,000	99.5%	<	97,601,000	47.5%	Dishub
		09	01	16	006	Pembangunan Halte, Traffic dan Rambu-Rambu LLAJ	Unit	274,552,000						0.0%	<	-	0.0%	Dishub
		09	01	17	001	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Orang	96,488,164		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Dishub
		09	01	17	005	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	bln	969,494,350	72,775,000	230,000,000	44,100,000	182,950,000	227,050,000	98.7%	<	299,825,000	30.9%	Dishub
		09	01	17	011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dokumen	80,000,000		39,980,600	-	37,321,600	37,321,600	93.3%	<	37,321,600	46.7%	Dishub
		09	01	17	015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Orang	140,000,000		24,830,000	17,445,400	6,000,000	23,445,400	94.4%	<	23,445,400	16.7%	Dishub
		09	01	18	012	Penyusunan DED	Dokumen	365,000,000	102,714,000	82,750,000		82,250,000	82,250,000	99.4%	<	184,964,000	50.7%	Dishub
		09	01	18	013	Pembangunan Gedung Terminal (OTSUS)	Keg	168,180,000	18,180,000	2,512,280,000		2,452,456,400	2,452,456,400	97.6%	<	2,470,636,400	1469.0%	Dishub
		09	01	19	001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jenis	-	100,011,400	355,000,000	164,300,000	188,842,000	353,142,000	99.5%	<	453,153,400	0.0%	Dishub
		09	01	19	002	Pengadaan marka jalan	Meter	392,690,834		215,000,000	-	212,752,000	212,752,000	99.0%	<	212,752,000	54.2%	Dishub
		09	01	19	005	Pengadaan trafic light (otsus)	Keg		1,126,545,000	-	1,112,795,700	1,112,795,700	98.8%	<	1,112,795,700	0.0%	Dishub	
		09	01	19	013	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DAK)	Unit	172,000,000						0.0%	<	-	0.0%	Dishub

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		09	01	19	014	Pengadaan marka jalan (OTSUS)	Keg			724,530,000	-	709,002,700	709,002,700	97.9%	<	709,002,700	0.0%	Dishub
		09	01	21	006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi	Unit	4,823,029,000	-	105,000,000	-	104,050,000	104,050,000	99.1%	<	104,050,000	2.2%	Dishub
		2	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12,500,000	1,404,000	2,410,000	748,500	600,000	1,348,500	56.0%	<	2,752,500	22.0%	Diskominfo
		2	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	340,000,000	25,438,364	46,700,000	8,206,250	30,869,476	39,075,726	83.7%	<	64,514,090	19.0%	Diskominfo
		2	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	484,742,223	90,510,000	86,026,880	31,750,000	53,550,000	85,300,000	99.2%	<	175,810,000	36.3%	Diskominfo
		2	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	136,000,000	20,000,000	22,471,685	5,438,050	17,017,650	22,455,700	99.9%	<	42,455,700	31.2%	Diskominfo
		2	10	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	84,200,000	15,300,000	16,917,500	3,080,000	11,939,500	15,019,500	88.8%	<	30,319,500	36.0%	Diskominfo
		2	10	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	36,000,000	4,458,650	5,000,000	3,058,300	1,931,100	4,989,400	99.8%	<	9,448,050	26.2%	Diskominfo
		2	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Bulan	5,700,000	1,075,000	1,440,000	-	-	-	0.0%	<	1,075,000	18.9%	Diskominfo
		2	10	01	18	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bulan	409,000,000	86,390,000	123,000,000	92,049,482	30,805,800	122,855,282	99.9%	<	209,245,282	51.2%	Diskominfo
		2	10	01	20	Penyediaan Pegawai Tidak Tetap	OB	266,217,416	60,419,000	88,960,200	36,250,000	38,810,200	75,060,200	84.4%	<	135,479,200	50.9%	Diskominfo
		2	10	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	548,427,520	119,589,000	173,000,000	137,665,000	31,640,000	169,305,000	97.9%	<	288,894,000	52.7%	Diskominfo
		2	10	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tahun	313,000,000	69,718,000	70,000,000	16,900,000	47,378,000	64,278,000	91.8%	<	133,996,000	42.8%	Diskominfo
		2	10	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Tahun	150,653,520	25,879,167	29,300,000	7,135,000	13,484,500	20,619,500	70.4%	<	46,498,667	30.9%	Diskominfo
		2	10	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tahun	156,278,520	1,500,000	23,500,000	-	-	-	0.0%	<	1,500,000	1.0%	Diskominfo
		2	10	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	64,491,632	13,100,000	15,780,000	-	13,394,000	13,394,000	84.9%	<	26,494,000	41.1%	Diskominfo
		2	10	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pasang	400,000,000	80,000,000	35,525,000	-	33,262,500	33,262,500	93.6%	<	113,262,500	28.3%	Diskominfo

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		2	10	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	244,204,000	39,840,000	40,000,000	18,354,000	21,041,000	39,395,000	98.5%	<	79,235,000	32.4%	Diskominfo
		2	10	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	9,958,500	4,236,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100.0%	<	5,436,000	54.6%	Diskominfo
		2	10	15	24	Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah Daerah (Otsus)	Paket	-	-	800,000,000	-	777,219,000	777,219,000	97.2%	<	777,219,000	0.0%	Diskominfo
		2	10	15	28	Pengumpulan Informasi Daerah	Tahun	40,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Diskominfo
		2	10	15	29	Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)	Tahun	180,000,000	-	74,000,000	-	69,594,000	69,594,000	94.0%	<	69,594,000	38.7%	Diskominfo
		2	10	15	30	Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi	Tahun	100,000,000	-	22,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	90.9%	<	20,000,000	20.0%	Diskominfo
		2	10	15	31	Pengelolaan Media Center	Tahun	88,467,750	-	17,000,000	-	16,896,000	16,896,000	99.4%	<	16,896,000	19.1%	Diskominfo
		2	10	15	32	Sosialisasi dan Promosi Potensi Daerah	Tahun	72,157,500	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Diskominfo
		2	10	15	33	Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	Tahun	53,373,525	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Diskominfo
		2	10	15	34	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (Otsus)	Tahun	-	-	765,000,000	-	758,720,000	758,720,000	99.2%	<	758,720,000	0.0%	Diskominfo
		2	10	17	02	Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi	Tahun	150,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Diskominfo
		2	10	17	03	Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Informatika	Tahun	150,000,000	-	140,000,000	67,757,000	69,855,000	137,612,000	98.3%	<	137,612,000	91.7%	Diskominfo
		2	10	18	04	Pengelolaan dan Koordinasi dengan Media Publik	Tahun	200,000,000	-	37,000,000	16,800,000	18,260,000	35,060,000	94.8%	<	35,060,000	17.5%	Diskominfo
		2	10	20	01	Pengelolaan data dan Informasi Publik	bulan	89,899,000	112,141,000.0	89,899,000	28,546,000	59,947,000	88,493,000	98.4%	<	200,634,000	223.2%	Diskominfo
		2	10	20	02	Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe	bulan	59,985,000	49,736,376.0	59,985,000	19,685,000	39,803,000	59,488,000	99.2%	<	109,224,376	182.1%	Diskominfo
		2	10	20	03	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe (Otsus)	bulan	516,450,000	49,736,376.0	516,450,000	-	514,000,000	514,000,000	99.5%	<	563,736,376	109.2%	Diskominfo
		11	01	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bulan	12,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	709,500	1,459,500	97.3%	<	2,959,500	23.7%	Disperindagkop

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		11	01	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	1,129,039,608	99,488,814	159,749,558	42,585,564	59,578,855	102,164,419	64.0%	<	201,653,233	17.9%	Disperindagkop
		11	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	625,335,000	98,725,000	134,205,000	51,000,000	82,605,000	133,605,000	99.6%	<	232,330,000	37.2%	Disperindagkop
		11	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	119,567,500	22,101,600	29,500,000	5,588,800	23,886,700	29,475,500	99.9%	<	51,577,100	43.1%	Disperindagkop
		11	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	47,400,000	8,894,750	8,506,000	-	8,257,900	8,257,900	97.1%	<	17,152,650	36.2%	Disperindagkop
		11	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	323,000,000	38,570,000	52,114,450	44,350,000	7,395,510	51,745,510	99.3%	<	90,315,510	28.0%	Disperindagkop
		11	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	29,600,000	-	15,000,000	4,000,000	10,960,000	14,960,000	99.7%	<	14,960,000	50.5%	Disperindagkop
		11	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	315,000,000	87,392,536	142,600,000	75,889,500	66,632,100	142,521,600	99.9%	<	229,914,136	73.0%	Disperindagkop
		11	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	800,425,000	207,561,000	262,525,000	110,675,000	125,650,000	236,325,000	90.0%	<	443,886,000	55.5%	Disperindagkop
		11	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Bulan	27,200,000	298,172,000	202,390,600	74,550,000	124,315,000	198,865,000	98.3%	<	497,037,000	1827.3%	Disperindagkop
		11	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bulan	49,000,000	352,313,000	9,500,000	9,450,000	-	9,450,000	99.5%	<	361,763,000	738.3%	Disperindagkop
		11	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	UB	289,187,500	45,769,800	51,037,500	22,876,440	27,187,000	50,063,440	98.1%	<	95,833,240	33.1%	Disperindagkop
		11	01	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Bulan	24,500,000	4,900,000	4,900,000	2,800,000	1,805,000	4,605,000	94.0%	<	9,505,000	38.8%	Disperindagkop
		11	01	02		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit	140,707,100		-			-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		11	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pasang	155,804,000	-	46,845,000	-	34,172,500	34,172,500	72.9%	<	34,172,500	21.9%	Disperindagkop
		11	01	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Bulan	44,300,000	-	3,000,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		11	01	05	39	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Bulan	6,372,330	-		-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		11	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	7,029,200	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		11	01	15	13	Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah dan Bansos Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Penindustrian	Keg	-	-	20,000,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		11	01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Paket	123,075,800	-	59,875,000	-	59,043,000	59,043,000	98.6%	<	59,043,000	48.0%	Disperindagkop
		11	01	18	12	Pengadaan Modal Mobiler, Komputer dan Kelembagaan dan Legalitas Koperasi	Unit	1,056,479,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		11	01	22	22	Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Persen	73,800,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		06	01	15	05	Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi	Keg	1,155,171,600	55,360,000	52,395,000		49,532,100	49,532,100	94.5%	<	104,892,100	9.1%	Disperindagkop
		06	01	15	06	Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK)	Keg	7,485,250,000	-	-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		06	01	15	09	Pembinaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Keg	981,216,000	-	-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop
		11	01	20	01	Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Pameran Produk Industri Kecil dan UKM	Persen	218,460,000	-	400,000,000	-	398,003,050	398,003,050	99.5%	<	398,003,050	182.2%	Disperindagkop
		06	01	18	03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	Pasar	1,012,450,000	2,818,285,000	768,000,000	-	716,881,530	716,881,530	93.3%	<	3,535,166,530	349.2%	Disperindagkop
		06	01	18	08	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk (DAK)	Pasar	20,006,950,000	2,818,285,000	1,342,825,000	-	1,278,472,700	1,278,472,700	95.2%	<	4,096,757,700	20.5%	Disperindagkop
		06	01	18	10	Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga pasar	Kecamatan	2,203,151,905	299,571,000	329,450,000	312,048,500	16,200,000	328,248,500	99.6%	<	627,819,500	28.5%	Disperindagkop
		07	01	16	20	Pengawasan Produk IKM Makanan/Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Serta Promosi dan Informasi)	Bulan	288,490,600	-	29,800,000		28,996,800	28,996,800	97.3%	<	28,996,800	10.1%	Disperindagkop
		07	01	16	21	Pengadaan Mesin. Peralatan Produksi IKM	Unit	2,824,595,900	-	-		-	-	0.0%	<	-	0.0%	Disperindagkop

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		07	01	19	05	Pengembangan Industri Kerajinan Daerah (OTSUS)	Paket		-	570,000,000	-	558,241,000	558,241,000	97.9%	<	558,241,000	0.0%	Disperindagkop
		07	01	19	06	Penyediaan Sarana Industri Kecil dan Menengah (OTSUS)	Paket		-	920,000,000	-	273,457,000	273,457,000	0.0%	<	273,457,000	0.0%	Disperindagkop
		07	01	25	02	Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe	Bulan	23,200,350		640,000,000	94,628,400	485,350,545	579,978,945	90.6%	<	579,978,945	2499.9%	Disperindagkop
		2	13	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	374,225,770	241,137,138	102,400,000	22,506,328	17,952,589	40,458,917	39.5%	<	281,596,055	75.2%	Disporapar
		2	13	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	470,320,000	87,600,000	87,920,000	32,360,000	45,960,000	78,320,000	89.1%	<	165,920,000	35.3%	Disporapar
		2	13	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	448,400,000	585,500,000	69,200,000	31,850,000	35,450,000	67,300,000	97.3%	<	652,800,000	145.6%	Disporapar
		2	13	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer,dll)	Unit	880,418,164	134,020,000	144,324,650	138,276,600	2,000,000	140,276,600	97.2%	<	274,296,600	31.2%	Disporapar
		2	13	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	UB	304,420,000	26,802,700	28,140,000	9,697,000	17,627,000	27,324,000	97.1%	<	54,126,700	17.8%	Disporapar
						Pendidikan Dan Pelatihan Formal	bulan	40,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		2	13	16	02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan				60,000,000	-	56,800,000	56,800,000	94.7%	<	56,800,000	0.0%	Disporapar
		2	13	16	16	Pembinaan dan Seleksi Paskibra Kota Lhokseumawe	Orang	204,520,850	33,494,250	40,000,000		39,440,000	39,440,000	98.6%	<	72,934,250	35.7%	Disporapar
		2	13	17	02	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Orang	150,000,000	74,600,000	100,000,000	-	91,400,000	91,400,000	91.4%	<	166,000,000	110.7%	Disporapar
		2	13	17	04	Pelatihan Tenaga Terampil Pembekalan Pemuda Kota Lhokseumawe	Orang	250,000,000		80,000,000	-	76,000,000	76,000,000	95.0%	<	76,000,000	30.4%	Disporapar
		2	13	17	05	Pelatihan Perbengkelan Bagi Pemuda (OTSUS)				500,000,000	-	447,335,000	447,335,000	89.5%	<	447,335,000	0.0%	Disporapar
		2	13	20	04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	cabang	1,021,639,600					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		2	13	20	31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Keg	1,459,926,430	158,730,000.0	555,790,000	90,180,000	463,920,324	554,100,324	99.7%	<	712,830,324	48.8%	Disporapar
		2	13	20		Pelaksanaan Turnamen Walikota Cup Lhokseumawe	keg	1,395,163,520					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		2	13	20	40	Pembinaan dan Permasalahan 11 Cabang Olahraga Binaan Disporapar Kota Lhokseumawe	Cabor		-	1,000,000,000	-	997,650,000	997,650,000	99.8%	<	997,650,000	0.0%	Disporapar
		2	13	20	41	Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Unggulan Daerah (OTSUS)	Cabang	-	100,000,000	500,000,000	-	-	-	0.0%	<	100,000,000	0.0%	Disporapar
		2	13	21	13	Pembangunan Lapangan Olah Raga	Lapangan	549,459,000	247,073,000	550,000,000	-	547,877,000	547,877,000	99.6%	<	794,950,000	144.7%	Disporapar
		3	02	15	29	Pelatihan Enterpreneurship Kepariwisata		27,703,400					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		3	02	15	30	Pendataan Objek Wisata		21,590,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		3	02	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	unit	200,852,074					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		3	02	16	07	Pengembangan; sosialisasi; dan penerapan serta pengawasan standarisasi	keg	154,084,010					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		3	02	16	10	Promosi potensi dan obyek pariwisata	keg	139,610,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		3	02	11	11	Lomba Layang Tunang Kota Lhokseumawe	org	140,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
				17		Sosialisasi Wisata Halal	org	49,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
				18		Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal	org	191,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Disporapar
		17	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	2,068,106,981	95,536,625	111,867,025	60,256,025	50,822,050	111,078,075	99%	<	206,614,700	10%	ARPUS
		17	01	01	20	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	OB	719,772,125	107,159,425	135,690,075	65,662,575	60,771,500	126,434,075	93%	<	233,593,500	63%	ARPUS
		17	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer dll)	Jenis	48,000,000	4,850,000	80,000,000	79,595,000	-	79,595,000	99%	<	84,445,000	20%	ARPUS
		17	01	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	UB	131,484,000	25,745,700	26,600,000	12,436,900	13,394,850	25,831,750	97%	<	51,577,450	155%	ARPUS
		17	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	UB	154,400,000	25,230,850	29,600,000	13,899,000	14,912,050	28,811,050	97%	<	54,041,900	41%	ARPUS
		17	01	02	45	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Paket	15,000,000	-	60,000,000	58,450,000	-	58,450,000	97%	<	58,450,000	183%	ARPUS

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		17	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pasang	200,000,000	-	51,382,500	51,000,000	-	51,000,000	99%	<	51,000,000	26%	ARPUS
		17	01	15	12	Pengadaan Meubeleur Perpustakaan Daerah (DAK)	Unit	719,940,000		719,940,000	405,000	1,560,000	1,965,000	0%	<	1,965,000	1%	ARPUS
		17	01	15	13	Pengadaan Perangkat TIK Perpustakaan Daerah (DAK)	Unit	427,120,000		427,120,000	-	119,030,202	119,030,202	28%	<	119,030,202	17%	ARPUS
		17	01	15	14	Penyusunan Detail Engineering Design				40,000,000		39,500,000	39,500,000	99%	<	39,500,000	9%	ARPUS
		18	01	15	02	Pengumpulan data	Keg	100,000,000		15,000,000		14,385,000	14,385,000	96%	<	14,385,000	14%	ARPUS
		18	01	19	3	Bimbingan Teknis Tenaga Arsip	Keg	180,000,000		40,000,000		36,460,000	36,460,000	91%	<	36,460,000	20%	ARPUS
		10	03	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	bln	1,424,000,000	-	239,154,466	72,238,000	156,919,966	229,157,966	95.8%	<	229,157,966	16.1%	Sekretariat Daerah
		10	03	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	bln	335,330,000	264,860,433	98,000,000	72,238,000	25,690,650	97,928,650	99.9%	<	362,789,083	108.2%	Sekretariat Daerah
		10	03	15	04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jenis	1,080,025,000	336,440,000	492,400,000	301,765,000	189,018,000	490,783,000	99.7%	<	827,223,000	76.6%	Sekretariat Daerah
		10	03	15	20	Pelaksanaan Kegiatan protokoler Pemko Lhokseumawe	bln	1,973,000,000	17,917,200	149,500,000	24,110,800	101,621,600	125,732,400	84.1%	<	143,649,600	7.3%	Sekretariat Daerah
		10	03	15	21	Pelaksanaan Peliputan untuk Publikasi dan doktasi	bln	1,754,000,000	116,860,200	297,296,000	84,806,000	197,816,550	282,622,550	95.1%	<	399,482,750	22.8%	Sekretariat Daerah
		10	03	18	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bln	4,479,300,000	608,200,000	734,800,000	223,600,000	489,554,000	713,154,000	97.1%	<	1,321,354,000	29.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bln	142,299,000	9,900,000	20,000,000	-	15,000,000	15,000,000	75.0%	<	24,900,000	17.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	6,477,130,808	864,132,203	1,095,730,808	-	935,006,907	935,006,907	85.3%	<	1,799,139,110	27.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	795,850,000	197,080,000	161,250,000	-	159,450,000	159,450,000	98.9%	<	356,530,000	44.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	bln	1,948,808,600	251,130,000	353,150,000	-	350,300,000	350,300,000	99.2%	<	601,430,000	30.9%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	bln	2,633,896,996	367,938,996	368,037,996	-	367,739,000	367,739,000	99.9%	<	735,677,996	27.9%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	bln	872,920,040	176,438,040	219,997,700	-	215,988,400	215,988,400	98.2%	<	392,426,440	45.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bln	882,419,500	189,786,900	239,859,500	-	239,557,000	239,557,000	99.9%	<	429,343,900	48.7%	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	1,221,347,500	67,765,000	150,000,000	-	149,168,000	149,168,000	99.4%	<	216,933,000	17.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bln	1,008,522,000	193,801,500	294,000,000	-	280,844,391	280,844,391	95.5%	<	474,645,891	47.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	bln	9,454,700,000	1,603,720,000	1,685,000,000	-	1,666,166,000	1,666,166,000	98.9%	<	3,269,886,000	34.6%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah	bln	51,910,000,000	3,247,869,644	3,125,000,000	-	3,123,327,935	3,123,327,935	99.9%	<	6,371,197,579	12.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	01	19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	bln	13,382,464,420	2,073,130,000	2,787,050,000	-	2,392,080,000	2,392,080,000	85.8%	<	4,465,210,000	33.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	44,628,870,776	1,733,972,768	1,712,951,831	-	1,687,561,500	1,687,561,500	98.5%	<	3,421,534,268	7.7%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Unit Bln	3,624,220,000	635,131,989	741,000,000	-	725,129,131	725,129,131	97.9%	<	1,360,261,120	37.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit Bln	1,890,750,000	424,917,080	617,000,000	-	526,390,098	526,390,098	85.3%	<	951,307,178	50.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	bln	1,074,054,750	227,365,500	279,059,750	-	278,445,000	278,445,000	99.8%	<	505,810,500	47.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	1,532,905,750	345,723,750	453,425,750	-	452,838,000	452,838,000	99.9%	<	798,561,750	52.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	bln	193,626,600	46,647,600	46,691,600	-	46,610,000	46,610,000	99.8%	<	93,257,600	48.2%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon	bln	445,008,560	87,731,400	88,728,560	-	88,196,000	88,196,000	99.4%	<	175,927,400	39.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	bln	583,950,000	24,900,000	141,000,000	-	140,624,000	140,624,000	99.7%	<	165,524,000	28.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	bln	100,320,000	24,895,000	25,000,000	-	24,620,000	24,620,000	98.5%	<	49,515,000	49.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	bln	1,267,007,500	128,302,520	266,834,250	-	265,851,756	265,851,756	99.6%	<	394,154,276	31.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	bln	738,357,450	-	50,000,000	-	45,000,000	45,000,000	90.0%	<	45,000,000	6.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	04	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Buku	348,075,000	-	29,698,700	6,501,900	21,843,400	28,345,300	95.4%	<	28,345,300	8.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	45	Pembinaan dan Pengembangan Anggota KORPRI Kota Lhokseumawe	Orang	152,627,500	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	47	Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Buku	713,283,382	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	03	05	50	Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI	Orang	433,462,100	53,360,000	99,600,000	7,310,000	90,420,000	97,730,000	98.1%	<	151,090,000	34.9%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	54	Penyusunan Uraian Tugas dan Jabatan Perangkat Daerah	Buku	802,268,500	-	46,089,300	42,108,600	3,955,700	46,064,300	99.9%	<	46,064,300	5.7%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	55	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Buku	188,841,800	-	29,993,700	-	29,773,700	29,773,700	99.3%	<	29,773,700	15.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	56	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat	Keg	416,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	57	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Buku	357,811,635	-	39,800,000	7,310,000	31,426,900	38,736,900	97.3%	<	38,736,900	10.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	58	Penyusunan Peraturan Tata Naskah Dinas	Buku	911,764,890	-	39,799,700	2,244,800	34,830,926	37,075,726	93.2%	<	37,075,726	4.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	buku	149,615,110	660,000	2,200,000	-	1,480,000	1,480,000	67.3%	<	2,140,000	1.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	07	04	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Buku	118,525,000	29,223,500	19,800,000	-	17,930,000	17,930,000	90.6%	<	47,153,500	39.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	07	05	Penyusunan RKT dan TAPKIN	buku	316,930,000	46,611,000	46,594,600	16,884,000	28,680,400	45,564,400	97.8%	<	92,175,400	29.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	10	01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	buku	977,918,008	43,802,900	43,615,800	22,625,800	20,456,600	43,082,400	98.8%	<	86,885,300	8.9%	Sekretariat Daerah
		01	03	10	02	Penyusunan dan pembahasan Laporan Keterangan dan Petanggungjawaban (LKPJ)	buku	1,445,849,490	34,628,828	51,996,925	36,996,925	14,610,250	51,607,175	99.3%	<	86,236,003	6.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	10	03	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	buku	514,425,002	83,325,091	102,523,467	100,748,652	-	100,748,652	98.3%	<	184,073,743	35.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	10	04	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	Buku	361,373,950	24,054,102	31,985,100	27,255,100	-	27,255,100	85.2%	<	51,309,202	14.2%	Sekretariat Daerah
		01	03	10	11	Penyusunan Standard Pelayanan Minimum (SPM)	Dok	888,496,890	24,054,102	33,810,000	-	30,247,500	30,247,500	89.5%	<	54,301,602	6.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	16	06	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dalam Rangka Kunjungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	bln	724,311,689	124,287,000	99,140,000	-	90,210,816	90,210,816	91.0%	<	214,497,816	29.6%	Sekretariat Daerah
		01	03	16	09	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	bln	1,818,098,780	34,990,000	149,000,000	-	72,358,461	72,358,461	48.6%	<	107,348,461	5.9%	Sekretariat Daerah
		01	03	16	12	Penyelenggaraan pendukung kegiatan pejabat daerah / Provinsi / Pusat	bln	4,634,723,900	700,997,000	497,062,776	209,043,000	271,565,840	480,608,840	96.7%	<	1,181,605,840	25.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	16	15	Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	bln	1,455,300,000	-	100,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50.0%	<	50,000,000	3.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	17	04	Pelayanan LPSE	bln	33,927,275,142	201,903,500	188,848,550	93,192,000	90,897,700	184,089,700	97.5%	<	385,993,200	1.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	17	05	Pelayanan LPSE Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	bln	350,188,300	62,073,250	84,828,750	42,303,552	36,519,200	78,822,752	92.9%	<	140,896,002	40.2%	Sekretariat Daerah
		01	03	17	06	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	bln	1,341,353,500	87,973,223	198,800,000	70,660,201	121,734,878	192,395,079	96.8%	<	280,368,302	20.9%	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	03	17	07	Workshop Manajemen Resiko dalam Proses Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa	Kali	644,247,917	-	100,000,000	17,602,600	81,648,200	99,250,800	99.3%	<	99,250,800	15.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kali	1,179,020,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru yang Lebih Tinggi	Naskah	3,003,912,400	536,622,000	560,206,500	56,073,000	495,200,500	551,273,500	98.4%	<	1,087,895,500	36.2%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	18	Penataan Administrasi Persuratan	Bulan	139,230,000	-	13,250,000	9,495,000	3,747,500	13,242,500	99.9%	<	13,242,500	9.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	22	Peningkatan Kapasitas Staf Ahli	OB	451,777,400	121,449,668	196,140,000	61,004,400	126,739,250	187,743,650	95.7%	<	309,193,318	68.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	24	Penyusunan dan Evaluasi Uraian Tugas SKPD	Buku	244,204,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	25	Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota	Perda / Perkada	358,383,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	30	Penanganan perkara litigasi dan Non litigasi Pemerintah Kota Lhokseumawe	Bln	4,035,968,000	718,900,000	2,299,195,000	297,000,000	201,212,500	498,212,500	21.7%	<	1,217,112,500	30.2%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	31	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	bln	172,816,000	27,895,000	29,000,000	-	28,760,000	28,760,000	99.2%	<	56,655,000	32.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	34	Pelaksanaan dan Penerapan Analisis Beban Kerja	Buku	305,255,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	36	Legal Drafting	Kali	215,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	37	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Qanun Kota Lhokseumawe	Kali	431,000,000	-	40,215,000	-	38,965,000	38,965,000	96.9%	<	38,965,000	9.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	03	Upaya Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Bln	911,700,000	47,527,984	29,950,000	29,797,000	-	29,797,000	99.5%	<	77,324,984	8.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	05	Pengadaan/ Pembebasan Tanah	Bln	160,076,350,000	8,276,381,059	23,810,000,000	22,260,000,000	641,858,313	22,901,858,313	96.2%	<	31,178,239,372	19.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	10	Verifikasi Hasil Pilkades dan Pemberian Kompensasi Keuchik yang Berakhir Masa Jabatan	Bln	5,494,590,000	-	239,250,000	-	163,681,000	163,681,000	68.4%	<	163,681,000	3.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	16	Pendataan dan Penamaan Rupabumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe	Dok	638,137,500	-	235,236,000	148,236,000	86,575,293	234,811,293	99.8%	<	234,811,293	36.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	18	Pemberian Pelayanan Kesehatan Untuk Mukim	Bln	167,890,250	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	20	Penyelenggaraan HUT OTDA dan Pendukung Resepsi Kenegaraan	Kali	400,653,293	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	03	27	21	Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong	bln	609,899,490	206,768,946	74,300,000	-	73,383,646	73,383,646	98.8%	<	280,152,592	45.9%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	25	Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan dan Gampong	Bln	1,343,122,000	-	98,885,536	-	97,562,378	97,562,378	98.7%	<	97,562,378	7.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	26	Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong	bln	356,306,000	49,320,100	50,000,000	-	44,220,000	44,220,000	88.4%	<	93,540,100	26.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	27	Penyelesaian konflik pertanahan dalam wilayah Kota Lhokseumawe	bln	746,495,000	81,398,000	68,880,000	-	65,582,618	65,582,618	95.2%	<	146,980,618	19.7%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	30	Pemekaran Kecamatan dan Gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe	Bln	808,940,154	19,998,000	74,782,402	-	74,200,902	74,200,902	99.2%	<	94,198,902	11.6%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	31	Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Saweu Gampong	Bln	2,891,070,105	-	198,921,320	-	197,711,320	197,711,320	99.4%	<	197,711,320	6.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	32	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong	Bln	255,255,000	-	39,800,000	-	37,310,000	37,310,000	93.7%	<	37,310,000	14.6%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	35	Kelancaran Penyelenggaraan DESK PILKADA	Kali	2,297,550,255	-	234,465,323	190,675,203	26,287,799	216,963,002	92.5%	<	216,963,002	9.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	27	36	Penyerahan Remisi oleh Walikota Pada Lembaga Permayarakatan Lhokseumawe	Kali	2,216,151,300	-	198,800,000	-	190,867,888	190,867,888	96.0%	<	190,867,888	8.6%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	01	Penyusunan Laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek	Dok	149,303,052	-	24,580,000	-	23,065,240	23,065,240	93.8%	<	23,065,240	15.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	02	Pelaksanaan penyaluran beras miskin	triwulan	2,690,140,578	333,491,850	-	-	-	-	0.0%	<	333,491,850	12.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	03	Penyusunan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibiayai dengan APBD	Buku	853,070,130	35,687,100	45,000,000	-	34,713,000	34,713,000	77.1%	<	70,400,100	8.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	04	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	bln	19,620,797,615	-	37,700,000	6,930,000	29,146,700	36,076,700	95.7%	<	36,076,700	0.2%	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	03	30	15	Facilitasi Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah	bln	665,394,236	34,573,700	296,000,000	84,423,250	149,172,301	233,595,551	78.9%	<	268,169,251	40.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	16	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	bln	11,024,221,511	-	36,400,000	2,170,000	31,030,000	33,200,000	91.2%	<	33,200,000	0.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	17	Penyusunan Laporan Otsus Kota Lhokseumawe	kali	410,476,759	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	18	Penyusunan Laporan DAK Kota Lhokseumawe	kali	4,897,570	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	19	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Orang	1,037,499,489	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	30	17	Assesment organisasi BUMD Kota Lhokseumawe	Keg	-	-	50,000,000	-	43,693,600	43,693,600	87.4%	<	43,693,600	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	31	06	Peningkatan sarana dan prasarana mushola Setdako Lhokseumawe	bln	135,600,000	11,300,000	25,000,000	2,100,000	22,800,000	24,900,000	99.6%	<	36,200,000	26.7%	Sekretariat Daerah
		01	03	31	10	Pembinaan Marching band Kota Lhokseumawe	bln	646,200,000	46,700,000	356,323,296	-	350,906,462	350,906,462	98.5%	<	397,606,462	61.5%	Sekretariat Daerah
		01	03	31	14	Kegiatan Ceramah Rutin Jum'at	bln	233,817,000	6,280,000	40,000,000	-	21,320,000	21,320,000	53.3%	<	27,600,000	11.8%	Sekretariat Daerah
		01	03	31	15	Perlombaan Baris Berbaris	kali	928,200,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	02	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Hari Besar	1,083,941,600	95,485,000	218,400,000	48,728,000	100,737,000	149,465,000	68.4%	<	244,950,000	22.6%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	05	Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra	Orang	2,307,038,000	309,800,000	579,800,000	-	563,610,200	563,610,200	97.2%	<	873,410,200	37.9%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	06	Peringatan Hari Perdamaian Aceh (15 Agustus 2005)	Kali	269,967,522	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	07	Peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe	Keg	217,952,070	11,595,000	30,000,000	-	29,965,000	29,965,000	99.9%	<	41,560,000	19.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	09	Pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	bln	122,102,000	18,190,000	19,915,000	4,860,000	15,040,000	19,900,000	99.9%	<	38,090,000	31.2%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	10	Peningkatan pelayanan kunjungan tamu ke Kota Lhokseumawe	bln	1,989,798,600	399,843,600	200,000,000	-	198,455,000	198,455,000	99.2%	<	598,298,600	30.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	12	Pelaksanaan peringatan Hari-Hari Besar Nasional	kali	3,073,600,000	525,799,000	348,900,000	-	334,253,900	334,253,900	95.8%	<	860,052,900	28.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	13	Anjagsana Ramadhan	kali	1,674,000,000	-	120,000,000	119,700,000	-	119,700,000	99.8%	<	119,700,000	7.2%	Sekretariat Daerah
		01	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	19,500,000	4,394,000	11,700,000	1,494,000	8,522,000	10,016,000	85.6%	<	14,410,000	73.9%	Sekwan
		01	04	01	02	Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Bulan	1,871,810,530	296,789,159	392,762,106	105,021,124	249,866,547	354,887,671	90.4%	<	651,676,830	34.8%	Sekwan
		01	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	189,600,000	31,770,000	35,350,000	9,177,000	20,555,000	29,732,000	84.1%	<	61,502,000	32.4%	Sekwan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	731,115,000	129,756,550	153,080,000	25,824,900	114,030,100	139,855,000	91.4%	<	269,611,550	36.9%	Sekwan
		01	04	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	721,672,696	189,963,400	242,886,300	42,573,900	137,307,300	179,881,200	74.1%	<	369,844,600	51.2%	Sekwan
		01	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	504,144,158	151,294,450	156,261,700	45,084,600	92,065,900	137,150,500	87.8%	<	288,444,950	57.2%	Sekwan
		01	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	147,792,500	14,044,000	25,000,000	-	15,049,000	15,049,000	60.2%	<	29,093,000	19.7%	Sekwan
		01	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	7,191,875,000	1,243,421,000	1,340,675,000	417,685,000	834,540,000	1,252,225,000	93.4%	<	2,495,646,000	34.7%	Sekwan
		01	04	01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Bulan	8,125,000,000	2,618,848,450	2,578,000,000	909,980,072	1,625,283,648	2,535,263,720	98.3%	<	5,154,112,170	63.4%	Sekwan
		01	04	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	OB	6,662,077,078	1,805,900,000	2,179,299,590	1,023,550,000	1,124,334,400	2,147,884,400	98.6%	<	3,953,784,400	59.3%	Sekwan
		01	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	unit	715,450,000	-	96,000,000	-	77,189,290	77,189,290	80.4%	<	77,189,290	10.8%	Sekwan
		01	04	02	11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	3,567,439,570	1,039,439,696	901,134,751	202,530,000	672,755,200	875,285,200	97.1%	<	1,914,724,896	53.7%	Sekwan
		01	04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	bulan	1,738,680,787	161,091,400	663,745,400	140,800,000	499,548,000	640,348,000	96.5%	<	801,439,400	46.1%	Sekwan
		01	04	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Unit	350,000,000	69,973,500	70,000,000	34,342,500	29,182,500	63,525,000	90.8%	<	133,498,500	38.1%	Sekwan
		01	04	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	1,667,600,000	226,197,300	314,400,000	58,047,000	119,253,000	177,300,000	56.4%	<	403,497,300	24.2%	Sekwan
		01	04	02	30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	562,184,500	140,447,000	109,699,475	18,916,000	55,794,000	74,710,000	68.1%	<	215,157,000	38.3%	Sekwan
		01	04	02	31	Pemeliharaan rutin/ berkala Jaringan Listrik	bulan	113,595,000	33,589,000	78,595,000	6,000,000	53,717,600	59,717,600	76.0%	<	93,306,600	82.1%	Sekwan
		01	04	02	32	Pemeliharaan rutin/ berkala Jaringan Telpo	bulan	95,995,000	26,025,000	15,940,000	-	13,085,000	13,085,000	82.1%	<	39,110,000	40.7%	Sekwan
		01	04	02	34	Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Parkir dan Halaman Kantor	bulan	169,940,000	51,000,000	68,000,000	-	67,698,000	67,698,000	99.6%	<	118,698,000	69.8%	Sekwan
		01	04	02	35	Pemeliharaan rutin / berkala jaringan air minum	bulan	137,995,000	30,516,000	34,995,000	8,629,000	20,300,000	28,929,000	82.7%	<	59,445,000	43.1%	Sekwan
		01	04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	bulan	532,815,000	-	375,000,000	-	343,707,000	343,707,000	91.7%	<	343,707,000	64.5%	Sekwan
		01	04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	2,927,877,167	653,835,500	1,205,512,875	208,150,000	942,952,650	1,151,102,650	95.5%	<	1,804,938,150	61.6%	Sekwan
		01	04	15	01	Pembahasan Rancangan Qanun Daerah	Raqan	4,427,526,503	855,867,200	892,149,500	308,599,500	555,102,030	863,701,530	96.8%	<	1,719,568,730	38.8%	Sekwan
		01	04	15	03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Bulan	7,693,628,433	2,145,515,100	2,596,388,110	778,371,700	1,430,302,100	2,208,673,800	85.1%	<	4,354,188,900	56.6%	Sekwan
		01	04	15	04	Rapat-rapat paripurna	Bulan	-	-	82,920,000	-	37,367,300	37,367,300	45.1%	<	37,367,300	0.0%	Sekwan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	04	15	05	Kegiatan Reses	Laporan	5,567,764,000	654,395,400	880,264,000	410,470,800	438,132,000	848,602,800	96.4%	<	1,502,998,200	27.0%	Sekwan
		01	04	15	07	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	Dewan	4,000,000,000	705,341,200	725,000,000	279,692,350	35,515,600	315,207,950	43.5%	<	1,020,549,150	25.5%	Sekwan
		01	04	15	09	Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media	Media	1,169,708,061	300,898,000	659,900,000	208,150,000	316,796,800	524,946,800	79.5%	<	825,844,800	70.6%	Sekwan
		01	04	15	10	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi DPRK Lhokseumawe	Bulan	312,115,100	52,382,975	64,307,324	19,350,000	42,362,475	61,712,475	96.0%	<	114,095,450	36.6%	Sekwan
		01	04	15	11	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	OB	1,950,000,000	360,000,000	600,000,000	105,000,000	362,792,000	467,792,000	78.0%	<	827,792,000	42.5%	Sekwan
		01	04	15	12	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Lhokseumawe	Kali	305,600,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekwan
		01	04	15	13	Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lhokseumawe	Kali	165,310,000	-	40,810,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekwan
		01	04	15	15	Pelantikan Pimpinan DPRK Lhokseumawe	Keg	101,375,000	-	115,000,000	-	100,490,000	100,490,000	87.4%	<	100,490,000	99.1%	Sekwan
		01	04	15	16	Pelantikan Anggota DPRK Lhokseumawe	Keg	357,656,250	-	515,900,000	-	395,603,409	395,603,409	76.7%	<	395,603,409	110.6%	Sekwan
		01	04	15	20	Orientasi Anggota DPRK	dewan	350,000,000	-	674,080,000	-	627,959,900	627,959,900	93.2%	<	627,959,900	179.4%	Sekwan
		01	04	15	21	Buletin Parlemenaria	Edisi	453,492,200	14,292,200	113,517,775	27,450,000	85,132,950	112,582,950	99.2%	<	126,875,150	28.0%	Sekwan
		01	04	15	27	Rapat-rapat Fraksi	Laporan	198,191,351	-	29,710,790	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekwan
		1	05	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	294,200,000	48,524,061	57,000,000	24,868,346	21,573,557	46,441,903	81.5%	<	94,965,964	32.3%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	272,315,000	53,080,000	58,960,000	21,550,000	35,610,000	57,160,000	96.9%	<	110,240,000	40.5%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bulan	230,000,000	44,990,000	83,800,000	13,336,300	70,342,000	83,678,300	99.9%	<	128,668,300	55.9%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	UB	120,074,270	23,608,304	23,700,000	7,003,200	16,650,850	23,654,050	99.8%	<	47,262,354	39.4%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	200,000,000	-	75,562,500	-	71,562,500	71,562,500	94.7%	<	71,562,500	35.8%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	28	02	Kegiatan Saweu Gampong	Bulan	82,000,000	22,500,000	20,000,000	7,925,000	11,350,000	19,275,000	96.4%	<	41,775,000	50.9%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	28	05	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong	Bulan	36,000,000	-	18,000,000	4,400,000	13,450,000	17,850,000	99.2%	<	17,850,000	49.6%	Kecamatan Banda Sakti

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	06	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	262,440,014	39,464,539	64,993,000	13,546,722	27,756,849	41,303,571	64%	<	80,768,110	31%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	1,225,694,125	192,528,559	229,806,925	112,900,000	112,856,925	225,756,925	98%	<	418,285,484	34%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	2	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Unit	36,113,676	6,600,000	52,000,000	-	51,450,000	51,450,000	99%	<	58,050,000	161%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit			10,000,000		9,800,000	9,800,000	98%	<	9,800,000	0%	Kecamatan Blang Mangat
		4	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jenis	200,000,000		80,600,000	-	73,300,000	73,300,000	91%	<	73,300,000	37%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	28	02	Kegiatan Saweu Gampong	Bulan		30,938,100	20,000,000	-	19,262,400	19,262,400	96%	<	50,200,500	0%	Kecamatan Blang Mangat
		1	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik	Bulan	2,112,815,319	45,672,343	88,117,685	24,498,601	26,324,589	50,823,190	57.7%	<	45,672,344	2.2%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	289,000,000	44,455,600	97,161,400	17,880,000	75,738,450	93,618,450	96.4%	<	44,455,601	15.4%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	951,900,000	190,210,000	220,390,000	94,792,800	95,747,200	190,540,000	86.5%	<	190,210,001	20.0%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	106,202,806	4,980,000	40,000,000	11,800,000	27,955,000	39,755,000	99.4%	<	4,980,001	4.7%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Bulan	32,000,000	3,000,000	118,000,000	-	117,801,000	117,801,000	99.8%	<	3,000,001	9.4%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Bulan	127,352,657	23,026,700	23,700,000	10,736,450	12,525,950	23,262,400	98.2%	<	23,026,701	18.1%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Bulan	13,361,400					-	0.0%	<	-	0.0%	
		1	07	02	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Bulan	42,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	
		1	07	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung	50,100,000					-	0.0%	<	-	0.0%	
		1	07	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Psg	312,325,000	1,400,000	62,465,000	0	56,000,000	56,000,000	89.7%	<	1,400,001	0.4%	Kecamatan Muara Satu

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	07	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Pasang	76,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	09	01	Penyediaan Jasa aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Bulan	295,091,879	81,505,000	90,907,500	25,200,000	32,607,500	57,807,500	63.6%	<	81,505,001	27.6%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	09	5	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Bulan	169,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	28	04	Peningkatan Pelatihan Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Bulan	50,280,000	11,085,000	10,000,000	2,450,000	7,370,000	9,820,000	98.2%	<	11,085,001	22.0%	Kecamatan Muara Satu
		3	09	30	07	Penyelenggaraan Kegiatan Masrakat Desa Bidang Sosial Budaya (HUT RI)	Kegiatan	0					-	0.0%	<	-	0.0%	
		4	10	31	15	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Hari	31,477,900		24,940,000			-	0.0%	<	-	0.0%	
		5	11	32	16	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Dok RAPBDES	32,400,000		39,793,650			-	0.0%	<	-	0.0%	
		01	08	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bln	6,000,000	999,000	1,091,000	1,089,000	-	1,089,000	99.8%	<	2,088,000	34.8%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	3,382,389,374	29,338,718	72,165,829	19,275,985	22,966,125	42,242,110	58.5%	<	71,580,828	2.1%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	3,382,389,374	274,911,818	732,387,952	336,407,562	395,233,998	731,641,560	99.9%	<	1,006,553,378	29.8%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	19,091,580	1,680,242	1,614,622	1,607,291	-	1,607,291	99.5%	<	3,287,533	17.2%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	1,033,403,200	192,865,000	223,675,925	109,550,075	111,423,925	220,974,000	98.8%	<	413,839,000	40.0%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	169,632,000	34,512,000	149,632,000	118,952,000	30,294,000	149,246,000	99.7%	<	183,758,000	108.3%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	02	21	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Unit	43,000,000			-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	
		01	08	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Bulan	90,520,560	23,171,200	28,634,078	12,200,850	16,134,400	28,335,250	99.0%	<	51,506,450	56.9%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer)	Bulan	23,106,882	3,300,000	6,323,200	3,000,000	3,300,000	6,300,000	99.6%	<	9,600,000	41.5%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Bulan	52,821,628	8,766,000	55,000,000	54,900,000	-	54,900,000	99.8%	<	63,666,000	120.5%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	pasang	20,000,000		69,517,500	-	69,000,000	69,000,000	99.3%	<	69,000,000	345.0%	Kecamatan Muara Dua

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	08	09	01	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan	OB	531,546,637	81,062,675	87,065,650	36,531,512	49,934,138	86,465,650	99.3%	<	167,528,325	31.5%	Kecamatan Muara Dua
		04	01	28	015	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Hari	35,520,000		25,000,000	24,900,000	-	24,900,000	99.6%	<	24,900,000	70.1%	Kecamatan Muara Dua
		01	09	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12,900,000	990,000	2,550,000	810,000	1,650,000	2,460,000	96.5%	<	3,450,000	26.7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	906,620,911	73,856,840	213,023,397	40,901,859	47,898,180	88,800,039	41.7%	<	162,656,879	17.9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	99,817,215	16,509,395	23,886,466	5,903,653	17,393,663	23,297,316	97.5%	<	39,806,711	39.9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	55,000,000	8,822,375	9,000,000	2,445,000	5,983,000	8,428,000	93.6%	<	17,250,375	31.4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	31,596,750	3,275,055	4,596,750	1,509,810	3,075,802	4,585,612	99.8%	<	7,860,667	24.9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	37,000,000	1,597,500	5,000,000	-	-	-	0.0%	<	1,597,500	4.3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar Kota Lhoksemaawe)	Bulan	502,900,000	116,483,700	145,700,000	48,903,000	90,755,900	139,658,900	95.9%	<	256,142,600	50.9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	7,481,278,958	1,804,561,787	1,865,833,505	751,450,000	1,051,125,902	1,802,575,902	96.6%	<	3,607,137,689	48.2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Unit	199,042,000	-	34,000,000	-	33,890,000	33,890,000	99.7%	<	33,890,000	17.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bulan	126,910,000	30,871,500	39,910,000	9,955,000	16,437,000	26,392,000	66.1%	<	57,263,500	45.1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	UB	175,810,000	33,001,500	33,300,000	14,118,000	12,274,000	26,392,000	79.3%	<	59,393,500	33.8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	UB	1,327,984,905	222,213,710	256,000,000	74,982,900	136,586,800	211,569,700	82.6%	<	433,783,410	32.7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	09	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	137,805,025	76,020,600	38,920,600	1,575,000	26,530,000	28,105,000	72.2%	<	104,125,600	75.6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Org	329,895,184	54,036,000	184,063,800	-	175,423,800	175,423,800	95.3%	<	229,459,800	69.6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	183,153,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Buku	7,826,119	-	1,200,000	-	1,189,800	1,189,800	99.2%	<	1,189,800	15.2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	07	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bulan	488,647,334	119,918,380	78,635,610	7,680,000	69,120,000	76,800,000	97.7%	<	196,718,380	40.3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	07	14	Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan bencana	Bulan	199,000,000	23,918,380	35,000,000	18,837,300	-	18,837,300	53.8%	<	42,755,680	21.5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	07	19	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Lokasi	-	7,986,921,013	1,364,390	-	-	-	0.0%	<	7,986,921,013	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	09	07	21	Pelatihan dan Pembekalan Teknis Pemadam Kebakaran	Orang	82,950,363	-	25,000,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas	02	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Bln	2,681,983,426	1,500,000	2,940,000	645,000	2,241,000	2,886,000	98.2%	<	4,386,000	0.2%	Inspektorat
		02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	434,000,000	74,541,486	86,800,000	32,911,037	51,952,647	84,863,684	97.8%	<	159,405,170	36.7%	Inspektorat
		02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	549,199,600	109,839,920	133,839,920	45,838,420	86,879,040	132,717,460	99.2%	<	242,557,380	44.2%	Inspektorat
		02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bln	179,156,500	27,190,800	57,743,200	-	57,664,200	57,664,200	99.9%	<	84,855,000	47.4%	Inspektorat
		02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bln	218,161,500	17,557,250	16,763,400	8,524,400	8,195,400	16,719,800	99.7%	<	34,277,050	15.7%	Inspektorat
		02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Eks	10,260,000	2,625,000	3,000,000	285,000	855,000	1,140,000	38.0%	<	3,765,000	36.7%	Inspektorat
		02	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	547,547,000	127,563,600	170,445,800	75,511,600	84,740,200	160,251,800	94.0%	<	287,815,400	52.6%	Inspektorat
		02	01	02	11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	112,665,720	-	92,000,000	-	91,269,100	91,269,100	99.2%	<	91,269,100	81.0%	Inspektorat
		02	01	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	UB	129,000,000	20,089,400	34,800,000	10,811,800	21,556,700	32,368,500	93.0%	<	52,457,900	40.7%	Inspektorat
		02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	UB	301,200,000	76,969,850	140,200,000	51,012,150	83,893,600	134,905,750	96.2%	<	211,875,600	70.3%	Inspektorat

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Bln	49,550,000	10,000,000	23,000,000	4,225,000	18,600,000	22,825,000	99.2%	<	32,825,000	66.2%	Inspektorat
		02	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	195,105,360	47,190,000	63,000,000	59,381,596	-	59,381,596	94.3%	<	106,571,596	54.6%	Inspektorat
		02	01	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	LHP	1,864,170,000	718,134,000	984,280,300	470,250,000	510,128,300	980,378,300	99.6%	<	1,698,512,300	91.1%	Inspektorat
		02	01	20	16	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Laporan	184,000,000	39,680,000	40,000,000	39,875,000	-	39,875,000	99.7%	<	79,555,000	43.2%	Inspektorat
		02	01	20	17	Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Aceh, BPKP, Irjen	Laporan	300,000,000	78,073,700	140,553,700	42,975,000	96,635,700	139,610,700	99.3%	<	217,684,400	72.6%	Inspektorat
		02	01	20	36	Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	RKA-SKPD	250,000,000	58,949,800	88,380,700	-	86,880,700	86,880,700	98.3%	<	145,830,500	58.3%	Inspektorat
		02	01	20	37	Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe	Bulan	1,500,000,000	294,780,200	301,690,900	102,891,950	181,427,130	284,319,080	94.2%	<	579,099,280	38.6%	Inspektorat
		02	01	20	47	Verifikasi Laporan RAD PPK	Laporan	124,000,000	-	34,328,000	7,625,000	26,573,000	34,198,000	99.6%	<	34,198,000	27.6%	Inspektorat
		02	01	20	49	Reviu LKJP Pemerintah Kota Lhokseumawe	Laporan	124,000,000	-	21,607,750	872,750	18,170,000	19,042,750	88.1%	<	19,042,750	15.4%	Inspektorat
		02	01	20	50	Evaluasi LKJP SKPD Kota Lhokseumawe	SKPK	76,000,000	-	40,769,650	29,094,650	10,625,000	39,719,650	97.4%	<	39,719,650	52.3%	Inspektorat
		02	01	20		Survei Penilaian Integritas	0	-	-	60,000,000	-	41,390,400	41,390,400	69.0%	<	41,390,400	0.0%	Inspektorat
		02	01	20	62	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Lhokseumawe	0	-	-	30,000,000	-	29,940,000	29,940,000	99.8%	<	29,940,000	0.0%	Inspektorat
	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik	02	01	21	04	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa & Aparatur	Orang	408,600,800	110,718,582	135,172,800	122,480,000	12,250,000	134,730,000	99.7%	<	245,448,582	60.1%	Inspektorat
		14	01	15	03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Buku	106,681,430	10,000,000	-	-	-	-	0%	<	10,000,000	9.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		14	01	15	05	Penyusunan Buku IPM	Buku	371,600,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		14	01	15	06	Penyusunan Buku Lhokseumawe dalam Angka	Buku	123,681,430	32,000,000	-	-	-	-	0%	<	32,000,000	25.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	03	01	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bulan	25,153,012	2,512,500	3,790,000	942,000	1,396,500	2,338,500	62%	<	4,851,000	19.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	1,713,795,651	151,536,166	246,068,649	107,450,249	61,418,926	168,869,175	69%	<	320,405,341	18.7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	817,820,000	128,819,800	167,000,000	67,600,000	96,200,000	163,800,000	98%	<	292,619,800	35.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	307,598,291	49,255,460	48,323,930	15,040,700	32,043,930	47,084,630	97%	<	96,340,090	31.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	203,688,196	32,818,000	56,330,000	1,800,000	50,389,400	52,189,400	93%	<	85,007,400	41.7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	153,509,173	22,581,825	26,620,000	3,540,575	16,779,850	20,320,425	76%	<	42,902,250	27.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	239,404,510	28,750,000	39,900,000	-	28,992,000	28,992,000	73%	<	57,742,000	24.1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	904,600,000	159,200,000	242,600,000	90,700,000	109,800,000	200,500,000	83%	<	359,700,000	39.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Unit	-	-	31,000,000	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Unit	226,402,064	254,903,750	399,479,029	16,160,000	330,856,000	347,016,000	87%	<	601,919,750	265.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Bulan	218,328,500					-	0%	<	-	0.0%	
		03	01	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Bulan	217,912,910	37,463,550	39,600,000	6,986,150	22,501,500	29,487,650	74%	<	66,951,200	30.7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Bulan	315,724,150	56,177,600	60,181,050	8,493,200	36,284,900	44,778,100	74%	<	100,955,700	32.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	290,400,000	54,720,000	70,000,000	2,000,000	34,850,000	36,850,000	53%	<	91,570,000	31.5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jenis	50,000,000	-	300,000,000	-	279,395,276	279,395,276	93%	<	279,395,276	558.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	02	45	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Unit	105,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	03	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	232,050,000	-	101,500,000		92,580,000	92,580,000	91%	<	92,580,000	39.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bln	305,225,000	30,255,000	35,000,000	4,720,000	30,020,000	34,740,000	99%	<	64,995,000	21.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	7,901,200	400,000	1,999,900		320,000	320,000	16%	<	720,000	9.1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan	03	01	10	07	Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	Bulan	255,368,247	23,009,350	31,699,800	30,720,000	-	30,720,000	97%	<	53,729,350	21.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	10	23	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Bulan	331,791,400	58,916,800	64,849,800	-	44,991,300	44,991,300	69%	<	103,908,100	31.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	10	24	Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)	Laporan	314,829,275	26,442,600	53,625,200	24,925,200	26,640,000	51,565,200	96%	<	78,007,800	24.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	16	13	Penyusunan Percepatan Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	Dokumen	225,106,615	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	16	15	Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian	Buku	628,728,850	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	16	18	Kemitraan Pendanaan Pembangunan Dengan Lembaga Dalam/Luar Negeri	Mitra	555,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	18	06	Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	Buku	111,501,915	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	19	15	Monitoring Air Limbah Komunal (Kegiatan SANIMAS-IDB)		25,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	19	18	Optimalisasi Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Meter Kubik/hari	236,523,300	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	19	20	Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	Dokumen	1,805,414,915	437,276,746	183,939,600	56,549,800	126,350,200	182,900,000	99%	<	620,176,746	34.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	19	21	Monitoring Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT)	Dokumen	220,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	19	23	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik	Dokumen	50,000,000	-	41,556,766	11,100,000	29,991,633	41,091,633	99%	<	41,091,633	82.2%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	14	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Buku	399,115,879	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	15	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Buku	778,822,785	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	18	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	Hari	1,087,174,052	189,622,100	206,577,475	188,102,505	-	188,102,505	91%	<	377,724,605	34.7%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	19	Penyusunan Perubahan KUA	Buku	353,572,279	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan
		03	01	21	21	Penyusunan Perubahan PPAS	Buku	883,264,693	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	21	31	Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Buku	332,944,136	48,625,868	85,450,768	-	77,381,168	77,381,168	91%	<	126,007,036	37.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	34	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Buku	333,594,313	63,247,567	160,400,800	614,600	148,728,492	149,343,092	93%	<	212,590,659	63.7%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	39	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Buku	100,080,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	43	Penyusunan Sistem Informasi, Monitoring & Evaluasi Kota Lhokseumawe	Aplikasi	209,131,429	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	44	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Kota Lhokseumawe	Laporan	161,548,440	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	49	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan	Buku	322,745,136	57,996,100	130,003,600	-	116,358,981	116,358,981	90%	<	174,355,081	54.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	59	Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)	Triwulan	185,000,000	-	191,409,300	32,510,000	156,738,500	189,248,500	99%	<	189,248,500	102.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	66	Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK	Buku	731,211,611	147,080,893	199,700,000	13,435,700	177,380,850	190,816,550	96%	<	337,897,443	46.2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	67	Sosialisasi dan Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Kali	230,560,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	71	Verifikasi Renja SKPK Lhokseumawe	Laporan	312,404,353	36,040,500	55,801,300	-	49,488,500	49,488,500	89%	<	85,529,000	27.4%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	72	Verifikasi Perubahan Renja SKPK Lhokseumawe	Laporan	312,487,993	36,355,000	55,812,200	-	49,374,200	49,374,200	88%	<	85,729,200	27.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	77	Penyusunan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe	Buku	395,418,114	72,830,000	76,964,600	26,250,000	32,265,600	58,515,600	76%	<	131,345,600	33.2%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	78	Manajemen Pengelolaan e-Musrenbang	Bulan	377,688,561	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	79	Pemeliharaan Jaringan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Elektronik	Bulan	415,633,681	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	21	80	Identifikasi Fungsionalisasi Sarana dan Prasarana Pembangunan	Dokumen	35,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	21	83	Penyusunan Dokumen RPI2JM	Dokumen	25,000,000	-	40,850,000	-	40,235,200	40,235,200	98%	<	40,235,200	160.9%	Badan Perencanaan
		03	01	21	84	Koordinasi Pembentukan Satgas Randal Bidang Cipta Karya	Laporan	135,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	85	Manajemen Pengelolaan i-Ren	Triwulan	153,855,953	-	262,889,200	-	211,387,100	211,387,100	80%	<	211,387,100	137.4%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	21	89	Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK Fisik	Dokumen	187,428,003	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen	65,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	22	25	Kajian Sektor Perekonomian di Wilayah Kota Lhokseumawe	Buku	52,916,631	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	22	27	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Corporate Social Rensponsibility (CSR)	Dokumen	3,500,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	22	32	Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Buku	63,000,000	74,996,436	132,492,350	12,840,000	65,595,655	78,435,655	59%	<	153,432,091	243.5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	22	33	Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Buku	13,000,000	-	47,052,550	-	39,872,550	39,872,550	85%	<	39,872,550	306.7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	22	34	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Buku	13,573,630	-	70,456,500	-	48,596,425	48,596,425	69%	<	48,596,425	358.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	22	40	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan dan dunia Usaha	Buku	14,724,350	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	22	41	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Buku	13,974,350	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	22	42	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Buku	63,974,350	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	22	43	Kajian Identifikasi Sektor Unggulan Kota Lhokseumawe	Buku	15,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	23	14	Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Buku	157,867,253	34,594,900	32,832,150	32,592,450	-	32,592,450	99%	<	67,187,350	42.6%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	23	28	Evaluasi Rencana Induk Pendidikan Kota Lhokseumawe 2008-2018	Buku	25,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan
		03	01	23	35	Penilaian Adopsi Usulan Musrenbang Kota Lhokseumawe dan Reses DPRK Lingkup Bidang Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM Dalam RKPD	Buku	40,000,000	-	22,856,050	-	22,039,150	22,039,150	96%	<	22,039,150	55.1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	23	36	Analisis Kesesuaian Program/Kegiatan yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan yang Dianggarkan Lingkup Bidang Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM	Buku	40,000,000	-	23,169,050	-	22,322,350	22,322,350	96%	<	22,322,350	55.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	23	37	Analisis Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD dengan Prioritas Pembangunan RPJMD Lingkup Bidang Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM	Buku	50,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	24	27	Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K - BK)	Laporan	299,064,516	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	24	28	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Lhokseumawe	Database	85,000,000	-	-	-	-	-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	26	03	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe	Laporan	883,933,456	195,863,275	239,676,275	26,019,550	171,247,825	197,267,375	82%	<	393,130,650	44.5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	26	09	Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe	Bulan	449,553,331	-	-	-		-	0%	<	-	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	26	12	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe	Buku	261,441,593	-	73,215,950	3,220,000	54,307,650	57,527,650	79%	<	57,527,650	22.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03	01	30	01	Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Pengembangan	Bulan	166,000,000	-	17,199,900	3,910,000	11,020,000	14,930,000	87%	<	14,930,000	9.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	30	05	Penyusunan Kajian Belanja Publik Kota Lhokseumawe	Buku	134,000,000	-	35,199,900	30,990,000	3,255,000	34,245,000	97%	<	34,245,000	25.6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	30	06	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Buku	130,000,000	49,118,000	58,639,800	-	46,983,380	46,983,380	80%	<	96,101,380	73.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		03	01	30	08	Pengembangan Inovasi Potensi Kelautan dan Perikanan Kota Lhokseumawe	Buku	35,000,000	60,588,200	59,074,800	-	35,616,600	35,616,600	60%	<	96,204,800	274.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		04	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	10,054,006,060	10,923,000	11,310,000	3,310,500	7,915,500	11,226,000	99.3%	<	22,149,000	0.2%	BPKD
		04	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	2,227,041,943	411,876,269	525,400,000	195,215,651	204,870,603	400,086,254	76.1%	<	811,962,523	36.5%	BPKD
		04	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	1,865,462,036	298,716,000	416,100,000	168,750,000	238,950,000	407,700,000	98.0%	<	706,416,000	37.9%	BPKD
		04	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	503,769,628	120,000,000	119,800,000	37,338,972	81,813,868	119,152,840	99.5%	<	239,152,840	47.5%	BPKD
		04	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	206,111,200	34,449,250	34,400,000	11,409,000	19,113,000	30,522,000	88.7%	<	64,971,250	31.5%	BPKD
		04	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	400,351,560	64,694,500	69,900,000	23,412,500	23,450,000	46,862,500	67.0%	<	111,557,000	27.9%	BPKD
		04	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	Bulan	1,071,720,101	426,487,658	307,500,000	199,302,100	107,446,800	306,748,900	99.8%	<	733,236,558	68.4%	BPKD
		04	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	3,663,499,226	659,870,000	876,600,700	347,207,600	367,805,600	715,013,200	81.6%	<	1,374,883,200	37.5%	BPKD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		04	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1,818,922,040		772,000,000	768,955,780	550,000	769,505,780	99.7%	<	769,505,780	42.3%	BPKD
		04	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	974,941,423	535,781,000	443,000,000	244,200,000	191,520,625	435,720,625	98.4%	<	971,501,625	99.6%	BPKD
		04	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	769,883,000	205,305,810	405,000,000	36,370,000	360,743,313	397,113,313	98.1%	<	602,419,123	78.2%	BPKD
		04	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	627,401,228	124,312,000	178,331,762	72,545,100	100,081,400	172,626,500	96.8%	<	296,938,500	47.3%	BPKD
		04	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Bulan	602,587,769	96,926,750	83,800,000	27,553,750	53,095,050	80,648,800	96.2%	<	177,575,550	29.5%	BPKD
		04	01	02	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir & Perlengkapan Kantor	Bulan	83,354,200	2,878,000	8,000,000	-	7,990,000	7,990,000	99.9%	<	10,868,000	13.0%	BPKD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	04	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	255,255,000		230,717,500	-	206,972,790	206,972,790	89.7%	<	206,972,790	81.1%	BPKD
		04	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Pasang	255,255,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Bulan	185,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jenis	202,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	07	04	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan		-	-	15,000,000	13,172,000	-	13,172,000	87.8%	<	13,172,000	0.0%	BPKD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	04	01	08	01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Kegiatan	20,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	15	02	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	Triwulan	565,575,950	7,200,000	-	-	-	-	0.0%	<	7,200,000	1.3%	BPKD
		04	01	15	14	Verifikasi Dokumen Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	0	-	-	118,862,400	48,826,075	67,708,123	116,534,198	98.0%	<	116,534,198	0.0%	BPKD
		04	01	15	15	Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe	Bulan	40,000,000	98,571,900	-	-	-	-	0.0%	<	98,571,900	246.4%	BPKD
		04	01	15	16	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Bulan	462,816,550	45,810,000	175,118,700	76,315,300	96,447,700	172,763,000	98.7%	<	218,573,000	47.2%	BPKD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		04	01	16	06	Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah	Triwulan	380,000,000	7,200,000	-	-	-	-	0.0%	<	7,200,000	1.9%	BPKD
		04	01	16	20	Pendataan Wajib Pajak PBB	Triwulan	7,200,000	372,167,572	-	-	-	-	0.0%	<	372,167,572	5169.0%	BPKD
		04	01	16	29	Sosialisasi dan Informasi Retribusi	Kali	72,000,000	98,571,900	-	-	-	-	0.0%	<	98,571,900	136.9%	BPKD
		04	01	16	38	Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	Bulan	7,500,000	45,810,000	-	-	-	-	0.0%	<	45,810,000	610.8%	BPKD
		04	01	16	45	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Triwulan	90,000,000		-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	16	46	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bulan	42,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	16	50	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Bulan	909,160,684		260,425,000	-	260,099,232	260,099,232	99.9%	<	260,099,232	28.6%	BPKD
		04	01	16	52	Penagihan Rutin Tunggal Retribusi Daerah	Triwulan	1,060,451,890		230,909,600	-	203,606,400	203,606,400	88.2%	<	203,606,400	19.2%	BPKD
		04	01	16	53	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Triwulan	-	98,571,900	144,173,400	-	134,393,300	134,393,300	93.2%	<	232,965,200	0.0%	BPKD
		04	01	16	54	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Bulan	311,717,742		81,275,000	-	79,105,000	79,105,000	97.3%	<	79,105,000	25.4%	BPKD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan ..	04	01	17	01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Buku	208,377,500	39,604,500	-	-		-	0.0%	<	39,604,500	19.0%	BPKD
		04	01	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku	260,000,000	55,260,000	60,000,000	-	59,940,000	59,940,000	99.9%	<	115,200,000	44.3%	BPKD
		04	01	17	03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Dokumen	174,620,000			-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK	Jenis	5,961,067,000	885,123,190	1,233,456,500	452,964,810	719,576,200	1,172,541,010	95.1%	<	2,057,664,200	34.5%	BPKD
		04	01	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK	Jenis	1,528,050,000	254,967,200	223,695,000	80,796,550	116,820,500	197,617,050	88.3%	<	452,584,250	29.6%	BPKD
		04	01	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jenis	1,426,550,000	192,765,700	181,633,000	19,680,000	124,242,900	143,922,900	79.2%	<	336,688,600	23.6%	BPKD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		04	01	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jenis	877,850,000	255,702,000	183,575,500	-	159,967,100	159,967,100	87.1%	<	415,669,100	47.4%	BPKD
		04	01	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jenis	356,820,000		64,900,800	30,630,500	34,192,500	64,823,000	99.9%	<	64,823,000	18.2%	BPKD
		04	01	17	18	Penyusunan Standar Kebutuhan Umum	0	-	-	35,460,000	-	29,790,000	29,790,000	84.0%	<	29,790,000	0.0%	BPKD
		04	01	17	21	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Buku	291,771,000	38,602,050	48,260,000	26,712,000	12,190,000	38,902,000	80.6%	<	77,504,050	26.6%	BPKD
		04	01	17	22	Pembinaan /Pergeseran Anggaran	SKPD	323,663,000	55,678,906	65,280,000	57,635,200	1,760,000	59,395,200	91.0%	<	115,074,106	35.6%	BPKD
		04	01	17	23	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancangan	350,922,400			-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	17	26	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	Dokumen	1,130,345,000	283,584,740	254,774,400	113,607,500	140,867,600	254,475,100	99.9%	<	538,059,840	47.6%	BPKD
		04	01	17	27	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jenis	781,182,400	204,149,185	150,931,049	84,741,500	60,675,023	145,416,523	96.3%	<	349,565,708	44.7%	BPKD
		04	01	17	29	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Orang	267,836,400	68,400,000	73,000,000	5,252,000	59,490,900	64,742,900	88.7%	<	133,142,900	49.7%	BPKD
		04	01	17	30	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK	Jenis	220,765,000			-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	17	35	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	319,156,081			-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	17	38	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	Triwulan	540,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		04	01	17	40	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jenis	1,491,975,720	432,599,698	189,056,000	28,846,000	158,551,500	187,397,500	99.1%	<	619,997,198	41.6%	BPKD
		04	01	17	47	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	Dokumen	59,950,780		13,500,000	12,799,900	-	12,799,900	94.8%	<	12,799,900	21.4%	BPKD
		04	01	17	48	Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan	Dokumen	154,084,628		35,314,500	34,313,500	-	34,313,500	97.2%	<	34,313,500	22.3%	BPKD
		04	01	17	51	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Triwulan	1,511,344,873		309,492,400	115,479,975	184,796,325	300,276,300	97.0%	<	300,276,300	19.9%	BPKD
		04	01	17	52	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Buku	320,752,400		30,888,100	20,945,000	6,492,000	27,437,000	88.8%	<	27,437,000	8.6%	BPKD
		04	01	17	53	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Buku	365,697,400		48,024,350	-	35,470,100	35,470,100	73.9%	<	35,470,100	9.7%	BPKD
		04	01	17	54	Penyusunan Perubahan KUA	Buku	182,713,200		26,378,300	-	22,387,900	22,387,900	84.9%	<	22,387,900	12.3%	BPKD
		04	01	17	55	Penyusunan Perubahan PPAS	Buku	377,661,200		48,515,300	-	36,597,400	36,597,400	75.4%	<	36,597,400	9.7%	BPKD
		04	01	18	02	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jenis	446,192,320	74,977,000	84,895,000	19,852,500	64,388,500	84,241,000	99.2%	<	159,218,000	35.7%	BPKD
		04	01	18	05	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	439,047,180	69,973,500	79,947,500	18,374,000	60,913,500	79,287,500	99.2%	<	149,261,000	34.0%	BPKD
		04	01	19	04	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Buku	159,424,932	26,025,000	30,000,000	24,603,200	5,320,000	29,923,200	99.7%	<	55,948,200	35.1%	BPKD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		04	01	19	08	Inventaris, Sertifikasi Barang / Aset Daerah	Bulan	231,552,500	10,630,000	105,725,000	4,620,000	99,510,000	104,130,000	98.5%	<	114,760,000	49.6%	BPKD
		04	01	19	09	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Triwulan	413,725,000	30,000,000	99,896,800	29,905,300	65,397,535	95,302,835	95.4%	<	125,302,835	30.3%	BPKD
		04	01	19	11	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Bulan	2,543,003,054	467,768,179	230,000,000	78,977,700	149,888,000	228,865,700	99.5%	<	696,633,879	27.4%	BPKD
		04	01	19	12	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Bulan	184,595,410	7,991,000	35,000,000	20,050,000	14,900,000	34,950,000	99.9%	<	42,941,000	23.3%	BPKD
		04	01	19	28	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	SKPD	282,384,000	63,320,000	50,000,000	13,760,000	36,133,000	49,893,000	99.8%	<	113,213,000	40.1%	BPKD
		04	01	19	31	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Triwulan	817,875,000	198,979,265	160,000,000	63,616,776	94,447,000	158,063,776	98.8%	<	357,043,041	43.7%	BPKD
		04	01	19	33	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Buah	251,302,994	40,960,000	45,000,000	6,930,000	37,935,000	44,865,000	99.7%	<	85,825,000	34.2%	BPKD
		04	01	19	34	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Triwulan	214,514,000		49,896,800	23,498,600	25,325,500	48,824,100	97.9%	<	48,824,100	22.8%	BPKD
		04	01	19	36	Patok / Batas Aset Daerah	Paket	55,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	19	37	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Dokumen	55,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	19	38	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah	Dokumen	55,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	19	39	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana	Dokumen	55,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		04	01	19	40	Buku Status Barang Milik Daerah	Buku	278,868,200	-	50,000,000	-	49,958,800	49,958,800	99.9%	<	49,958,800	17.9%	BPKD
		04	01	19	41	Sensus Barang Milik Daerah	Dokumen	429,028,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	19	43	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumaw	Dokumen	55,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		04	01	19	50	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Orang	55,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BPKD
		05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	642,000,000	96,631,702	140,400,000	-	102,959,725	102,959,725	73.3%	<	199,591,427	31.1%	BKPSDM
		05	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	195,024,033	29,959,450	49,578,510	29,706,820	19,617,790	49,324,610	99.5%	<	79,284,060	40.7%	BKPSDM
		05	01	01	19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	953,538,952	139,755,850	164,350,000	73,880,000	77,900,000	151,780,000	92.4%	<	291,535,850	30.6%	BKPSDM
		05	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Unit	58,518,840	14,835,000	126,425,000		125,474,996	125,474,996	99.2%	<	140,309,996	239.8%	BKPSDM
		05	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	13,248,400	2,994,500	15,000,000		14,793,800	14,793,800	98.6%	<	17,788,300	134.3%	BKPSDM
		05	01	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	UB	144,440,000	28,698,350	32,300,000		31,855,320	31,855,320	98.6%	<	60,553,670	41.9%	BKPSDM
		05	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Pasang	94,755,000		128,960,000		86,960,000	86,960,000	67.4%	<	86,960,000	91.8%	BKPSDM
		05	01	05	05	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Kali	94,755,000	28,650,000	48,000,000	10,130,000	32,200,399	42,330,399	88.2%	<	70,980,399	74.9%	BKPSDM
		05	01	15	01	Pengembangan Sistem E-Performance	Orang	1,704,755,000	374,041,000.0	184,747,000	9,456,500	7,410,000	16,866,500	9.1%	<	390,907,500	22.9%	BKPSDM
		05	01	37	02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Orang	1,269,000,300	176,674,214		-		-	0.0%	<	176,674,214	13.9%	BKPSDM

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	01	15	10	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Orang	147,000,000	32,635,320.0	34,419,000	27,220,000	4,910,000	32,130,000	93.3%	<	64,765,320	44.1%	BKPSDM
		05	01	15	11	Pembuatan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	Dokumen	89,000,000		36,695,716	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BKPSDM
		05	01	15	13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dengan Sistem e-Formasi	Kali	93,000,000		57,452,400	-	47,348,200	47,348,200	82.4%	<	47,348,200	50.9%	BKPSDM
		05	01	15	15	Evaluasi dan Verifikasi Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Selesai Pendidikan	Kali	74,500,000		21,628,600	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	BKPSDM
		05	01	15	19	Pengelolaan dan Peremajaan Data Sstem e-Lapkin	Kali	75,780,500		41,635,250	21,635,250	13,450,000	35,085,250	84.3%	<	35,085,250	46.3%	BKPSDM
		05	01	16	01	Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS	Kali	288,155,000	29,972,750	61,720,000	33,002,000	28,368,000	61,370,000	99.4%	<	91,342,750	31.7%	BKPSDM
		05	01	16	02	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Periode	140,000,000	60,945,000	85,729,625	39,687,425	45,667,200	85,354,625	99.6%	<	146,299,625	104.5%	BKPSDM
		05	01	16	04	Selsksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Periode	245,000,000		490,310,100	14,820,000	233,357,500	248,177,500	50.6%	<	248,177,500	101.3%	BKPSDM
		05	01	16	24	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Orang	245,000,000	49,948,500	80,000,000	20,273,000	56,706,600	76,979,600	96.2%	<	126,928,100	51.8%	BKPSDM
		05	01	16	25	Pelaksanaan Sidang Penetapan Hukuman Disiplin PNS	PNS	134,000,000	26,610,000		-		-	0.0%	<	26,610,000	19.9%	BKPSDM
		05	01	16	27	Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberiaan Penghargaan Kepada PNS Masa Purna Bakti	Kali	97,883,056	28,545,000	46,242,700	-	43,430,900	43,430,900	93.9%	<	71,975,900	73.5%	BKPSDM
		05	01	16	43	Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Honoror dan Tenaga Bakti	Kali	82,000,000	10,000,000		-		-	0.0%	<	10,000,000	12.2%	BKPSDM
		05	01	16	48	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Kali			135,143,960	60,453,760	4,060,000	64,513,760	47.7%	<	64,513,760	0.0%	BKPSDM

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	01	16	49	Pengelolaan Sistem Informasi Tata Letak Naskah	Orang	11,150,000	-		-		-	0.0%	<	-	0.0%	BKPSDM
		05	01	16	50	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Pemko Lhokseumawe	Orang	11,150,000	-	51,296,400	-	51,202,800	51,202,800	99.8%	<	51,202,800	459.2%	BKPSDM
		05	01	16	51	Selsksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	11,150,000		9,854,000	9,585,800	-	9,585,800	97.3%	<	9,585,800	86.0%	BKPSDM
		06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	306,099,000	38,511,669	59,000,000	16,317,662	32,389,610	48,707,272	82.6%	<	87,218,941	28.5%	DSI & PD
		06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keunagan	OB	540,925,203	100,320,000	100,375,400	38,400,000	56,460,000	94,860,000	94.5%	<	195,180,000	36.1%	DSI & PD
		06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	143,050,910	23,924,650	37,942,000	5,955,576	31,788,054	37,743,630	99.5%	<	61,668,280	43.1%	DSI & PD
		06	01	01	18	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan keLuar Daerah	Bulan	379,777,000	83,999,800	210,375,000	49,255,000	159,785,560	209,040,560	99.4%	<	293,040,360	77.2%	DSI & PD
		06	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	unit	12,004,000	-	1,614,025,000	-	1,494,024,000	1,494,024,000	92.6%	<	1,494,024,000	12446.1%	DSI & PD
		06	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	416,680,000	4,900,000	105,200,000	74,970,000	25,200,000	100,170,000	95.2%	<	105,070,000	25.2%	DSI & PD
		06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	112,915,000	15,223,528	18,000,000	3,509,934	12,808,116	16,318,050	90.7%	<	31,541,578	27.9%	DSI & PD
		06	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit	27,116,164	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	61,459,000	-	99,742,500	-	69,500,000	69,500,000	69.7%	<	69,500,000	113.1%	DSI & PD
		06	01	05	21	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Bulan	101,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	15	01	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	unit	11,069,250,036	2,567,745,289	2,041,595,000.00	-	2,035,499,775	2,035,499,775	99.7%	<	4,603,245,064	41.6%	DSI & PD
		06	01	15	10	Pemberian Jasa Keagamaan	bln	8,773,095,934	1,741,850,959	1,421,900,000	559,925,000	821,262,000	1,381,187,000	97.1%	<	3,123,037,959	35.6%	DSI & PD
		06	01	15	11	Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mesjid	unit	8,530,500,000	2,189,889,700	992,200,000	-	969,828,324	969,828,324	97.7%	<	3,159,718,024	37.0%	DSI & PD
		06	01	15	15	Peningkatan Pembinaan Mesjid Kecamatan	Unit Mesjid	564,772,400	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	15	16	Manasik Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji	Calhaj	2,469,754,100	-	325,000,000	-	323,775,000	323,775,000	99.6%	<	323,775,000	13.1%	DSI & PD
		06	01	16	03	Pengembangan Syiar Islam dalam Masyarakat	peserta	1,504,952,295	-	1,798,396,000	396,720,000	1,343,901,125	1,740,621,125	96.8%	<	1,740,621,125	100.0%	DSI & PD
		06	01	16	04	Peningkatan penertiban Syariat Islam	Bulan	240,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	05	Memperingati Hari-hari Besar Agama Islam	Hari	907,178,425	227,474,700	247,595,650	94,825,000	151,010,700	245,835,700	99.3%	<	473,310,400	52.2%	DSI & PD
		06	01	16	08	Pembinaan Qari-Qariah Kota Lhokseumawe	bln	330,000,003	49,999,839	71,100,000	22,560,300	48,367,225	70,927,525	99.8%	<	120,927,364	36.6%	DSI & PD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	01	16	09	Pembinaan Hafidz-Hafidz Kota Lhokseumawe	bln	493,355,000	93,203,384	99,350,000	46,060,656	43,961,153	90,021,809	90.6%	<	183,225,193	37.1%	DSI & PD
		06	01	16	10	Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim	bln	1,835,391,829	325,495,425	377,980,000	85,903,918	265,700,589	351,604,507	93.0%	<	677,099,932	36.9%	DSI & PD
		06	01	16	11	Pelatihan Tajhiz Mayat Bagi Warga Masyarakat Se-Wilayah Kota Lhokseumawe	peserta	175,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	12	Pengembangan Tilawatil Quran	bln	161,500,000	-	189,400,000	52,944,850	134,216,150	187,161,000	98.8%	<	187,161,000	115.9%	DSI & PD
		06	01	16	13	Lomba Da'i Se Kota Lhokseumawe	Orang	65,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	16	Penyelesaian Itsbat Nikah Korban Konflik dan Keluarga Kurang Mampu	bln	712,132,512	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	17	Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Penegak Hukum Syariat Islam	bln	105,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	18	Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Syariat Islam	bln	76,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	19	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Syariat Islam	bln	105,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	20	Sosialisasi Pelaksanaan Qanun dan Perwal Bidang Syariat Islam	bln	105,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	16	21	Penyusunan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam	buku	30,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	21	01	Pembangunan sarana dan prasarana Dayah	unit	8,027,773,088	3,407,963,393	1,423,500,000	-	1,412,922,879	1,412,922,879	99.3%	<	4,820,886,272	60.1%	DSI & PD
		06	01	21	02	Pembangunan sarana dan prasarana Dayah (OTSUS)	unit	-	-	1,000,000,000	-	970,150,000	970,150,000	97.0%	<	970,150,000	100.0%	DSI & PD
		06	01	21	xx	Pembentukan Badan Usaha Ekonomi Produktif di Dayah	Kec	2,220,229,550	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	21	03	Perlombaan Baca Kitab Kuning	santri	966,240,000	-	40,000,000.00	-	39,949,875	39,949,875	99.9%	<	39,949,875	4.1%	DSI & PD
		06	01	21	04	Pelatihan Manajemen Dayah	Orang	195,721,680	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	21	05	Pelatihan Kurikulum Dayah	orang	787,690,210	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	31	02	Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam	Orang	84,817,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	01	31	19	Lomba Pidato tentang Syari'at Islam	Orang	59,600,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	31	20	Lomba Fahmil untuk Pelajar Kota Lhokseumawe	Orang	53,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
		06	01	31	21	Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid	mesjid	47,040,000	-	20,000,000	-	18,899,036	18,899,036	94.5%	<	18,899,036	40.2%	DSI & PD
		06	01	32	04	Pendataan Balai Pengajian dan Dayah se Wilayah Kota Lhokseumawe	keg	295,000,000	-	50,000,000	-	46,499,900	46,499,900	93.0%	<	46,499,900	15.8%	DSI & PD
		06	01	32	04	Pendataan Sarana dan Prasarana Ibadah Masyarakat	Unit Mesjid dan Meunasah	305,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	DSI & PD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	06	02	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bln	13,000,000	999,000	999,000.00	-	996,000	996,000	99.7%	<	1,995,000	15.3%	Sekretariat MPU
		06	02	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	93,064,932	8,074,629	14,086,000	3,326,250	3,603,249	6,929,499	49.2%	<	15,004,128	16.1%	Sekretariat MPU
		06	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bln	50,409,044	8,665,440	8,612,000	-	8,432,440	8,432,440	97.9%	<	17,097,880	33.9%	Sekretariat MPU
		06	02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bln	883,099,659	65,984,400	109,000,000	35,901,500	72,739,050	108,640,550	99.7%	<	174,624,950	19.8%	Sekretariat MPU
		06	02	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	808,175,725	64,408,825	74,406,475	28,500,000	34,300,000	62,800,000	84.4%	<	127,208,825	15.7%	Sekretariat MPU
		06	02	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	UB	78,500,000	17,173,900	21,700,000	8,390,900	12,969,400	21,360,300	98.4%	<	38,534,200	49.1%	Sekretariat MPU
		06	02	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	UB	234,000,000	50,507,300	53,900,000	19,674,450	32,038,150	51,712,600	95.9%	<	102,219,900	43.7%	Sekretariat MPU
		06	02	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	5,141,000	500,000	800,000	-	-	-	0.0%	<	500,000	9.7%	Sekretariat MPU
		06	02	31	05	Pendidikan dan pelatihan bagi para ulama	orang	152,627,500	25,000,000	33,943,975	-	33,763,600	33,763,600	99.5%	<	58,763,600	38.5%	Sekretariat MPU
		06	02	32	07	Investigasi dan Verifikasi Keberadaan Aliran Sesat	Kali	-	-	15,000,000	-	12,300,000	12,300,000	82.0%	<	12,300,000	0.0%	Sekretariat MPU
		06	02	46	02	Pendidikan dan pelatihan bagi para ulama (Simposium Hukum Islam)	Orang	152,627,500	25,000,000	26,560,000	-	26,260,000	26,260,000	98.9%	<	51,260,000	33.6%	Sekretariat MPU
		06	02	46	05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Kali	202,400,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat MPU

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	9,077,900	990,000	999,000	498,000	498,000	996,000	99.7%	<	1,986,000	21.9%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	33,600,516,262	7,022,949	15,631,570	3,945,868	4,353,211	8,299,079	53.1%	<	15,322,028	0.0%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	33,600,516,262	5,551,258,520	14,336,105,380	211,070,800	9,021,916,750	9,232,987,550	64.4%	<	14,784,246,070	44.0%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	11,198,500	1,622,100	1,639,700	817,400	815,300	1,632,700	99.6%	<	3,254,800	29.1%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	558,321,000	94,207,000	109,915,000	54,099,000	55,209,925	109,308,925	99.4%	<	203,515,925	36.5%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	73,373,976	4,980,000	25,000,000	24,850,000	-	24,850,000	99.4%	<	29,830,000	40.7%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	UB	145,610,160	23,110,000	23,760,000	10,215,000	12,200,000	22,415,000	94.3%	<	45,525,000	31.3%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	178,465,600	36,668,600	37,600,000	13,850,000	22,700,000	36,550,000	97.2%	<	73,218,600	41.0%	Sekretariat Baitul Mal
		06	03	47	02	Pembangunan Rumah Kaum dhuafa dana ZIS (Zakat dan Infaq)	Unit	31,127,171,448	5,537,264,920	14,296,546,380	201,321,000	8,992,107,850	9,193,428,850	64.3%	<	14,730,693,770	47.3%	Sekretariat Baitul Mal
		06	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bln	6,600,000	1,398,000	2,000,000	1,002,000	996,000	1,998,000	99.9%	<	3,396,000	51.5%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	2,795,363,003	5,189,750	12,000,000	2,102,500	2,964,750	5,067,250	42.2%	<	10,257,000	0.4%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	01	07	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	OB	2,795,363,003	35,930,500	46,017,400	15,778,500	24,976,000	40,754,500	88.6%	<	76,685,000	2.7%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bln	2,573,079,951	12,457,000	17,717,400	6,796,000	10,062,500	16,858,500	95.2%	<	29,315,500	1.1%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	01	13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bln	31,502,000	1,835,000	4,835,000	2,315,500	2,414,000	4,729,500	97.8%	<	6,564,500	20.8%	Sekretariat Majelis Adat Aceh

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	14,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	
		06	04	01	17	Penyediaan Makanan & Minuman	Bln	93,097,000	8,510,000	11,880,000	3,610,000	8,250,000	11,860,000	99.8%	<	20,370,000	21.9%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	01	18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bln	319,847,435	44,955,400	100,600,000	42,282,000	57,893,093	100,175,093	99.6%	<	145,130,493	45.4%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	341,775,000	51,501,000	58,215,000	24,000,000	30,748,000	54,748,000	94.0%	<	106,249,000	31.1%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	01	23	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	OB	1,384,505,000	264,205,000	304,005,000	130,300,000	169,858,500	300,158,500	98.7%	<	564,363,500	40.8%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	02	11	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer,dll)	Unit	120,523,720	74,545,000	35,500,000	-	35,274,438	35,274,438	99.4%	<	109,819,438	91.1%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	UB	118,800,000	29,190,500	29,300,000	9,718,000	19,566,000	29,284,000	99.9%	<	58,474,500	49.2%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Operasional	UB	83,983,052	23,074,500	23,500,000	8,982,500	14,117,000	23,099,500	98.3%	<	46,174,000	55.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	150,000,000	-	19,165,000	-	19,039,375	19,039,375	99.3%	<	19,039,375	12.7%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan kerja perangkat Daerah	buku	2,300,000	399,000	800,000	-	796,500	796,500	99.6%	<	1,195,500	52.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	07	03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)							-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kali	49,000,000	-	30,000,000	6,650,000	6,650,000	13,300,000	44.3%	<	13,300,000	27.1%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	15	17	Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong	Gampong	136,000,000	-	4,000,000	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	15	31	Pelatihan Dalael Khaerat dan Meurukon	Kel		-		-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	04	17	08	Dialog/sosialisasi untuk generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat	Orang	50,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	
		06	04	17	23	Sosialisasi tentang Peran Lembaga Adat Gampong sebagai Pengendali Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan	Orang	50,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	
		06	04	17	28	Pembinaan Gampong Percontohan Adat Aceh Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe	Gampong	240,000,000					-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	04	19	01	Penyediaan alat-alat kesenian Tradisional							-	0.0%	<	-	0.0%	
		06	04	19	03	Penyediaan Baju Adat Aceh dan Perlengkapannya	Pasang	150,000,000	-	30,000,000		29,740,109	29,740,109	99.1%	<	29,740,109	19.8%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	1	06	04	20	10	Penguatan Lembaga Peradilan Adat Gampong	orang	50,000,000				-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		06	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	30,470,000	4,650,000	4,770,000	2,342,500	2,325,000	4,667,500	97.9%	<	9,317,500	30.6%	Sekretariat MPD
		06	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	295,122,820	49,122,000	62,622,820	24,900,000	37,122,000	62,022,000	99.0%	<	111,144,000	37.7%	Sekretariat MPD
		06	05	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	202,557,225	32,157,000	38,557,225	18,850,000	17,157,000	36,007,000	93.4%	<	68,164,000	33.7%	Sekretariat MPD
		06	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	4,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	<	-	0.0%	Sekretariat MPD
		06	05	02	24	Pemeliharaan Ritin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	186,400,000	43,963,600	47,000,000	20,578,150	26,315,600	46,893,750	99.8%	<	90,857,350	48.7%	Sekretariat MPD
		06	05	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang	200,000,000	-	24,180,000	-	24,000,000	24,000,000	99.3%	<	24,000,000	12.0%	Sekretariat MPD
		06	05	22	08	Penatausahaan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan	Jenis	-	-	100,000,000	-	83,976,100	83,976,100	84.0%	<	83,976,100	0.0%	Sekretariat MPD

Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target Keuangan yang direncanakan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2019 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2019 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Rp	Rp	Rp	Semester 1	Semester 2		Rp	Rp			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Bln	238,791,030	47,880,000	72,859,340	-	72,859,340	72,859,340	100.0%	=	120,739,340	50.6%	P&K	
		1	01	01	20	Penyediaan jasa Pegawai tidak Tetap	org	29,633,075,920	6,899,887,920	10,419,457,920	4,670,094,920	5,749,357,000	10,419,451,920	100.0%	=	17,319,339,840	58.4%	P&K	
		1	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,Komputer dll)	Unit	121,050,000	23,800,000	24,050,000	11,850,000	12,200,000	24,050,000	100.0%	=	47,850,000	39.5%	P&K	
		1	01	03	06	Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor	Gedung	215,000,000	45,000,000	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	100.0%	=	80,000,000	37.2%	P&K	
		1	01	07	06	Sinkronisasi Data Perencanaan	buku	2,638,520	1,200,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000	100.0%	=	81,200,000	3077.5%	P&K	
		1	01	15	68	Peringatan Hari Aksara Internasional	Hari	152,250,000	6,450,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	100.0%	=	56,450,000	37.1%	P&K	
		1	01	15	78	Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (DAK NON FISIK)	Bulan	990,000,000	195,500,000	192,000,000		192,000,000	192,000,000	100.0%	=	387,500,000	39.1%	P&K	
		1	01	15	82	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	Bulan	75,000,000	15,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100.0%	=	25,000,000	33.3%	P&K	
		1	01	15	86	Pembangunan RKB PAUD (DAK)	Ruang	240,400,000		137,750,000		137,750,000	137,750,000	100.0%	=	137,750,000	57.3%	P&K	
		1	01	15	87	Rehabilitasi Ruang Kelas Paud /TK (DAK)	Ruang	403,080,000		95,245,338		95,245,338	95,245,338	100.0%	=	95,245,338	23.6%	P&K	
		1	01	16	70	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		819,160,000		80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	100.0%	=	80,000,000	9.8%	P&K	
		1	01	16	79	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah (DAK)	Ruang	2,539,787,980		645,346,319	-	645,346,319	645,346,319	100.0%	=	645,346,319	25.4%	P&K	
		1	01	16	94	Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah (DAK)	Ruang	6,046,475,000	1,403,749,000.0	2,860,575,540	-	2,860,575,540	2,860,575,540	100.0%	=	4,264,324,540	70.5%	P&K	
		1	01	16	103	Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan SD/MI dan SMP/MTs Serta Bimtek Proktor UN Kota Lhokseumawe (Otsus)	Angkt			500,000,000.00	-	499,999,900	499,999,900	100.0%	=	499,999,900	0.0%	P&K	
		1	01	16	121	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)		552,680,000		50,000,000.00	25,020,000	24,980,000	50,000,000	100.0%	=	50,000,000	9.0%	P&K	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	01	16	129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SD)	sekolah	66,316,000,000	-	20,184,622,000	-	20,184,622,000	20,184,622,000	100.0%	=	20,184,622,000	30.4%	P&K
		1	01	16	132	Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK)	Sekolah	822,405,000	269,633,900.0	588,000,000	-	587,900,000	587,900,000	100.0%	=	857,533,900	104.3%	P&K
		1	01	16	134	Pembangunan Toilet (jamban) berserta sanitasinya (DAK)	Sekolah	1,400,000,000		414,000,000	-	414,000,000	414,000,000	100.0%	=	414,000,000	29.6%	P&K
		1	01	16	136	Olimpiade siswa nasional (OSN) SD dan SMP		343,590,000		50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100.0%	=	50,000,000	14.6%	P&K
		1	01	16	137	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru (DAK)	Ruang	600,000,000		395,741,767	-	395,741,766	395,741,766	100.0%	=	395,741,766	66.0%	P&K
		1	01	16	138	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kantor (DAK)	Ruang	600,000,000		114,000,000	-	114,000,000	114,000,000	100.0%	=	114,000,000	19.0%	P&K
		1	01	16	139	Pembangunan Laboratorium IPA (DAK)	Ruang	5,892,240,000		313,033,374	-	313,033,374	313,033,374	100.0%	=	313,033,374	5.3%	P&K
		1	01	16	140	Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK)	Sekolah	1,745,840,000		289,750,000	-	289,750,000	289,750,000	100.0%	=	289,750,000	16.6%	P&K
		1	01	16	142	Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	Paket	1,008,000,000		588,000,000	-	588,000,000	588,000,000	100.0%	=	588,000,000	58.3%	P&K
		1	01	16	143	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK)	Ruang			166,250,000	-	166,250,000	166,250,000	100.0%	=	166,250,000	0.0%	P&K
		1	01	18	45	Pembangunan Ruang Praktek/Bengkel SKB (DAK)				192,626,648	25,000,000	167,626,648	192,626,648	100.0%	=	192,626,648	0.0%	P&K
		1	01	18	46	Pembangunan Toilet (jamban) SKB berserta sanitasinya (DAK)				38,000,000	25,000,000	13,000,000	38,000,000	100.0%	=	38,000,000	0.0%	P&K
		1	01	22	41	Penilaian Satuan Kerja Pendidikan	Buku	20,000,000		40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	100.0%	=	40,000,000	200.0%	P&K
		02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bln	653,640,000	25,576,300	65,573,300	-	65,563,800	65,563,800	100.0%	=	91,140,100	13.9%	Dinkes
		02	01	01	18	Rapat rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	bln	1,116,000,000	127,988,900	170,000,000	105,277,871	64,702,000	169,979,871	100.0%	=	297,968,771	26.7%	Dinkes
		02	01	15	19	Pengadaan Pendukung Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK)	Jenis/paket		150,659,200	253,150,000	-	253,078,704	253,078,704	100.0%	=	403,737,904	0.0%	Dinkes
		02	01	20	18	Penurunan Stunting (DAK)	Bulan	5,900,000,000	-	326,812,000	-	326,725,900	326,725,900	100.0%	=	326,725,900	5.5%	Dinkes
		02	01	34	39	Pengelolaan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Periode		-	26,050,000	-	26,050,000	26,050,000	100.0%	=	26,050,000	0.0%	Dinkes
		03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	1,263,023,088	198,560,000	209,060,000	53,160,000	155,825,000	208,985,000	100.0%	=	407,545,000	32.3%	DPUPR

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Bulan	240,563,834	38,867,750	39,400,000	11,930,000	27,463,000	39,393,000	100.0%	=	78,260,750	32.5%	DPUPR
		03	01	01	20	Penyediaan Jasa pegawai Tidak Tetap	OB	1,939,285,015	330,750,000	386,150,000	187,250,000	198,846,750	386,096,750	100.0%	=	716,846,750	37.0%	DPUPR
		03	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bulan	30,525,500	5,000,000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100.0%	=	17,000,000	55.7%	DPUPR
		03	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	100.0%	=	7,200,000	0.0%	DPUPR
		03	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	12,126,120	-	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	100.0%	=	1,900,000	15.7%	DPUPR
		1	03	27	11	Peningkatan Prasarana Sanitasi (DAK)	paket	43,558,000,000	2,556,500,000	5,289,878,000	1,287,500,000	4,002,303,200	5,289,803,200	100.0%	=	7,846,303,200	18.0%	DPUPR
		05	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	6,950,000	1,050,000	1,050,000	480,000	570,000	1,050,000	100.0%	=	2,100,000	30.2%	Kesbangpol
		05	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	500,597,888	96,012,200	98,732,200	56,840,000	41,850,825	98,690,825	100.0%	=	194,703,025	38.9%	Kesbangpol
		05	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	eks	10,260,000	1,140,000	1,140,000	475,000	665,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	22.2%	Kesbangpol
		05	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Bulan	517,643,230	119,269,000	125,000,000	79,894,400	45,072,900	124,967,300	100.0%	=	244,236,300	47.2%	Kesbangpol
		05	01	02	011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	292,170,147	8,990,000	25,000,000	8,806,000	16,193,125	24,999,125	100.0%	=	33,989,125	11.6%	Kesbangpol
		05	01	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	UB	132,853,000	29,149,375	29,300,000	25,847,000	3,450,000	29,297,000	100.0%	=	58,446,375	44.0%	Kesbangpol
		05	01	02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	UB	107,239,000	23,501,000	23,500,000	19,500,000	4,000,000	23,500,000	100.0%	=	47,001,000	43.8%	Kesbangpol
		05	01	03	006	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Tahun	400,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	100.0%	=	160,000,000	40.0%	Kesbangpol
		05	01	07	002	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	7,326,120	1,196,000	1,198,350	-	1,198,350	1,198,350	100.0%	=	2,394,350	32.7%	Kesbangpol
		05	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	556,580,000	95,140,000	95,140,000	39,800,000	55,340,000	95,140,000	100.0%	=	190,280,000	34.2%	Satpol PP & WH
		05	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	146,000,000	26,521,500	27,543,360	10,884,000	16,659,360	27,543,360	100.0%	=	54,064,860	37.0%	Satpol PP & WH
		05	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	100,000,000	19,999,800	20,000,000	5,000,100	14,992,800	19,992,900	100.0%	=	39,992,700	40.0%	Satpol PP & WH
		05	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	11,340,000	1,140,000	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	20.1%	Satpol PP & WH
		05	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	90,000,000	15,000,000	15,000,000	3,650,000	11,350,000	15,000,000	100.0%	=	30,000,000	33.3%	Satpol PP & WH
		05	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Bulan	455,000,000	143,994,300	138,000,000	73,402,400	64,593,370	137,995,770	100.0%	=	281,990,070	62.0%	Satpol PP & WH
		05	02	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Unit	388,500,000	-	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	100.0%	=	3,800,000	1.0%	Satpol PP & WH
		05	02	05	025	Penetapan Angka Kredit	Periode	118,233,700	-	17,800,000	-	17,800,000	17,800,000	100.0%	=	17,800,000	15.1%	Satpol PP & WH

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		05	02	06	011	Penyusunan Standart Pelayanan Minum (SPM)	Buku	26,000,000	-	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	100.0%	=	5,200,000	20.0%	Satpol PP & WH
		05	02	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Buku	3,384,600	599,800	600,000	-	600,000	600,000	100.0%	=	1,199,800	35.4%	Satpol PP & WH
		05	02	15	007	Peningkatan Penertiban Syari'at Islam Kota Lhokseumawe	Kali	1,751,585,000	343,251,000	209,750,000	120,756,500	88,950,000	209,706,500	100.0%	=	552,957,500	31.6%	Satpol PP & WH
		05	02	15	008	Pelaksanaan Hukum Pelanggar Syariat Islam	Kali	595,800,000	232,875,000	52,800,000	-	52,800,000	52,800,000	100.0%	=	285,675,000	47.9%	Satpol PP & WH
		05	02	15	015	Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat	Bulan	189,200,000	-	18,200,000	7,500,000	10,700,000	18,200,000	100.0%	=	18,200,000	9.6%	Satpol PP & WH
		05	02	16	006	Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kali	1,199,290,300	204,899,000	164,150,000	79,100,000	85,050,000	164,150,000	100.0%	=	369,049,000	30.8%	Satpol PP & WH
		06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Bulan	7,965,000	990,000	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	100.0%	=	2,340,000	29.4%	Dinsos
		06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Eks	7,655,795	1,140,000	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	29.8%	Dinsos
		06	01	01	17	Penyediaan Makanan & Minuman	Bulan	139,348,907	25,248,800	40,000,000	16,215,100	23,779,300	39,994,400	100.0%	=	65,243,200	46.8%	Dinsos
		06	01	03	06	Penyewaan Sewa Gedung Kantor	Tahun	805,873,200	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	100.0%	=	240,000,000	29.8%	Dinsos
		06	01	16	16	Verifikasi Data dan Validasi Bantuan Sosial untuk Masalah Kesejahteraan Sosial	Bulan	311,651,070		29,866,505	-	29,862,305	29,862,305	100.0%	=	29,862,305	9.6%	Dinsos
		2	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	752,711,760	118,711,760	134,911,760	55,941,460	78,965,300	134,906,760	100.0%	=	253,618,520	33.7%	DPMTSP & Naker
		2	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	177,330,200	42,320,270	61,867,065	10,988,353	50,869,492	61,857,845	100.0%	=	104,178,115	58.7%	DPMTSP & Naker
		2	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	5,700,000	1,140,000	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	40.0%	DPMTSP & Naker
		2	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UB	85,000,000	10,000,000	10,000,000	1,750,000	8,250,000	10,000,000	100.0%	=	20,000,000	23.5%	DPMTSP & Naker
		2	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Buku	3,313,060	250,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100.0%	=	1,450,000	43.8%	DPMTSP & Naker
		2	01	16	01	Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja	Orang	226,723,975	39,375,000	20,000,000	7,390,000	12,610,000	20,000,000	100.0%	=	59,375,000	26.2%	DPMTSP & Naker
		2	12	18	12	Penyusunan data base perizinan dan non perizinan	Jenis Izin	118,250,000	43,159,800	18,613,400	-	18,613,400	18,613,400	100.0%	=	61,773,200	52.2%	DPMTSP & Naker

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bln	15,146,400	1,500,000	2,500,000	648,000	1,851,000	2,499,000	100.0%	=	3,999,000	26.4%	DP3APP&KB
		02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	OB	603,790,000	114,670,000	115,790,000	38,240,000	77,550,000	115,790,000	100.0%	=	230,460,000	38.2%	DP3APP&KB
		02	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	36,818,000	4,818,000	9,152,000	4,754,500	4,397,500	9,152,000	100.0%	=	13,970,000	37.9%	DP3APP&KB
		02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Eks	7,540,000	1,140,000	1,140,000	285,000	855,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	30.2%	DP3APP&KB
		02	01	01	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Bln	38,710,000	6,000,000	11,850,000	3,000,000	8,850,000	11,850,000	100.0%	=	17,850,000	46.1%	DP3APP&KB
		02	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bln	759,764,315	135,374,784	154,500,000	69,805,400	84,688,025	154,493,425	100.0%	=	289,868,209	38.2%	DP3APP&KB
		02	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Gedung	24,180,000	2,970,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100.0%	=	7,970,000	33.0%	DP3APP&KB
		2	01	03	06	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	thn	300,255,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100.0%	=	100,000,000	33.3%	DP3APP&KB
		02	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	5,826,120	700,000	700,000	-	700,000	700,000	100.0%	=	1,400,000	24.0%	DP3APP&KB
		02	01	15	13	Pelatihan keterampilan bagi ibu dalam tumbuh kembang anak	org	110,900,000		33,985,000.00	-	33,985,000.00	33,985,000	100.0%	=	33,985,000	30.6%	DP3APP&KB
		02	01	18	19	Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)	Bulan	499,625,000		25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	100.0%	=	25,000,000	5.0%	DP3APP&KB
		03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	8,475,000	1,500,000	1,650,000	750,000	900,000	1,650,000	100.0%	=	3,150,000	37.2%	DKPPP
		03	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	33,276,168	2,935,000	2,970,000	385,000	2,585,000	2,970,000	100.0%	=	5,905,000	17.7%	DKPPP
		03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Bulan	6,441,000	760,000	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	100.0%	=	1,900,000	29.5%	DKPPP
		03	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	Bulan	360,200,900	112,410,866	234,485,000	133,079,538	101,405,462	234,485,000	100.0%	=	346,895,866	96.3%	DKPPP
		03	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	pasang	82,160,000	-	141,085,000		141,085,000	141,085,000	100.0%	=	141,085,000	171.7%	DKPPP
		01	01	16	02	Pengawasan dan Penertiban Illegal Fising	kali	595,000	125,000,000	59,599,552	-	59,597,600	59,597,600	100.0%	=	184,597,600	31024.8%	DKPPP
		01	01	26	01	Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan	KUB	70,000,000		40,000,000	15,000,000	24,990,000	39,990,000	100.0%	=	39,990,000	57.1%	DKPPP
					08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan pertanian/perkebunan	unit	11,307,590,938	219,774,900	47,000,000	-	47,000,000	47,000,000	100.0%	=	266,774,900	2.4%	DKPPP

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		03	01	19	26	Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian				20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100.0%	=	20,000,000	0.0%	DKPPP
		03	01	22	03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat				24,000,000	-	24,000,000	24,000,000	100.0%	=	24,000,000	0.0%	DKPPP
		03	01	22	16	Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)				8,300,000	500,000	7,800,000	8,300,000	100.0%	=	8,300,000	0.0%	DKPPP
		06	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	bln	-	-	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	100.0%	=	1,410,000	0.0%	Pertanahan
		06	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	bln	-	-	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	100.0%	=	25,000,000	0.0%	Pertanahan
		06	05	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bulan		-	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	100.0%	=	25,000,000	0.0%	Pertanahan
		06	05	03	06	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Bulan	-	-	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	100.0%	=	80,000,000	0.0%	Pertanahan
		05	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	25,430,000	3,900,000	3,760,000	3,760,000	-	3,760,000	100.0%	=	7,660,000	30.1%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bln	6,156,000	1,140,000	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	37.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bln	7,113,000,000	1,422,105,000	1,234,600,000	302,400,000	932,092,000	1,234,492,000	100.0%	=	2,656,597,000	37.3%	Dinas Lingkungan Hidup
		05	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bln	344,000,000	138,999,800	157,000,000	76,997,650	80,001,797	156,999,447	100.0%	=	295,999,247	86.0%	Dinas Lingkungan Hidup
		06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	669,740,000	103,400,000	103,740,000	50,680,000	53,060,000	103,740,000	100.0%	=	207,140,000	30.9%	Disdukcapil
		06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	230,082,200	28,000,000	26,840,200	10,335,300	16,504,900	26,840,200	100.0%	=	54,840,200	23.8%	Disdukcapil
		06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	5,700,000	1,140,000	1,140,000	570,000	570,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	40.0%	Disdukcapil
		06	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	50,391,539	7,970,000	8,000,000	4,210,000	3,790,000	8,000,000	100.0%	=	15,970,000	31.7%	Disdukcapil
		06	01	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mobiler, komuter, dll)	Bulan	66,000,000	16,470,000	16,500,000	8,190,000	8,310,000	16,500,000	100.0%	=	32,970,000	50.0%	Disdukcapil
		06	01	03	06	Pennyediaan sewa gedung Gudang kantor	Tahun	250,000,000	44,550,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100.0%	=	94,550,000	37.8%	Disdukcapil

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		06	01	07	2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	5,976,120	799,800	800,000		800,000	800,000	100.0%	=	1,599,800	26.8%	Disdukcapil
		06	01	15	20	Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Buku	4,475,871	-	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	100.0%	=	8,000,000	178.7%	Disdukcapil
		06	01	15	022	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK)	Jenis	710,170,000	328,134,000	330,967,000	198,260,000	132,706,000	330,966,000	100.0%	=	659,100,000	92.8%	Disdukcapil
		06	01	15	024	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil(DAK NON FISIK)	Triwulan	252,876,200	51,336,200	51,000,000	-	51,000,000	51,000,000	100.0%	=	102,336,200	40.5%	Disdukcapil
		06	01	15	027	Penyusunan Buku Data Penduduk Persmester (DAK NON FISIK)	Buku	210,000,000	48,000,000	43,000,000	-	43,000,000	43,000,000	100.0%	=	91,000,000	43.3%	Disdukcapil
		06	01	15	028	Penyusunan Data Pencatatan Sipil DAK NON FISIK)	Triwulan	320,700,000	53,535,600	53,000,000	-	53,000,000	53,000,000	100.0%	=	106,535,600	33.2%	Disdukcapil
		06	01	15	052	Pengelolaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik - Dana DAK)	Bulan	157,300,000	-	22,300,000	-	22,300,000	22,300,000	100.0%	=	22,300,000	14.2%	Disdukcapil
		07	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	9,548,732	2,499,000	2,499,000	1,680,000	819,000	2,499,000	100.0%	=	4,998,000	52.3%	DPMG
		07	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	127,954,966	24,999,950	24,982,000	11,000,000	13,982,000	24,982,000	100.0%	=	49,981,950	39.1%	DPMG
		07	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	72,940,584	15,000,000	14,975,000	13,974,900	999,000	14,973,900	100.0%	=	29,973,900	41.1%	DPMG
		07	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Eks	7,500,000	1,500,000	2,200,000	1,500,000	700,000	2,200,000	100.0%	=	3,700,000	49.3%	DPMG
		07	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	60,200,480	12,000,000	23,800,000	10,200,000	13,600,000	23,800,000	100.0%	=	35,800,000	59.5%	DPMG
		07	01	02	011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	438,467,610	71,580,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	100.0%	=	96,580,000	22.0%	DPMG
		07	01	02	030	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Bulan	78,470,000	15,000,000	15,000,000	3,450,000	11,550,000	15,000,000	100.0%	=	30,000,000	38.2%	DPMG
		07	01	02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Bulan	445,200,000	70,200,000	50,000,000	-	49,998,000	49,998,000	100.0%	=	120,198,000	27.0%	DPMG
		09	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	600,000,000	108,640,000	110,880,000	45,920,000	64,955,000	110,875,000	100.0%	=	219,515,000	36.6%	Dishub
		09	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	eks	9,940,000	1,368,000	1,368,000	570,000	798,000	1,368,000	100.0%	=	2,736,000	27.5%	Dishub
		09	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bln	85,792,000	3,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.0%	=	13,000,000	15.2%	Dishub

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		09	01	17	009	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal	bln	287,948,500	141,287,000	44,750,000	23,250,000	21,500,000	44,750,000	100.0%	=	186,037,000	64.6%	Dishub
		2	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	47,200,000	8,000,000	11,650,000	1,908,000	9,742,000	11,650,000	100.0%	=	19,650,000	41.6%	Diskominfo
		2	10	03	06	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Tahun	400,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	100.0%	=	160,000,000	40.0%	Diskominfo
		11	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eks	6,880,000	1,140,000	1,140,000	380,000	760,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	33.1%	Disperindagkop
		11	01	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	UB	133,900,000	6,246,400	26,600,000	9,089,000	17,508,490	26,597,490	100.0%	=	32,843,890	24.5%	Disperindagkop
		11	01	03	06	Penyediaan Sewa Gedung/ Gudang Kantor	Tahun	88,400,000	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	100.0%	=	80,000,000	90.5%	Disperindagkop
		11	01	22	01	Pendataan dan Monitoring Koperasi yang Aktif dan Tidak Aktif	Persen	218,460,000	-	20,000,000	-	19,999,300	19,999,300	100.0%	=	19,999,300	9.2%	Disperindagkop
		06	01	18	11	Penertiban Pasar Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Pasar	272,505,951	50,000,000	15,950,000	15,950,000	-	15,950,000	100.0%	=	65,950,000	24.2%	Disperindagkop
		07	01	16	15	Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe	Bulan	84,800,000	-	39,300,000		39,289,200	39,289,200	100.0%	=	39,289,200	46.3%	Disperindagkop
		07	01	24	02	Penilaian Desa Kerajinan DEKRANAS Kota Lhokseumawe	Kegiatan	28,712,500	29,690,000	29,925,000	-	29,922,300	29,922,300	100.0%	=	59,612,300	207.6%	Disperindagkop
		2	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bln	12,000,000	1,596,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	100.0%	=	4,596,000	38.3%	Disporapar
		2	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Bln	204,069,192	60,740,500	23,279,400	8,883,370	14,395,211	23,278,581	100.0%	=	84,019,081	41.2%	Disporapar
		2	13	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bln	70,300,000	13,743,000	15,300,000	7,578,000	7,722,000	15,300,000	100.0%	=	29,043,000	41.3%	Disporapar
		2	13	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	19,558,700	2,415,100	2,360,700	686,200	1,674,500	2,360,700	100.0%	=	4,775,800	24.4%	Disporapar
		2	13	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	eks	7,140,000	1,140,000	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	31.9%	Disporapar
		2	13	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bln	38,800,000	10,000,000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100.0%	=	22,000,000	56.7%	Disporapar
		2	13	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar Daerah	Bln	609,000,000	268,932,000	275,000,000	127,468,000	147,444,500	274,912,500	100.0%	=	543,844,500	89.3%	Disporapar
		2	13	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	52,680,000	3,500,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100.0%	=	8,500,000	16.1%	Disporapar
		2	13	03	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pasang	-		40,300,000	-	40,300,000	40,300,000	100.0%	=	40,300,000	0.0%	Disporapar

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		2	13	03	06	Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor	Tahun	488,408,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	100.0%	=	80,000,000	16.4%	Disporapar
		2	13	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	buku	9,126,120	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100.0%	=	4,000,000	43.8%	Disporapar
		2	13	16	0	Pelatihan Pemnuda Pelajar Kota Lhokseumawe (IMPKL)				40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	100.0%	=	40,000,000	0.0%	Disporapar
		2	13	18	01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Keg	200,000,000		50,000,000		50,000,000	50,000,000	100.0%	=	50,000,000	25.0%	Disporapar
		2	13	20	08	Pemeberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Orang	300,000,000	-	43,750,000	-	43,750,000	43,750,000	100.0%	=	43,750,000	14.6%	Disporapar
		2	13	20	37	Pelaksanaan Turnamen Muspida Cup Lhokseumawe				150,000,000		150,000,000	150,000,000	100.0%	=	150,000,000	0.0%	Disporapar
						Pelaksanaan Olah Raga Rekreasi Heroes Fun Contest				30,000,000		30,000,000	30,000,000	100.0%	=		0.0%	Disporapar
		2	13	20	53	Event Turnamen Bola Kaki Usia Dini se Kota Lhokseumawe		-	150,000,000	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	100.0%	=	230,000,000	0.0%	Disporapar
		3	02	15	08	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Orang	30,000,000	129,000,000	104,247,000	104,247,000		104,247,000	100.0%	=	233,247,000	777.5%	Disporapar
		3	02	15	14	Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe	Unit	638,112,768	149,000,000	130,000,000	-	130,000,000	130,000,000	100.0%	=	279,000,000	43.7%	Disporapar
		17	01	01	01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Bulan	2,068,106,981	2,700,000	2,610,000	1,350,000	1,260,000	2,610,000	100%	=	5,310,000	0%	ARPUS
		17	01	01	07	Penyedian Jasa Administrasi Keuangan	OB	1,864,615,314	70,305,775	62,267,025	26,357,025	35,910,000	62,267,025	100%	=	132,572,800	6%	ARPUS
		17	01	01	10	Penyedian Alat Tulis Kantor	Bulan	135,031,645	12,957,100	23,293,400	9,973,057	13,307,469	23,280,526	100%	=	36,237,626	2%	ARPUS
		17	01	01	11	Penyedian Barang Cetakan dan Penggadaan	Bulan	86,207,256	12,957,100	13,000,000	5,305,000	7,683,900	12,988,900	100%	=	25,946,000	19%	ARPUS
		17	01	01	13	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	25,500,000	4,496,925	4,300,000	2,611,475	1,682,150	4,293,625	100%	=	8,790,550	10%	ARPUS
		17	01	01	15	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Eks	10,260,000	1,140,000	1,140,000	570,000	570,000	1,140,000	100%	=	2,280,000	9%	ARPUS
		17	01	01	17	Penyedian Makanan dan Minuman	Bulan	55,667,563	8,995,000	12,000,000	5,920,000	6,080,000	12,000,000	100%	=	20,995,000	205%	ARPUS

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		17	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi Dan Konsultasi dalam dan keluut daerah	Bulan	370,000,000	68,607,000	118,000,000	49,104,216	68,693,000	117,797,216	100%	=	186,404,216	335%	ARPUS
		17	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	33,374,285	3,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100%	=	8,000,000	17%	ARPUS
		17	01	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor (Mobiler,Komputer dll)	Bulan	31,918,440	7,500,000	7,500,000	3,700,000	3,800,000	7,500,000	100%	=	15,000,000	10%	ARPUS
		17	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Buku	3,320,500	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100%	=	2,000,000	60%	ARPUS
		17	01	15	02	Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Lhokseumawe	Orang	49,091,667		13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	100%	=	13,000,000	1%	ARPUS
		17	01	15	03	Lomba Pustaka Tk. Gampong Se- Kota Lhokseumawe	Orang	20,641,857		14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	100%	=	14,000,000	29%	ARPUS
		17	01	15	04	Lomba Berceita Hikayat Daerah	Orang	49,091,667		20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100%	=	20,000,000	97%	ARPUS
		17	01	15	08	Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	Bulan	65,856,477	20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	100%	=	40,000,000	81%	ARPUS
		17	01	15	09	Stock Opname dan Penyiangn (Weeding) Perpustakaan	Kali	32,000,000		10,000,000	4,600,000	5,400,000	10,000,000	100%	=	10,000,000	15%	ARPUS
		17	01	15	10	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Hari	37,380,950		18,000,000	8,950,000	9,050,000	18,000,000	100%	=	18,000,000	56%	ARPUS
		17	01	15	11	Penyediaana Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah (DAK)	Eks	195,000,000		195,000,000	-	194,989,750	194,989,750	100%	=	194,989,750	522%	ARPUS
		01	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	7,657,650,000	-	2,319,565,750	-	2,319,565,750	2,319,565,750	100.0%	=	2,319,565,750	30.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jenis	4,375,800,000	20,250,000	302,250,000	-	302,249,000	302,249,000	100.0%	=	322,499,000	7.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	03	07	Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan	bln	1,815,402,000	321,500,000	321,000,000	-	321,000,000	321,000,000	100.0%	=	642,500,000	35.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	05	61	Keikutsertaan MTQ KORPRI	Keg	283,101,000	118,894,713	29,300,000	6,440,000	22,855,000	29,295,000	100.0%	=	148,189,713	52.3%	Sekretariat Daerah
		01	03	16	07	Kunjungan Kerja Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	bln	662,390,004	124,287,000	130,000,000	-	129,984,000	129,984,000	100.0%	=	254,271,000	38.4%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Raqan	148,128,000	23,900,000	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	100.0%	=	51,900,000	35.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jenis	975,176,000	157,945,000	150,000,000	105,900,000	44,100,000	150,000,000	100.0%	=	307,945,000	31.6%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	11	Bina Kadarkum	Kali	646,500,000	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	100.0%	=	50,000,000	7.7%	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	03	26	28	Sosialisasi Qanun Kota Lhokseumawe	Kali	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100.0%	=	100,000,000	0.0%	Sekretariat Daerah
		01	03	26	35	Sosialisasi Hak Azasi Manusia (HAM)	Kali	646,500,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	100.0%	=	50,000,000	7.7%	Sekretariat Daerah
		01	03	29	04	Pelaksanaan Pengajian Gampong di Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe	bln	5,027,240,500	883,335,000	929,500,000	233,310,000	696,189,000	929,499,000	100.0%	=	1,812,834,000	36.1%	Sekretariat Daerah
		01	03	33	06	Pelestarian TMP Blang Panyang	Bln	1,005,040,000	20,991,600	36,000,000	13,697,000	22,300,300	35,997,300	100.0%	=	56,988,900	5.7%	Sekretariat Daerah
		01	03	34	04	Pelaksanaan Rekrutmen Paskibra	Kali	272,691,000	40,641,000	50,000,000	48,500,000	1,500,000	50,000,000	100.0%	=	90,641,000	33.2%	Sekretariat Daerah
		01	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	743,400,000	148,306,400	148,680,000	60,900,000	87,742,300	148,642,300	100.0%	=	296,948,700	39.9%	Sekwan
		01	04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	495,900,000	96,900,000	99,180,000	32,300,000	66,859,000	99,159,000	100.0%	=	196,059,000	39.5%	Sekwan
		01	04	07	02	Penyusunan RENJA SKPD	Buku	8,126,120	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	100.0%	=	1,500,000	18.5%	Sekwan
		1	05	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bulan	13,000,000	1,500,000	1,476,000	750,000	726,000	1,476,000	100.0%	=	2,976,000	22.9%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	103,212,820	13,900,000	23,693,000	10,146,000	13,547,000	23,693,000	100.0%	=	37,593,000	36.4%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	56,287,752	10,960,000	9,838,500	2,830,000	7,008,500	9,838,500	100.0%	=	20,798,500	37.0%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	37,546,200	2,000,000	1,814,000	660,000	1,154,000	1,814,000	100.0%	=	3,814,000	10.2%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	8,400,000	1,140,000	1,140,000	285,000	855,000	1,140,000	100.0%	=	2,280,000	27.1%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	36,000,000	3,990,000	5,890,000	-	5,890,000	5,890,000	100.0%	=	9,880,000	27.4%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	1,329,673,132	206,551,000	242,101,000	121,251,000	120,850,000	242,101,000	100.0%	=	448,652,000	33.7%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37,000,000	5,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	100.0%	=	45,000,000	121.6%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Gedung	34,000,000	3,000,000	33,000,000	-	33,000,000	33,000,000	100.0%	=	36,000,000	105.9%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor (Mobiller, Komputer dll)	Bulan	20,772,700	6,000,000	6,000,000	1,715,000	4,285,000	6,000,000	100.0%	=	12,000,000	57.8%	Kecamatan Banda Sakti

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	05	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	4,761,000	848,800	999,900	-	999,900	999,900	100.0%	=	1,848,700	38.8%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	09	01	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	OB	555,649,571	90,714,000	91,014,000	38,614,000	52,400,000	91,014,000	100.0%	=	181,728,000	32.7%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	28	01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, dll)	Hari	447,032,400	118,580,000	49,880,000	49,880,000	-	49,880,000	100.0%	=	168,460,000	37.7%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	28	03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat desa/ke. Bidang Pemuda dan Olah Raga	Bulan	32,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100.0%	=	3,000,000	9.4%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	28	04	Peningkatan Pelatihan /Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	OB	40,000,000	-	8,000,000	8,000,000		8,000,000	100.0%	=	8,000,000	20.0%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	28	15	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Hari	80,000,000	-	31,880,000	31,880,000		31,880,000	100.0%	=	31,880,000	39.9%	Kecamatan Banda Sakti
		1	05	28	16	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Gampong	40,000,000	-	33,835,000	-	33,835,000	33,835,000	100.0%	=	33,835,000	84.6%	Kecamatan Banda Sakti
		01	06	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bln	6,150,000	999,000	990,000	390,000	600,000	990,000	100%	=	1,989,000	32%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	236,548,400	47,309,600	55,000,680	19,050,000	35,950,680	55,000,680	100%	=	102,310,280	43%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bln	51,575,466	18,710,409	23,441,100	3,023,800	20,410,000	23,433,800	100%	=	42,144,209	82%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bln	32,287,950	8,964,250	8,827,650	-	8,822,965	8,822,965	100%	=	17,787,215	55%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	10,925,507	1,653,518	1,638,454	-	1,637,448	1,637,448	100%	=	3,290,966	30%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eks	6,840,000	1,140,000	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	100%	=	2,280,000	33%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bln	26,000,000	6,940,000	5,855,000	-	5,855,000	5,855,000	100%	=	12,795,000	49%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bln	200,000,000	48,384,500	83,800,000	13,470,000	70,251,700	83,721,700	100%	=	132,106,200	66%	Kecamatan Blang Mangat

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	06	2	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	UB	118,800,000	23,751,200	23,760,000	6,390,200	17,357,800	23,748,000	100%	=	47,499,200	40%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	2	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Bulan	30,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	100%	=	12,000,000	40%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	10,625,500	5,050,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100%	=	6,050,000	57%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	06	09	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	OB	647,240,266	97,014,900	106,016,325	43,000,000	63,016,325	106,016,325	100%	=	203,031,225	31%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	28	01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bid.Agama,Sosial dan Budaya (MTQ,HUT RI Dll)	Hari		80,000,000	48,932,750	-	48,932,750	48,932,750	100%	=	128,932,750	0%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	28	03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bidang Pemuda Olahraga	Bulan	40,000,000		6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	100%	=	6,000,000	15%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	28	04	Peningkatan Pelatihan /Ketrampilan dan Pembinaan Pkk Gampong	Bulan	40,000,000	10,000,000	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	100%	=	18,000,000	45%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	28	05	Peningkatan Keterlibatan dan Ketrentaman Masyarakat di Lingkungan Desa/gampong	Bulan	40,000,000		12,000,000	-	11,985,200	11,985,200	100%	=	11,985,200	30%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	28	015	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	hari	70,000,000		34,948,400	-	34,948,400	34,948,400	100%	=	34,948,400	50%	Kecamatan Blang Mangat
		01	06	28	16	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Gampong	31,810,000		32,798,200	-	32,698,200	32,698,200	100%	=	32,698,200	103%	Kecamatan Blang Mangat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	1	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	10,952,447	1,000,000	979,000	477,000	502,000	979,000	100.0%	=	1,000,001	9.1%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	2,112,815,319	9,001,400	23,449,200	11,065,553	12,383,647	23,449,200	100.0%	=	9,001,401	0.4%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	1,930,453,919	9,001,400	23,449,200	11,065,553	12,383,647	23,449,200	100.0%	=	9,001,401	0.5%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	80,048,250	9,532,500	9,369,425	4,743,423	4,626,000	9,369,423	100.0%	=	9,532,501	11.9%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	01	13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bulan	31,386,000	1,986,000	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	100.0%	=	1,986,001	6.3%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Bulan	5,700,000	1,140,000	1,140,000	570,000	570,000	1,140,000	100.0%	=	1,140,001	20.0%	Kecamatan Muara Satu

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		1	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	36,400,000	4,700,000	5,780,000	-	5,780,000	5,780,000	100.0%	=	4,700,001	12.9%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	02	30	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor (mobiler,Komputer)	Bulan	26,800,000	3,800,000	3,800,000	-	3,800,000	3,800,000	100.0%	=	3,800,001	14.2%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Buku	5,000,000	1,400,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	100.0%	=	1,400,001	28.0%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	28	01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan bidang Agama, sosial & budaya (MTQ,HUT RI,DLL)	Hari	463,366,300	100,000,000	49,900,000	49,896,400	-	49,896,400	100.0%	=	100,000,001	21.6%	Kecamatan Muara Satu
		1	07	28	02	Kegiatan Saweu Gampong	Bulan	55,508,200	11,982,100	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100.0%	=	11,982,101	21.6%	Kecamatan Muara Satu
		2	08	29	03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bdg Pemuda dan Olahraga	Bulan	0		5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100.0%	=	1	0.0%	Kecamatan Muara Satu
		2	08	29	05	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel. (Gampong)	Bulan	0		20,000,000	6,393,850	13,599,050	19,992,900	100.0%	=	1	0.0%	
		01	08	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bln	2,064,512,455	14,999,143	22,566,002	13,174,300	9,390,210	22,564,510	100.0%	=	37,563,653	1.8%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bln	43,869,000	8,993,750	9,531,500	5,864,750	3,665,500	9,530,250	100.0%	=	18,524,000	42.2%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	6,696,474	1,140,000	1,200,000	600,000	600,000	1,200,000	100.0%	=	2,340,000	34.9%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bln	41,541,800	6,580,000	59,725,000	30,900,000	28,825,000	59,725,000	100.0%	=	66,305,000	159.6%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Bln	206,300,000	74,852,300	217,200,000	108,546,400	108,650,000	217,196,400	100.0%	=	292,048,700	141.6%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Unit	121,897,331	26,901,000	29,591,100		29,591,000	29,591,000	100.0%	=	56,492,000	46.3%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Buku	6,191,000	1,550,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0%	=	2,550,000	41.2%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	28	01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bid. Agama,Sosial dan Budaya (MTQ,HUT RI,DII)	Hari	530,000,000	100,000,000	49,593,100	49,593,100	-	49,593,100	100.0%	=	149,593,100	28.2%	Kecamatan Muara Dua
		01	08	28	02	Saweu Gampong	Bln	58,912,400	24,000,000	134,360,000	60,817,800	73,534,500	134,352,300	100.0%	=	158,352,300	268.8%	Kecamatan Muara Dua

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16
		01	08	28	03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat desa/kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga	kegiatan	33,000,000	50,000,000	261,600,000	99,000,000	162,600,000	261,600,000	100.0%	=	311,600,000	944.2%	Kecamatan Muara Dua
		04	01	28	004	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Bulan	31,000,000		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100.0%	=	10,000,000	32.3%	Kecamatan Muara Dua
		04	01	28	005	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel. (Gampong)	Bulan	34,600,000		100,000,000	48,390,850	51,595,150	99,986,000	100.0%	=	99,986,000	289.0%	Kecamatan Muara Dua
		04	01	28	016	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Gampong	34,000,000		34,880,000	-	34,880,000	34,880,000	100.0%	=	34,880,000	102.6%	Kecamatan Muara Dua

Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target Keuangan yang direncanakan

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2019 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Rp	Rp	Rp	Semester 1	Semester 2		Rp	Realisasi >/=<		Rp	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12= 11/8	13	14 = 7+11	15=14/6*100%	16	
		01	09	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OB	653,785,860	111,012,235	128,024,070	53,000,000	125,914,068	178,914,068	139.8%	>	289,926,303	44.3%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

B. Capaian Kinerja

Berikut ini adalah capaian realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jumlah indikator yang terdata adalah 45 indikator. Namun masih terdapat 27 data indikator yang belum tercapai dan terkendala dalam penghitungannya.

Tabel 2.164
Tingkat Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2022)	TARGET TAHUN		REALISASI		OPD
					2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	50	70	54	57	54	56	DSI&PD
2	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	36	69	59	58	37	DSI&PD
3	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah	Rp (milyar)	8,79	9,24	8,88	8,97	7,43	8,80	Sekretariat Baitul Mal
4	Pertumbuhan PDRB	Persen	1,18	6,02	6,50	6,80	3,84	3,97	BPS
5	Pengendalian Laju Inflasi	Persen	5,60	2,09	2,80	2,60	2,05	1,20	BPS
6	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	11,98	9,24	9,50	9,30	11,81	11,18	BPS
7	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	10,51	9,49	10,40	10,33	12,52	11,06	BPS
8	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp (Juta)	1,009	1,20	1,04	1,08	10,86	11,42	BPS
9	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20	40	20	20	0	20	Dinas P3AP2KB
10	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2.314	2.351	2314	2323	3850	5084	Disperindagkop

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2022)	TARGET TAHUN		REALISASI		OPD
					2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	17,84	19,70	18,20	18,56			BPS
12	Jumlah Investor	PMDN/ PMA	305	389	320	336	348	386	DPMPPTSP & Naker
13	Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3.387	4.323	3556	3734	3656	3839	DPMPPTSP & Naker
14	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,09	1,26	1,12	1,16	0,00	0,00	BPS
15	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	75,78	78,47	76,31	76,84	76,62	77,30	BPS
16	Rerata Nilai Ujian Nasional:								
	-Rerata Nilai Ujian Sekolah SD/MI	Nilai	86,6	95	90	90			Dinas PK
	-Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs	Nilai	56	95	75	80			Dinas PK
17	Angka Partisipasi Kasar:								
	- SD/MI	Angka	105,63	105,63	105,63	105,63	95,12	94,42	Dinas PK
	- SMP/MTs	Angka	101	101	101	101	111,8	97,26	Dinas PK

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2022)	TARGET TAHUN		REALISASI		OPD
					2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Angka partisipasi Murni:								
	- SD/MI	Angka	93,66	99,4	96,5	99,4	81,8	84,47	Dinas PK
	- SMP/MTs	Angka	79,05	91,6	81,4	83,9	81,2	66,31	Dinas PK
19	Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15,16	15,78	15,28	15,40	N/A	N/A	Dinas PK
20	Rasio Ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	51,90	50,11	51,38	50,87	N/A	N/A	
21	Jumlah Prestasi olahraga	Jumlah	18	32	28	30	20	-	Disporapar
22	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	14	19	15	16	14	12	DSI&PD
23	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,05	71,62	71,16	71,28	N/A	N/A	Dinkes
24	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	0	2	2	N/A	N/A	Dinkes
25	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA	Persen	50	100	60	70	N/A	N/A	Dinkes
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	5,78	8,11	6,18	6,62	N/A	N/A	Dinkes

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2022)	TARGET TAHUN		REALISASI		OPD
					2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Cakupan anak usia 0-11 bln mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	82,2	100,00	91,50	92,00	N/A	N/A	Dinkes
28	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	B	CC	C	-	-	Setdako
29	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	CC	C	CC	CC	Setdako
30	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Setdako
31	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	Dalam Proses Audit BPK	BPKD
32	Keterbukaan Informasi Publik melalui Website	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
33	Pencapaian target Nasional 100-0-100	Persen	3.89-81.3-71.4	4.51-9.3-82.8	4.01-76.4-73.5	4.13-16.8-75-7	N/A	N/A	
34	Persentase Akses Jaringan Air Minum Layak/ Air Bersih	Persen	3,89	4,51	4,01	4,13	0,00	17,03	Dinas PUPR
35	Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah (Ha)	81,3	9,27	76,4	16,8	2,44	0,79	Dinas PUPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2022)	TARGET TAHUN		REALISASI		OPD
					2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36	Penanganan Sampah	Persen	71,4	82,8	73,5	75,7	81,53	81,00	DLH
37	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	6,98	11,24	7,68	8,45	3,64	3,67	Dinas PUPR
38	Kategori Capaian kinerja Infrastruktur Publik	Absolut	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Dinas PUPR
39	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	58,1	81,5	62,2	66,6	N/A	N/A	Dinas PUPR
40	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	36,8	56,6	40,1	43,7	14%	100%	Dishub
41	Persentase sampah yang tertangani	Persen	71,40	91,13	74,97	78,72	81,53	81,00	DLH
42	Luasan RTH Publik 20%	Ha	25,4	40,9	27,9	30,7	25,4	25,5	DLH
43	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio (Per 10.000)	58,76	34,70	52,88	47,60	100,00	Belum ada Data	Satpol PP & WH
44	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	36	69	59	58	37	Satpol PP & WH
45	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	40	75		70	100	73	Kesbangpol

Sumber : Hasil Evaluasi (diolah)

2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Pembangunan di Kota Lhokseumawe tentu tidak terlepas dari pengaruh Global yang kompleks, hal ini akan memberi dampak pada masalah-masalah dan tantangan yang akan dihadapi baik secara global, nasional maupun daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota Lhokseumawe tentu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, adapun permasalahan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Dinul Islam, Keistimewaan dan Sosial Budaya
 - a. Masih kurangnya eksplorasi cagar budaya;
 - b. Tingginya pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - c. Belum optimalnya pemberian bantuan terhadap operasional panti asuhan/jompo;
2. Ekonomi, Industri dan Pariwisata
 - a. Perkembangan industri cenderung menurun seiring dengan habisnya produktivitas Kilang Arun;
 - b. Daya serap tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan yang signifikan;
 - c. Menurunnya produksi perikanan budidaya;
 - d. Kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi;
 - e. Pertumbuhan Ekonomi yang belum mencapai target RPJM Kota Lhokseumawe;
 - f. Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe yang belum Optimal;
 - g. Jumlah angka kemiskinan yang belum mencapai target RPJM Kota Lhokseumawe;
 - h. Ketahanan pangan dan energi yang harus terus dijaga kesinambungannya;

3. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
- b. Terbatasnya Gedung Perpustakaan Umum Daerah;
- c. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN;
- d. Kualitas pendidikan yang mengalami stagnan sehingga harus ditingkatkan;
- e. Masih adanya usia anak yang masih putus sekolah.
- f. Kondisi ruang sekolah yang masih dalam kondisi rusak

4. Pelayanan Kesehatan

- a. Belum tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Rasio pelayanan Posyandu terhadap Balita belum memenuhi standar;
- c. Masih tingginya kasus *pneumonia* pada bayi;
- d. Pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah;
- e. Belum optimalnya pemberian imunisasi campak pada balita;
- f. Masih ditemukan beberapa kasus seperti penderita TBC BTA(+), DBD, dan Diare;
- g. Pelayanan akses kesehatan yang belum maksimal;
- h. Pencegahan dan Penanganan Covid-19;

5. Penataan Birokrasi Pemerintah

- a. Masih ada delapan SKPK yang belum memiliki gedung kantor;
- b. Penurunan opini tata kelola keuangan dari WTP menjadi WDP;
- c. Minimnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun pelatihan formal bagi ASN;
- d. Masih adanya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti;

6. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a. Penanganan sanitasi masih belum optimal;
- b. Penanganan timbulan sampah belum optimal;
- c. Masih rendahnya akses air bersih kepada rumah tangga;
- d. Jumlah rambu-rambu lalu lintas belum memadai;
- e. Sarana-Prasarana publik yang belum fungsional.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

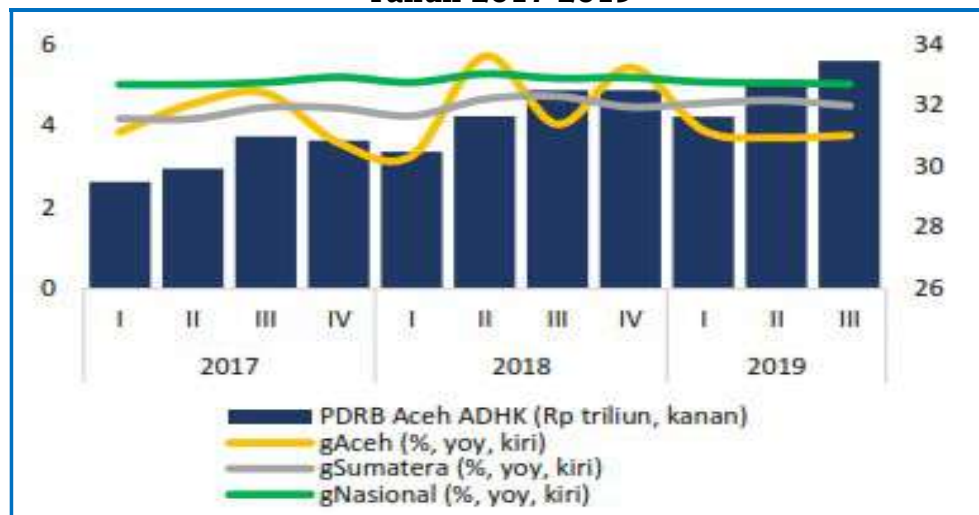
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Aceh

Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2019 tumbuh 5,02%, relative sama dengan capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,05%. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestic yang membaik di tengah permintaan global dan harga komoditas global yang menurun. Berbeda dengan relative stabilnya perekonomian Nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera pada triwulan tersebut tercatat tumbuh melambat dari 4,61% pada triwulan II-2019 menjadi 4,49%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah dan investasi yang melambat. Di sisi lapangan usaha, perlambatan terjadi pada hamper seluruh lapangan usaha utama Sumatera, yaitu pertanian, industry pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta konstruksi. Perlambatan ekonomi Sumatera tersebut dialami oleh mayoritas provinsi, diantaranya adalah Sumatera Utara (5,11%, yoy), Riau (2,74%, yoy), Bengkulu (4,95%, yoy), Jambi (4,31%, yoy), Sumatera Selatan (5,67%, yoy), Kepulauan Bangka Belitung (3,05%, yoy), dan Lampung (5,16%, yoy).

Pada triwulan III-2019 ini, perekonomian Aceh tercatat memiliki pangsa 5,61% terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut relatif tidak mengalami banyak perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut hamper mencapai 60% dari total ekonomi Sumatera.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera, perekonomian Aceh pada triwulan laporan menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,76%(yoy) atau meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya sebesar 3,71%(yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang masing-masing memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,07%, 1,26%, dan 0,70% terhadap pertumbuhan pada triwulan III-2019.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Aceh
Tahun 2017-2019



Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Aceh, BI Kpw Prov. Aceh, 2019

Terjaganya momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari pola konsumsi masyarakat pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Idul Adha dan tradisi masyarakat Aceh, yakni Hari Meugang. Selanjutnya, masuknya periode tahun ajaran baru sekolah/ perguruan tinggi juga turut memperkuat konsumsi masyarakat. Faktor lain yang menopang kinerja pertumbuhan komponen ini adalah adanya berbagai event nasional dan internasional, diantaranya adalah Pulau Banyak Internasional Festival (23-27 Juli); Banda Aceh Coffee Festival (1-3 Agustus); Festival Danau Lut Tawar (2-4 Agustus); Aceh Culinary Festival (5-7 Agustus); Saman Gayo Alas Festival (18-19 Agustus), serta adanya kegiatan MTQ Nasional (28 Juli-4 Agustus).

3.1.2. Kondisi Perekonomian Kota Lhokseumawe

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Sejak tahun 2015, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini meningkat dari 17,84% pada Tahun 2014 menjadi 23,18% pada Tahun 2016. Namun mengalami penurunan peranan hingga 22,39% di Tahun 2018.

Kategori dengan peranan kedua terbesar hingga akhir tahun 2018 adalah industri pengolahan sebesar 19,84%. Kategori ini mengalami penurunan dari Tahun 2014 hingga 39,39%. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga pada Tahun 2018 dengan peranan sebesar 14,23 persen. Kategori ini mengalami peningkatan dari Tahun 2014 sebesar 11,32%. Dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relatif datar selama Tahun 2015-2018, dimana pada tahun 2015 komponen ini tumbuh sebesar 3,12% dan tumbuh sebesar 3,53% di Tahun 2018.

Struktur ekonomi Kota Lhokseumawe dari sisi pengeluaran di Tahun 2014-2018 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yaitu 38,35% dan 53,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan distribusi terbesar kedua yaitu 34,51% pada Tahun 2014 dan 45,94%. Pada Tahun 2018. Nilai PMTB menunjukkan penambahan barang modal di suatu wilayah dalam rangka peningkatan produktivitas.

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) masih sangat minim dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Meskipun terus mengalami peningkatan, dalam kurun waktu lima Tahun (2014-2018) rata-rata kontribusi komponen ini di bawah dua persen. Sehingga belum bias dikatakan bahwa komponen ini sebagai motor penggerak perekonomian Lhokseumawe. Tercatat dari Tahun 2014-2018 kontribusi tertinggi konsumsi LNPRT hanya sebesar 1,31% di Tahun 2018. Nilai konsumsi LNPRT naik 0,03 triliun rupiah dari Tahun 2014.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah konsumsi akhir dalam suatu perekonomian. Konsumsi pemerintah dalam perekonomian Lhokseumawe memiliki peranan yang cukup besar, hal ini karena komponen ini menempati urutan ketiga dalam struktur ekonomi Lhokseumawa. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 1,37 triliun rupiah, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1,44 triliun di Tahun 2018.

Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, dalam kurun waktu 2014-2018 konsumsi pemerintah secara umum tumbuh positif, hanya saja bergerak naik turun dan di penghujung Tahun 2017-2018 tumbuh positif sebesar 0,67% dan 2,79%.

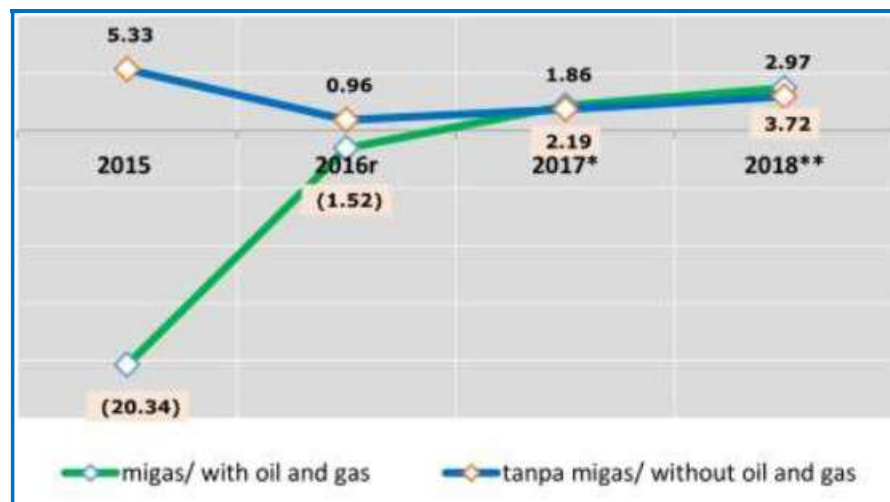
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi selama kurun waktu setahun.

Selama lima tahun terakhir (2014-2018), pertumbuhan ekonomi dengan migas Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif pada Tahun 2015 dan 2016 serta pertumbuhan positif pada Tahun 2017 dan 2018. Hal ini terjadi karena kategori migas yang dulunya menjadi sektor unggulan banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga Tahun 2016. Pada Tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 3,72% (dengan migas) dan 2,97% (tanpa migas). Kondisi ini menunjukkan mulainya terjadi kecenderungan pergeseran sektor ekonomi unggulan migas ke non migas di Lhokseumawe.

Gambar 3.2.

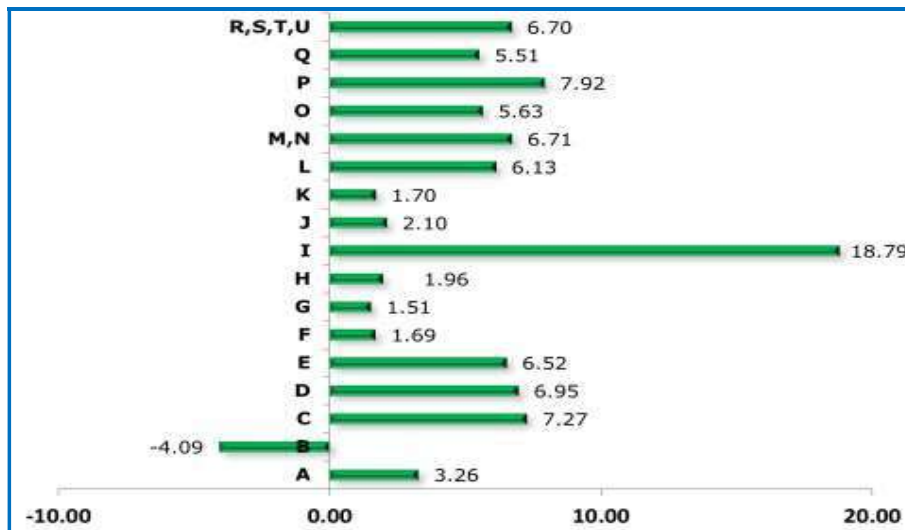
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2015-2018 (persen)**



Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe 2014-2018, BPS Lhokseumawe

Jika dilihat lebih rinci di Tahun 2018, terdapat satu kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kategori Pertambangan dan Penggalan (4,09%). Selain kategori tersebut, kategori lain menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tiga kategori dengan pertumbuhan di atas 7% adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,79%, Jasa Pendidikan sebesar 7,92%, dan Industri Pengolahan sebesar 7,27%.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 (persen)



Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe 2014-2018, BPS Lhokseumawe

B. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Berdasarkan data yang dirilis *Berita Resmi Statistik* edisi Januari 2020 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, tercatat bahwa laju inflasi tahun kalender (Desember 2019 terhadap Desember 2018) untuk Kota Lhokseumawe adalah 1,20%; Kota Banda Aceh sebesar 1,38%; Kota Meulaboh sebesar 4,28%; dan Nasional sebesar 2,72%.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada tiga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,12%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,02%; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dan kelompok sandang masing-masing sebesar 0,08%. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok kesehatan dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Komponen inti pada Desember 2019 mengalami inflasi sebesar 0,14% atau terjadi kenaikan indeks dari 124,23 pada bulan November 2019 menjadi 124,41 pada bulan Desember 2019. Sedangkan komponen harga diatur pemerintah tidak mengalami perubahan indeks. Sementara komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,93%.

Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, dan Banda Aceh
Desember 2018-Desember 2019



Sumber: Berita Resmi Statistik, Edisi Januari 2020, BPS Lhokseumawe

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga laju inflasi antara lain :

1. Mengoptimalkan pengalokasian anggaran dalam memperbaiki konektivitas perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mendukung peningkatan ketersediaan pasokan;
2. Melakukan diseminasi dan komunikasi terkait inflasi untuk menjaga ekspektasi harga di masyarakat;
3. Meningkatkan kelancaran distribusi barang ke masyarakat melalui pasar atau mempercepat fungsionalitas pasar induk.

Selanjutnya, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh telah menyusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah Aceh Tahun 2019-2021 dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

A. Keterjangkauan Harga

- penyediaan komoditas pangan strategis murah melalui optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTI-C) dan pasar/bazar murah terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- perbaikan manajemen pengelolaan kilang padi (permodalan, pemasaran, dan penyediaan stok);
- penyusunan neraca pangan;
- penguatan kolaborasi dengan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga;
- pengawasan penyaluran LPG bersubsidi (3 Kg) dan program konversi LPG;
- pengembangan PIHPS Produsen dan optimalisasi penggunaannya;
- diversifikasi konsumsi bahan makan pokok melalui sosialisasi secara massif, khususnya untuk produk olahan ikan dan daging beku.

B. Ketersediaan Pasokan

- peningkatan produksi;
 - ✓ optimalisasi bantuan benih dan sarana produksi lainnya;
 - ✓ program peningkatan populasi ternak melalui kegiatan sapi induk wajib bunting (SIWAB), kegiatan Bedah Miskin Rakyat Sejahtera (Bekerja), kegiatan pengembangan Kawasan peternakan, pelestarian sumber data genetic ternak sebagai plasma nuftag, kegiatan processing semen beku (sperma beku/straw);
 - ✓ Diseminasi dan informasi mengenai musim dan lalu lintas ikan kepada nelayan.
- pemanfaatan Sarana Sistem Rantai Dingin; Gudang Beku Terpadu/*Integrated Cold Storage* (ICS) Lampulo, Idi, Aceh Selatan, Simeuleu, dan Sabang;
- pengembangan 17 Gapoktan PUPM di beberapa kabupaten di Aceh;
- pengenalan SRG kepada pelaku usaha dan penguatan pengelola Gudang SRG.

C. Kelancaran Distribusi

- kerjasama perdagangan antar daerah, baik antar kab/kota di Aceh maupun dengan provinsi lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditas pangan strategis;
- melakukan fasilitasi kerjasama antar produsen maupun pedagang lintas daerah;
- optimalisasi perdagangan antar pulau dan meningkatkan kelancaran arus distribusi;
- pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, baik menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara;
- pemberian subsidi transportasi alternative.

D. Komunikasi Efektif

- perbaiki kualitas data sebagai dasar kebijakan:
 - ✓ penyusunan neraca pangan kabupaten/kota sebagai dasar untuk menjaga stok pangan dan mendorong terjalannya kerjasama perdagangan antar daerah;
 - ✓ inventarisasi komoditas utama surplus dan deficit pada kabupaten/kota di Aceh;
 - ✓ tersedianya informasi harga pangan strategis di 23 kab/kota untuk komoditas bahan pangan strategis.
- optimalisasi penyampaian informasi harga pangan strategis di berbagai lokasi di kabupaten/kota melalui berbagai media komunikasi;
- mendukung kebijakan *administered price*, termasuk pengawasan tarif angkutan udara;
- melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID;
- komunikasi yang efektif di berbagai media dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat.

3.1.3. Perkiraan Perekonomian Tahun 2020

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Bank Dunia (*World Bank*) edisi Desember 2019 yang bertajuk *Membangun Indonesia*, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada Tahun 2019 dan 5,1% pada Tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan tersebut lebih rendah dari proyeksi pada Juni 2019. Saat ini Bank Dunia memandang ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level 5,1% pada 2019 dan 5,2% pada 2020. Kondisi perekonomian global yang menantang akibat ketegangan perdagangan internasional berimbas pada melambatnya penggerak pertumbuhan domestik Indonesia. Bank Dunia memperkirakan ketegangan perdagangan internasional akan menurun secara bertahap pada Tahun 2020. Di dalam negeri, ketidakpastian politik Indonesia juga mestinya berkurang pasca terbentuknya cabinet pemerintahan yang baru untuk periode 2019-2024.

Pertumbuhan investasi juga diperkirakan meningkat sejalan dengan terdorongnya sentiment bisnis karena reformasi ekonomi yang diwacanakan pemerintah. Pertumbuhan konsumsi swasta diproyeksikan sedikit turun pada Tahun 2020. Penyebabnya adalah inflasi yang diperkirakan lebih tinggi akibat penghapusan subsidi tarif listrik untuk sejumlah golongan rumah tangga dan karena angka konsumsi swasta tahun sebelumnya yang tinggi akibat pemilu 2019. Di tengah berlanjutnya ketidakpastian kebijakan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi global, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia masih akan lemah. Pelemahan ekspor beriringan dengan berkurangnya impor secara bertahap sehingga deficit neraca transaksi berjalan tetap dapat menyempit menjadi 2,7% terhadap PDB pada 2019 dan 2,6% terhadap PDB pada 2020.

Sejalan dengan prediksi kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi ekonomi domestik Aceh pada triwulan I-2020 diperkirakan masih tumbuh positif namun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Namun demikian secara keseluruhan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2020 diperkirakan tumbuh positif pada kisaran 3,95%-4,35%, melambat dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi periode triwulan IV-2019 sebesar 4,30%-4,70%. Perlambatan kinerja tersebut seiring dengan pelemahan konsumsi pemerintah daerah sejalan dengan pola musimannya dimana realisasi belanja pemerintah di awal tahun masih relative terbatas. Sementara itu, perilaku investor swasta pun di awal tahun cenderung masih bersikap menunggu dan belum merealisasikan investasinya, sehingga akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan investasi domestik. Normalisasi pengeluaran rumah tangga pasca berakhirnya periode libur panjang akhir tahun diperkirakan juga akan menyebabkan perlambatan kinerja ekonomi dari sisi komponen konsumsi rumah tangga. Di samping itu, daya beli dan pendapatan masyarakat (khususnya petani tanaman perkebunan) juga diperkirakan belum membaik seiring dengan masih berlangsungnya masa trek komoditas kelapa sawit.

Namun demikian, perlambatan pertumbuhan tersebut masih dapat tertahan oleh beberapa faktor pendorong. Peningkatan UMP Aceh sebesar 8,51% dari Rp.2,9 juta/bulan pada 2019 menjadi Rp.3,1 juta/bulan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020 diyakini akan mampu menahan daya beli masyarakat. Selain itu, perkiraan masuknya masa panen raya komoditas tanaman pangan khususnya padi pada bulan Maret diperkirakan juga mampu meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan. Secara keseluruhan Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan meningkat pada kisaran 4,83%-5,23% dengan proyeksi dalam kisaran tengah atau lebih tinggi dibandingkan perkiraan capaian Tahun 2019. Positifnya kinerja perekonomian pada tahun 2020 diperkirakan bersumber dari akselerasi komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri.

Konsumsi rumah tangga di Tahun 2020 diperkirakan terakselerasi sebagai dampak dari adanya peningkatan pendapatan, utamanya disebabkan oleh peningkatan UMP Aceh sebesar 8,51%. Selanjutnya peningkatan komponen konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya pagu APBA di Tahun 2020 serta pengesahan anggaran yang dilakukan dengan cepat. Sementara itu, ekspor luar negeri diperkirakan meningkat sejalan dengan perbaikan *outlook* pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik.

Seiring dengan prospek perekonomian Nasional dan perekonomian Aceh pada Tahun 2020, perkiraan perekonomian Lhokseumawe juga diharapkan dapat mengikuti prospek perekonomian Nasional dan Aceh. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022, bahwa pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,86%.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan perekonomian, dimana KEK Arun saat ini telah memiliki izin untuk pembangunannya dan telah diresmikan pelaksanaannya sejak Desember 2018 bersamaan dengan *groundbreaking* jalan tol Banda Aceh – Sigli.

KEK Arun yang berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft. Aktivitas KEK Arun diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khusus bagi masyarakat Lhokseumawe, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Lhokseumawe diharapkan cukup baik dan positif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang perekonomian Lhokseumawe dari sisi pengeluaran, sehingga gejolak pada laju pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga akan sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian Lhokseumawe.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perekonomian Nasional pada Tahun 2020 diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tantangan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5%. Gejolak perang dagang global serta stagnannya pertumbuhan perekonomian dunia sangat berpengaruh pada dinamika investasi dan konsumsi dalam negeri.

Tantangan terbesar yang dihadapi Perekonomian Nasional dan Perekonomian Global pada tahun 2020 yaitu terjadi Pandemi Wabah COVID-19. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dalam laporan yang dirilis tanggal 3 April 2020 sebagaimana dikutip <https://ekbis.sindonews.com> memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh 2,5%. Angka ini turun dari 5% pada tahun 2019. Meski Indonesia memiliki landasan makroekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian negara, dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri.

Dalam menghadapi sejumlah tantangan perekonomian pada Tahun 2020 pemerintah telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil guna menghadapi tantangan ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal.

Langkah tegas dapat diterapkan secara efektif untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah tersebut, khususnya guna melindungi kelompok miskin dan rentan, perekonomian Indonesia dapat kembali pulih secara bertahap ke jalur pertumbuhannya tahun 2021.

Langkah pemerintah dan otoritas keuangan yang telah meluncurkan berbagai langkah fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan terarah untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat, termasuk distribusi bantuan langsung tunai bagi kelompok miskin dan rentan, pemotongan pajak dan kelonggaran pembayaran pinjaman bagi pekerja dan dunia usaha. Demikian juga pemerintah telah melakukan penggratisan dan keringanan pembayaran tagihan listrik selama 3 bulan (April s/d Juni) terhadap pelanggan rentan terhadap pandemi COVID-19 ini.

Di sisi lain, Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Selanjutnya, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Di samping itu juga meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi perekonomian Lhokseumawe juga tidak terlepas dari tantangan ekonomi yang dihadapi secara Nasional dan Aceh. Dengan adanya pandemi COVID-19 juga telah merubah arah aktivitas perekonomian Kota Lhokseumawe. Seiring langkah pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran dampak COVID-19, secara langsung telah berdampak terhadap ekonomi sebagian masyarakat akibat adanya sejumlah instruksi dan himbauan dalam rangkaantisipasi penyebaran virus di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pembatasan jam malam, penutupan tempat usaha wisata, sehingga pekerjaanya kehilangan pekerjaan.

Dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi tersebut, sesuai dengan tema Pembangunan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 yaitu *Memperkuat Kerjasama Pembangunan Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing SDM*, Pemerintah Kota Lhokseumawe akan berfokus pada peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia. Dari sisi belanja, pada tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 akan dilakukan *refocusing* belanja daerah secara lebih efisien pada Tahun Anggaran 2020. Khususnya yang secara signifikan adalah meningkatkan belanja Alat Pelindung Diri, belanja untuk usaha-usaha preventif dan belanja yang diperuntukan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang berdampak COVID-19.

Untuk tahun 2021 belanja daerah diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, sehingga dapat membantu SDM Lhokseumawe memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Kota Lhokseumawe, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Lhokseumawe.

Pada Tabel 3.1. (T-C.20) dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil audit LRAPBK, realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar Rp.749.405.667.506,- atau mencapai 92,76 persen dari target sebesar Rp.807.871.157.381,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.65.618.966.778,-; Dana Perimbangan Rp.586.255.868.918,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.97.530.831.811,-. Pada Tahun 2018 pendapatan Kota Lhokseumawe turun dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2018 pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tidak lagi menjadi bagian dari pendapatan Kabupaten/Kota melainkan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh.

Selanjutnya pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.922.536.203.518,-, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.76.178.941.193,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.641.275.568.101,-; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.205.081.694.224,-. Berbeda dengan Tahun 2018, dalam struktur pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sudah dialokasikan pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Dari target yang telah ditetapkan tahun 2019 tersebut, sampai dengan akhir Desember 2019 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe mencapai Rp.864.499.598.943,- atau setara 93,71 persen dari target. Realisasi tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.64.454.924.996,- (80,67 persen); Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.607.297.641.452,- (94,70 persen); dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.195.747.014.495,- (95,45 persen).

Tahun 2020 jumlah pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan sebesar Rp.921.872.347.282,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.67.223.805.350,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.617.243.482.000,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.237.405.059.932,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Akan tetapi dengan mewabahnya pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat telah melakukan restrukturisasi postur APBN tahun 2020. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada postur pendapatan Kota Lhokseumawe terutama pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan dana transfer pemerintah provinsi. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 (T-C.20)
Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2018 (n-3)*	Realisasi Tahun 2019 (n-2)	APBK 2020 (n-1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENDAPATAN DAERAH	749,405,667,506	864,499,598,943	921,872,347,282
1.1	Pendapatan Asli Daerah	65,618,966,778	61,454,942,996	67,223,805,350
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33,855,813,011	28,475,036,318	31,880,000,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,088,925,300	3,758,646,496	4,710,823,350
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,100,912,333	5,108,664,333	5,200,000,000
1.1.4	Zakat dan Infaq	-	7,644,838,340	8,800,000,000
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23,573,316,134	16,467,757,509	16,632,982,000
1.2	Dana Perimbangan	586,255,868,918	607,297,641,452	617,243,482,000
1.2.1	Transfer Umum	492,307,017,018	504,262,665,312	507,857,153,000
1.2.2	Transfer Khusus	93,948,851,900	103,034,976,140	109,386,329,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	97,530,831,811	195,747,014,495	237,405,059,932
1.3.1	Pendapatan Hibah	20,114,160,000	21,366,880,000	30,079,920,000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya	23,302,809,346	26,704,399,172	29,117,787,473
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53,113,862,465	147,566,670,653	178,207,352,459
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,000,000,000	90,100,000	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	18,964,670	-
	JUMLAH PENDAPATAN	749,405,667,506	864,499,598,943	921,872,347,282

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

Sedangkan untuk tahun 2021 pendapatan Kota Lhokseumawe direncanakan sebesar Rp.919.149.778.882,-. Pendapatan yang direncanakan tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.64.501.236.950,- Pendapatan Transfer sebesar Rp.824.568.621.932,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.30.079.920.000,-.

Jumlah pendapatan yang direncanakan pada tahun 2021 relatif lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun berjalan (2020). Perbedaan target pendapatan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana di dalamnya terdapat alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang direncanakan sebesar Rp.96.137.969.459. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1116/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/915/2020 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2021.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah juga direncanakan lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2020, hal ini disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di Kota Lhokseumawe yang selama tahun 2020 ini masih mengalami stagnan akibat pandemi COVID-19. Tentunya diharapkan hingga akhir 2020 pandemi COVID-19 bisa berakhir, sehingga geliat ekonomi di Kota Lhokseumawe dapat bergerak naik, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat Tabel 3.1.a. berikut.

Tabel 3.1.a. (T-C.20.a)
Proyeksi / Target Pendapatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN	
		2021	2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	910,202,301,117	920,350,778,882
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	64,501,236,950	65,702,236,950
4.1.1.	Pajak Daerah	30,699,000,000	31,900,000,000
4.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,200,000,000	5,200,000,000
4.1.3.	Retribusi Daerah	4,265,823,350	4,265,823,350
4.1.4.	Zakat dan Infaq	7,850,000,000	7,850,000,000
4.1.5.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16,486,413,600	16,486,413,600

NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN	
		2021	2022
4.2.	Pendapatan Transfer	824,568,621,932	824,568,621,932
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	699,312,865,000	699,312,865,000
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	35,094,002,000	35,094,002,000
4.2.1.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	472,763,151,000	472,763,151,000
4.2.1.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61,417,516,000	61,417,516,000
4.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	47,968,813,000	47,968,813,000
4.2.1.5.	Dana Insentif Daerah (DID)	21,048,688,000	21,048,688,000
4.2.1.6.	Dana Desa	61,020,695,000	61,020,695,000
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125,255,756,932	125,255,756,932
4.2.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	29,117,787,473	29,117,787,473
4.2.2.2.	Dana Otonomi Khusus	96,137,969,459	96,137,969,459
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30,079,920,000	30,079,920,000
4.3.1.	Pendapatan Hibah	30,079,920,000	30,079,920,000
	JUMLAH PENDAPATAN	919,149,778,882	920,350,778,882

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan
2. ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
 - e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- meningkatkan kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efisiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berdasar *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;

2. prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan untuk :

- a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
- c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dan fungsi kesehatan 10%;
- d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- e. sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Belanja Kota Lhokseumawe juga diarahkan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka secara garis besar gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.2 (T-C.21.)
Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2018 (n-3) *)	Realisasi Tahun 2019 (n-2)	APBK Tahun 2020 (n-1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	BELANJA DAERAH	775,480,033,294	873,465,604,518	932,428,473,462
2.1	Belanja Tidak Langsung	399,988,550,303	412,220,469,101	453,595,514,550
2.1.1	Belanja Pegawai	281,603,206,480	289,071,620,823	305,501,682,831
2.1.4	Belanja Hibah	7,607,600,000	6,228,895,000	15,866,498,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,159,430,000	7,695,849,500	10,489,512,500
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	973,164,381	-	6,381,491,785
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	101,336,724,357	109,096,151,414	114,256,329,434
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	308,425,085	127,952,364	1,100,000,000
2.2	Belanja Langsung	375,491,482,991	461,245,135,417	478,832,958,912
2.2.1	Belanja Pegawai	49,974,636,110	59,769,863,300	62,621,499,000
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	182,434,448,725	197,599,996,127	207,544,365,907
2.2.3	Belanja Modal	143,082,398,156	203,875,275,990	208,667,094,005
	JUMLAH BELANJA	775,480,033,294	873,465,604,518	932,428,473,462

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar Rp.775.480.033.294,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.399.988.550.303,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.375.491.482.991,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 realisasi belanja diperkirakan sebesar Rp.873.465.604.518,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.412.220.469.101,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.461.245.135.417,-. Untuk Tahun Anggaran 2020 total belanja Kota Lhokseumawe dianggarkan sebesar Rp.932.428.473.462,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.453.595.514.550,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.478.832.958.912,-.

Sehubungan dengan mewabahnya COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO, Pemerintah telah melakukan restrukturisasi postur APBN 2020 dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Restrukturisasi postur APBN tentunya sangat berpengaruh terhadap postur APBK Lhokseumawe. Sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat bahwa APBK 2020 harus dilakukan *refocusing* belanja yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19.

Sedangkan untuk Tahun 2021, proyeksi/target belanja Kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai Rp.936.206.162.904,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.620.503.482.770,-; Belanja Modal sebesar Rp.193.964.858.916,-; Belanja Tak Terduga sebesar Rp.1.100.000.000,-; dan Belanja Transfer Kepada sebesar Rp.120.637.821.219,-. Proyeksi/Target Belanja Hibah tahun 2021 relatif meningkat dibandingkan dengan jumlah Belanja Hibah pada tahun 2020. Hal ini karena pada belanja hibah tersebut direncanakan alokasi untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe oleh KIP dan Panwaslih Kota Lhokseumawe yang mencapai Rp.36 milyar. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran belanja Kota Lhokseumawe tahun 2021 dan proyeksi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.a. berikut.

Tabel 3.2.a. (T-C.21.a)
Proyeksi/Target Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN	
		2021	2022
5.	BELANJA DAERAH	936,206,162,904	940,309,982,105
5.1.	Belanja Operasi	620,503,482,769	600,711,358,981
5.1.1.	Belanja Pegawai	350,326,261,377	368,892,574,446
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	177,732,975,055	204,169,623,808
5.1.5.	Belanja Hibah	51,692,496,025	16,359,822,900
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	40,751,750,313	11,289,337,828
5.2.	Belanja Modal	193,964,858,916	215,555,471,141
5.3.	Belanja Tak Terduga	1,100,000,000	1,100,000,000
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	1,100,000,000	1,100,000,000
5.4.	Belanja Transfer	120,637,821,219	122,943,151,983
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	6,381,491,785	6,700,566,374
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	114,256,329,434	116,242,585,609
	JUMLAH BELANJA	936,206,162,904	940,309,982,105

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yang belum dapat dipastikan sampai kapan, maka pada Tahun 2021 belanja Kota Lhokseumawe juga diarahkan untuk penanganan COVID-19. Penggunaan belanja untuk penanganan COVID-19 akan diarahkan terutama untuk pendanaan alat pelindung diri (APD), insentif petugas dan tenaga medis, dan untuk kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian juga dengan Belanja Bantuan Sosial, meningkat dari tahun sebelumnya, dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut pada Tahun 2021 direncanakan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak Covid-19.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Untuk Tahun 2021 Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.18.056.384.022 dengan rincian SILPA Penerimaan Zakat sebesar Rp.7.000.000.000,-; dan SILPA Tahun sebelumnya sebesar Rp.11.056.384.022,-. Selanjutnya untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk Investasi/Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan atas realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, besaran pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 (T-C.22.)
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Nomor Urut	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018 (n-3) *)	Realisasi Tahun 2019 (n-2)	APBK Tahun 2020 (n-1) *)	Proyeksi / Target Tahun 2021 (n)	Proyeksi / Target Tahun 2022 (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	PEMBIAYAAN	53,033,411,783	25,959,045,995	10,556,126,180	17,056,384,022	19,959,203,223
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	55,333,411,783	26,959,045,995	12,056,126,180	18,056,384,022	20,959,203,223
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55,333,411,783	26,959,045,995	12,056,126,180	18,056,384,022	20,959,203,223
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55,333,411,783	26,959,045,995	12,056,126,180	18,056,384,022	20,959,203,223
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	53,033,411,783	25,959,045,995	10,556,126,180	17,056,384,022	19,959,203,223

Sumber : Proyeksi BPKD Kota Lhokseumawe, *) Audited

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan atas penjabaran dari tahun Keempat RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPK Lhokseumaw Tahun 2021 mengusung tema yaitu: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing SDM”**.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawemerupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022: **“TERWUJUDNYA KOTA LHOXSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”**. Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
2. sehat mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
3. cerdas mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
4. sejahtera mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual;

Misi

Dalam mewujudkan Visi Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui beberapa Misi sebagai berikut :

1. **memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat**, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, menjadikan nilai-

nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang islami.

- 2. meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan,** yaitu mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerja sama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan.
- 3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdayasaing,** yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki dayasaing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan system pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang MahaEsa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*),** yaitu peningkatan kinerja serta peningkatan system penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan system perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

5. **mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai**, yaitu mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan social serta sarana dan prasarana dasar perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.
6. **mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari**, yaitu pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;
7. **mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan**, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	SKPK Penanggung Jawab
Visi : TERWUJUDNYA KOTA LHOKESEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”.					
Misi 1, Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.	Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat	Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman syariat islam bagi masyarakat	Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai keislaman	DSI-PD
				Meningkatkan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan agama bagi masyarakat	MPU
			Peningkatan Sosialisasi ZIS	Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS	B. MAL
		Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya aceh	MAA
				Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada	PK

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi	Menurunkan angka kemiskinan	Peningkatan dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Mengembangkan keahlian daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi dan jiwa kewirausahaan dan akses kesempatan kerja
			Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak	Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima	Memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional
		Meningkatnya Iklim Investasi	Peningkatan promosi dan potensi daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam promosi potensi daerah
			Percepatan pelayanan investasi melalui e-permit	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan investasi e permit
		Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pembangunan pariwisata daerah
		Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya keunggulan kompetitif pada sektor kelautan perikanan, peternakandan pangan	Pemanfaatan dan pengelolaan sektor pertanian, kelautan perikanan dan pangan
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran	Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan sarana prasarana pembelajaran
		Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan SDM melalui pembinaan pemuda
			Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	peningkatan saran dan prasarana olah raga
		Meningkatnya status Tipe Dayah	Peningkatan sarana dan prasarana Dayah	Penyediaan sarana dan prasarana dayah
	Meningkatkan kualitas kesehatan.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta jaringannya
		Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit menular	Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit menular
		Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit tidak menular	Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular
		Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan	Peningkatan kemitraan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, usia produktif	Peningkatan kualitas kesehatan melalui kemitraan kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance).	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur	Melaksanakan perencanaan, pelaporan, evaluasi sesuai prosedur secara transparan dan akuntabel
				Pembentukan Lembaga Perbankan Pembiayaan Syariah secara Profesional dan Mandiri
		Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik
		Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam pemilu
Misi 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata	Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap air minum
			Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat	Penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan kawasan pemukiman kumuh
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan	Peningkatan ruas jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara <u>merata</u>	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan kawasan terbuka hijau	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan RTH dan pemeliharaan kawasan RTH
			Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang	Penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan tata
		Terselenggaranya manajemen sampah kota	Peningkatan manajemen pengelolaan sampah	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana prasarana lingkungan permukiman
				Relokasi TPA yang memiliki ramah lingkungan dan terjaminnya pengelolaan sampah yang baik
Misi 7 : Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam	Meningkatkan ketertiban dalam menegakkan syariat islam
		Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat

Sumber : RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 Kota Lhokseumawe

Tema pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2021 diarahkan terkait dengan penanganan Covid-19, maka tema RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing SDM”**. Maka sasaran yang akan dicapai Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 diantaranya yaitu:

Tabel 4.2
Target Capaian Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Visi / Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Kondisi Akhir	OPD
Visi : “TERWUJUDNYA KOTA LHOXSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”						
Misi 1, Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.	1.1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam	Indeks	0	0	DSI PD
		Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam	Persen	70	80	DSI PD
	1.1.1	Menguatnya Penegakan Syariat Islam dalam Bermasyarakat	Kasus	0	0.00	DSI PD
		Persentase penurunan pelanggaran syariat islam	Persen	60	70.00	Satpol PP
		Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)	Rp (milyar)	0.00	0.00	B. MAL
		Persentase peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa	Persen	95	100	B. MAL
	1.1.2	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Jumlah gampong	0	0	MAA
		Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Bulan	-	-	MAA
		Persentase pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Persen	50	100	MAA

Visi / Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2021	Kondisi Akhir	OPD
Misi 2, Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen	4.10	4.20	BPS
			Pengendalian laju inflasi	Persen	1.40	1.30	BPS
	2.1.1	Menurunkan angka kemiskinan	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	10.80	10.80	BPS
			Tingkat pengangguran terbuka	Persen	11.04	11.03	BPS
			Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp (Juta)	1.16	1.20	BPS
			Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	25	30	DP3A P2KB
	2.1.2	Meningkatnya pertumbuhan	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2,342	2,351	Diskop
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	19.311	19.697	BPS
			Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Persen	80	0	Setdako
	2.1.3	Meningkatnya iklim investasi	Jumlah Investor	PMDN/ PMA	352.0	362.0	DPM PTSP
			Peningkatan investor	Persen	95	98.0	DPM PTSP
			Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3.409	3.419	DPM PTSP
			Peningkatan nilai investasi	Persen	97	98	DPM PTSP
			Cakupan Pengendalian dan pembinaan BUMD dan BLUD	Persen	80	90	Setda
	2.1.4	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	1.23	1.26	Dis Pora
			Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	20	20.00	Dis Pora
	2.1.5	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	33.42	34.09	Dinsos
			Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100	100	Dinsos
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100	100	Dinsos

Visi / Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2021	Kondisi Akhir	OPD
	2.1.6	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan	Bulan	12	12	DKPP
			Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	90	95	DKPP
			Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0.75	0.75	DKPP
			Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	98	100	DKPP
			Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	6.81	6.88	DKPP
			Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8.47	8.53	DKPP
			Persentase peningkatan produksi pertanian	Persen	100	100	
Misi 3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	3.1	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	77.92	78.47	BPS
	3.1.1	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Rerata nilai ujian nasional:				PK
			-Rerata nilai ujian nasional SD/MI	Nilai	95	95	PK
			-Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs	Nilai	95	95	PK
			Angka Partisipasi Kasar:				PK
			- APK SD/MI	Angka	100.0	100.0	PK
			- APK SMP/MTs	Angka	100.0	100.0	PK
			Angka Partisipasi Murni:				PK
			- APM SD/MI	Angka	90.00	90.00	PK
			- APM SMP/MTs	Angka	90.00	90.00	PK
			Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15.65	15.78	PK
	3.1.2	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Rasio ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	0.00	0.00	PK
			Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	7	7	Dis Pora

Visi / Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2021	Kondisi Akhir	OPD
	3.1.3	Meningkatnya status tipe Dayah	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	15	16	DSI PD
	3.2	Meningkatkan kualitas	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.5	71.6	Dinkes
	3.2.1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	-	0	Dinkes
	3.2.1. a	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	7	7	Dinkes (Revisi)
	3.2.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	-	0	Dinkes
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita	Persen	-	0	Dinkes
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita	Persen	-	0.0	Dinkes
	3.2.2. a	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
	3.2.3	Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I	Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	-	0.0	Dinkes
	3.2.3. a	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)

Visi / Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun 2021	Kondisi Akhir	OPD
	3.2.4	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Dinkes (Revisi)
			Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0.02	0.02	Dinkes (Revisi)
			Prevelensi Balita Gizi Kurang	persen	1.18	1.18	Dinkes (Revisi)
			Cakupan Desa Siaga	jumlah	88.24	100.00	Dinkes (Revisi)

Misi 4, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance).	4.1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	B	B	Setda
	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kategori hasil evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	Setda
			Kategori hasil evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Setda
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	BPKD
			Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	100	88	Inspekt orat
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	persen	100	100	Inspekt orat
			Level Kapabilitas APIP	level	3 level	4 dengan catatan level	Inspekt orat
			Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	level	3 level	3 level	Inspekt orat
	4.1.2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Cakupan pengelolaan Website pemerintah	Persen	100	100.00	Kominfo
			Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	4.0	4.0	Kominfo
	4.1.3	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	-	75.00	Kesban g Pol
Misi 5, Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.	5.1	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	Pencapaian target nasional 100-0-100	Persen	4.38- 11.3- 80.4	4.51- 9.3- 82.8	PUPR
	5.1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih	Persen	4.38	4.51	PUPR
			Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah	11.30	9.27	PUPR
			Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	4.38	4.51	PUPR
	5.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal	Kategori capaian kinerja infrastruktur publik	Absolut	Baik	Baik	PUPR
	5.2.1	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	76.20	81.53	PUPR
	5.2.2	Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	51.95	51.95	Dishub

Visi / Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Kondisi Akhir	OPD
Misi 6, Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.	6.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	1.15	1.36	DLH
	6.1.1 Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH Publik 20%	Ha	-	0.0	DLH
	6.1.2 Terselenggaranya manajemen sampah kota	Persentase sampah yang tertangani	Persen	86.8	92.0	DLH
Misi 7, Mewujudkan ketentraman, ketertiban, kedamaian dan persatuan	7.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio (Per 10.000)	38.55	34.70	PP WH
	7.1.1 Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	60	65	PP WH
	7.1.2 Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	-	-	Kesbang Pol
	7.1.3 Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	90	95	PP WH
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	47.00	50.00	BPBD
		Cakupan penanggulangan kebakaran	Persen	100	100	BPBD

Tabel 4.3
Sinkronisasi Isu Strategis, Tujuan/Sasaran Pembangunan nasional, Provinsi dan kota Lhokseumawe

No	RKPK LHOKEUMAWE TAHUN 2021	RKP ACEH Tahun 2021	RKP Tahun 2021
A	Isu Strategis		
1	Daya serap tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan yang signifikan selama pandemi Covid-19	1 Banyaknya pemutusan hubungan kerja selama pandemi Covid-19 yang meningkatkan angka pengangguran	Pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19
2	Pertumbuhan Ekonomi yang belum mencapai target RPJM Kota Lhokseumawe;	2 Menurunnya semangat wirausaha serta kesulitan akses modal masyarakat kecil dan menengah sebagai imbas dari pandemi Covid-19	Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
3	Sarana-Prasarana publik yang belum fungsional	3 Terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur akibat adanya PSBB selama pandemi Covid-19	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
4	Produktivitas agroindustri yang terhambat akibat pandemi Covid-19	4 Produktivitas agroindustri yang terhambat akibat pandemi Covid-19	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera.
5	Kualitas pendidikan yang mengalami stagnan sehingga harus ditingkatkan;	5 Semakin terhambatnya peningkatan kualitas SDM Aceh Pasca Covid-19	
6	Meningkatnya kerawanan pangan akibat pandemi Covid-19	6 Meningkatnya kerawanan pangan akibat pandemi Covid-19	Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung
7	Belum optimalnya penanganan kesehatan fisik dan sosial akibat pandemi Covid-19	7 Belum optimalnya penanganan kesehatan fisik dan sosial akibat pandemi Covid-19	

B	Tujuan			
1	Memperkuat pelaksanaan Syariat isl	1	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	
2	Meningkatkan Pertumbuhan ekonom	2	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
		3	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua level
		4	Menurunnya angka kemiskinan	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
				Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
				Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
3	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang	5	Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
		6	Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	
4	Meningkatkan kualitas kesehatan	7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	8	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	
		9	Meningkatkan kualitas kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	
		10	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
		11	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	
6	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	12	Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar	Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
		13	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	
7	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal	14	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
		15	Menurunnya angka pengangguran	
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	16	Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari	Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
				Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
		17	Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
9	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan	18	Meningkatkan pembangunan demokrasi	
		19	Meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
		20	Meningkatkan pembangunan demokrasi	
		21	Meningkatkan tatakelola kebencanaan	

C	Sasaran		
1	Menguatnya Penegakan Syariat Islam dalam Bermasyarakat	1	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas
		2	Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah
2	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	4	Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan keagamaan dan budaya berbasis islami
		5	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami
3	Menurunkan angka kemiskinan	6	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
4	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	7	Meningkatnya pembangunan industri
		8	Meningkatnya pembangunan industri pengolahan non migas dan ekonomi kreatif
5	Meningkatnya iklim investasi	9	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
6	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	10	Penguatan destinasi pariwisata halal
7	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	11	Peningkatan kesejahteraan PMKS dan Disabilitas
8	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;	12	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pertanian
9	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	13	Meningkatnya kualitas pendidikan
		14	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap pendidikan
10	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	15	Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing
11	Meningkatnya status tipe Dayah	16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan dayah
12	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	17	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
13	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	18	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap layanan kesehatan
14	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	19	Penguatan sistem rujukan
15	Meningkatnya pengendalian penyakit menular		
16	Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I		
17	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular		
18	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia		
19	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	20	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		21	Birokrasi yang efektif dan efisien
		22	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
20	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	23	Pengembangan Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi (SIAT)
21	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	24	Penuntasan penyelesaian turunan UU-PA
22	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	25	Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur dasar masyarakat
23	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan		
24	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal		
25	Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau		
26	Terselenggaranya manajemen sampah kota	26	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari
27	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	27	Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat
		28	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam di daerah perbatasan
28	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	29	Penjaminan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
29	Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	30	Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target prioritas Kota Lhokseumawe, maka prioritas pembangunan dijabarkan ke dalam program Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Pogram Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2021

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
I.	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya		
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	150.000.000,-	PK
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	150.000.000,-	PK
3.	Program Pembinaan Sejarah	150.000.000,-	PK
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000,-	PK
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	613.430.102	PK
6.	Program Pemberdayaan Sosial	2.923.864.600,-	Dinsos
7.	Program Rehabilitasi Sosial	3.690.000.000,-	Dinsos
8.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	41.245.000.000,-	Dinsos
9.	Program Penanganan Bencana	771.553.700	Dinsos
10.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	360.000.000,-	Dinsos
11.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	1.011.035.000,-	Dispora
12.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	2.962.681.560,-	Dispora
13.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	130.000.000,-	Dispora
14	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	288.350.000,-	MAA

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
II.	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata		
1.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan	360.000.000,-	DP3AP2&KB
2.	Program Perlindungan Perempuan	460.000.000,-	DP3AP2&KB
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	500.000.000,-	DP3AP2&KB
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	127.000.000,-	DP3AP2&KB
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	375.000.000,-	DP3AP2&KB
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	675.000.000,-	DP3AP2&KB
7.	Program Pengendalian Penduduk	50.000.000,-	DP3AP2&KB
8.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	44.000.000,-	DP3AP2&KB
9.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	418.848.800	DPMTSP
10.	Program Penempatan Tenaga Kerja	130.300.000,-	DPMTSP
11.	Program Hubungan Industrial	308.000.000,-	DPMTSP
12.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	387.408.263,-	DPMTSP
13.	Program Promosi Penanaman Modal	250.000.000,-	DPMTSP
14.	Program Pelayanan Penanaman Modal	328.700.000,-	DPMTSP
15.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	169.400.000,-	DPMTSP
16.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	72.000.000,-	DPMTSP

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
17.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	95.148.337,-	Dispora
18.	Program Pemasaran Pariwisata	807.589.684,-	Dispora
19.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Penanaman Modal	72.000.000,-	Dispora
20.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	206.325.000,-	DKP3
21.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.377.473.500,-	DKP3
22.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	60.000.000,-	DKP3
23.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	719.076.000,-	DKP3
24.	Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana	681.200.000,-	DKP3
25.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	636.100.000,-	DKP3
26.	Program Penyuluh Pertanian	1.987.250.000,-	DKP3
27.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	30.000.000,-	Disperindagkop
28.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.000.000,-	Disperindagkop
29.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	66.640.000,-	Disperindagkop

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
30.	Program Pengembangan UMKM	460.000.000,-	Disperindagkop
31.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.096.100.000,-	Disperindagkop
32.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	430.000.000,-	Disperindagkop
33.	Program Pengembangan Ekspor	680.000.000,-	Disperindagkop
34.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	3.125.000.000,-	Disperindagkop
35.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	972.560.715	Disperindagkop
36.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	50.000.000,-	Disperindagkop
37.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	141.245.720,-	Disperindagkop
38.	Program Baitul Mal	7.548.624.000,-	Disperindagkop
III.	Peningkatan Kualitas Pendidikan		
1.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	414.795.479,-	MPD
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	46.855.344.386	PK
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	110.000.000,-	PK
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	250.000.000,-	PK
5.	Program Pembinaan Perpustakaan	2.343.260.000,-	Arpus
IV.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	40.513.660.672	Dinkes

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia	629.460.000,-	Dinkes
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	205.000.000,-	Dinkes
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	520.000.000,-	Dinkes
5.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.902.046.000,-	Dinkes
6.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga	104.121.700,-	Dinkes
V.	Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan		
1.	Program Penanggulangan Bencana	1.640.710.073	BPBD
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran	600.600.000,-	BPBD
3.	Program Pendaftaran Penduduk	2.330.163.500,-	Disdukcapil
4.	Program Pencatatan Sipil	767.965.000,-	Disdukcapil
5.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	1.097.000.000,-	Disdukcapil
6.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	165.000.000,-	Disdukcapil
7.	Program Pemerintahan Desa	1.405.210.000,-	DPMG
8.	Pogram Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2.030.017.700,-	DPMG
9.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	237.108.525,-	Kominfo

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
10.	Program Aplikasi Informatika	1.851.559.475,-	Kominfo
11.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	34.000.000,-	Kominfo
12.	Program Pengelolaan Arsip	400.000.000,-	Arpus
13.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100.000.000,-	Arpus
14.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23.976.646,-	Setdako
15.	Program Perekonomian dan Pembangunan	7.178.811.700,-	Setdako
16.	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	6.399.366.500,-	Sekwan
17.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	1.799.458.868,-	Bappeda
18.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	3.216.584.460,-	Bappeda
19.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	693.410.000,-	Bappeda
20.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.382.572.600,-	BPKD
21.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.367.355.300,-	BPKD
22.	Program Kepegawaian Daerah	2.245.492.496,-	BKPSDM
23.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.605.667.800,-	BKPSDM
24.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.130.050.000,-	Inspektorat
25.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.528.878.730,-	Inspektorat

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	244.330.000,-	Kec. Banda Sakti
27.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	8.295.000,-	Kec. Banda Sakti
28.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	36.000.000,-	Kec. Banda Sakti
29.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.376.950,-	Kec. Banda Sakti
30.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000,-	Kec. Blang Mangat
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	271.217.629,-	Kec. Blang Mangat
32.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	15.000.000,-	Kec. Blang Mangat
33.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,	Kec. Blang Mangat
34.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.535.290,-	Kec. Blang Mangat
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	208.611.344,-	Muara Satu
36.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	8.000.000,-	Muara Satu
37.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.500.000,-	Muara Satu

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
38.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.240.200,-	Muara Satu
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	266.192.846,-	Muara Dua
40.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	22.590.050,-	Muara Dua
41.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.500.000,-	Muara Dua
42.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.167.100,-	Muara Dua
VI.	Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan		
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.100.000.000,-	PUPR
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	1.100.000.000,-	PUPR
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	6.100.000.000,-	PUPR
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Drainase	9.120.600.000,-	PUPR
5.	Program Pengembangan Permukiman	3.000.000.000,-	PUPR
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	4.000.000.000,-	PUPR
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.025.600.000,-	PUPR

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	92.222.477.388,-	PUPR
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.750.000.000,-	PUPR
10.	Program Kawasan Permukiman	363.000.000,-	PUPR
11.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.800.000.000,-	PUPR
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas	18.781.984.621,-	PUPR
13.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	476.000.000,-	DLH
14.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	261.330.000,-	DLH
15.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3.701.324.700,-	DLH
16.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	2.015.000.000,-	DLH
17.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	255.000.000,-	DLH
18.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.000.000,-	DLH
19.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	111.000.000,-	DLH

No	Program Prioritas	Pagu	OPD
20.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.000.000,-	DLH
21.	Program Pengelolaan Persampahan	7.250.000.000,-	DLH
22.	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan	2.499.000.000	Dishub
VII.	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	3.542.787.500,-	Satpol PP
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	705.674.800,-	Kesbangpol
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta budaya Politik	35.537.500.000,-	Kesbangpol
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	160.257.800,-	Kesbangpol
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	435.256.025,-	Kesbangpol
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	634.693.950,-	Kesbangpol

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA

Rencana kerja dan pendanaan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2021 disusun berdasarkan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan evaluasi pembangunan dan capaian kinerja yang telah dicapai dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2019. Disamping itu, rencana kerja dirumuskan atas aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dirangkum dari hasil Musrenbang dan dituangkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang diperoleh dari sistem perencanaan terpadu (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan terwujudnya integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Program dan Kegiatan tersebut dirangkum dan disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga memberi manfaat dan memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Berikut Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021.

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
								Tolok Ukur	Target	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				TOTAL BELANJA DAERAH											936,206,162,904	940,309,982,105		
				SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH											2,022,215,321	2,224,634,853		MPD
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											2,022,215,321	2,224,634,853		MPD
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											2,022,215,321	2,224,634,853		MPD
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,607,419,842	1,768,359,826		MPD
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,200,000	1,320,000		MPD
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja SKPD	8 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,200,000	1,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											863,742,842	950,117,126		MPD
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	168 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	863,742,842	950,117,126	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											25,000,000	27,500,000		MPD
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Stel	Meningkatnya SDM Aparatur yang Handal	100%	25,000,000	27,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											164,140,000	180,752,000		MPD
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	39 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	23,000,000	25,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
											Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Jenis						MPD
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	615 Porsi	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365 Eks	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,140,000	1,452,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	37 Kali	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											30,000,000	33,000,000		MPD
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	32 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	30,000,000	33,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											430,637,000	473,700,700		MPD
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Materai yang Disediakan	426 Lembar	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	100%	1,998,000	2,197,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang Dibayar	12 RB	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	100%	4,770,000	5,247,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	252 OB	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	100%	423,869,000	466,255,900	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
											Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	120 OB						MPD
											Jumlah Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108 OB						MPD
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										92,700,000	101,970,000		MPD
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12 UB	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100%	25,700,000	28,270,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara	24 UB	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100%	47,000,000	51,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung kantor yang Dipelihara	1 Unit	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100%	15,000,000	16,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	16 Unit	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100%	5,000,000	5,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH										414,795,479	456,275,027		MPD
1	01	08	2.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh										143,536,480	157,890,128		MPD
1	01	08	2.01	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	65 Persen	Jumlah Edisi Buletin Edukasi	4 Edisi	Terselenggarakannya Kebijakan Pendidikan Aceh	100%	143,536,480	157,890,128	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
											Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan Public Hearing (Meudrah) Pendidikan	2 Hari						MPD
											Jumlah Hari Pelaksanaan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	6 Hari						MPD
											Jumlah Hari Pemberian Ceramah Rohani untuk Mencegah Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah	5 Hari						MPD
1	01	08	2.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh										100,000,000	110,000,000		MPD
1	01	08	2.02	03	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	65 Persen	Jumlah Data Penerima Beasiswa dan Bantuan Pendidikan	3 Jenis	Terbiayainya Dana Pendidikan Bagi Penerima Beasiswa dan Bantuan Pendidikan	100%	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
1	01	08	2.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh										171,258,999	188,384,899		MPD
1	01	08	2.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	65 Persen	Jumlah Hari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Balai Pengajian, Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)	3 Hari	Terselenggarakannya Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	100%	65,495,000	72,044,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
											Jumlah Hari Pelaksanaan Pengawasan dan Bimbingan MPD kepada Komite Sekolah	2 Hari						MPD
											Jumlah Hari Pelaksanaan Supervisi Pencapaian Standar Pendidikan	4 Hari						MPD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	01	08	2.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	65 Persen	Jumlah Hari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Assesment Kompetensi Minimum (AKM) Tingkat Sekolah Dasar	3 Hari	Terselenggarakannya Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	100%	105,763,999	116,340,399	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPD
											Jumlah Hari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Assesment Kompetensi Minimum (AKM) Tingkat Sekolah Menengah	8 Hari						MPD
											Jumlah Hari Pelaksanaan Pendataan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	4 Hari						MPD
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									193,966,452,442	223,574,574,397		PK	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									192,653,022,340	220,949,574,397		PK	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									192,653,022,340	220,949,574,397		PK	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									144,687,677,954	165,970,881,397		PK	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									721,200,000	461,200,000		PK	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja dan Resntra Perubahan Yang Dicitak	20 buku	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	401,200,000	321,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
											Jumlah DED yang disusun	17 Dokumen						PK
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RKA-SKPD	10 buku	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	75,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan RKA-SKPD	10 buku	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	75,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPA-SKPD	10 buku	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	75,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan DPA-SKPD	10 Buku	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	75,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah buku LAKIP SKPD	10 buku	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									126,045,004,477	150,638,907,920		PK	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29400 OB	Meningkatnya kualitas Administasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	126,038,444,477	150,632,347,920	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah buku SPM yang dicetak	20 buku	Meningkatnya kualitas Administasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	6,560,000	6,560,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									340,000,000	95,000,000		PK	
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen angka kredit guru yang disusun	500 Dokumen	Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	40,000,000	45,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	5 Kali	Meningkatnya kualitas Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	300,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.06		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	01	2.06	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,495,000,000	1,143,000,000		PK
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Peralatan Listrik dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan	90 Jenis	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95 Persen	350,000,000	98,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan yang Dicetak dan Digandakan	50 Jenis	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Kali	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95 Persen	300,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah operator aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada dinas pendidikan dan sekolah	135 Orang	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95 Persen	795,000,000	795,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,736,400,000	150,000,000		PK
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 Unit	Meningkatnya pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2,000,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Jenis	Meningkatnya pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	136,400,000	90,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	1 Unit	Meningkatnya pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	600,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										13,198,773,477	13,198,773,477		PK
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang Dikirim	50 Surat	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	2,220,000	2,220,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang Dibayar	96 rekening bulan	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	360,088,296	360,088,296	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	22836 OB	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	12,836,465,181	12,836,465,181	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
											Jumlah pejabat pengelola keuangan OPD	1740 OB						PK
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										151,300,000	284,000,000		PK
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatann	12 UB	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 Persen	35,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 UB	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 Persen	18,200,000	19,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Jenis	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 Persen	50,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 Persen	48,100,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	01	02		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												46,855,344,386	54,068,693,000		PK
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												23,310,972,000	23,564,555,175		PK
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	1,858,500,000	544,350,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun	2 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	218,416,000	240,257,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang usaha kesehatan sekolah yang dibangun	2 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	159,812,000	175,793,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	5 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	1,129,485,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	4 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	913,664,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	18 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	2,466,900,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	572,144,000	629,358,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	125,097,000	137,606,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	23 Unit	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	355,554,000	594,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sekolah	5 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sekolah penerima perlengkapan sekolah	16 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	540,000,000	594,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa	40 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah penyediaan biaya personel peserta didik sekolah dasar	50 Siswa	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Sekolah yang menerima pengadaan alat praktik dan peraga siswa	5 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	330,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Periode penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	1 Semester	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	150,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sekolah yang dilakukan evaluasi	72 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	300,000,000	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah cabang perlombaan yang diperlombakan	13 Cabang Lomba	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	400,000,000	550,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih	588 Orang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	800,000,000	927,789,275	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	368 Orang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	300,000,000	1,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sekolah yang menerima dana bos	69 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	12,621,400,000	15,881,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah bendahara sekolah yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah dasar	69 bendahara sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	50,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												20,485,960,386	26,342,806,425		PK
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang kelas yang dibangun	7 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	1,897,584,386	2,087,342,825	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah laboratorium yang dibangun	8 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	2,205,000,000	2,425,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	4 unit	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	2,000,000,000	2,200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	431,513,000	474,664,300	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	12 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	2,360,040,000	2,596,044,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	655,548,000	721,102,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	827,774,000	910,551,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah laboratorium yang direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	1,843,725,000	2,028,097,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	3 unit	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	318,456,000	350,301,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sekolah	5 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	9 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	405,000,000	445,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Siswa	50 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	1,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah penyediaan biaya personel peserta didik sekolah menengah pertama	50 Siswa	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Sekolah Penerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	12 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah pengadaan perlengkapan belajar peserta didik	40 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa	2 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	23,820,000	26,202,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Periode penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	1 Semester	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sekolah yang dilakukan evaluasi	27 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah cabang perlombaan yang dperlombakan	14 Cabang Lomba	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	500,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih	417 Orang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	1,000,000,000	1,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	162 Orang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	300,000,000	800,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sekolah yang menerima dana bos	27 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	5,017,500,000	8,277,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah bendahara sekolah yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah dasar	27 bendahara sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	50,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	PK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	02	2.03	01	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										1,958,412,000	2,261,331,400		PK
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	1 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	79,218,000	79,218,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	2 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	111,558,000	122,713,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru paud yang direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	247,436,000	272,179,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas paud yang direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	50,200,000	55,220,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Paud	5 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	5 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD	6 Paket	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	120,000,000	132,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih	100 Orang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	500,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	390 Orang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	300,000,000	750,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sekolah yang menerima dana BOP	5 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	350,000,000	250,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										1,100,000,000	1,900,000,000		PK
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru nonformal/kesetaraan yang dibangun	4 Ruang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	500,000,000	1,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah Unit Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5 Unit	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	100,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/kesetaraan	436 Orang	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	300,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	25 Sekolah	Meningkatnya pencapaian angka partisipasi kasar	100 Persen	200,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										750,000,000	500,000,000		PK
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										400,000,000	400,000,000		PK
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	Jumlah peserta penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	126 Peserta	Meningkatnya pemahaman kurikulum lokal	100 Persen	300,000,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	Jumlah peserta penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	116 Peserta	Meningkatnya pemahaman kurikulum lokal	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	116 Peserta	Meningkatnya pemahaman kurikulum lokal	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										350,000,000	100,000,000		PK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kompetensi dasar lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	90 Peserta	Meningkatnya pemahaman kurikulum lokal	100 Persen	300,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	Jumlah peserta pelatihan penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	90 Peserta	Meningkatnya pemahaman kurikulum lokal	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											110,000,000	110,000,000		PK
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											110,000,000	110,000,000		PK
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	Jumlah cetak buku perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	15 buku	Meningkatnya persentase pemenuhan guru berijazah S1/D4	100 Persen	60,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	Jumlah cetak buku penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan	15 buku	Meningkatnya persentase pemenuhan guru berijazah S1/D4	100 Persen	50,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN											250,000,000	300,000,000		PK
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											250,000,000	300,000,000		PK
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	85 Persen	Jumlah dokumen penilaian kelayakan usul perizinan paud dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	10 Dokumen	Meningkatnya Cakupan pelayanan perizinan	85 Persen	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	85 Persen	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan perizinan paud dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	10 Dokumen	Meningkatnya Cakupan pelayanan perizinan	85 Persen	50,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	85 Persen	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	100 Sekolah	Meningkatnya Cakupan pelayanan perizinan	85 Persen	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PK	

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											1,313,430,102	2,625,000,000		PK	
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											1,313,430,102	2,625,000,000		PK	
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											150,000,000	660,000,000		PK	
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											100,000,000	360,000,000		PK	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	90 Persen	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, di kembangkan dan di mamfaatkan	2 Objek	Meningkatnya cakupan pengembangan kebudayaan	85 Persen	50,000,000	300,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	90 Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang dibina	20 Orang	Meningkatnya cakupan pengembangan kebudayaan	85 Persen	50,000,000	60,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											50,000,000	300,000,000		PK	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	90 Persen	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, di kembangkan dan di mamfaatkan	3 Objek	Meningkatnya cakupan pengembangan kebudayaan	85 Persen	50,000,000	300,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											150,000,000	650,000,000		PK		
2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											150,000,000	650,000,000		PK	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	80 Persen	Jumlah SDM dan Lembaga dan Pranata kesenian tradisional yang dilatih	20 Orang	Cakupan pengemabangan kesenian tradisional	80 Persen	50,000,000	170,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	80 Persen	Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	20 Orang	Cakupan pengemabangan kesenian tradisional	80 Persen	50,000,000	80,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	80 Persen	Periode Operasional Gedung kesenian dan Terselenggaranya Peringatan Hari Kesenian Daerah	12 Bulan	Cakupan pengemabangan kesenian tradisional	80 Persen	50,000,000	400,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											150,000,000	205,000,000		PK		
2	22	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											150,000,000	205,000,000		PK	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pembinaan Sejarah	85 Persen	Jumlah SDM dan Lembaga sejarah di Kota Lhokseumawe yang terberdaya	12 Orang	Cakupan pembinaan sejarah	80 Persen	50,000,000	70,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pembinaan Sejarah	85 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana pembinaan sejarah yang tersedia	5 Unit	Cakupan pembinaan sejarah	80 Persen	50,000,000	65,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pembinaan Sejarah	85 Persen	Tersedianya akses dan Media informasi sejarah bagi masyarakat	1 event pameran	Cakupan pembinaan sejarah	80 Persen	50,000,000	70,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											250,000,000	250,000,000		PK		
2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota											100,000,000	100,000,000		PK	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.45 Persen	Jumlah dokumen Pendataan Objek Penginggalan Sejarah Purbakala dan cagar budaya	1 Dokumen	Meningkatnya cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	80 Persen	50,000,000	50,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.45 Persen	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	3 Cagar budaya	Meningkatnya cakupan pelestariaan dan pengelolaan cagar budaya	80 Persen	50,000,000	50,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										150,000,000	150,000,000		PK
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.45 Persen	Jumlah situs budaya yang dilindungi	22 Situs	Meningkatnya cakupan pengelolaan cagar budaya	80 Persen	50,000,000	50,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.45 Persen	Terlaknya pelestarian budaya pada event tertentu seperti hari purbakala	1 Event Budaya	Meningkatnya cakupan pengelolaan cagar budaya	80 Persen	50,000,000	50,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.45 Persen	Periode pemanfaatan cagar budaya	12 Bulan	Meningkatnya cakupan pengelolaan cagar budaya	80 Persen	50,000,000	50,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN										613,430,102	860,000,000		PK
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota										613,430,102	860,000,000		PK
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan Museum	80 Persen	Periode Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	12 Bulan	Meningkatnya cakupan pengelolaan museum	80 Persen	113,430,102	300,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan Museum	80 Persen	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	Meningkatnya cakupan pengelolaan museum	80 Persen	150,000,000	150,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan Museum	80 Persen	Periode pelayanan dan peningkatan akses masyarakat	12 Bulan	Meningkatnya cakupan pengelolaan museum	80 Persen	50,000,000	100,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan Museum	80 Persen	Periode Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	12 Bulan	Meningkatnya cakupan pengelolaan museum	80 Persen	300,000,000	310,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PK
					DINAS KESEHATAN										104,393,326,370	112,735,440,724		DINKES
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										104,393,326,370	112,735,440,724		DINKES
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										104,393,326,370	112,735,440,724		DINKES
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										62,525,205,698	65,450,190,852		DINKES
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,200,000	7,920,000		DINKES
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah buku renja perangkat daerah	10 buku	Terciptanya Sinkronisasi dokumen perencanaan,penganngaranda n evaluasi kinerja perangkat daerah	85 persen	7,200,000	7,920,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										54,166,421,408	59,971,370,852		DINKES
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan	11.018 OB	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat Daerah	100 Persen	54,166,421,408	59,971,370,852	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target		
1	02	01	2.05		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	02	01	2.05	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											259,000,000	359,000,000		DINKES
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	400 Orang	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	200,000,000	220,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Penetapan angka kredit	2 Kali	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	9,000,000	89,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	50 Peserta	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											559,720,000	379,000,000		DINKES
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penambahan kapasitas daya dan instalasi listrik	2 Gedung	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	50,000,000	45,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor serta Alat Tulis Kantor	40 Jenis	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	97,440,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	4500 Porsi	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	90,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	400 Lembar	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	150,000,000	46,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2 eks x 12 Bulan)	24 Eks	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2,280,000	18,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	43 Kali	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	170,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											6,451,355,000	3,881,900,000		DINKES
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Surat	Terlaksananya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,500,000	1,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95 Rekening	Terlaksananya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	624,000,000	520,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	588 OB 9,468 OB	Terlaksananya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5,825,855,000	3,360,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES DINKES	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,081,509,290	851,000,000		DINKES
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	36,890,000	42,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	35 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	664,619,290	530,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	200,000,000	126,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	180,000,000	153,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1	02	02		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										40,513,660,672	46,130,843,872		DINKES
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										18,453,000,000	20,276,084,385		DINKES
1	02	02	2.01	07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	jumlah pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	6 faskes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	200,000,000	440,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12 Puskesmas	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	970,000,000	700,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 Faskes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	4,603,000,000	6,156,084,385	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Jenis	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	300,000,000	330,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	2,500,000,000	2,500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Jenis	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	4,600,000,000	3,500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	80 Jenis	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	2,800,000,000	3,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	40 Jenis	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	1,580,000,000	1,650,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Periode Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	76 Faskes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	700,000,000	1,500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Periode Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Puskesmas	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 Persen	200,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										21,168,660,672	24,873,559,487		DINKES
1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4817 Ibu Hamil	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	305,000,000	335,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	4599 Ibu Bersalin	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	280,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4380 Bayi Baru Lahir	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	255,000,000	255,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada balita	21.626 Balita	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	290,000,000	290,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	26.148 UsiaPendidikan Dasar	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	355,000,000	355,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	129.025 Usia Produktif	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	234,000,000	234,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	14.287 Usia lanjut	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	145,200,000	159,720,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	107.673 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	174,240,000	191,664,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	179.455 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	172,000,000	137,093,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	550 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	269,830,000	296,813,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.612 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	380,000,000	580,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.732 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	170,000,000	649,726,287	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	211.123 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	300,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	211.123 Orang	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	90,000,000	99,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1.465 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	500,000,000	550,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	7 Puskesmas	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	170,000,000	187,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	68 Desa	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	350,000,000	385,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	7 Puskesmas	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	450,000,000	495,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Periode Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Panti Penyehat	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	50,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68 Desa	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	152,000,000	167,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	jumlah Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatanorang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	13.301 Orang Kasus	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	20,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	68 Desa	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	159,600,000	175,560,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	68 Desa	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1,358,808,672	921,580,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Puskesmas	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	10,042,982,000	11,042,982,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	100 Kali	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	125,000,000	137,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	5 Desa	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	200,000,000	220,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Puskesmas	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	2,400,000,000	4,230,371,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Instalasi Farmasi	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	900,000,000	990,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2 Puskesmas	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	600,000,000	660,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	68 Desa	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	120,000,000	180,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	68 Desa	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 persen	150,000,000	170,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										800,000,000	880,000,000		DINKES			
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	7 Puskesmas	Terlaksananya Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 Persen	400,000,000	440,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah Puskesmas yang menggunakan sistem informasi Kesehatan diFaskes	7 Puskesmas	Terlaksananya Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 Persen	120,000,000	132,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Jumlah peralatan perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringannya	7 Puskesmas	Terlaksananya Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 Persen	280,000,000	308,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										92,000,000	101,200,000		DINKES			
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	Periode Pengendalian dan pengawasan Perizinan Rumah sakit	2 Kali	Cakupan penerbitan izin Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	92,000,000	101,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										629,460,000	356,906,000		DINKES			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota										30,000,000	33,000,000		DINKES			
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.26 -	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Tempat Praktik	jumlah tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik	100 Persen	30,000,000	33,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										329,460,000	158,906,000		DINKES			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.26 -	Periode Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Kali	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	9 profesi	108,000,000	52,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.26 -	Periode Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2 Kali	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	9 profesi	30,000,000	33,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.26 -	Periode Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Kali	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	9 profesi	191,460,000	73,106,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										270,000,000	165,000,000		DINKES
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.26 -	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	40 Orang	jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan memiliki sertifikat	140 orang	270,000,000	165,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										205,000,000	225,500,000		DINKES
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										45,000,000	49,500,000		DINKES
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Periode Pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan sarana Kefarmasian, Alkes dan UMOT	2 Kali	jumlah apotek, toko obat, toko alkes dan optik, umot yang memiliki izin	30 rekomen dasi	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Periode Monitoring dan Evaluasi terhadap Perizinan Sarana Kefarmasian, Alkes dan UMOT	2 Kali	jumlah apotek, toko obat, toko alkes dan optik, umot yang memiliki izin	30 rekomen dasi	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah Pertemuan dengan Penanggungjawab/Pemilik Sarana Kefarmasian, Alkes dan UMOT	2 Kali	jumlah apotek, toko obat, toko alkes dan optik, umot yang memiliki izin	30 rekomen dasi	25,000,000	27,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga										20,000,000	22,000,000		DINKES
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan terhadap sarana PAK dan PKRT	2 Kali	jumlah produksi alkes pkrt yang memiliki sertifikat	2 sertifikat	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan terhadap sarana PAK dan PKRT	2 Kali	jumlah produksi alkes pkrt yang memiliki sertifikat	2 sertifikat	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										80,000,000	88,000,000		DINKES
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap kelayakan sertifikat izin produksi pangan industri Rumah Tangga	4 Kali	jumlah industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat	100 Persen	80,000,000	88,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										20,000,000	22,000,000		DINKES
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap kelayakan TPM dan DAM	4 Kali	jumlah tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memiliki sertifikat laik higiene	100 Persen	20,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										20,000,000	22,000,000		DINKES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4 Kali	Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan	100 Persen	20,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										10,000,000	11,000,000		DINKES
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Beredar (Market)	2 Kali	persentase post market pada produksi dan produk makanan minuman yang dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut	100 persen	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										10,000,000	11,000,000		DINKES
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	Jumlah pembinaan dan pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	40 IRT	persentase post market pada produksi dan produk makanan minuman yang dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut	100 persen	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										520,000,000	572,000,000		DINKES
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										210,000,000	231,000,000		DINKES
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Desa yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat	100 Persen	Jumlah Peserta Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200 Orang	Terlaksanaan advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	210,000,000	231,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										240,000,000	264,000,000		DINKES
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Desa Sehat	10.29 Persen	Jumlah Peserta Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250 Orang	Persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	240,000,000	264,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										70,000,000	77,000,000		DINKES
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Desa Sehat	10.29 Persen	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	250 Orang	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	70,000,000	77,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINKES

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		OPD							
												Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan															
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target														
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																			163,150,645,377		182,291,789,966				PUPR		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			163,150,645,377		182,291,789,966				PUPR		
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			140,205,660,756		158,802,462,346				PUPR		
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			9,786,983,368		12,814,090,122				PUPR		
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			222,500,000		347,883,200				PUPR		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renstra/Renja Perangkat Daerah	1 Buku	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,500,000	24,883,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RKA-SKPD	5 Buku	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	5,000,000	6,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPA-SKPD	20 Buku	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	7,500,000	8,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPPA-SKPD	20 Buku	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	7,500,000	8,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	200,000,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			4,417,749,368		4,859,524,305				PUPR		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1078 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,417,749,368	4,859,524,305	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			150,000,000		150,000,000				PUPR		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	130 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur yang Handal	98 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Pelatihan yang Diikuti	20 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur yang Handal	98 Persen	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			415,280,000		615,647,565				PUPR		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	6 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perkantoran	18 Persen	3,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perkantoran	18 Persen	100,000,000	118,091,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman	833 Porsi	Lancarnya Administrasi Umum Perkantoran	18 Persen	25,000,000	9,953,280	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Penyediaan Penggandaan	5 Jenis 3400 Lembar	Lancarnya Administrasi Umum Perkantoran	18 Persen	35,000,000	49,766,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR PUPR													
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	365 Eksp	Lancarnya Administrasi Umum Perkantoran	18 Persen	2,280,000	2,836,685	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	83 Kali	Lancarnya Administrasi Umum Perkantoran	18 Persen	250,000,000	432,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR													
1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			2,579,472,000		2,449,766,400				PUPR		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan																																																											
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan																																																											
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target																																																										
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15				
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Lancarnya Urusan Pemerintahan	98 Persen	530,000,000	400,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	2 Unit	Lancarnya Urusan Pemerintahan	98 Persen	2,000,000,000	2,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	10 Jenis	Lancarnya Urusan Pemerintahan	98 Persen	49,472,000	49,766,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											873,510,000	2,063,414,477		PUPR																																																							
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang Dikirim	50 Surat	Lancarnya Urusan Pemerintahan	98 Persen	2,200,000	3,732,480	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Rekening	Lancarnya Urusan Pemerintahan	98 Persen	272,760,000	554,298,163	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	852 OB	Lancarnya Urusan Pemerintahan	98 Persen	598,550,000	1,505,383,834	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
										Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	312 OB	PUPR																																																														
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,119,400,000	2,316,967,775		PUPR																																																							
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Lancarnya Operasional Urusan Pemerintahan	98 Persen	33,000,000	66,288,845	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala dan Pajak Kendaraan Dinas/operasional	3 Unit	Lancarnya Operasional Urusan Pemerintahan	98 Persen	75,400,000	255,202,099	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	4 Unit	Lancarnya Operasional Urusan Pemerintahan	98 Persen	1,005,000,000	1,983,035,231	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 Jenis	Lancarnya Operasional Urusan Pemerintahan	98 Persen	6,000,000	12,441,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	01	2.13		Penataan Organisasi											9,072,000	10,886,400		PUPR																																																							
1	03	01	2.13	02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen SPM	1 Dokumen	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi	95 Persen	9,072,000	10,886,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PUPR																																																								
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											10,100,000,000	12,800,000,000		PUPR																																																							
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											10,100,000,000	12,800,000,000		PUPR																																																							
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan air yang tertampung	100 Persen	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Terbangun	1 Unit	Meningkatnya SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	98 Persen	1,500,000,000	2,200,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR																																																								
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan air yang tertampung	100 Persen	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	111 Unit	Meningkatnya SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	98 Persen	3,000,000,000	5,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR																																																								
											Jumlah Prasarana dan Saluran Air Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Tersedia	87 Unit						PUPR																																																								
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan air yang tertampung	100 Persen	Jumlah Turap/Talud/Bronjong Terbangun	1 Ruas	Meningkatnya SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	98 Persen	5,000,000,000	5,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR																																																								
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan air yang tertampung	100 Persen	Jumlah Waduk yang Direvitalisasi	1 Unit	Meningkatnya SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	98 Persen	600,000,000	600,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR																																																								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		OPD	
												Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
												Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		
1	03	03		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												1,100,000,000	2,320,000,000		PUPR					
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota												1,100,000,000	2,320,000,000		PUPR					
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penduduk berakses air minum	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Dokumen	Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	95 Persen	100,000,000	120,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penduduk berakses air minum	100 Persen	Jumlah Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Melalui DAK	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	95 Persen	1,000,000,000	2,200,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												6,100,000,000	8,600,000,000		PUPR						
1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota												6,100,000,000	8,600,000,000		PUPR					
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86.51 Persen	Jumlah Prasarana Sanitasi	25 Unit	Meningkatnya sanitasi Lingkungan	95 Persen	5,000,000,000	7,500,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86.51 Persen	Monitoring Air Limbah	4 Kali	Meningkatnya sanitasi Lingkungan	95 Persen	1,100,000,000	1,100,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												9,120,600,000	15,689,720,000		PUPR						
1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota												9,120,600,000	15,689,720,000		PUPR					
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase drainase dalam kondisi baik	77.81 Persen	Jumlah Dokumen Survey yang Disusun	1 Dokumen	Terkelolanya Sistem Drainase yang Baik	95 Persen	200,000,000	200,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan		Persentase drainase dalam kondisi baik	77.81 Persen	Periode Monitoring Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	1 Dokumen	Terkelolanya Sistem Drainase yang Baik	95 Persen	75,000,000	75,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase drainase dalam kondisi baik	77.81 Persen	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang Terbangun Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang Terbangun	121 ruas 150 ruas	Terkelolanya Sistem Drainase yang Baik	95 Persen	8,500,000,000	15,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR PUPR						
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase drainase dalam kondisi baik	77.81 Persen	Jumlah Saluran yang Direhab	1 ruas	Terkelolanya Sistem Drainase yang Baik	95 Persen	345,600,000	414,720,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												3,000,000,000	5,000,000,000		PUPR						
1	03	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												3,000,000,000	5,000,000,000		PUPR					
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	10.22 Persen	Jumlah Turap/Talud/Bronjong Terbangun	33 Ruas	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	95 Persen	3,000,000,000	5,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												4,000,000,000	4,000,000,000		PUPR						
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung												4,000,000,000	4,000,000,000		PUPR					
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	cakupan bangunan gedung yang terbangun	80 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Dibangun	5 Paket	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	95 Persen	4,000,000,000	4,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												2,025,600,000	3,025,920,000		PUPR						
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota												2,025,600,000	3,025,920,000		PUPR					
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penataan kawasan	0.083 Persen	Jumlah Kawasan yang Direvitalisasi dan Pameran Pembangunan	1 paket	Meningkatkannya Fungsi Bangunan dan Lingkungan	95 Persen	2,025,600,000	3,025,920,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	03	10			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										92,222,477,388	91,852,498,624		PUPR
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										92,222,477,388	91,852,498,624		PUPR
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Jalan	1 Dokumen	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat	98 Persen	500,000,000	500,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	1 dokumen	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat	98 Persen	350,000,000	350,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	Jumlah Jalan yang Terbangun	400 Paket	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat	98 Persen	82,972,477,388	83,002,498,624	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	Jumlah Jalan yang Direhab	2 Ruas	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat	98 Persen	2,000,000,000	2,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	Jumlah Pembangunan Jembatan	1 ruas	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat	98 Persen	5,000,000,000	5,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan jembatan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Unit	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat	98 Persen	1,400,000,000	1,000,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										2,750,000,000	2,700,233,600		PUPR
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										2,000,000,000	1,950,233,600		PUPR
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketaatan terhadap RTRW	3.40 Persen	Jumlah Dokumen Penetapan Rincian Tata Ruang	1 Dokumen	Tertipnya Penetaan Ruang Daerah	95 Persen	1,200,000,000	1,150,233,600	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketaatan terhadap RTRW	3.40 Persen	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	Tertipnya Penetaan Ruang Daerah	95 Persen	400,000,000	400,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketaatan terhadap RTRW	3.40 Persen	Jumlah Hari Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang Pentaan Ruang	1 Hari	Tertipnya Penetaan Ruang Daerah	95 Persen	400,000,000	400,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota										500,000,000	500,000,000		PUPR
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketaatan terhadap RTRW	3.40 Persen	Periode Monitoring Penyusunan Rekomendasi Tata Ruang	3 Kali	Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kota Lhokseumawe	95 Persen	500,000,000	500,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										250,000,000	250,000,000		PUPR
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketaatan terhadap RTRW	3.40 Persen	Periode Monitoring Pemanfaatan Ruang	4 Kali	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	95 Persen	250,000,000	250,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										22,944,984,621	23,489,327,620		PUPR
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										363,000,000	399,300,000		PUPR
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										363,000,000	399,300,000		PUPR
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio permukiman layak huni	0.96 Persen	Periode survey pemukiman kumuh	1 kali	Tersedianya Infrastruktur Permukiman Kumuh	95 Persen	363,000,000	399,300,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan			
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Prioritas Pembangunan Nasional		OPD	
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	04	04		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											3,800,000,000	3,800,000,000		PUPR					
1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											3,800,000,000	3,800,000,000		PUPR					
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio rumah layak huni	0.32 Persen	Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun	40 Unit	Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni	95 Persen	3,800,000,000	3,800,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR					
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											18,781,984,621	19,290,027,620		PUPR					
1	04	05	2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan											18,781,984,621	19,290,027,620		PUPR					
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan prasarana umum yang tersedia	80 Persen	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terbangun	80 Unit	Meningkatnya Prasarana,Sarana dan Ultiitas Umum	95 Persen	18,781,984,621	19,290,027,620	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PUPR					
					BADAN PENGULANGAN BENCANA DAERAH											7,983,488,014	5,746,733,895		BPBD				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											7,983,488,014	5,746,733,895		BPBD				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											7,983,488,014	5,746,733,895		BPBD				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											5,742,177,941	5,098,733,895		BPBD				
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Rp9,200,000	11,656,920		BPBD				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RENJA SKPD	10 Buku	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Persen	1,200,000	1,656,920	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Buku	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Buku	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Buku	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Buku	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,325,360,941	2,325,360,941		BPBD				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah ASN	490 OB	Lancarnya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2,325,360,941	2,325,360,941	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											151,500,000	110,964,034		BPBD				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Stel	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	116,500,000	85,964,034	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai	25 Orang	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	35,000,000	25,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											163,140,000	103,900,000		BPBD				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 Jenis	Lancarnya kegiatan administrasi umum kantor	100 Persen	30,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
											Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit						BPBD					
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah peralatan rumah tangga	10 Unit	Lancarnya kegiatan administrasi umum kantor	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1200 Kotak	Lancarnya kegiatan administrasi umum kantor	100 Persen	17,000,000	15,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan																																																									
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD																																																								
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																																																												
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	Lancarnya kegiatan administrasi umum kantor	100 Persen	10,000,000	12,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah surat kabar yang tersedia	365 Eks	Lancarnya kegiatan administrasi umum kantor	100 Persen	1,140,000	1,400,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 Kali	Lancarnya kegiatan administrasi umum kantor	100 Persen	100,000,000	40,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										145,000,000	60,000,000		BPBD																																																								
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	145,000,000	60,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,279,177,000	2,280,377,000		BPBD																																																								
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah materai yang diperlukan	330 Lembar	Lancarnya jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	2,000,000	2,700,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah rekening yang dibayar	84 rekening	Lancarnya jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	213,023,000	213,023,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jasa pegawai tidak tetap Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	1620 OB 240 OB	Lancarnya jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	2,064,154,000	2,064,654,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										666,300,000	206,225,000		BPBD																																																								
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	Lancarnya operasional kantor	100 Persen	33,300,000	35,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit	Lancarnya operasional kantor	100 Persen	256,000,000	56,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah Fasilitas gedung kantor yang dibangun Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit 2 Unit	Lancarnya operasional kantor	100 Persen	337,000,000	60,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD BPBD																																																								
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 Unit	Lancarnya operasional kantor	100 Persen	40,000,000	54,725,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD																																																								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1	05	01	2.13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	05	01	2.13		Penataan Organisasi										2,500,000	250,000		BPBD
1	05	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku SPM	10 Buku	Tersedianya penataan organisasi	10 Buku	2,500,000	250,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										1,640,710,073	422,400,000		BPBD
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										37,400,000	37,400,000		BPBD
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Jumlah Jenis Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Jenis	Tersedianya informasi rawan bencana	100 Persen	37,400,000	37,400,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										853,310,073	140,000,000		BPBD
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Rentang waktu pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Tahun	Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	253,310,073	70,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Jumlah jenis penanganan pascabencana	2 Jenis	Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	500,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Jumlah TRC BPBD yang terlatih	12 Orang	Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100,000,000	40,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										650,000,000	195,000,000		BPBD
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Rentang waktu Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	400,000,000	100,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Jumlah logistik kebutuhan korban bencana	2 Jenis	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	50,000,000	45,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Rentang waktu respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	10 Kali	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	200,000,000	50,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										100,000,000	50,000,000		BPBD
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	Rentang waktu Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	12 Bulan	Tersedianya sistem informasi kebencanaan	100 Persen	100,000,000	50,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										600,600,000	225,600,000		BPBD
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										600,600,000	225,600,000		BPBD
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan penanggulangan kebakaran	100 Persen	Rentang waktu pelayanan pemadaman kebakaran	12 Bulan	Terciptanya petugas pemadam kebakaran yang handal	100 Persen	30,600,000	30,600,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan penanggulangan kebakaran	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	2 Jenis	Terciptanya petugas pemadam kebakaran yang handal	100 Persen	500,000,000	150,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan penanggulangan kebakaran	100 Persen	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang terlatih	110 Orang	Terciptanya petugas pemadam kebakaran yang handal	100 Persen	50,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan penanggulangan kebakaran	100 Persen	Rentang waktu Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	12 Bulan	Terciptanya petugas pemadam kebakaran yang handal	100 Persen	20,000,000	15,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BPBD
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILATUL HISBAH										14,533,556,188	12,132,024,921		SATPOL
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										14,533,556,188	12,132,024,921		SATPOL
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										14,533,556,188	12,132,024,921		SATPOL
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										10,990,768,688	10,685,130,508		SATPOL
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,025,000	4,850,000		SATPOL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja SKPD	10 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	1,200,000	600,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RKA-SKPD	5 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	1,225,000	750,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan RKA-SKPD	5 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	1,225,000	750,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPA-SKPD	15 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,075,000	1,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan DPA-SKPD	15 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,075,000	1,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan LKJIP	5 Laporan	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	1,225,000	750,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,471,597,006	3,815,329,707		SATPOL
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	700 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,468,027,006	3,814,829,707	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,020,000	250,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	12 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,550,000	250,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,325,000	250,000		SATPOL
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Laporan Persediaan dan BMD	3 Buku	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95 Persen	1,325,000	250,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										658,760,922	326,700,738		SATPOL
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	306 Psg	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	497,732,867	171,993,683	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang Waktu Penetapan Angka Kredit Satpol PP	2 Kali	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	33,050,000	35,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 Orang	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	99,707,055	94,707,055	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
											Jumlah yang mengikuti Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur	2 Orang						SATPOL
											Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	1 Orang						SATPOL
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	28,271,000	25,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										221,475,000	229,320,500		SATPOL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	5,000,000	1,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Bahan Kebersihan yang tersedia	80 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	39,725,000	39,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	1,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	1050 Porsi	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	21,000,000	15,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Barang yang dicetak	2 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	37,405,000	17,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen yang diandakan/Fotocopy	63310 Lembar	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	3,000,000	3,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	5 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	15,205,000	3,320,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 Kali	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	100,000,000	150,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1,914,000,000	2,691,000,000		SATPOL
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	141,000,000	141,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mebel	1 Unit	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	5,000,000	1,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	787,431,250	2,380,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Jenis	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	980,568,750	169,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4,282,885,760	3,358,607,159		SATPOL
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Materai yang disediakan	375 Lembar	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2,000,000	4,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang dikirim	5 Surat	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100 Persen	108,500,000	130,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100 Persen	20,000,000	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (279 Org x 12 Org)	3348 OB	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4,152,385,760	3,214,607,159	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
										Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (16 Org x 12 Bln)	192 OB	SATPOL						
										Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar pada Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS (268 Org x 12 Bln)	3216 OB	SATPOL						
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										420,800,000	253,302,404		SATPOL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln)	12 UB	Terpeliharanya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	33,000,000	33,300,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (5 Unit x 12 Bln)	60 UB	Terpeliharanya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	181,800,000	123,800,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL			
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Mebel	2 Jenis	Terpeliharanya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	1,000,000	500,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL			
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Jenis	Terpeliharanya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	199,000,000	87,202,404	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL			
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	Terpeliharanya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	6,000,000	8,500,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL			
1	05	01	2.13		Penataan Organisasi										10,900,000	5,770,000		SATPOL			
1	05	01	2.13	02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Standart Pelayanan Minimum (SPM)	10 Buku	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	95 Persen	10,900,000	5,770,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL			
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										3,542,787,500	1,446,894,413		SATPOL			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										1,831,125,000	644,222,413		SATPOL			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Kali	Terciptanya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	95 Persen	570,725,000	155,615,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		SATPOL		
											Frekuensi Pelaksanaan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	3 Kali							SATPOL		
											Frekuensi Pelaksanaan Pengamanan terhadap Pejabat/Tamu (VIP)	4 Kali							SATPOL		
											Frekuensi Penertiban Gepeng dan ODGJ	6 Kali							SATPOL		
											Frekuensi Pengamanan Kantor Walikota/Rumah Dinas/Aset Daerah	12 Kali							SATPOL		
											Frekuensi Pengamanan Ketupat Rencong	11 Hari							SATPOL		
											Frekuensi Pengamanan Operasi Lilin, Hari Natal dan Tahun Baru	10 Hari							SATPOL		
											Jumlah Pelaksanaan Kunjungan ke Sekolah-sekolah di Kota Lhokseumawe	5 Sekolah							SATPOL		
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Frekuensi Penertiban Atribut Kampanye	3 Hari	Terciptanya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	95 Persen	141,760,000	77,968,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		SATPOL		
											Jumlah Tenaga Pelaksanaan Pengamanan untuk Pemilikada	123 Orang							SATPOL		
											Jumlah Tenaga Satlinmas untuk Pemilikada	123 Orang							SATPOL		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anggota Linmas Gampong	7 Hari	Terciptanya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	95 Persen	713,540,000	349,509,413	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
											Frekuensi Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH	5 Hari						SATPOL
											Jumlah Peserta Satlinmas dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	1040 Orang						SATPOL
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Qanun Syariat Islam	12 Kali	Terciptanya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	95 Persen	375,100,000	51,130,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
											Frekuensi Pendukung Kegiatan Acara/Upacara HUT Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	1 Kali						SATPOL
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	2 Unit	Terciptanya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	95 Persen	30,000,000	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										178,916,500	80,000,000		SATPOL
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Jumlah Kasus Pembinaan dan penanganan Pelanggaran Qanun	55 Kasus	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat akan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95 Persen	178,916,500	80,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	02	2.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayahul Hisbah Aceh										1,532,746,000	722,672,000		SATPOL
1	05	02	2.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe	18 Kali	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Satpol PP dan WH Aceh	95 persen	903,300,000	365,647,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
											Frekuensi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	12 Kali						SATPOL
1	05	02	2.04	03	Pengawasan terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan/Pengendalian Isu-Isu di Lapangan	4 Kali	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Satpol PP dan WH Aceh	95 persen	358,175,000	171,525,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
											Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat	12 Kali						SATPOL
											Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban pada Bulan Ramadhan	30 Hari						SATPOL
											Frekuensi Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe	12 Kali						SATPOL
1	05	02	2.04	04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam	50 Orang	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Satpol PP dan WH Aceh	95 persen	28,271,000	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	02	2.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam	6 Kali	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Satpol PP dan WH Aceh	95 persen	213,850,000	165,500,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	SATPOL
1	05	02	2.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	Jumlah Peserta Peningkatan Kerjasama Ulama/Tokoh Masyarakat/Instansi terkait dalam Pelaksanaan Syariat Islam	50 Orang	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Satpol PP dan WH Aceh	95 persen	29,150,000	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publi	SATPOL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				DINAS SOSIAL											52,721,946,181	18,965,743,586		DINSOS	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														DINSOS	
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											52,721,946,181	18,965,743,586		DINSOS	
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											52,721,946,181	18,965,743,586		DINSOS	
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											3,731,527,881	4,020,783,456		DINSOS	
															10,000,000	12,000,000		DINSOS	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10 Buku	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	5,000,000	6,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINSOS	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	10 Buku	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	5,000,000	6,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINSOS	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,198,144,287	2,308,051,502		DINSOS
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	300 OB	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	2,198,144,287	2,308,051,502	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											76,800,000	84,480,000		DINSOS
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu	96 Pasang	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	52,800,000	58,080,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Kali	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	24,000,000	26,400,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											325,033,594	381,806,954		DINSOS
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80 Jenis	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	77,733,594	85,506,954	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1050 Porsi	Meningkatnya Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	30,000,000	33,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30 Jenis	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (1eks x 365 hari)	365 Eks	Meningkatnya Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	2,300,000	2,300,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Publikasi./Spanduk/Baliho/Pap an Nama/Umbul2 Kantor, Tiang Bendera	5 Jenis	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	10,000,000	11,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kali	Meningkatnya Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	175,000,000	220,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											418,750,000	460,625,000		DINSOS
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	168,750,000	185,625,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Jenis	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	250,000,000	275,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	06	01	2.08		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											526,400,000	579,340,000		DINSOS
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Surat	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen	3,000,000	3,600,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 RB	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen	95,000,000	104,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	23 OB	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen	428,400,000	471,240,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
			Jumlah Sewa Gedung	1 Unit							DINSOS								
			Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	228 OB							DINSOS								
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											160,900,000	177,430,000		DINSOS
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 UB	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	95 Persen	35,100,000	38,610,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Opsional	24 UB	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	95 Persen	95,300,000	104,830,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	10 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	95 Persen	14,500,000	15,590,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	95 Persen	16,000,000	18,400,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	01	2.13		Penataan Organisasi											15,500,000	17,050,000		DINSOS
1	06	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	10 Buku	Meingkatnya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	90 Persen	15,500,000	17,050,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											2,923,864,600	3,243,751,060		DINSOS
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)											2,120,000,000	2,340,000,000		DINSOS
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial	67 Persen	Jumlah Bantuan KUBE (50 KUBE X Rp. 20.000.000)	50 KUBE	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	95 Persen	2,000,000,000	2,200,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DINSOS	
			Jumlah Bantuan UEP (100 Org x Rp 5.000.000)	100 Orang							DINSOS								
			Jumlah Pengadaan Becak Mesin (30 Becak x Rp. 30.000.000)	30 Buah							DINSOS								
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	4 Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	95 Persen	120,000,000	140,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DINSOS	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan					
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													803,864,600	903,751,060		DINSOS
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	4 Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	95 Persen	95,000,000	110,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS			
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	Jumlah Peningkatan Potensi Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	4 Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	95 Persen	90,000,000	100,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS			
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	4 Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	95 Persen	30,000,000	40,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS			
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	4 Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	95 Persen	548,864,600	603,751,060	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS			
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	Jumlah Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4 Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	95 Persen	40,000,000	50,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS			
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													3,690,000,000	4,130,000,000		DINSOS
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													2,275,000,000	2,515,000,000		DINSOS
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Penyediaan Permakanan	1320 Paket	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Aanak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	500,000,000	550,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS			
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Penyediaan Sandang	1320 Paket	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Aanak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	200,000,000	220,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Belanja Operasional	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Penyediaan Alat Bantu (OTSUS)	100 Paket	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	1,000,000,000	1,100,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	30,000,000	35,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	12 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	30,000,000	35,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	80,000,000	90,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	12 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	320,000,000	350,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dasar	4 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	25,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Data dan Pengaduan	12 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	25,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	10 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	20,000,000	25,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12 Kali	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlarant, Aanak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Asuhan	95 Persen	45,000,000	50,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										1,415,000,000	1,615,000,000		DINSOS
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Penyediaan Permakanan ODKB	300 Paket	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	500,000,000	550,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Penyediaan Sandang ODKB	300 Paket	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	200,000,000	220,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	5 Jenis	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	300,000,000	350,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	300 Paket	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	135,000,000	150,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	20,000,000	25,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat dan Korban Bencana	4 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	50,000,000	60,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Suarat Nikah dan Suarat Nikah	20 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	20,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	24 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	25,000,000	35,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	24 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	35,000,000	45,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	35,000,000	40,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	100 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	45,000,000	50,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	4 Kali	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS diluar Panti Asuhan	95 Persen	50,000,000	60,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										41,245,000,000	6,322,500,000		DINSOS
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar										450,000,000	580,000,000		DINSOS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 Persen	Jumlah Penjangkauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	100 Kali	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	95 Persen	150,000,000	200,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 Persen	Jumlah Rujukan Anak - anak Terlantar	100 Kali	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	95 Persen	100,000,000	130,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 Persen	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	100 Kali	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	95 Persen	200,000,000	250,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										40,795,000,000	5,742,500,000		DINSOS
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 Persen	Jumlah Pendataan Fakir Miskin	4 Kecamatan	Meningkatnya Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	95 Persen	675,000,000	742,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 Persen	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	4 Kecamatan	Meningkatnya Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	95 Persen	40,120,000,000	5,000,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA										771,553,700	848,709,070		DINSOS
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										671,553,700	738,709,070		DINSOS
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	Jumlah Penyediaan Makanan	10 Jenis	Meningkatnya Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kabupaten/ Kota	95 Persen	250,000,000	275,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	Jumlah Penyediaan Sandang	4 Kecamatan	Meningkatnya Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kabupaten/ Kota	95 Persen	201,553,700	221,709,070	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Lokasi	Meningkatnya Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kabupaten/ Kota	95 Persen	100,000,000	110,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	Jumlah Penanganan Khusus Penampungan Rentan	4 Kecamatan	Meningkatnya Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kabupaten/ Kota	95 Persen	70,000,000	77,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	4 Kecamatan	Meningkatnya Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kabupaten/ Kota	95 Persen	50,000,000	55,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										100,000,000	110,000,000		DINSOS
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1 Gampong	Meningkatnya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	95 Persen	50,000,000	55,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25 Orang	Meningkatnya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	95 Persen	50,000,000	55,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										360,000,000	400,000,000		DINSOS
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										360,000,000	400,000,000		DINSOS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	Meningkatnya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	95 Persen	200,000,000	220,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Jenis	Meningkatnya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	95 Persen	100,000,000	110,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	Jumlah Pengamanan Taman Makam Pahlawan (3 org x 12 Bulan	36 OB	Meningkatnya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	95 Persen	60,000,000	70,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DINSOS
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										8,862,925,700	9,854,045,970		DINAS PP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										8,862,925,700	9,854,045,970		DINAS PP
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										5,806,758,000	6,558,097,670		DINAS PP
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,309,758,000	3,693,097,670		DINAS PP
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,000,000	10,000,000		DINAS PP
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja Murni dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	10 BUKU	Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dokume n	5,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,306,558,000	2,603,097,670		DINAS PP
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392 OB	Tersedianya Gaji, tunjangan ASN dan Jasa Administrasi Keuangan	100 Persen	2,306,558,000	2,603,097,670	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										55,000,000	65,000,000		DINAS PP
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari tertentu	50 Pasang	Tertatnya administrasi kepegawaian	100 Persen	45,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekwensi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Kali	Tertatnya administrasi kepegawaian	100 Persen	10,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										293,500,000	359,000,000		DINAS PP
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis alat tulis kantor, peralatan listrik, dan bahan kebersihan OPD	50 Jenis	Tersedianya Administrasi Umum OPD	100 Persen	60,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	375 Porsi	Tersedianya Administrasi Umum OPD	100 Persen	15,000,000	17,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 Jenis	Tersedianya Administrasi Umum OPD	100 Persen	17,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	365 Exsampler	Tersedianya Administrasi Umum OPD	100 Persen	1,500,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 Kali	Tersedianya Administrasi Umum OPD	100 Persen	200,000,000	250,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										38,000,000	50,000,000		DINAS PP
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya.	10 Jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	38,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										502,700,000	476,000,000		DINAS PP
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat Yang dikirim	100 Surat	Tersedianya Jasa Penunjang OPD	100 Persen	2,500,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang dibayar (3 Rek X 12 Bln)	36 RB	Tersedianya Jasa Penunjang OPD	100 Persen	60,000,000	68,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Hari pelaksanaan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	3 Hari	Tersedianya Jasa Penunjang OPD	100 Persen	28,200,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan OPD (22 Org x 12 Bln) dan Jumlah Tenaga Tidak Tetap (29 Org x 12 Bln) serta penyediaan jasa sewa gedung	612 OB	Tersedianya Jasa Penunjang OPD	100 Persen	412,000,000	370,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										109,000,000	130,000,000		DINAS PP	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 bln)	12 UB	Terpeliharanya Barang Mili Daerah	100 Persen	27,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (4 Unit x 12 Bln)	48 UB	Terpeliharanya Barang Mili Daerah	100 Persen	60,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Linnya	3 Jenis	Terpeliharanya Barang Mili Daerah	100 Persen	7,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	10 Jenis	Terpeliharanya Barang Mili Daerah	100 Persen	15,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										360,000,000	410,000,000		DINAS PP	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota										100,000,000	150,000,000		DINAS PP	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	75.30 Persen	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi PUG termasuk PPRG	7 OPD	Terlaksananya Sosialisasi PUG dan PPRG	7 OPD	100,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										60,000,000	80,000,000		DINAS PP	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	75.30 Persen	Jumlah Perlombaan Pelaksanaan Hari Ibu	1 Perlombaan	Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ibu	100 Persen	60,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										200,000,000	180,000,000		DINAS PP
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	75.30 Persen	Rentang Waktu Pelaksanaan DWP, Perwari, Kapasitas DWP dan Seminar DWP	12 Bulan	Meningkatnya Kapasitas DWP dan Pelaksanaan PERWARI	100 Persen	200,000,000	180,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										460,000,000	500,000,000		DINAS PP	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										225,000,000	250,000,000		DINAS PP
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	20 Persen	Jumlah Kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan	3 Buku	Terlayannya Kasus Kekerasan terhadap perempuan	100 Persen	75,000,000	90,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	20 Persen	Jumlah kasus yang ditangani	50 Kasus	Terlayannya Kasus Kekerasan terhadap perempuan	100 Persen	150,000,000	160,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										235,000,000	250,000,000		DINAS PP
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih	20 Persen	Jumlah pelatihan SDM terhadap kekerasan perempuan	5 kali	Tersedianya Layanan Perlindungan Perempuan	100 Persen	125,000,000	130,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih	20 Persen	Jumlah Penyediaan layanan perlindungan perempuan di Lhokseumawe	4 Gampong	Tersedianya Layanan Perlindungan Perempuan	100 Persen	110,000,000	120,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										500,000,000	500,000,000		DINAS PP	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										500,000,000	500,000,000		DINAS PP
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kelurahan	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	23 Persen	Jumlah Perempuan yang memiliki usaha	60 Orang	Terlatihnya perempuan yang memiliki usaha	80 Persen	500,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										127,000,000	150,000,000		DINAS PP	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										127,000,000	150,000,000		DINAS PP
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak	100 Persen	Jumlah Forum Data SIGA	33 OPD	Berkembangnya Informasi Gender dan Anak	100 Persen	127,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										375,000,000	455,000,000		DINAS PP	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										40,000,000	80,000,000		DINAS PP
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Hak Anak	95 Persen	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi KLA	33 OPD	Meningkatnya Motivasi Anak Dalam Beraktivitas	80 Persen	40,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										335,000,000	375,000,000		DINAS PP
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Hak Anak	95 Persen	Jumlah sarana ruang bermain ramah anak	1 Unit	Tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak	75 Persen	180,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Hak Anak	95 Persen	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional dan Forum Anak Daerah	140 Orang	Tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak	75 Persen	155,000,000	175,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										675,000,000	850,000,000		DINAS PP	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										125,000,000	150,000,000		DINAS PP
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih	76 Persen	Jumlah Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	40 Kasus	Terlayannya kasus kekerasan terhadap anak	90 Persen	125,000,000	150,000,000		DINAS PP
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										200,000,000	220,000,000		DINAS PP
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penaganan Oleh Petugas Terlatih	76 Persen	Jumlah Penanganan Kasus kekerasan terhadap anak di tingkat gampong.	40 Kasus	Tertanganinya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	80 Persen	200,000,000	220,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										100,000,000	180,000,000		DINAS PP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	76 Persen	Jumlah buku data gender dan anak	10 Buku	Tertanganinya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	80 Persen	100,000,000	180,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										250,000,000	300,000,000		DINAS PP
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	76 Persen	Jumlah Penyediaan prasarana layanaan bagi anak	10 Jenis	Tersedianya Layanan Bagi Anak Korban Kekerasan	80 Persen	250,000,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										3,056,167,700	3,295,948,300		DINAS PP
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										50,000,000	70,000,000		DINAS PP
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										50,000,000	70,000,000		DINAS PP
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laju Pertumbuhan Penduduk	2 Persen	Jumlah sekolah siaga kependudukan	2 Sekolah	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	45 Persen	50,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										2,902,046,000	3,116,648,300		DINAS PP
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal										638,116,000	696,521,800		DINAS PP
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Program KKBPK	4 Kecamatan	Meningkatnya PUS yang menggunakan Kontrasepsi	80 Persen	70,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Media KIE	5 KIE	Meningkatnya PUS yang menggunakan Kontrasepsi	80 Persen	124,480,000	130,704,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Balai Penyuluh KB	4 Balai	Meningkatnya PUS yang menggunakan Kontrasepsi	80 Persen	443,636,000	465,817,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										558,000,000	608,400,000		DINAS PP
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah PKB/PLKB	14 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tertang Ber KB	80 Persen	150,000,000	180,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	272 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tertang Ber KB	80 Persen	408,000,000	428,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										1,262,990,000	1,346,639,500		DINAS PP
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaring Pelayanan KB	19 Faskes	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi	17 Unit	71,340,000	74,907,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Pasangan Keluarga Lestari	4 Pasangan	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi	17 Unit	38,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Paket	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi	17 Unit	1,011,650,000	1,062,232,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Anak Pra Sejatera terlayani khitan	200 Orang	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi	17 Unit	142,000,000	149,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	14	03	2.04	03	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											442,940,000	465,087,000		DINAS PP
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan lansia	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas	5 Gampong	Meningkatnya Keluarga Berkualitas	100 Persen	442,940,000	465,087,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DINAS PP	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											104,121,700	109,300,000		DINAS PP
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											104,121,700	109,300,000		DINAS PP
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	81.94 Persen	Jumlah Kelompok Tribina dan UPPKS yang mendapatkan pembinaan	10 Kelompok	Terbinanya Kelompok Tribina dan UPPKS	5 Kelompo k	47,600,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	81.94 Persen	Jumlah Kader Tribina dan UPPKS yang mendapatkan pelatihan	55 Orang	Terbinanya Kelompok Tribina dan UPPKS	5 Kelompo k	56,521,700	59,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DINAS PP	
					DINAS PERTANAHAN											6,951,920,194	7,632,112,213		TANAH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											6,951,920,194	7,632,112,213		TANAH
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											6,951,920,194	7,632,112,213		TANAH
2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,371,305,194	4,808,435,713		TANAH
2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											50,000,000	55,000,000		TANAH
2	10	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja dan Renja Perubahan OPD	8 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80%	5,000,000	5,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah DPA SKPD	12 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80%	15,000,000	16,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah DPPA SKPD	12 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80%	15,000,000	16,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan LAKIP	4 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80%	15,000,000	16,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,408,230,000	2,649,053,000		TANAH
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	336 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	2,363,230,000	2,599,553,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	20,000,000	22,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran	6 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	25,000,000	27,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											161,000,000	177,100,000		TANAH
2	10	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Psg	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	95 Persen	40,000,000	44,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawain	5 Dokumen	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	95 Persen	30,000,000	33,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	95 Persen	40,000,000	44,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	95 Persen	51,000,000	56,100,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	01	2.06		Administrasi Umum Peranqkat Daerah											251.580.000	276.738.000		TANAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Alat Listrik dan Kebersihan	30 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	54,300,000	59,730,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
											Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 Jenis						TANAH
2	10	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1300 Porsi	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	25,000,000	27,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Barang yang dicetak	4 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	20,000,000	22,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
											Jumlah Laporan Yang Digandakan	30000 Lembar						TANAH
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan (2 Eks x 365 hr)	730 Eks	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	2,280,000	2,508,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	32 Kali	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	150,000,000	165,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										974,800,000	1,072,280,000		TANAH
2	10	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	250,000,000	275,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	8 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	250,000,000	275,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 Jenis	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	474,800,000	522,280,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										370,695,194	407,764,713		TANAH
2	10	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Materai	1000 Lembar	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	6,000,000	6,600,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang di Bayar (4 Rekening x 12 Bln)	48 RB	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	130,145,194	143,159,713	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor yang Disewa	1 Unit	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	234,550,000	258,005,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
											Jumlah Penyediaan Honorarium Jasa Pegawai Tidak Tetap (6 Org x 12 Bln)	72 OB						TANAH
											Jumlah Penyediaan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan (14 Org x 12 Bln)	168 OB						TANAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	10	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							155,000,000	170,500,000		TANAH			
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	30,000,000	33,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Operasional (2 Unit x 12 Bulan)	24 UB	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	35,000,000	38,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	65,000,000	71,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	25,000,000	27,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											350,000,000	385,000,000		TANAH	
2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota											350,000,000	385,000,000		TANAH
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	80 Persen	Frekuensi Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 Daerah Kota Lhokseumawe	4 Kali	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	80 Persen	150,000,000	165,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	80 Persen	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Daerah Kota Lhokseumawe	12 Kasus	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	80 Persen	200,000,000	220,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											300,000,000	330,000,000		TANAH	
2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota											150,000,000	165,000,000		TANAH
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	0.14 Persen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pemanfaatan Tanah Kosong/ Non Produktif Menjadi Kawasan Produktif	5 Dokumen	Tertibnya Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	90 Persen	150,000,000	165,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	10	2.02	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi											150,000,000	165,000,000		TANAH
2	10	10	2.02	01	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	0.14 Persen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi yang kosong/ Nonproduktif Menjadi Kawasan Produktif	5 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	90 Persen	150,000,000	165,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH											510,000,000	561,000,000		TANAH	
2	10	12	2.01	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah											260,000,000	286,000,000		TANAH
2	10	12	2.01	01	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	9.62 Persen	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Untuk 4 Kecamatan	20 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe	90 Persen	260,000,000	286,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	12	2.02	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin											250,000,000	275,000,000		TANAH
2	10	12	2.02	01	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	9.62 Persen	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin di 4 Kecamatan	5 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	90 Persen	250,000,000	275,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN											150,000,000	150,000,000		TANAH	
2	10	13	2.01	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong											150,000,000	165,000,000		TANAH
2	10	13	2.01	01	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	9.62 Persen	Jumlah Dokumen Peta Detail Lokasi Tanah Pemerintah Kota Lhokseumawe Pada Kecamatan Banda Sakti	5 Dokumen	Terlaksananya Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah	90 Persen	150,000,000	165,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	10	14		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN											757,615,000	833,376,500		TANAH	
2	10	14	2.01	Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Pertanian Kabupaten											443,760,000	488,136,000		TANAH	
2	10	14	2.01	01	Pembinaan Kerjasama Pendidikan Pertanian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan SDM Aparatur	90 Persen	Frekuensi Koordinasi Antar Lembaga Pertanian	4 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Pertanian	95 Persen	145,000,000	159,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	14	2.01	02	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan SDM Aparatur	90 Persen	Jumlah Aparatur Sipil Negara pada OPD Pemerintah Kota Lhokseumawe yang Mengikuti Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian Bidang Pengadaan Tanah	38 Orang	Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Pertanian	95 Persen	298,760,000	328,636,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
											Jumlah Aparatur Sipil Negara pada OPD Pemerintah Kota Lhokseumawe yang Mengikuti Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	38 Orang						TANAH	
											Jumlah Aparatur Sipil Negara pada OPD Pemerintah Kota Lhokseumawe yang Mengikuti Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian Bidang Penyuluhan Hukum Pertanian	38 Orang						TANAH	
2	10	14	2.02	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian											313,855,000	345,240,500		TANAH	
2	10	14	2.02	01	Pembinaan Pertanian Bagi Imeum Mukim/Keuchik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan SDM Aparatur	90 Persen	Jumlah Geuchik Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanian Bagi Imum Mukim/ Keuchik Bidang Pengadaan Tanah	68 Orang	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian	95 Persen	313,855,000	345,240,500	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
											Jumlah Geuchik Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanian Bagi Imum Mukim/ Keuchik Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	68 Orang						TANAH	
											Jumlah Geuchik Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanian Bagi Imum Mukim/ Keuchik Bidang Penyuluhan Hukum Pertanian	68 Orang						TANAH	
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU											200,000,000	220,000,000		TANAH		
2	10	15	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil											200,000,000	220,000,000		TANAH	
2	10	15	2.01	02	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	100 Persen	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Pengelolaan Sempadan Pantai pada Kecamatan Banda Sakti	5 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai dan Wilayah Perbatasan	90 Persen	200,000,000	220,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN											313,000,000	344,300,000		TANAH		
2	10	17	2.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanian											313,000,000	344,300,000		TANAH	
2	10	17	2.01	02	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	80 Persen	Jumlah Aparatur Gampong Yang Memahami Hukum Menyangkut dengan Pertanian	68 Orang	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanian	90 Persen	313,000,000	344,300,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	TANAH	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP											40,303,679,428	41,582,481,301		DLH
																			DLH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											40,303,679,428	41,582,481,301		DLH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan																
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan																
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target															
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	40,303,679,428	41,582,481,301		DLH						
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	26,189,024,728	26,644,811,131		DLH						
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	4,947,200	4,441,920		DLH						
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja Perangkat Daerah	30 Buku	Sinkronnya dokumen perencanaan perangkat daerah	95 Persen	4,947,200	4,441,920	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	2,234,219,471	2,234,219,471		DLH						
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan 28 org x 14 bulan	392 ob	Lancar dan tertibnya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2,234,219,471	2,234,219,471	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	568,000,000	783,891,683		DLH						
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	336 pasang	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98 Persen	556,000,000	770,891,683	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	frekuensi pendidikan dan pelatihan formal	3 orang	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98 Persen	12,000,000	13,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	1,574,854,000	1,555,854,000		DLH						
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah pemeliharaan jaringan listrik	120 unit	Lancarnya administrasi perkantoran	12 Bulan	6,000,000	6,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 60 jenis	60 jenis	Lancarnya administrasi perkantoran	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	124140 porsi	Lancarnya administrasi perkantoran	12 Bulan	1,422,600,000	1,422,600,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	50 jenis	Lancarnya administrasi perkantoran	12 Bulan	40,000,000	21,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah penyediaan peralatan bahan bacaan dan perundang-undangan	365 eks	Lancarnya administrasi perkantoran	12 Bulan	1,254,000	1,254,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 kali	Lancarnya administrasi perkantoran	12 Bulan	75,000,000	75,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	50,000,000	9,000,000		DLH						
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 jenis	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	95 Persen	50,000,000	9,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	18,805,200,625	19,105,600,625		DLH						
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah surat yang dikirim	20 surat	Lancarnya operasional perkantoran	12 Bulan	2,600,000	3,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah rekening yang dibayar	696 rekening	Lancarnya operasional perkantoran	12 Bulan	9,900,000,000	10,000,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah penyediaan gaji pegawai tidak tetap	361 orang	Lancarnya operasional perkantoran	12 Bulan	8,902,600,625	9,102,600,625	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													
											jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	19 orang						DLH													
											jumlah penyediaan pengelolaan laboratorium	4 orang						DLH													
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	2,951,803,432	2,951,803,432		DLH						
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	1 unit	Terjaganya nilai ekonomis barang milik daerah	95 Persen	40,000,000	40,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH													

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah pemeliharaan gedung kantor	636 unit	Terjaganya nilai ekonomis barang milik daerah	95 Persen	2,911,803,432	2,911,803,432	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											476,000,000	473,000,000		DLH
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota											318,000,000	318,000,000		DLH
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada -	jumlah buku RPPLH	6 Buku	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	95 Persen	173,000,000	173,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada -	jumlah buku pengendalian RPPLH	5 Buku	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	95 Persen	145,000,000	145,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											158,000,000	155,000,000		DLH
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada -	jumlah rencana perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH)	20 buah	Meningkatnya pemanfaatan dokumen kajian lingkungan hidup	90 Persen	158,000,000	155,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											261,330,000	284,463,000		DLH
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											30,000,000	30,000,000		DLH
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	jumlah pemantauan kualitas lingkungan	2 kali	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											24,330,000	26,763,000		DLH
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	jumlah pelaksanaan edukasi dan komunikasi	1 kali	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	95 Persen	24,330,000	26,763,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											207,000,000	227,700,000		DLH
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	jumlah penanganan kasus lingkungan hidup, penanganan air limbah kotor	1 kali	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	95 Persen	207,000,000	227,700,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											3,701,324,700	3,741,707,170		DLH
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											846,172,600	952,289,860		DLH
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	37.2 Ha	jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau	3 lokasi	Terjaganya kualitas ruang terbuka hijau	95 Persen	846,172,600	952,289,860	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
											jumlah rehabilitasi hutan dan lahan	5 lokasi						DLH	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											2,855,152,100	2,789,417,310		DLH
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	37.2 Ha	jumlah lokasi pemeliharaan dan penataan taman kota	2 lokasi	Terjaganya kualitas ruang terbuka hijau	95 Persen	502,652,100	531,417,310	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	37.2 Ha	DOKA jumlah lampu penerangan jalan umum	20 persen 20 paket	Terjaganya kualitas ruang terbuka hijau	95 Persen	2,352,500,000	2,258,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											2,015,000,000	2,216,500,000		DLH
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3											2,000,000,000	2,200,000,000		DLH
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan limbah B3 yang dikelola	100 Persen	jumlah fasilitas TPS dan Insenerator	1 unit	Terjaganya kualitas lingkungan dari limbah berbahaya	95 Persen	2,000,000,000	2,200,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											15,000,000	16,500,000		DLH
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota		Cakupan limbah B3 yang dikelola	100 Persen	jumlah limbah B3 yang terkumpul	1 kali	Terjaganya kualitas lingkungan dari limbah berbahaya	95 Persen	15,000,000	16,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											255,000,000	280,000,000		DLH
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											255,000,000	280,000,000		DLH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12 Bulan	jumlah kasus lingkungan yang tersedia	1 unit	Terjaganya kualitas lingkungan	95 Persen	200,000,000	220,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12 Bulan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat	3 orang	Terjaganya kualitas lingkungan	95 Persen	15,000,000	16,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12 Bulan	jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	5 kasus	Terjaganya kualitas lingkungan	95 Persen	25,000,000	27,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12 Bulan	jumlah koordinasi dan pengawasan	14 buku	Terjaganya kualitas lingkungan	95 Persen	15,000,000	16,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										35,000,000	38,000,000		DLH	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										35,000,000	38,000,000		DLH	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat	12 Bulan	jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup	125 orang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup	95 Persen	35,000,000	38,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										111,000,000	71,000,000		DLH	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										111,000,000	71,000,000		DLH	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	12 Bulan	jumlah penilaian terhadap usaha/kegiatan, pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	5 unit	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau	95 Persen	111,000,000	71,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		OPD			
												Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan										Hasil Kegiatan	
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										10,000,000	11,000,000		DLH							
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										10,000,000	11,000,000		DLH							
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup	12 Bulan	jumlah pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	1 kali	Terselesaikannya pengaduan masalah lingkungan hidup	90 Persen	10,000,000	11,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH							
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										7,250,000,000	7,822,000,000		DLH							
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah										7,200,000,000	7,800,000,000		DLH							
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	100 Persen	jumlah AMDAL TPA Baru	1 lokasi	Meningkatnya penanganan kebersihan lingkungan	90 Persen	1,200,000,000	1,650,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH							
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	100 Persen	jumlah penyediaan sarana prasarana tempat pembuangan akhir	1 paket	Meningkatnya penanganan kebersihan lingkungan	90 Persen	3,500,000,000	3,650,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH							
											jumlah tempat parkir yang tersdia (DOKA)	100 persen					DLH								
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	100 Persen	jumlah pembuatan sumur dan tower air serta rehabilitasi ruang kerja	3 unit	Meningkatnya penanganan kebersihan lingkungan	90 Persen	500,000,000	500,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH							
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	100 Persen	jumlah penyediaan sarana dan prasarana pembangunan bank sampah	5 unit	Meningkatnya penanganan kebersihan lingkungan	90 Persen	2,000,000,000	2,000,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH							
											jumlah penyediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan akhir	1 paket					DLH								
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										50,000,000	22,000,000		DLH							
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	100 Persen	jumlah penilaian terhadap usaha/kegiatan kinerja pengelolaan sampah	5 unit	Meningkatnya penanganan masalah persampahan	90 Persen	50,000,000	22,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	DLH							
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										11,365,783,718	13,196,297,039		CAPIL							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										11,365,783,718	13,196,297,039		CAPIL							
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										11,365,783,718	13,196,297,039		CAPIL							
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,005,655,218	8,926,853,414		CAPIL							
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										11,820,000	10,705,692		CAPIL							
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja, Renja Perubahan SKPD	10 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	1,195,000	80,692	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL							
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA	5 Dokumen	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	1,475,000	1,475,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL							
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	5 Dokumen	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,075,000	2,075,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL							
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA) SKPD	17 Dokumen	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,075,000	2,075,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL							
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan LKJIP	5 Laporan	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD					
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2,062,710,418	2,268,581,460		CAPIL
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	420 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	2,058,710,418	2,264,581,460	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	12 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														2,000,000	2,000,000		CAPIL
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	1 Laporan	Tertipnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														376,800,000	333,205,000		CAPIL
2	12	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2 Unit	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana Yang Handal	97 Persen	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari Tertentu Beserta Atribut Kelengkapannya	196 Pasang	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana Yang Handal	97 Persen	196,000,000	147,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana Yang Handal	97 Persen	80,800,000	71,205,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 Peserta	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana Yang Handal	97 Persen	25,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peserta Bimtek	20 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana Yang Handal	97 Persen	55,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														468,420,000	390,420,000		CAPIL
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik	10 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	1,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ATK yang tersedia	85 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	64,000,000	64,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	10,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Yang Tersedia	1200 Porsi	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	20,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan Yang dicetak dan digandakan	30 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (3 Eks x 365 Hari)	1095 Eks	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	3,420,000	3,420,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Bahan Material Yang disediakan	5 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	170,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60 Orang	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	12	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Arsip Administrasi Yang Tertata Rapi	5 Dokumen	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Jumlah Penyusunan Arsip Kependudukan yang Tertata	950000 Berkas						CAPIL
2	12	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18 Laporan TTE	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Persen	35,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,978,964,800	4,810,101,262		CAPIL
2	12	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	450,000,000	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Set	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang diadakan (Mesin Antrian, Camera CCTV, Mesin Ginset)	4 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	180,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang diadakan (Pos Satpam, Tempat Parkir, Mushalla)	3 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	8 Jenis	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	1,478,964,800	3,980,101,262	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 Jenis	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	750,000,000	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										690,440,000	695,840,000		CAPIL
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Materai Yang Digunakan	190 Lembar	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 Persen	2,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Jumlah Surat yang Dikirim	240 Surat						CAPIL
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening Yang Dibayar (Telp/Internet/Wifi, Air PDAM, TTE, Listrik	96 RB	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 Persen	141,600,000	144,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 Persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Jumlah Pengelolaan Manajemen DAK Non Fisik	15 OK	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 Persen	536,840,000	536,840,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	816 OB						CAPIL
											Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan (21 Orang x 12 Bulan)	252 OB						CAPIL
											Jumlah Sewa Gedung Arsip, Jumlah Transportasi Pemindahan Arsip	1 Gedung						CAPIL
2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										393,500,000	395,000,000		CAPIL
2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan,Perizinan dan Rehap Mobil Dinas Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	Terjaganya Nilai Ekonomi Barang Milik Daerah	95 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala dan Rehap Kendaraan Dinas Operasional (2 Unit x 12 Bulan)	24 UB	Terjaganya Nilai Ekonomi Barang Milik Daerah	95 Persen	80,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Mebel Yang Terpelihara	4 Set	Terjaganya Nilai Ekonomi Barang Milik Daerah	95 Persen	8,500,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	8 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomi Barang Milik Daerah	95 Persen	95,000,000	95,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Rehap Gedung Kantor	1 Gedung	Terjaganya Nilai Ekonomi Barang Milik Daerah	95 Persen	80,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	30 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomi Barang Milik Daerah	95 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang dipelihara	3 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomi Barang Milik Daerah	95 Persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,13		Penataan Organisasi										21,000,000	21,000,000		CAPIL
2	12	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku SPM	10 Buku	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	92 Persen	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Laporan Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Reformasi Birokrasi	20 Buku	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	92 Persen	8,000,000	8,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20 Buku	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	92 Persen	8,000,000	8,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										2,330,163,500	1,748,400,000		CAPIL
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										1,240,000,000	675,000,000		CAPIL
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	360 Orang	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	100,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Register Penduduk Yang Terdata	24960 Orang	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	110,000,000	95,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Kasus Yang Terselasaikan Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1000 Kasus 50 Peserta	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	200,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Frekuensi Layanan Pendaftaran Penduduk Frekuensi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Media Informasi Kependudukan	12 Bulan 4 Semester 3 Jenis	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	300,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Pencatatan Dokumen Penduduk	62400 Dokumen	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	200,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Berkas Yang Terselasaikan	46800 Berkas	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	140,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Dokumen Yang Terselasaikan	200 Dokumen	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	100,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Kependudukan	31200 Dokumen	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	90,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk										210,000,000	250,400,000		CAPIL
2	12	02	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Frekwensi Penyelenggaraan Adminduk	2 Semester	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pendaftaran Penduduk Penduduk	95 Persen	40,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	Jumlah Dokumen Kependudukan	8 Jenis	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pendaftaran Penduduk Penduduk	95 Persen	170,000,000	170,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							650,000,000	593,000,000		CAPIL			
2	12	02	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Frekuensi Lintas Sektor Pelayanan Dokumen Kependudukan	40 Orang	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	15 Orang						CAPIL
											Jumlah Personil Perekaman KTP Elektronik dan Percetakan KIA	180 OT						CAPIL
2	12	02	2,03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Frekwensi Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Pendaftaran Penduduk	2 Semester	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	80,000,000	68,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Frekwensi Fasilitas Pendaftaran Penduduk	1 Kali	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	70,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Jumlah Alat Penanganan Covid	8 Jenis						CAPIL
2	12	02	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Jumlah Peserta Pemanfaatan Data Kependudukan	40 Peserta	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	90,000,000	90,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Jumlah Peserta Sosialisasi	120 Peserta	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	110,000,000	85,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	150 Peserta						CAPIL
2	12	02	2,03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Frekwensi Kerjasama dengan Pihak Terkait tentang Pendaftaran Penduduk	1 Kali	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	50,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Frekwensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	5 Kali	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	50,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Jumlah Data Kependudukan Yang Valid	46800 Dokumen	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	95 Persen	100,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							230,163,500	230,000,000		CAPIL			
2	12	02	2,04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Jumlah Pengelolaan dan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan	5 Dokumen	Terciptanya Pengawasan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,04	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Frekwensi Pengawasan Pendaftaran Penduduk	2 Kali	Terciptanya Pengawasan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	80,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	02	2,04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0,97 Persen	Jumlah Peserta Bimtek	20 Orang	Terciptanya Pengawasan Pendaftaran Penduduk	95 Persen	100,163,500	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							767,965,000	755,000,000		CAPIL			
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil							195,000,000	195,000,000		CAPIL			
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0,88 Persen	Jumlah Buku Register Pencatatan Sipil	10 Buku	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	97 Persen	60,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0,88 Persen	Frekuensi Layanan Pencatatan Sipil	4 Triwulan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	97 Persen	50,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Frekuensi Peningkatan Dalam Layanan Pencatatan Sipil	4 Triwulan						CAPIL
2	12	03	2,01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0,88 Persen	Jumlah Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Pencatatan Sipil	5000 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	97 Persen	30,000,000	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2,01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0,88 Persen	"Jumlah buku tentang Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemamfaatan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan "	20 Buku	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	97 Persen	25,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0,88 Persen	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	5 Jenis	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	97 Persen	30,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										427,000,000	425,000,000		CAPIL
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah terkait dengan KUA dan Mahkamah Syariah	48 Kali	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	40,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah terkait dengan Perkawinan dan Perceraian dibidang Agama Dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik	8 Kali	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah terkait Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	20 Kali	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
										Frekuensi Lintas Sektor Pelayanan Pencatatan Sipil	40 Orang							CAPIL
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Pencatatan Sipil	4 Triwulan	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	05	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Penerimaan dan Permintaan Data Pencatatan Sipil	12 Bulan	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	15,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Fasilitas Pencatatan Sipil	1 Kali	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	12,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Jumlah Perjanjian Pemanfaatan Data Dengan Instansi Terkait	10 Perjanjian	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	35,000,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	100,000,000	93,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
										Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Pencatatan Sipil	200 Orang							CAPIL
2	12	03	2.02	09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2 Semester	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	20,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Komunikasi, informasi dan edukasi	5 Kali	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	45,000,000	45,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Jumlah Data Pencatatan Sipil Yang Valid	5000 Data	Tersedianya Laporan Pencatatan Sipil	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan						
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target					
1	2	3		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	12	03	2,03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil												145,965,000	135,000,000		CAPIL
2	12	03	2,03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Jumlah Pengelolaan dan Penggunaan Blangko Dokumen Pencatatan Sipil	5000 Dokumen	Tersedianya Hasil Pelaporan	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	03	2,03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	2 Semester	Tersedianya Hasil Pelaporan	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	03	2,03	03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Daerah	6 Kali	Tersedianya Hasil Pelaporan	95 Persen	35,000,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	03	2,03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	Frekwensi Peserta Bimtek	15 Orang	Tersedianya Hasil Pelaporan	95 Persen	50,965,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												1,097,000,000	1,601,043,625		CAPIL
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan												137,000,000	215,000,000		CAPIL
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Buku Triwulan	20 Buku	Tersedianya Dokumen Data Kependudukan	97 Persen	40,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	34 Perjanjian	Tersedianya Dokumen Data Kependudukan	97 Persen	47,000,000	65,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	04	2,01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Laporan Database Kependudukan	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Data Kependudukan	97 Persen	50,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	04	2,02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												85,000,000	95,043,625		CAPIL
2	12	04	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Buku Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Evaluasi	20 Buku	Tersedianya Buku Informasi Administrasi Kependudukan	95 Persen	85,000,000	95,043,625	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												435,000,000	751,000,000		CAPIL
2	12	04	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Frekuensi Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Kali Pertemuan	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	70,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
				Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Terkait Penyelenggaraan Adminduk							60 Orang	CAPIL								
2	12	04	2,03	02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Frekwensi Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	12 Bulan	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	50,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	04	2,03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Bahan Penerbitkan	15 Jenis	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	60,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
				Jumlah Laporan Administrasi Kependudukan							34 Laporan	CAPIL								
											Jumlah Media Sosialisasi	3 Jenis						CAPIL		
2	12	04	2,03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Perjanjian	10 Perjanjian	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	35,000,000	65,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
2	12	04	2,03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	100,000,000	250,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL		
				Jumlah Peserta Sosialisasi Penerapan Dukcapil Go-Digital							100 Orang	CAPIL								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	12	04	2,03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Frekwensi Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2 Semester	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	30,000,000	81,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	04	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Alat Medis dan Pelindung Diri	7 Jenis	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	40,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Jumlah Pengelolaan Dalam Penyusunan Data Kependudukan	2 Semester						CAPIL
2	12	04	2,03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Frekuensi Pemanfaatan Data Kependudukan	34 SKPD	Tersedianya Laporan PIAK	95 Persen	50,000,000	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Frekuensi penyajian data	12 Bulan						CAPIL
2	12	04	20,4		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										440,000,000	540,000,000		CAPIL
2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan tentang informasi Administrasi Kependudukan	2 Semester	Tersedianya Laporan Monev	95 Persen	77,000,000	145,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
											Frekuensi Rapat dan Koordinasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	17 Peserta						CAPIL
2	12	04	2,04	02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Frekwensi Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama.	2 Kali	Tersedianya Laporan Monev	95 Persen	80,000,000	95,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	04	2,04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	Jumlah Peserta Bimtek	15 Orang	Tersedianya Laporan Monev	95 Persen	283,000,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										165,000,000	165,000,000		CAPIL
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan										165,000,000	165,000,000		CAPIL
2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Ketersediaan Data Kependudukan	90 Persen	Frekwensi Penyusunan data Kependudukan	2 Semester	Tersedianya Data Profil Kependudukan	97 Persen	90,000,000	90,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Ketersediaan Data Kependudukan	90 Persen	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	40 Buku	Tersedianya Data Profil Kependudukan	97 Persen	75,000,000	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	CAPIL
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG										6,335,413,210	7,315,930,854		DPGM
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										6,335,413,210	7,315,930,854		DPGM
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										6,335,413,210	7,315,930,854		DPGM
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										2,900,185,510	3,203,260,613		DPGM
2	13	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,000,000	11,000,000		DPGM
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja OPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	100 Persen	3,000,000	3,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	10 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan DPPA SKPD	10 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan LAKIP/LKJIP	10 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,886,521,460	2,075,773,606		DPGM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	286 OB	Tersedianya Laporan Keuangan OPD	100 Persen	1,882,521,460	2,070,773,606	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan OPD	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	18 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan OPD	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										4,000,000	5,000,000		DPGM
2	13	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Barang Habis Pakai dan Barang Milik Daerah yang Ditatausahakan	100 Dokumen	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										96,000,000	112,000,000		DPGM
2	13	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	70 Pasang	Terciptanya Kedisiplinan dan Kualitas SDM ASN	100 Persen	70,000,000	79,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pendataan dan Pengolahan DUK, SOP, ANJAB/ABK	3 Jenis	Terciptanya Kedisiplinan dan Kualitas SDM ASN	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Data Bezzeting dan Analisis Jabatan Yang Diinput Ke Sistem	2 Jenis	Terciptanya Kedisiplinan dan Kualitas SDM ASN	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penilaian Kerja ASN	25 Laporan	Terciptanya Kedisiplinan dan Kualitas SDM ASN	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Diklat ASN berdasarkan Tupoksi	4 Orang	Terciptanya Kedisiplinan dan Kualitas SDM ASN	100 Persen	20,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										223,500,000	243,500,000		DPGM
2	13	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket Instalasi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	3,000,000	3,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Peralatan/Perlengkapan Kebersihan yang Disediakan	70 Jenis	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	40,000,000	44,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	1500 Pors	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	30,000,000	33,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	11 Jenis	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	15,000,000	16,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	413 Eks	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	2,500,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Publikasi (Spanduk/Baliho/dll)	5 Jenis	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	3,000,000	3,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60 Kali	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	130,000,000	140,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan						
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												100,000,000	110,000,000		DPGM
2	13	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	4 Jenis	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 Persen	40,000,000	45,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan	6 Jenis	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 Persen	60,000,000	65,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												441,164,050	484,987,007		DPGM
2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Materai yang Disediakan	500 Lembar	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	2,500,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	60 Rekening	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	133,664,050	146,487,007	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Tenaga Bakti Daerah dan Jasa Administrasi Keuangan	684 OB	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	305,000,000	335,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												140,000,000	161,000,000		DPGM
2	13	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah	100 Persen	30,000,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah	100 Persen	25,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Jenis	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah	100 Persen	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Ruangan Gedung Kantor yang Direhab	6 Ruang	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah	100 Persen	50,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	5 Jenis	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah	100 Persen	25,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												1,405,210,000	1,555,000,000		DPGM
2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												1,405,210,000	1,555,000,000		DPGM
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Gampong yang Dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	68 Gampong	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	75,000,000	90,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Pedoman Perencanaan Pembangunan Gampong	6 Dokumen	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Gampong yang Dibina dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Gampong	68 Gampong	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	305,210,000	320,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Aparatur Pemerintah Gampong yang Dibina	272 Orang	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	04	2,01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Gampong yang Difasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	68 Gampong	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	50,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah BUMG yang Dibina dan Diawasi	68 BUMG	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	150,000,000	165,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Gampong yang Dibina dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik	68 Gampong	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	50,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Gampong yang Dibina dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong	68 Gampong	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	50,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Peserta Fasilitas Profil Gampong	272 Gampong	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	150,000,000	165,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	04	2,01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Peserta Rapat Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	272 Orang	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	50,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Peserta Fasilitas Pengelolaan Aset Gampong	204 Orang	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Anggota Tuha Peut Gampong yang Ditingkatkan Kualitas	204 Orang	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	50,000,000	72,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	04	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Fasilitas Pembinaan Laporan Keuchik	68 Gampong	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	75,000,000	82,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	Jumlah Fasilitas Evaluasi Perkembangan Gampong serta Lomba Gampong	68 Gampong	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Gampong	100 Persen	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										2,030,017,700	2,557,670,241		DPGM
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang										2,030,017,700	2,557,670,241		DPGM
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Kelembagaan Masyarakat Gampong yang Ditata dan Dibina	204 Kelompok Lembaga	Terselenggaranya Fasilitas Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pemberdayaan Gampong	100 Persen	350,000,000	420,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	Jumlah Kader Kelembagaan yang Dibina	350 Orang	Terselenggaranya Fasilitas Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pemberdayaan Gampong	100 Persen	250,000,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	05	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Gampong	68 Unit	Terselenggaranya Fasilitas Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pemberdayaan Gampong	100 Persen	150,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas PKK (2 kali x 68 Kelompok)	136 Kelompok	Terselenggaranya Fasilitas Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pemberdayaan Gampong	100 Persen	250,000,000	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	Jumlah Gampong yang Mengikuti Gelar TTG Tingkat Kota dan Provinsi	38 Gampong	Terselenggaranya Fasilitas Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pemberdayaan Gampong	100 Persen	150,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	Jumlah Gampong yang Mengikuti BBGRM Tingkat Provinsi	1 Gampong	Terselenggaranya Fasilitas Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pemberdayaan Gampong	100 Persen	150,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompo k	Frekuensi Fasilitasi Kegiatan Tim Penggerak PKK	68 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Di Bidang Pemberdayaan Gampong	100 Persen	730,017,700	887,670,241	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPGM
					DINAS PERHUBUNGAN										7,687,428,611	7,022,285,744		DISHUB
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										7,687,428,611	7,022,285,744		DISHUB
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										7,687,428,611	7,022,285,744		DISHUB
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,188,428,611	5,291,285,744		DISHUB
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,300,000	12,300,000		DISHUB
2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja)	2 Dokumen	Terpenuhinya kesesuaian perencanaan kerja dengan evaluasi kinerja instansi pemerintah	100 Persen	3,500,000	3,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1 Dokumen	Terpenuhinya kesesuaian perencanaan kerja dengan evaluasi kinerja instansi pemerintah	100 Persen	3,200,000	3,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (P-RKA)	1 Dokumen	Terpenuhinya kesesuaian perencanaan kerja dengan evaluasi kinerja instansi pemerintah	100 Persen	3,200,000	3,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP)	1 Dokumen	Terpenuhinya kesesuaian perencanaan kerja dengan evaluasi kinerja instansi pemerintah	100 Persen	2,400,000	2,400,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,655,551,611	2,733,328,254		DISHUB
2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah PNS yang dibayar gaji dan tunjangan	420 OB	Tertibnya adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2,647,951,611	2,725,728,254	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Tertibnya adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2,200,000	2,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah laporan periodik keuangan	14 Dokumen	Tertibnya adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	5,400,000	5,400,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										26,600,000	28,600,000		DISHUB
2	15	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen RKBMD	2 Dokumen	Tertibnya administrasi dan pengelolaan barang milik daerah	100 Persen	2,400,000	2,400,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen inventaris barang	3 Dokumen	Tertibnya administrasi dan pengelolaan barang milik daerah	100 Persen	3,600,000	3,600,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB
2	15	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah laporan periodik penatausahaan barang	14 Dokumen	Tertibnya administrasi dan pengelolaan barang milik daerah	100 Persen	20,600,000	22,600,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD					
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional							
									Tokolok Ukur	Target	Tokolok Ukur	Target	Tokolok Ukur	Target										
1				2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15				
2	15	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																4,300,000	4,300,000			DISHUB
2	15	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan retribusi daerah	1 Dokumen	Terjaminnya pelaksanaan dan pelaporan pendapatan daerah		100 Persen	2,500,000	2,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah laporan periodik retribusi daerah	12 Dokumen	Terjaminnya pelaksanaan dan pelaporan pendapatan daerah		100 Persen	1,800,000	1,800,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																113,600,000	69,400,000			DISHUB
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan dan pakaian kerja	130 stel	Tertibnya administrasi dan meningkatnya kualitas kepegawaian		100 Persen	95,000,000	45,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	3 Dokumen	Tertibnya administrasi dan meningkatnya kualitas kepegawaian		100 Persen	3,600,000	4,400,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 Kali	Tertibnya administrasi dan meningkatnya kualitas kepegawaian		100 Persen	15,000,000	20,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																276,510,000	241,205,850			DISHUB
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor	15 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kantor		100 Persen	7,500,000	7,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	45 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kantor		100 Persen	37,500,000	37,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
												Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	15 Jenis			DISHUB								
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan peralatan makan dan dapur	5 jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kantor		100 Persen	5,000,000	2,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah porsi makan dan minuman yang disediakan	480 Porsi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kantor		100 Persen	14,400,000	15,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah barang cetakan	15 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kantor		100 Persen	60,670,000	27,085,850	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
												Jumlah barang penggandaan	1 Jenis			DISHUB								
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah surat kabar yang tersedia	365 Eksemplar	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kantor		100 Persen	1,440,000	1,620,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dna konsultasi keluar daerah	50 Kali	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kantor		100 Persen	150,000,000	150,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																171,868,000	131,000,000			DISHUB
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kendaraan operasional dinas	2 Unit	Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor		100 Persen	50,000,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah meja dan kursi kerja/jabatan	4 Jenis	Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor		100 Persen	46,868,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah peralatan dan perangkat kerja kantor	4 Jenis	Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor		100 Persen	50,000,000	51,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Jenis	Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor		100 Persen	25,000,000	30,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		DISHUB			
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																1,329,599,000	1,453,151,640			DISHUB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan materi	300 Lembar	Terselenggaranya tugas-tugas kantor dengan baik dan lancar	100 Persen	3,000,000	3,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Meunasah Mee	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah rekening yang harus dibayar (15 rekening x 12 Bulan)	180 RB	Terselenggaranya tugas-tugas kantor dengan baik dan lancar	100 Persen	107,860,000	133,308,756	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
								Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh									DISHUB		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah tenaga non ASN	1.236 OB	Terselenggaranya tugas-tugas kantor dengan baik dan lancar	100 Persen	1,218,739,000	1,316,842,884	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	DISHUB	
												Jumlah tenaga pengelolaan keuangan	180 OB						DISHUB
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												598,100,000	618,000,000		DISHUB
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	Terpeliharanya aset daerah sebagaimana mestinya	100 Persen	31,600,000	33,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (16 unit x 12 Bulan)	192 UB	Terpeliharanya aset daerah sebagaimana mestinya	100 Persen	538,000,000	550,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah peralatan dan perangkat kerja kantor yang terpelihara	5 Jenis	Terpeliharanya aset daerah sebagaimana mestinya	100 Persen	12,000,000	15,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Terpeliharanya aset daerah sebagaimana mestinya	100 Persen	9,500,000	10,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah fasilitas pendukung gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Terpeliharanya aset daerah sebagaimana mestinya	100 Persen	7,000,000	10,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												2,499,000,000	1,731,000,000		DISHUB	
2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												30,000,000	40,000,000		DISHUB
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah dokumen manajemen keselamatan jaringan jalan	1 Dokumen	Kebutuhan jaringan LLAJ dapat terpetakan dengan baik	100 Persen	30,000,000	40,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												438,000,000	336,000,000		DISHUB
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	3 Jenis	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas	100 Persen	368,000,000	256,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
								Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan									DISHUB		
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang terpelihara	3 Jenis	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas	100 Persen	70,000,000	80,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
								Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh									DISHUB		
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C												525,000,000	500,000,000		DISHUB
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah sarana penerangan lingkungan terminal penumpang	5 Unit	Terselenggaranya terminal angkutan darat dengan aman dan nyaman	100 Persen	110,000,000	75,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Meunasah Mee	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah fasilitas, kebersihan dan keamanan lingkungan terminal	2 Terminal	Terselenggaranya terminal angkutan darat dengan aman dan nyaman	100 Persen	390,000,000	400,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
								Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh									DISHUB		
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Belanja Operasional	Terwujudnya sistem tranportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah SDM pengelola terminal yang berkompetensi	1 Orang	Terselenggaranya terminal angkutan darat dengan aman dan nyaman	100 Persen	25,000,000	25,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB	
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												296,000,000	205,000,000		DISHUB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Meunasah Mee	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah perangkat pengujian kendaraan bermotor	1 Unit	Terpenuhinya standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor	100 Persen	150,000,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Meunasah Mee	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah SDM pengujian kendaraan bermotor yang berkompentensi	1 Orang	Terpenuhinya standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor	100 Persen	25,000,000	25,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah penyediaan smartcard pengujian kendaraan bermotor	1400 Lembar	Terpenuhinya standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor	100 Persen	49,000,000	60,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Meunasah Mee	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah sarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor	8 jenis	Terpenuhinya standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Meunasah Mee	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah peralatan pengujian yang terkalibrasi	7 Unit	Terpenuhinya standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor	100 Persen	22,000,000	20,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										180,000,000	130,000,000		DISHUB		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah dokumen kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas	1 Dokumen	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	70 Persen	30,000,000	30,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah perlengkapan manajemen rekayasa lalu lintas	3 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	70 Persen	100,000,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi Forum LLAJ	2 Kali	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	70 Persen	50,000,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										280,000,000	350,000,000		DISHUB		
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah SDM Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkompentensi	1 Orang	Meningkatnya kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas	90 Persen	25,000,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah kegiatan inspeksi/pengaturan keselamatan angkutan umum dan jalan raya	5 Kegiatan	Meningkatnya kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas	90 Persen	255,000,000	300,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										750,000,000	170,000,000		DISHUB		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	Jumlah angkutan umum bus sekolah	1 Unit	Terpenuhinya kebutuhan angkutan untuk siswa sekolah	70 Persen	750,000,000	170,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DISHUB		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		OPD								
																				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan																
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target															
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN																5,545,747,630		5,545,747,630				KOMINFO														
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																5,545,747,630		5,545,747,630				KOMINFO														
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																5,511,747,630		5,511,747,630				KOMINFO														
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																3,423,079,630		3,423,079,630				KOMINFO														
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																1,200,000		1,200,000				KOMINFO														
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Buku Renja SKPD		10 Buku		Tercapainya Program dan Kegiatan SKPK		95 Persen		1,200,000		1,200,000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		KOMINFO	
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																2,316,590,204		2,316,590,204				KOMINFO														
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (19 org x 14 bulan)		266 OB		Lancarnya Administrasi Keuangan		100 Persen		2,316,590,204		2,316,590,204		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		KOMINFO	
2	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																54,000,000		54,000,000				KOMINFO														
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Laporan Barang		26 Laporan		Tercapainya Laporan Administrasi Barang		100 Persen		54,000,000		54,000,000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		KOMINFO	
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																79,800,000		79,800,000				KOMINFO														
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		72 Orang		Meningkatnya Kinerja ASN		90 Persen		50,000,000		50,000,000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		KOMINFO	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang Dilaksanakan		10 Kali		Meningkatnya Kinerja ASN		90 Persen		29,800,000		29,800,000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		KOMINFO	
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																157,139,534		157,139,534				KOMINFO														
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		31 Jenis		Lancar Administrasi Umum dan Kegiatan Kantor		90 Persen		29,999,534		29,999,534		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		KOMINFO	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan		1500 Porsi		Lancar Administrasi Umum dan Kegiatan Kantor		90 Persen		11,000,000		11,000,000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		KOMINFO	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan		15 Jenis		Lancar Administrasi Umum dan Kegiatan Kantor		90 Persen		15,000,000		15,000,000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		KOMINFO	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2 Eks x 365 Hari)		730 Eks		Lancar Administrasi Umum dan Kegiatan Kantor		90 Persen		1,140,000		1,140,000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		KOMINFO	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		50 Kali		Lancar Administrasi Umum dan Kegiatan Kantor		90 Persen		100,000,000		100,000,000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		KOMINFO	
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																250,000,000		250,000,000				KOMINFO														
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		1 Unit		Lancar Pelayanan Publik Kantor		95 Persen		250,000,000		250,000,000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		KOMINFO	
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																463,849,892		463,849,892				KOMINFO														
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Surat yang Dikirim		200 Surat		Lancar Pelayanan Publik Kantor		95 Persen		3,000,000		3,000,000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		KOMINFO	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Belanja Operasional				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan				Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong				Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen		Jumlah Rekening Untuk Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		24 Rekening		Lancar Pelayanan Publik Kantor		95 Persen		200,000,000		200,000,000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		KOMINFO	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	14 Orang	Lancar Pelayanan Publik Kantor	95 Persen	260,849,892	260,849,892	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KOMINFO
				Jumlah Unit Untuk Penyewaan Gedung Kantor							2 Unit	KOMINFO						
				Periode Penyediaan Gaji Non PNS - Jumlah Non PNS							204 OB	KOMINFO						
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										100,500,000	100,500,000		KOMINFO
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 UB	Lancar Pelayanan Publik Kantor	95 Persen	33,300,000	33,300,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KOMINFO
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Unit dan Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 UB	Lancar Pelayanan Publik Kantor	95 Persen	23,500,000	23,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KOMINFO
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Dipelihara	14 Ruang	Lancar Pelayanan Publik Kantor	95 Persen	8,000,000	8,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KOMINFO
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Mebeleur yang Dipelihara	30 Unit	Lancar Pelayanan Publik Kantor	95 Persen	35,700,000	35,700,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KOMINFO
											Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	77 Unit						KOMINFO
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										237,108,525	237,108,525		KOMINFO
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										237,108,525	237,108,525		KOMINFO
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	Jumlah Data Opini dan Aspirasi Publik	25 Data	Tercapainya Informasi dan Komunikasi Publik	90 Persen	14,000,000	14,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KOMINFO
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	Jumlah Website Kota Lhokseumawe yang dikelola	36 Website	Tercapainya Informasi dan Komunikasi Publik	90 Persen	48,100,000	48,100,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KOMINFO
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	Jumlah Gedung Pusat Integrasi/Analisis Data dan Informasi Publik yang Dibangun	1 Gedung	Tercapainya Informasi dan Komunikasi Publik	90 Persen	23,300,000	23,300,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KOMINFO
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	Jumlah Data yang Dipublikasikan ke Masyarakat	35 Data	Tercapainya Informasi dan Komunikasi Publik	90 Persen	45,000,000	45,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KOMINFO
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	Frekuensi Layanan Kemitraan Antara Pemerintah dan Mas Media	12 Kali	Tercapainya Informasi dan Komunikasi Publik	90 Persen	76,708,525	76,708,525	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KOMINFO
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menjalin Hubungan Antar Pemerintah	4 Kelompok	Tercapainya Informasi dan Komunikasi Publik	90 Persen	30,000,000	30,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KOMINFO
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										1,851,559,475	1,851,559,475		KOMINFO
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										150,000,000	150,000,000		KOMINFO
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Jumlah Sub Domain yang Dalam Pengawasan	50 Sub Domain	Peningkatan Jaringan Intra Daerah dan Sub Domain	75 Persen	50,000,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Junlah OPD terlayani jaringan Intra Pemerintah Daerah	8 OPD	Peningkatan Jaringan Intra Daerah dan Sub Domain	75 Persen	100,000,000	100,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										1,701,559,475	1,701,559,475		KOMINFO
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Jumlah Server yang Dikelola	7 Unit	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Lhokseumawe	80 Persen	21,000,000	21,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Frekuensi Layanan Integrasi Data dan Informasi Perangkat Daerah	12 Bulan	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Lhokseumawe	80 Persen	24,000,000	24,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikelola	8 Aplikasi	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Lhokseumawe	80 Persen	34,342,740	34,342,740	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Jumlah Email Resmi Pemerintah Lhokseumawe untuk OPD dan ASN	600 Email	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Lhokseumawe	80 Persen	26,000,000	26,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Jumlah Infrastruktur Menuju Lhokseumawe Smart City	1 Unit	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Lhokseumawe	80 Persen	1,564,216,735	1,564,216,735	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	Jumlah website OPD dan Gampong	102 Website	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Lhokseumawe	80 Persen	32,000,000	32,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											34,000,000	34,000,000		KOMINFO
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											34,000,000	34,000,000		KOMINFO
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											17,000,000	17,000,000		KOMINFO
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	100 Persen	Frekuensi Pelaksanaan layanan kemanan informasi daerah	12 Bulan	Peningkatan Jaminan Keamanan Informasi	80 Persen	17,000,000	17,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota											17,000,000	17,000,000		KOMINFO
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	100 Persen	Frekuensi Pelaksanaan operasional sandi dan kemanan informasi	12 Bulan	Peningkatan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	80 Persen	17,000,000	17,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KOMINFO	
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA											7,611,798,487	7,817,896,596		DPMTSP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											7,611,798,487	7,817,896,596		DPMTSP
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											6,404,290,224	6,543,128,404		DPMTSP
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,503,141,424	5,593,328,404		DPMTSP
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											41,178,000	36,303,849		DPMTSP
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah buku renja SKPD	10 Buku	Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1,200,000	1,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPA DPMTSP dan NAKER	20 Buku	Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	9,978,000	5,103,849	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan DPA DPMTSP dan NAKER	20 Buku	Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	9,000,000	9,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Kinerja SKPD (LkjiP, IKU, PK, LKPD)	4 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	21,000,000	21,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,834,590,204	4,016,549,224		DPMTSP
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMTSP dan NAKER	630 OB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,819,590,204	4,001,549,224	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan SPJ, Realisasi Anggaran Triwulan, LRA, Neraca dan CLAK Serta LPE	6 Dokumen	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											20,000,000	20,000,000		DPMTSP
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Laporan BMD dan Rekonsiliasi	10 Buku	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah OPD	100%	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											10,022,000	10,000,000		DPMTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	07	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Buku	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	10,022,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										125,000,000	125,000,000		DPMTSP	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	80 Pasang	Tersedianya Pakaian Dinas, Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian serta Diklat ASN	90%	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Buku	Tersedianya Pakaian Dinas, Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian serta Diklat ASN	90%	25,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	6 Orang	Tersedianya Pakaian Dinas, Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian serta Diklat ASN	90%	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										310,644,800	361,243,849		DPMTSP	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK	35 Jenis	Terlaksana Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Dearah	97%	54,801,800	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	Terlaksana Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Dearah	97%	4,978,000	5,103,849	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1500 Porsi	Terlaksana Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Dearah	97%	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17 Jenis	Terlaksana Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Dearah	97%	19,725,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Tersedianya Media Cetak	365 Eksemplar	Terlaksana Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Dearah	97%	1,140,000	1,140,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	99 Kali	Terlaksana Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Dearah	97%	200,000,000	225,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										652,028,620	484,731,482		DPMTSP	
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	5 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	550,000,000	375,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mebel	15 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	20 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	77,028,620	84,731,482	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										385,077,800	415,500,000		DPMTSP
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Benda Pos	3 Jenis	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di bayar	60 RB	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	102,200,000	120,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pejabat pengelola keuangan OPD (16 Org x 12 Bln)	192 OB	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	280,877,800	293,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
										Jumlah Penyediaan Pegawai Tidak Tetap (35 Org x 12 Bln)	420 OB	DPMTSP						
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										124,600,000	124,000,000		DPMTSP
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 UB	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33,300,000	32,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 UB	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	31,300,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2 Jenis	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										44,000,000	44,000,000		DPMTSP
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										44,000,000	44,000,000		DPMTSP
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Jumlah Buku Rencana Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe	10 Buku	Tersusunnya Laporan Rencana Tenaga Kerja Mikro	100%	44,000,000	44,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										418,848,800	428,000,000		DPMTSP
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										310,148,800	300,000,000		DPMTSP
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70 Persen	Jumlah Pesrta Pelatihan Pencari Kerja	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan dan Koordinasi Lintas Lembaga	90%	160,148,800	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70 Persen	Jumlah kerjasama LPKS	3 LPKS	Terlaksananya Pelatihan dan Koordinasi Lintas Lembaga	90%	150,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil										108,700,000	128,000,000		DPMTSP
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70 Persen	Jumlah Layanan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	20 Perusahaan	Pelayanan Konsultassi Perusahaan Kecil	80%	108,700,000	128,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		OPD									
												Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan										Hasil Kegiatan							
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									Tolok Ukur	Target						
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																			130,300,000	140,000,000			DPMTSP				
2	07	04	2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			100,000,000	100,000,000			DPMTSP				
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		49 Persen	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	9 LPKTS	Terlaksana Penertiban Izin LPTKS	100%	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP									
2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																			30,300,000	40,000,000			DPMTSP				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		49 Persen	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja Online	1000 Pencari Kerja	Tersusunnya Laporan Pencari Kerja dan Penempatan	100%	30,300,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP									
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																			308,000,000	337,800,000			DPMTSP					
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			198,000,000	216,800,000			DPMTSP				
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja		78 Persen	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan	24 Perusahaan	Layanan Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PPKB	100%	88,000,000	96,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP									
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja		78 Persen	Jumlah Pendaftaran Perjanjian Kerjasama	30 Perusahaan	Layanan Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PPKB	100%	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP									
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja		78 Persen	Jumlah Buku Laporan Pendataan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10 Laporan	Layanan Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PPKB	100%	50,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP									
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																			110,000,000	121,000,000			DPMTSP				
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menurunkan angka kemiskinan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun		0	Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	40 Kasus	Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	100%	110,000,000	121,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP									
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			1,207,508,263	1,274,768,192			DPMTSP						
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																			387,408,263	447,032,863			DPMTSP					
2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			255,119,556	311,244,156			DPMTSP				
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Investor PMDN/PMA	371 Investor	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal (LKPM)	3 Item	Terlaksanya Sosislisasi LKPM dan Forum CSR	100%	141,671,551	177,796,151	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP										
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Investor PMDN/PMA	371 Investor	Jumlah Forum CSR atau TJSLP	1 Forum	Terlaksanya Sosislisasi LKPM dan Forum CSR	100%	113,448,005	133,448,005	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP										
2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			132,288,707	135,788,707			DPMTSP				
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Investor PMDN/PMA	371 Investor	Jumlah Buku RUPM dan Peta Potensi dan Peluang Usaha	100 Buku	Tersedia Buku RUPM dan Peta Potensi dan Peluang Usaha	100%	35,000,000	38,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP										
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Investor PMDN/PMA	371 Investor	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	Tersedia Buku RUPM dan Peta Potensi dan Peluang Usaha	100%	97,288,707	97,288,707	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP										
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																			250,000,000	218,565,329			DPMTSP					
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			250,000,000	218,565,329			DPMTSP				
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Cakupan promosi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	100 Persen	Jumlah Produk Unggulan UMKM yang di Expose	10 Produk	Mengikuti Pameran/Expo	2 Kali	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP										
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Cakupan promosi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	100 Persen	Jumlah Keikutsertaan Event Pameran/Expo	2 Kali	Mengikuti Pameran/Expo	2 Kali	150,000,000	108,565,329	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DPMTSP										

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	18	04			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											328,700,000	358,700,000		DPMTSP
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											328,700,000	358,700,000		DPMTSP
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lamanya proses perizinan	6 Hari	Jumlah Layanan Perizinan Berusaha secara elektronik	100 Berkas	Pelayanan Perizinan Terpadu secara online dan terintegrasi	100%	109,000,000	109,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DPMTSP	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lamanya proses perizinan	6 Hari	Jumlah Observasi Lapangan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Penanaman Modal	96 Kali	Pelayanan Perizinan Terpadu secara online dan terintegrasi	100%	90,700,000	90,700,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DPMTSP	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lamanya proses perizinan	6 Hari	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terintegrasi	150 Pemohon Izin	Pelayanan Perizinan Terpadu secara online dan terintegrasi	100%	59,000,000	59,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DPMTSP	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lamanya proses perizinan	6 Hari	Jumlah Layanan Informasi Perizinan Berusaha secara online dan terintegrasi	100 Pemohon Izin	Pelayanan Perizinan Terpadu secara online dan terintegrasi	100%	70,000,000	100,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	DPMTSP	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											169,400,000	178,470,000		DPMTSP
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											169,400,000	178,470,000		DPMTSP
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan dalam pengawasan	30 Perusahaan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal/Perizinan Berusaha	96 Kali	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	90,700,000	99,770,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan dalam pengawasan	30 Perusahaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Berusaha	50 Orang	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya iklim investasi	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan dalam pengawasan	30 Perusahaan	Jumlah Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Perizinan Berusaha	1 Dokumen	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	28,700,000	28,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											72,000,000	72,000,000		DPMTSP
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											72,000,000	72,000,000		DPMTSP
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	12 Bulan	Jumlah Dokumen Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	Tersusunnya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	90%	72,000,000	72,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DPMTSP	
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARAWISATA											8,277,985,804	6,717,731,007		DISPORA
																			DISPORA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											6,589,547,983	5,539,293,186		DISPORA
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											6,589,547,983	5,539,293,186		DISPORA
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,485,831,423	2,705,733,918		DISPORA
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,200,000	1,756,920		DISPORA
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	4 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan PEnganggaran OPD	100 persen	1,200,000	1,756,920	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,656,501,423	1,822,151,565		DISPORA
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	420 OB	Dokumen administrasi dan laporan keuangan lainnya	100 persen	1,656,501,423	1,822,151,565	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											20,000,000	20,000,000		DISPORA
2	19	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 sarana / event	Partisipasi OPD dalam kegiatan	100 persen	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										218,140,000	213,116,843		DISPORA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Peralatan Listrik dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan	20 Jenis	Sarana dan prasarana administrasi	90 persen	90,000,000	66,005,843	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah porsi makanan dan minuman	44 porsi	Sarana dan prasarana administrasi	90 persen	12,000,000	13,550,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan yang Dicitakan dan Digandakan	8 jenis	Sarana dan prasarana administrasi	90 persen	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah surat kabar yang disediakan per bulan	360 eksemplar	Sarana dan prasarana administrasi	90 persen	1,140,000	1,311,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi perjalanan dinas luar daerah selama setahun	25 kali	Sarana dan prasarana administrasi	90 persen	100,000,000	115,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										200,000,000	200,000,000		DISPORA
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 jenis	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	90 persen	200,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										276,850,000	283,708,590		DISPORA
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah surat keluar yang terbit selama setahun	36 surat	Tersedianya jasa penunjang urusan OPD	90 persen	5,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah rekening yang dibayar	24 rekening	Tersedianya jasa penunjang urusan OPD	90 persen	102,400,000	85,608,590	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah gedung yang disewa	2 unit	Tersedianya jasa penunjang urusan OPD	90 persen	169,450,000	195,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
											Jumlah jasa pegawai tidak tetap	168 OB						DISPORA
											Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	144 OB						DISPORA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										113,140,000	165,000,000		DISPORA
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah mobil dinas/jabatan yang dipelihara	12 UB	Tersedianya jasa pemeliharaan barang OPD	90 persen	28,140,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	Tersedianya jasa pemeliharaan barang OPD	90 persen	85,000,000	85,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										1,011,035,000	911,035,000		DISPORA
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										440,000,000	440,000,000		DISPORA
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	Jumlah pelatihan kepemudaan yang dilaksanakan	1 kali	tingkat partisipasi pemuda dan masyarakat	80 persen	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	Jumlah rapat kordinasi lintas sektor yang dilakukan	3 kali	tingkat partisipasi pemuda dan masyarakat	80 persen	150,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	Jumlah perencanaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan	1 sarana/prasarana	tingkat partisipasi pemuda dan masyarakat	80 persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DISPORA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	Pelaksanaan event pemberian penghargaan untuk pemuda dan organisasi kepemudaan	1 kali	tingkat partisipasi pemuda dan masyarakat	80 persen	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	Jumlah peserta seleksi paskibra	60 orang	tingkat partisipasi pemuda dan masyarakat	80 persen	140,000,000	140,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										571,035,000	471,035,000		DISPORA
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	Jumlah peserta pelatihan entrepreneur	60 orang	partisipasi organisasi pemuda	70 persen	280,000,000	180,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	50 orang	partisipasi organisasi pemuda	70 persen	291,035,000	291,035,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										2,962,681,560	1,812,524,268		DISPORA
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										665,000,000	305,000,000		DISPORA
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Periode Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	12 bulan	Terlaksana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga	70 persen	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana olahraga	2 unit	Terlaksana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga	70 persen	660,000,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1,872,681,560	1,117,524,268		DISPORA
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	10 cabang olahraga	Jumlah Atlet yang dibina	30 orang	872,681,560	317,524,268	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	11 cabang olahraga	Jumlah Atlet yang dibina	30 orang	1,000,000,000	800,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										190,000,000	190,000,000		DISPORA
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	80 orang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	80 persen	15,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	80 orang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	80 persen	100,000,000	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	80 orang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	80 persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah Atlet berprestasi yang diberikan penghargaan	10 orang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	80 persen	25,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										125,000,000	100,000,000		DISPORA
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah organisasi keolahragaan	5 organisasi	jumlah organisasi keolahragaan yang aktif	10 organisas i	125,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										110,000,000	100,000,000		DISPORA
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	Jumlah event yang dilaksanakan	2 kali	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 persen	110,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										130,000,000	110,000,000		DISPORA
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										130,000,000	110,000,000		DISPORA
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pembina pramuka yang dibina	100 Persen	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 persen	130,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan					
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														1,688,437,821	1,178,437,821		DISPORA
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														1,688,437,821	1,178,437,821		DISPORA
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														95,148,337	95,148,337		DISPORA
3	26	02	2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														26,922,000	26,922,000		DISPORA
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	Jumlah event yang diikuti	1 kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100 persen	26,922,000	26,922,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	02	2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														58,226,337	58,226,337		DISPORA
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	Jumlah dokumen	1 dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	Jumlah kunjungan wisata	3000 orang	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 persen	48,226,337	48,226,337	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														10,000,000	10,000,000		DISPORA
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	Jumlah kunjungan movev	3 kali	Terlaksananya monitoring dan evaluasi objek wisata	100 persen	10,000,000	10,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISPORA					
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														807,589,684	547,589,684		DISPORA
3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														807,589,684	547,589,684		DISPORA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	Jumlah kunjungan wisata	3000 orang	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata	100 persen	617,945,014	417,945,014	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	Jumlah media yang diterbitkan	6 media	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata	100 persen	189,644,670	129,644,670	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														785,699,800	535,699,800		DISPORA
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar														785,699,800	535,699,800		DISPORA
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kunjungan Wisata	17 Persen	Jumlah SDM Pariwisata	20 orang	Jumlah SDM Pariwisata dan kunjungan wisata	50 orang	220,000,000	120,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kunjungan Wisata	17 Persen	Jumlah SDM Pariwisata	30 orang	Jumlah SDM Pariwisata dan kunjungan wisata	50 orang	200,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kunjungan Wisata	17 Persen	Jumlah SDM Pariwisata	30 orang	Jumlah SDM Pariwisata dan kunjungan wisata	50 orang	65,699,800	65,699,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kunjungan Wisata	17 Persen	Jumlah event pariwisata	2 event	Jumlah SDM Pariwisata dan kunjungan wisata	50 orang	300,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DISPORA					
						SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH														1,712,831,804	1,856,206,004		MAA
																			MAA				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														1,712,831,804	1,856,206,004		MAA
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														1,712,831,804	1,856,206,004		MAA
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1,424,481,804	1,564,651,004		MAA
2	22	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1,200,000	1,200,000		MAA
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah buku Renstra dan renja	10 Buku	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantorn	95 Persen	1,200,000	1,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	MAA					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											617,898,899	750,898,899		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	126 OB	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan	98 Persen	617,898,899	750,898,899	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	MAA	
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											112,000,000	112,000,000		
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Beserta Perlengkapannya	24 Pasang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantorn	98 Persen	90,000,000	90,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	MAA	
2	22	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	10 Kali	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantorn	98 Persen	22,000,000	22,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	MAA	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											147,115,000	148,115,000		
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Penyediaan ATK	75 Jenis	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	95 Persen	26,000,000	27,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	500 Porsi	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	95 Persen	23,835,000	23,835,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	15 Jenis	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	95 Persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	730 Eks	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	95 Persen	2,280,000	2,280,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	10 Unit	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	95 Persen	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Negri	10 Kali	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	95 Persen	80,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											48,012,905	48,012,905		
2	22	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	1 Unit	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	28,000,000	28,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	10,012,905	10,012,905	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											444,055,000	450,224,200		
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang dikirim	20 Surat	Lancarnya administrasi perkantoran	95 Persen	1,400,000	2,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	MAA	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang dibayar	24 RB	Lancarnya administrasi perkantoran	95 Persen	12,000,000	17,569,200	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	MAA	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pejabat Pengelola keuangan OPD (11 orang x 12 bulan) dan jumlah Pegawai Tidak tetap dan Jumlah Pengurus MAA	516 OB	Lancarnya administrasi perkantoran	95 Persen	430,655,000	430,655,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	MAA	
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											54,200,000	54,200,000		
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Berkala kendaraan Dinas Jabatan (1 unit x 12 Bulan)	12 UB	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	25,700,000	25,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan Dinas Operasional (1 unit x 12 bln)	12 UB	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	23,500,000	23,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan kantor	19 Unit	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)											288,350,000	291,555,000		MAA	
2	22	07	2.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat											224,350,000	227,555,000		MAA	
2	22	07	2.01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	Jumlah Peserta Pelatihan Seumapa untuk generasi muda	20 Peserta	Meningkatkan Jumlah kaderisasi Adat Aceh	95 Persen	40,000,000	43,205,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	07	2.01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Do Da Idi	20 Peserta	Meningkatkan Jumlah kaderisasi Adat Aceh	95 Persen	35,000,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	07	2.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Adat Istiadat	100 Peserta	Meningkatkan Jumlah kaderisasi Adat Aceh	95 Persen	59,350,000	59,350,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	07	2.01	04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	Jumlah Gampong yang dibina sebagai Percontohan Adat	1 Gampong	Meningkatkan Jumlah kaderisasi Adat Aceh	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	07	2.01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	Jumlah pelaksanaan Acara Adat Budaya Daerah	5 Kali	Meningkatkan Jumlah kaderisasi Adat Aceh	95 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	07	2.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat											64,000,000	64,000,000		MAA	
2	22	07	2.02	01	Penguatan Peradilan Adat	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	Jumlah Peserta Penguatan Lembaga Peradilan Adat gampong	50 Peserta	Meningkatkan Jumlah Penggunaan Hukum Kearifan Lokal	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
2	22	07	2.02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	Jumlah Kasus Peradilan adat	68 Kasus	Meningkatkan Jumlah Penggunaan Hukum Kearifan Lokal	95 Persen	34,000,000	34,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MAA		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											6,079,444,860	3,836,406,954		ARPUS	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											6,079,444,860	3,836,406,954		ARPUS	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											5,579,444,860	3,572,286,000		ARPUS	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											3,236,184,860	2,874,536,000		ARPUS	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											44,199,200	8,000,000		ARPUS	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RENJA SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Dokumen RKA-SKPD	100%	31,199,200	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS		
											Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen								
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Dokumen RKA-SKPD	100%	2,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahn RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Dokumen RKA-SKPD	100%	2,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Dokumen RKA-SKPD	100%	2,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Dokumen RKA-SKPD	100%	2,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Dokumen RKA-SKPD	100%	3,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Dokumen RKA-SKPD	100%	2,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,067,644,860	2,052,000,000		ARPUS
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan (21 orang x 14 Bulan)	294 OB	Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN, Laporan Keuangan dan Penatausahaan serta Verifikasi Keuangan SKPD	100%	2,059,340,000	2,050,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	3 Laporan	Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN, Laporan Keuangan dan Penatausahaan serta Verifikasi Keuangan SKPD	100%	2,304,860	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang Waktu Koordinasi Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12 Kali	Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN, Laporan Keuangan dan Penatausahaan serta Verifikasi Keuangan SKPD	100%	6,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										125,000,000	100,000,000		ARPUS
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu	50 Orang	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	20 Orang	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	75,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										181,640,800	150,036,000		ARPUS
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	Tersedianya Peralatan, Perlengkapan, Komponen Instalasi Listrik, Barang Cetak, Penggandaan, Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan, Bahan Logistik Kantor serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Jenis	Tersedianya Peralatan, Perlengkapan, Komponen Instalasi Listrik, Barang Cetak, Penggandaan, Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan, Bahan Logistik Kantor serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	12 Bulan	33,500,800	1,725,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Makan dan Minum Yang Disediakan	550 Porsi	Tersedianya Peralatan, Perlengkapan, Komponen Instalasi Listrik, Barang Cetak, Penggandaan, Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan, Bahan Logistik Kantor serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan yang dicetak dan digandakan	20 Jenis	Tersedianya Peralatan, Perlengkapan, Komponen Instalasi Listrik, Barang Cetak, Penggandaan, Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan, Bahan Logistik Kantor serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Perundang -undangan	365 Eks	Tersedianya Peralatan, Perlengkapan, Komponen Instalasi Listrik, Barang Cetak, Penggandaan, Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan, Bahan Logistik Kantor serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1,140,000	1,311,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Kali	Tersedianya Peralatan, Perlengkapan, Komponen Instalasi Listrik, Barang Cetak, Penggandaan, Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan, Bahan Logistik Kantor serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	120,000,000	120,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											125,000,000	32,500,000		ARPUS
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	4 Unit	Tersedianya Fasilitas Kendaraan Dinas, Kendaraan Operasional serta Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	100%	100,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	Tersedianya Fasilitas Kendaraan Dinas, Kendaraan Operasional serta Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	100%	25,000,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											362,500,000	361,800,000		ARPUS
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang dikirim	1000 Surat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,000,000	3,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang di bayar	48 Rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,000,000	99,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan Kerja Yang Di sewa	20 Unit	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,500,000	1,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap (35 orang x 12 Bulan)	420 OB	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	258,000,000	258,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
											Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan SKPD (11 Orang x 12 Bulan)	132 OB						ARPUS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	23	01	2.09		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												330,200,000	170,200,000		ARPUS
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 Bulan)	12 UB	Meningkatnya umur ekonomis Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	30,600,000	30,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS		
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (2 unit x 12 Bulan)	24 UB	Meningkatnya umur ekonomis Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	29,600,000	29,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS		
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	Meningkatnya umur ekonomis Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	20,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS		
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Unit	Meningkatnya umur ekonomis Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	150,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS		
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Ruang Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit	Meningkatnya umur ekonomis Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										2,343,260,000	697,750,000		ARPUS
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										960,800,000	350,000,000		ARPUS
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Perpustakaan Berbasis Digital	1 Unit	Tersedianya Perpustakaan Berbasis Digital, Tersedianya Sarana Mobiler dan TIK Perpustakaan, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling, Terbinanya Perpustakaan Kota Lhokseumawe, Tersedianya Bahan Bacaan Perpustakaan, Terlaksananya Stock Opname dan Penyiangan (Weeding Perpustakaan), Tersedianya Data Informasi Tentang Perpustakaan	12 Bulan	100,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Frekwensi Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	48 Kali	Tersedianya Perpustakaan Berbasis Digital, Tersedianya Sarana Mobiler dan TIK Perpustakaan, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling, Terbinanya Perpustakaan Kota Lhokseumawe, Tersedianya Bahan Bacaan Perpustakaan, Terlaksananya Stock Opname	12 Bulan	655,800,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
											Jumlah Ketersediaan Mobiler dan TIK Perpustakaan Kota Lhokseumawe	2 Jenis						ARPUS
											Jumlah Pengadaan Perabot Perpustakaan	12 Jenis						ARPUS
											Rentang Waktu pelaksanaan perpustakaan hari sabtu	48 hari						ARPUS
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Rentang Waktu pembinaan perpustakaan Kota Lhokseumawe	1 Kali	Tersedianya Perpustakaan Berbasis Digital, Tersedianya Sarana Mobiler dan TIK Perpustakaan, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling, Terbinanya Perpustakaan Kota Lhokseumawe, Tersedianya Bahan Bacaan Perpustakaan, Terlaksananya Stock Opname dan Penyiangan (Weeding Perpustakaan), Tersedianya Data Informasi Tentang Perpustakaan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Jumlah Bahan Bacaan perpustakaan	1500 Eks	Tersedianya Perpustakaan Berbasis Digital, Tersedianya Sarana Mobiler dan TIK Perpustakaan, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling, Terbinanya Perpustakaan Kota Lhokseumawe, Tersedianya Bahan Bacaan Perpustakaan, Terlaksananya Stock Opname dan Penyiangan (Weeding Perpustakaan), Tersedianya Data Informasi Tentang Perpustakaan	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Frekuensi Pengelolaan dan Pengembangan Terhadap Bahan Perpustakaan/Buku Tersedia	4 Kali	Tersedianya Perpustakaan Berbasis Digital, Tersedianya Sarana Mobiler dan TIK Perpustakaan, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling, Terbinanya Perpustakaan Kota Lhokseumawe, Tersedianya Bahan Bacaan Perpustakaan, Terlaksananya Stock Opname dan Penyiangan (Weeding Perpustakaan), Tersedianya Data Informasi Tentang Perpustakaan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Jumlah Ketersedian Data dan Informasi Tentang Perpustakaan	1 Dokumen	Tersedianya Perpustakaan Berbasis Digital, Tersedianya Sarana Mobiler dan TIK Perpustakaan, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu, Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling, Terbinanya Perpustakaan Kota Lhokseumawe, Tersedianya Bahan Bacaan Perpustakaan, Terlaksananya Stock Opname dan Penyiangan (Weeding Perpustakaan), Tersedianya Data Informasi Tentang Perpustakaan	12 Bulan	35,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,382,460,000	347,750,000		ARPUS		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Jumlah Peserta Seminar Menumbuhkan Budaya baca dan Literasi	100 Orang	Tumbuhnya Minat Baca, Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	50,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang Terbangun	1 Paket	Tumbuhnya Minat Baca, Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	1,200,000,000	227,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
											Jumlah Sarana Perpustakaan yang terbangun (LANJUTAN)	1 Paket					ARPUS	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Jumlah Peserta lomba Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Gampong dan Lomba Bercerita Hikayat Daerah	70 Orang	Tumbuhnya Minat Baca, Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	92,460,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	Jumlah Peserta Duta Baca	40 orang	Tumbuhnya Minat Baca, Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	40,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								500,000,000	264,120,954		ARPUS		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								400,000,000	147,750,000		ARPUS		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								45,000,000	28,750,000		ARPUS		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	34 OPD	Frekuensi penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	1 Kali	Adanya Peningkatan SDM Kearsipan di lingkungan Pemko Lhokseumawe	10 Bulan	45,000,000	28,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								55,000,000	34,500,000		ARPUS		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	34 OPD	Jumlah Arsip yang Diakusisi (Perangkat Daerah/Institusi Perorangan)	5 OPD	Tersedianya Arsip Statis	30 Box	55,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan					
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										300,000,000	84,500,000		ARPUS	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	34 OPD	Jumlah Aplikasi Simpul Jaringan Informasi JIKN Kearsipan	1 Aplikasi	Adanya Peningkatan SDM Kearsipan	90 Orang	125,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	34 OPD	Jumlah Unit Kearsipan Berdaya Guna di Kota Lhokseumawe	68 Gampong	Adanya Peningkatan SDM Kearsipan	90 Orang	175,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										100,000,000	116,370,954		ARPUS	
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota										30,000,000	34,500,000		ARPUS	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60 Persen	Jumlah Penilaian dan Penetapan Arsip Hasil Alih Media	40 item	Keabsahan Arsip Ahli Media	40 Item	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS	
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang										70,000,000	81,870,954		ARPUS	
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60 Persen	Jumlah Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Statis Yang dinyatakan Hilang	10 Item	Tersedianya Khasanah Arsip Statis	7 Item	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS	
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60 Persen	Jumlah Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media Yang Dinyatakan Hilang	10 Item	Tersedianya Khasanah Arsip Statis	7 Item	25,000,000	28,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS	
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60 Persen	Frekuensi Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	2 Tayang	Tersedianya Khasanah Arsip Statis	7 Item	15,000,000	18,620,954	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ARPUS	
					DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN										18,518,411,676	19,581,792,339		DKPP	
																			DKPP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										18,518,411,676	19,581,792,339		DKPP	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										7,446,747,676	8,330,708,134		DKPP	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,240,422,676	8,098,190,209		DKPP	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										27,200,000	32,458,160		DKPP	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 Persen	1,200,000	1,458,160	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA	2 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 Persen	5,200,000	6,200,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 Persen	5,200,000	6,200,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA	20 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 Persen	5,200,000	6,200,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	20 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 Persen	5,200,000	6,200,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen LKJP	10 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 Persen	5,200,000	6,200,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,113,827,226	5,625,209,949		DKPP	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1204 OB	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	100 Persen	5,113,827,226	5,625,209,949	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										365,143,450	454,825,500		DKPP	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80 Unit	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	44,003,450	48,025,500	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400 Porsi	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000	15,375,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Laporan yang dicetak dan digandakan	30 Jenis	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000	40,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	730 Eks	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,140,000	1,425,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke	45 Kali	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	280,000,000	350,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										138,000,000	200,000,000		DKPP	
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	10 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	63,000,000	100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	15 Jenis	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	75,000,000	100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										957,712,000	1,118,831,600		DKPP	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Surat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	2,000,000	2,875,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Rekening yang dibaya Rekening	23 Rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	285,922,000	324,345,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	1092 OB	Tersedianya Jasa Penunjang	100	669,790,000	791,611,600	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	09	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	kinerja dan keuangan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Jumlah Pengelola Keuangan SKPD	288 OB	Urusan Pemerintah	Persen	663,750,000	75,761,000	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP		
2				09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										638,540,000	666,865,000		DKPP
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	60 UB	Tersedianya Gedung Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	33,300,000	39,625,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP		
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	48 UB	Tersedianya Gedung Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	237,240,000	242,240,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP		
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	7 Unit	Tersedianya Gedung Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	200,000,000	200,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP		
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	30 Jenis	Tersedianya Gedung Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	168,000,000	185,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DKPP		
2				09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										206,325,000	232,517,925		DKPP	
2				09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										24,000,000	25,000,000		DKPP
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 Persen	Jumlah Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	8 Jenis	Tersedianya Informasi Harga Pangan	100 Persen	24,000,000	25,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP		
2				09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										126,700,000	140,770,000		DKPP
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 Persen	Frekuensi Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan	12 Kali	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Makanan	100 Persen	126,700,000	140,770,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP		
2				09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										55,625,000	66,747,925		DKPP
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 Persen	Frekuensi pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam berpotensi sumber daya lokal	2 hari	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita	100 Persen	55,625,000	66,747,925	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	25	03	2.01		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														DKPP
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											7,048,038,000	7,121,543,205		DKPP
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											3,377,473,500	3,615,788,455		DKPP
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											1,132,838,000	1,143,470,000		DKPP
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	100 Persen	60,000,000	70,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	Jumlah Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	5 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	100 Persen	972,138,000	972,770,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	100 Persen	100,700,000	100,700,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota											1,178,535,500	1,305,389,050		DKPP
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	Jumlah Kelompok Lembaga Nelayan	10 Kelompok	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Nelayan	100 Persen	310,000,000	350,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	Jumlah Sarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	6 Unit	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Nelayan	100 Persen	868,535,500	955,389,050	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									1,000,000,000	1,100,000,000		DKPP	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	4 Unit	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	100 Persen	1,000,000,000	1,100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								66,100,000	66,929,405		DKPP		
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Kapal Perikanan	300 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan	100 Persen	66,100,000	66,929,405	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								2,993,702,500	2,788,892,750		DKPP		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								1,016,902,500	728,892,750		DKPP		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	100 Ton	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	100 Persen	776,902,500	428,892,750	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Frekuensi Pelatihan Pembudidayaan Ikan	3 Kali	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	100 Persen	240,000,000	300,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								21,800,000	21,800,000		DKPP		
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan	200 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan	100 Persen	21,800,000	21,800,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan												1,955,000,000	2,038,200,000		DKPP
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Jumlah Pendataan Pembudidayaan Ikan	1 Buku	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	66,800,000	80,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Jumlah Sarana Produksi	36956 m3	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	850,000,000	870,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Jumlah Pembuatan Pintu Air	30 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	810,000,000	850,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Jumlah Alat Ukur	20 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	50,000,000	60,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Frekuensi Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan	12 Kali	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	28,200,000	28,200,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	Jumlah Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	4 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	150,000,000	150,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										60,000,000	100,000,000		DKPP
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota										60,000,000	100,000,000		DKPP
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan	12 Bulan	Frekuensi Patroli Bersama	8 Kali	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	100 Persen	60,000,000	100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										616,862,000	616,862,000		DKPP
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil										110,000,000	110,000,000		DKPP
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100 Persen	Jumlah Dokumen Data Usaha Perikanan	10 Dokumen	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	100 Persen	110,000,000	110,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
											Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan	12 Unit						DKPP
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota										506,862,000	506,862,000		DKPP
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100 Persen	Jumlah Kegiatan Perikanan Tangkap	5 Jenis	Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan	100 Persen	150,000,000	150,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100 Persen	Jumlah Fasilitas Untuk Pelaku Usaha Perikanan	12 Unit	Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan	100 Persen	356,862,000	356,862,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										4,023,626,000	4,129,541,000		DKPP
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										719,076,000	719,076,000		DKPP
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										668,376,000	668,376,000		DKPP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3		27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	60 Persen	Jumlah Bibit Unggul Pertanian	6 Unit	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Saran Pertanian	100 Persen	668,376,000	668,376,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
												Frekuensi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Kali					DKPP	
3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										50,700,000	50,700,000		DKPP
3		27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	60 Persen	Frekuensi Pelatihan SDM Petugas Laboratorium	6 Hari	Terlaksananya Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	100 Persen	50,700,000	50,700,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										681,200,000	751,200,000		DKPP
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian										50,000,000	70,000,000		DKPP
3		27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perkebunan	100 Persen	Frekuensi Pengembangan Bibit Pertanian/ Perkebunan	8 Kali	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen	50,000,000	70,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian										550,500,000	600,500,000		DKPP
3		27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perkebunan	100 Persen	Jumlah Dokumen DED	3 Dokumen	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100 Persen	50,500,000	50,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3		27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perkebunan	100 Persen	Jumlah Prasarana Puskeswan	2 Unit	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100 Persen	500,000,000	550,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	03	2.03			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota										80,700,000	80,700,000		DKPP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perkebunan	100 Persen	Jumlah Ternak Sapi yang ikut Perlombaan	5 Ekor	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Bibit Ternak	100 Persen	80,700,000	80,700,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										636,100,000	655,000,000		DKPP
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										500,000,000	500,000,000		DKPP
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana pendukung penyakit ternak	80 Persen	Jumlah Pengobatan Gratis Hewan	6 Jenis	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100 Persen	500,000,000	500,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										111,100,000	130,000,000		DKPP
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana pendukung penyakit ternak	80 Persen	Frekuensi Pelatihan SDM Petugas IB	15 Hari	Tersedianya Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan	100 Persen	36,100,000	30,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
											Frekuensi Pelatihan SDM Petugas Laboratorium	6 Hari						DKPP
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana pendukung penyakit ternak	80 Persen	Frekuensi Pelayanan Kesehatan Hewan	12 Kali	Tersedianya Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan	100 Persen	75,000,000	100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan										25,000,000	25,000,000		DKPP
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana pendukung penyakit ternak	80 Persen	Frekuensi Pendampingan Unit Kesejahteraan Hewan	12 Kali	Terlaksananya Pendampingan Pengawasan Teknis Peternakan	100 Persen	25,000,000	25,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										1,987,250,000	2,004,265,000		DKPP
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										1,987,250,000	2,004,265,000		DKPP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	0.002 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh	3 unit	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100 Persen	950,000,000	950,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	0.002 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	10 Hari	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100 Persen	237,250,000	254,265,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	0.002 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 unit	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100 Persen	800,000,000	800,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DKPP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Cetak Kantor	Belanja Operasional	kinerja dan keuangan	Muara Dua, Uteunkot	Urusan Pemerintahan	Persen	Minuman yang Disediakan	450 Persen	Umum Perangkat Daerah	100%	12,000,000	19,000,000	Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Jenis laporan yang Dicitak dan Digandakan	50 Dokumen	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	50 Jenis	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,140,000	1,600,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Jenis Bahan Material Kantor	5 Jenis	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15,000,000	16,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50 Kali	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	150,000,000	170,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Arsip Yang Tertata Pada SKPD	50 Jenis	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Web) Pada	2 Web	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										421,200,000	463,320,000		DISKOP
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	12 UB	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	50,000,000	55,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Mebel yang Disediakan	50 Jenis	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Jenis	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	30,000,000	33,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Gedung	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	166,200,000	182,820,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	75,000,000	82,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
								Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	50 Unit									
								Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis									
								Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50 Jenis									
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Periode Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan						
											Jumlah Pengadaan Taman dan Halaman Kantor	1 Unit						
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										970,700,000	1,069,620,000		DISKOP
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Surat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1,500,000	3,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Rekening Yang Dibayar	60 Rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	412,400,000	453,640,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	80 Jenis	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	50,000,000	55,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung/Gudang Kantor yang di sewa	1 Gedung	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	506,800,000	557,480,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Gedung/Gudang Kantor yang di sewa	1 Gedung							
										Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	780 OB							
										Jumlah Pegawai Non PNS	780 OB							
										Persentase Jasa Kebersihan Kantor	264 OB							
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										720,149,015	787,163,917		DISKOP
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 UB	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	60,000,000	66,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Mobil Jabatan	1 Unit							
										Jumlah Rehab Sedang/Berat Mobil Jabatan	12 UB							
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36 UB	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	85,000,000	88,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit							
										Jumlah Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36 UB							
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 UB	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	100,000,000	110,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	6 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	225,149,015	247,663,917	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30 Jenis	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	100,000,000	110,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	30 Jenis							
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	7 Gedung	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100%	150,000,000	165,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	4 Lokasi							
										Jumlah Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	3 Unit							
2	17	01	2.13		Penataan Organisasi										90,000,000	99,000,000		DISKOP
2	17	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan dan Analisa Jabatan	80 Persen	Terlasananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100%	5,000,000	5,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Persentase Pelaksanaan Penyusunan SOTK dan UPT Dinas	80 Persen							
2	17	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Jenis Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Jenis	Terlasananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100%	75,000,000	82,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Persentase Terlaksananya Kinerja dan Reformasi Birokrasi	80 Persen	Terlasananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100%	5,000,000	5,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP
2	17	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Jenis	Terlasananya Penataan Oranisasi Peranakot Daerah	100%	5,000,000	5,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	DISKOP

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan	
												Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										30,000,000	33,000,000		DISKOP			
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										15,000,000	16,500,000		DISKOP			
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	Jumlah Kelompok praKoperasi Menjadi Koperasi Berbadan Hukum	2 Koperasi	Jumlah KSP/USP yang Aktif dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	15,000,000	16,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										15,000,000	16,500,000		DISKOP			
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	Jumlah Kelompok Pra Koperasi Simpan Pinjam Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum	2 Koperasi	Bertambahnya Koperasi Simpan Pinjam Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	15,000,000	16,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										20,000,000	22,000,000		DISKOP			
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										20,000,000	22,000,000		DISKOP			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	Jumlah KSP/USP yang Dinilai	10 Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	Jumlah KSP/USP yang Diawasi	10 Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										20,000,000	22,000,000		DISKOP			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										20,000,000	22,000,000		DISKOP			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase BPR/LKM aktif	100 Persen	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang Dinilai	10 Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase BPR/LKM aktif	100 Persen	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Berprestasi Yang Diberi Penghargaan	10 Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										66,640,000	73,304,000		DISKOP			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										66,640,000	73,304,000		DISKOP			
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	Jumlah UMKM yang Didata	1000 UMKM	Bertambahnya UMKM Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	Jumlah Wirausaha yang Terlayani Bisnis Dan Teknis dalam Meningkatkan Usahanya	100 Orang	Bertambahnya UMKM Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha	4 Kecamatan	Bertambahnya UMKM Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	Jumlah UMKM yang Mengikuti Laporan	12 UMKM	Bertambahnya UMKM Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	10,000,000	11,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	Jumlah UMKM yang Terverifikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	4 Kecamatan	Bertambahnya UMKM Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	26,640,000	29,304,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DISKOP		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur			Target				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												460,000,000	506,000,000	DISKOP	
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												460,000,000	506,000,000	DISKOP	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	Jumlah UMKM dan pelaku usaha yang melakukan Kerjasama Dalam Rangka Penguatan Akses Pasar Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat	15 Orang 150 UMKM	Terlaksananya Fasilitasi Usaha Mikro Menjasi Usaha Kecil	100%	460,000,000	506,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												6,494,906,435	6,549,158,679	DISKOP	
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												5,331,100,000	5,268,971,600	DISKOP	
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												1,096,100,000	1,572,050,000	DISKOP	
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												1,080,600,000	1,555,000,000	DISKOP	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4 Kec	Jumlah Pasar yang ber SNI	1 Pasar	Tersedianya Bangunan dan Terpeliharanya Sarana Distribusi Perdagangan	100%	1,030,600,000	1,500,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4 Kec	Jumlah Pasar Rakyat yang Dimonitoring	4 Kecamatan	Tersedianya Bangunan dan Terpeliharanya Sarana Distribusi Perdagangan	100%	50,000,000	55,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya												15,500,000	17,050,000	DISKOP	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4 Kec	Pertiban dan Pembinaan Pasar	4 Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	15,500,000	17,050,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												430,000,000	473,000,000	DISKOP	
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota												355,000,000	390,500,000	DISKOP	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	4 Kec	Jumlah Komoditi yang Dipantau	64 Komoditi	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	35,000,000	38,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	4 Kec	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	4 Kematan	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	100%	320,000,000	352,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												75,000,000	82,500,000	DISKOP	
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	4 Kec	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Operasionaln Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Kecamatan	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Kota Lhokseumawe	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	4 Kec	Jumlah Distributor Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi	4 Kecamatan	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Kota Lhokseumawe	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	4 Kec	Jumlah Distrobutor Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi	4 Kecamatan	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Kota Lhokseumawe	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												680,000,000	1,255,000,000	DISKOP	
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												680,000,000	1,255,000,000	DISKOP	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	21.89 Persen	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang Mendapat Pembinaan	10 Orang	Tercapainya Keikutsertaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Nasional Maupun Pameran Dagang Lokal	100%	30,000,000	30,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	21.89 Persen	Jumlah UKM yang Mengikuti Pameran Dagang Produk Ekspor	2 Produk	Tercapainya Keikutsertaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Nasional Maupun Pameran Dagang Lokal	100%	350,000,000	825,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	21.89 Persen	Jumlah UKM yang Mengikuti Pameran Dagang Produk Ekspor	2 Produk	Tercapainya Keikutsertaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Nasional Maupun Pameran Dagang Lokal	100%	300,000,000	400,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												3,125,000,000	1,968,921,600	DISKOP	
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan												3,125,000,000	1,968,921,600	DISKOP	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Persentase Standarisasi Tera ulang	100 Persen	Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Standarisasi Tera Ulang	2 Gedung	Terlasananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	3,075,000,000	390,171,600	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Persentase Standarisasi Tera ulang	100 Persen	Jumlah Pedagang yang diberi Penyuluhan dan Diawasi Metrologi Legal	4 Kecamatan	Terlasananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	25,000,000	1,551,250,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Standarisasi Tera ulang	100 Persen	Jumlah Pelaku Usaha Yang Disidik Mertologi Legal	4 Kecamatan	Terlasananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										1,163,806,435	1,280,187,079		DISKOP
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										972,560,715	1,069,816,787		DISKOP
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										972,560,715	1,069,816,787		DISKOP
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	Jumlah Jenis Laporan	3 Jenis	Terlaksannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe	100%	100,000,000	110,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	Frekwensi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilavahan Industri	10 Kali	Terlaksannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe	100%	30,000,000	33,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	Jumlah IKM yang di Tingkatkan Kompetensi nya	100 Industri	Terlaksannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe	100%	197,709,730	217,480,703	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Produk IKM Makanan / Minuman (Pengawasan IK/RT) yang Diawasi	40 Produk							
										Jumlah Promosi dan Informasi Produk IKM	10 Jenis							
										Jumlah SDM Industri	SDM Indus							
											Persentase Penyuluhan Pelaku IKM Makanan Dan Minuman	80 Persen						
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	80 Persen	Terlaksannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe	100%	500,000,000	550,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Pabrik Pakan Ternak	80 Persen							
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	Jumlah Desain Kemasan	200 Desain	Terlaksannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe	100%	94,850,985	104,336,084	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Kerjasama Kemitraan (MOU)	2 MOU							
										Jumlah Pelaksanaan Penilaian Desa Kerajinan (DEKRANAS)	2 Kali							
										Persentase Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Industri (SDM)	80 Persen							
											Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa Kerajinan (DEKRANAS)	80 Persen						
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	Jumlah laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Laporan	Terlaksannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe	100%	50,000,000	55,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP
										Jumlah Laporan Pendataan Industri Mikro Kecil Menengah (IMKM)	1 Laporan							
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA										50,000,000	55,000,000		DISKOP
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota										50,000,000	55,000,000		DISKOP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Persentase IKM yang memiliki izin	30 Persen	Jumlah IKM yang di Standardisasi Produk usahanya (SP-PIRT, HALAL, MD, Barcode dan HaKI)	10 IKM	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	Persentase IKM yang memiliki izin	30 Persen	Jumlah Industri menyampaikan data dan informasi ke Sistem informasi industri	50 Industri	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	25,000,000	27,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											141,245,720	155,370,292		DISKOP
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota											141,245,720	155,370,292		DISKOP
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan data SINAS	12 Bulan	Jumlah Industri menyampaikan data dan informasi ke Sistem informasi industri	50 Industri	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	50,000,000	55,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan data SINAS	12 Bulan	Jumlah Industri menyampaikan data dan informasi ke Sistem informasi industri	50 Industri	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	50,000,000	55,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan data SINAS	12 Bulan	Jumlah Industri Yang Dipantau dan Dievaluasi Penyampaian data dan informasi ke Sistem informasi industri	50 Industri	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	41,245,720	45,370,292	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DISKOP	
					SEKRETARIAT DAERAH											67,029,827,107	76,929,123,257		SETDAKO
																			SETDAKO
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											67,029,827,107	76,929,123,257		SETDAKO
4	01				SEKRETARIAT DAERAH											67,029,827,107	76,929,123,257		SETDAKO
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											35,874,218,761	43,412,960,150		SETDAKO
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											226,802,300	544,821,497		SETDAKO
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja dan Renja Perubahan Jumlah Buku RKT dan TAPKIN Perangkat Daerah	20 Buku 50 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Ecvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	43,597,000	82,060,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku LAKIP Pemko dan Setdako Jumlah Buku LKPJ	34 Buku 30 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Ecvaluasi	100 Persen	80,063,800	240,579,295	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku EKPOD Jumlah Buku LPPD dan IKK	40 Buku 20 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan,	100 Persen	103,141,500	222,182,202	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	SETDAKO	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12,654,429,063	13,979,871,969		SETDAKO
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (172 Org x 14 Bln)	2408 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	12,654,429,063	13,979,871,969	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan							
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													473,500,000	801,772,950		SETDAKO
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas	300 Pasang	Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur dan Meningkatnya SDM Aparatur	100 Persen	425,000,000	729,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	8 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur dan Meningkatnya SDM Aparatur	100 Persen	48,500,000	72,472,950	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													5,548,060,600	6,177,908,499		SETDAKO
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Instalasi Jaringan Listrik	1 Jaringan	Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan Listrik	100 Jenis 50 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	248,060,600	312,960,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO SETDAKO			
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	500,000,000	246,235,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Yang Disediakan	35140 Porsi	Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,757,000,000	2,262,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicitak dan Digandakan	150 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	198,000,000	212,960,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang Waktu Kunjungan Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rentang Waktu Peningkatan Pelayanan Tamu Ke Kota Lhokseumawe	12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	300,000,000	348,553,499	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO SETDAKO			
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	700 Kali	Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2,495,000,000	2,744,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													4,518,000,000	5,710,000,000		SETDAKO
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2,600,000,000	2,860,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Jenis	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,918,000,000	2,850,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													4,791,897,000	6,299,235,820		SETDAKO
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Benda Pos dan Paket Pengiriman	300 Lembar	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	15,000,000	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan	240 Rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,000,000,000	1,597,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disewa	7 Jenis	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	150,000,000	193,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO			
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Pegawai Tidak Tetap (328 Org x 12 Bln) Jumlah Penyedia Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (56 Org x 12 Bln) Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3936 OB 672 OB 12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3,626,897,000	4,472,135,820	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO SETDAKO SETDAKO			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,292,559,750	3,685,480,725		SETDAKO
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaaa Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan/Mobil Jabatan (18 Unit x 12 Bulan)	216 UB	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	741,000,000	762,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (19 Unit x 12 Bulan)	228 UB	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	500,000,000	550,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Gedung	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,195,000,000	1,314,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnva	6 Jenis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	619,059,750	679,645,725	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	237,500,000	379,335,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											1,180,642,648	1,238,706,913		SETDAKO
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH (2 Org x 14 Bln)	28 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	580,642,648	638,706,913	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (2 Org x 12 Bln)	24 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	600,000,000	600,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah											441,000,000	428,582,000		SETDAKO
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bantuan Perumahan Kepala Daerah (1 Unit x 1 Tahun)	1 UT	Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	134,000,000	147,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bantuan Perumahan Wakil Kepala Daerah (1 Unit x 1 Tahun)	1 UT	Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	127,000,000	139,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekreariat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bantuan Perumahan Sekretariat Daerah (1 Unit x 3 Tahun)	3 UT	Terpenuhinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	180,000,000	141,482,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi											1,018,027,400	2,246,579,777		SETDAKO
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Analisi Beban Kerja (ABK) Pemko Lhokseumawe	60 Buku	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 Persen	164,017,500	583,791,362	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
											Jumlah Buku Hasil Evaluasi Jabatan Pemko Lhokseumawe	50 Buku						SETDAKO
											Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Pemko Lhokseumawe	1 Dokumen						SETDAKO
											Jumlah Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota	20 Raqan						SETDAKO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku IKM Kota Lhokseumaww	15 Buku	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 Persen	288,310,000	1,072,070,945	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
											Jumlah Buku Tata Naskah Dinas Kota Lhokseumawe	50 Buku						SETDAKO
											Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPM Kota Lhokseumawe	6 Laporan						SETDAKO
											Jumlah Tenaga Ahli Walikota (4 Org x 12 Bln)	48 OB						SETDAKO
											Jumlah Unit Layanan Publik Terbaik	3 Unit						SETDAKO
											Rentang Waktu Penataan Arsip/Dokumen Persuratan Setda Kota Lhokseumawe	12 Bulan						SETDAKO
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Keikutsertaan MTQ KORPRI Nasional	1 Kali	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 Persen	565,699,900	590,717,470	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
											Frekuensi Pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	12 Kali						SETDAKO
											Frekuensi Peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe	1 Kali						SETDAKO
											Jumlah Atlit KORPRI Kota Lhokseumawe	30 Orang						SETDAKO
											Jumlah Buku Pedoman SOP	25 Buku						SETDAKO
											Jumlah Laporan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe	2 Laporan						SETDAKO
Jumlah Peserta Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI	50 Orang	SETDAKO																
											Jumlah Peserta MTQ KORPRI	100 Orang					SETDAKO	
											Jumlah Peserta Seleksi BAPOR KORPRI	50 Orang					SETDAKO	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										1,729,300,000	2,300,000,000		SETDAKO
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang Waktu Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	Lancarnya Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	400,500,000	650,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	Lancarnya Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	828,800,000	1,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
											Rentang Waktu Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12 Bulan						SETDAKO
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang Waktu Kegiatan Pendokumentasian Pimpinan	12 Bulan	Lancarnya Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	500,000,000	650,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
											Rentang Waktu Pelaksanaan Peliputan Untuk Publikasi Dokumentasi	12 Bulan						SETDAKO
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										23,976,796,646	29,878,467,439		SETDAKO
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan										18,984,219,646	23,879,077,939		SETDAKO
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	12 titik wilayah	Frekuensi Keikutsertaan Kegiatan APEKSI	1 Kali	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	81,700,000	220,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saino	SETDAKO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	12 titik wilayah	Frekuensi Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dan Gampong	1 Kali	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	726,849,646	2,055,250,659	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
											Frekuensi Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Saweu Gampong	10 Kali						SETDAKO
											Jumlah Laporan Pendataan dan Penamaan Rupa Bumi Wilayah Kota Lhokseumawe	1 Laporan						SETDAKO
											Jumlah Laporan Verifikasi Hasil Pilkades dan Pemberian Kompensasi Keuchik Yang Berakhir Masa Jabatan	24 Laporan						SETDAKO
											Jumlah Titik Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	15 Titik						SETDAKO
											Jumlah Titik Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan dan Gampong	20 Titik Tapal Batas						SETDAKO
											Rentang Waktu Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong	12 Bulan						SETDAKO
											Rentang Waktu Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong	12 Bulan						SETDAKO
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	12 titik wilayah	Frekuensi Penyelenggaraan Konflik Pertanahan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	12 Kali	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	18,175,670,000	21,603,827,280	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO
											Frekuensi Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Pejabat Daerah/Propinsi/Pusat	12 Kali						SETDAKO
											Frekuensi Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	12 Kali						SETDAKO
											Frekuensi Percepatan Aset P3D dan P2D Kota Lhokseumawe	1 kali						SETDAKO
											Frkuensi Penyerahan Remisi oleh Walikota pada Lembaga Pemasyaraktan Lhokseumawe	1 Kali						SETDAKO
											Rentang Waktu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	12 Bulan						SETDAKO
											Rentang Waktu Pengadaan/Pembebasan Tapah	12 Bulan						SETDAKO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan					
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat														3,233,902,000	3,642,503,100		SETDAKO
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan daerah	8 Hari Besar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Anjangsana Ramadhan	1 Kali	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	1,199,016,000	1,745,122,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Jumlah Peserta Pembina dan Pelatihan Dai	40 Orang						SETDAKO				
											Rentang Waktu Kegiatan Ceramah Rutin Jumat	12 Bulan						SETDAKO				
											Rentang Waktu Pelaksanaan Pengajian Gampong Di Wilayah Pemko Lhokseumawe	11 Bulan						SETDAKO				
											Rentang Waktu Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe	12 Bulan						SETDAKO				
											Rentang Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Mushalla Setdako	12 Bulan						SETDAKO				
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan daerah	8 Hari Besar	Frekuensi Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Lhokseumawe	12 Kali	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	203,681,000	185,130,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	2 Kali						SETDAKO				
											Frekuensi Pelestarian TMP Blang Panyang	12 Kali						SETDAKO				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan daerah	8 Hari Besar	Frekuensi Pelaksanaan Pendukung Peringatan Hari Kemerdekaan RI	1 Kali	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	1,831,205,000	1,712,250,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Frekuensi Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar	8 Kali						SETDAKO				
											Frekuensi Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa	1 Kali						SETDAKO				
											Jumlah Pembinaan Marching Band Kota Lhokseumawe	150 Hari						SETDAKO				
											Jumlah Perlengkapan Personil Paskibra	35 Stel						SETDAKO				
											Jumlah Peserta Hasil Seleksi Rekrutmen Paskibra	35 Orang						SETDAKO				
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum														1,758,675,000	2,356,886,400		SETDAKO
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	45 Qanun	Frekuensi Pelaksanaan Bina Kadarkum	2 Kali	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	779,700,000	1,102,036,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Frekuensi Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	12 Kali						SETDAKO				
											Jumlah Konsep/Naskah Hasil Kajian	20 Buku						SETDAKO				
											Jumlah Produk Hukum Gampong Yang Selaras Dengan Peraturan Perundang-undangan	68 Qanun						SETDAKO				
											Jumlah Rancangan Qanun Yang Disusun	14 Raqan						SETDAKO				
											Rentang Waktu Pelaksanaan Leqal Drafting	12 Bulan						SETDAKO				
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	45 Qanun	Frekuensi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kali	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	803,000,000	914,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi Hak Asasi Manusia	4 Kali						SETDAKO				
											Jumlah Penyediaan Tenaga Bantuan Hukum Kota Lhokseumawe	6 Orang						SETDAKO				
								Kota Lhokseumawe	Cakupan produk		Frekuensi Sosialisasi Qanun Serta Undang-undang Kota Lhokseumawe kepada Masyarakat	4 Kali					Meningkatkan Sumber Daya	SETDAKO				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	hukum daerah yang difasilitasi	45 Qanun	Jumlah Peraturan Yang dipublikasi	5 Jenis	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	175,975,000	340,850,000	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
									Rentang Waktu Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	12 Bulan								SETDAKO	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											7,178,811,700	3,637,695,668		SETDAKO
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											5,255,100,100	1,280,000,000		SETDAKO
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan Laporan pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe	12 Laporan	Frekuensi Kegiatan Assesment Organisasi BUMD Di Kota Lhokseumawe	12 Kali	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 Persen	4,220,400,000	160,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
											Jumlah Terbentuknya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Lhokseumawe	1 BUMD						SETDAKO	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan Laporan pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe	12 Laporan	Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah	12 Kali	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 Persen	476,433,400	560,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
											Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	12 Kali						SETDAKO	
											Jumlah Laporan Sarana Produksi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	1 Laporan						SETDAKO	
											Rentang Waktu Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Bersubsidi	12 Bulan						SETDAKO	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan Laporan pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe	12 Laporan	Jumlah Qanun Tentang Pemetaan Zona Ekonomi (ZEE) di Wilayah Kota Lhokseumawe	1 Qanun	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 Persen	558,266,700	560,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
											Rentang Waktu Kerjasama Pemko Lhokseumawe dengan daerah Lain dan Pihak Ketiga	12 Bulan						SETDAKO	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											266,648,400	350,895,668		SETDAKO
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek	12 Laporan	Frekuensi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 Kali	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100 Persen	135,200,000	222,221,890	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
											Jumlah Buku Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan Yang Dibiayai idengan APBK	100 Buku						SETDAKO	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan penyediaan laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek	12 Laporan	Frekuensi Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	4 Kali	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100 Persen	131,448,400	128,673,778	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO	
											Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan Program dan Kegiatan Fisik/Proyek	12 Laporan						SETDAKO	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target		
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															1,657,063,200	2,006,800,000		SETDAKO
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	100 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Kali	Tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	866,300,000	925,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Rentang Waktu Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan						SETDAKO				
											Rentang Waktu Pelaksanaan Riset dan dan Analisis Pasar Barang/Jasa	12 Bulan						SETDAKO				
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	100 Persen	Frekuensi Bimtek Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	2 Kali	Tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	645,993,200	931,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Frekuensi Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi UKPBJ	1 Kali						SETDAKO				
											Rentang Waktu Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan						SETDAKO				
											Rentang Waktu Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog ElektronikLokal/Sektoral	12 Bulan						SETDAKO				
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	100 Persen	Rentang Waktu Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi	12 Bulan	Tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	144,770,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETDAKO				
											Rentang Waktu Pembinaan dan Advokasi SDM PBJ	12 Bulan						SETDAKO				
				SEKRETARIAT DPRK															29,642,814,584	34,422,061,086		SETWAN
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	02			SEKRETARIAT DPRD															29,642,814,584	34,422,061,086		SETWAN
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															29,642,814,584	34,422,061,086		SETWAN	
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															23,243,448,084	26,747,794,586		SETWAN
																29,809,326	45,000,000		SETWAN			
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah buku Renstra dan Renja Perangkat Daerah	20 Buku	Meningkatnya Efektifitas Kerja	100 Persen	4,809,326	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya Efektifitas Kerja	100 Persen	5,000,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya Efektifitas Kerja	100 Persen	5,000,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dukomen DPA SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya Efektifitas Kerja	100 Persen	5,000,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya Efektifitas Kerja	100 Persen	5,000,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	Meningkatnya Efektifitas Kerja	100 Persen	5,000,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															4,184,142,859	4,602,557,145		SETWAN
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	882 OB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan dan Jasa Administrasi Keuangan	100 Persen	4,184,142,859	4,602,557,145	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															1,101,555,387	1,183,120,000		SETWAN
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	3 Unit	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pedidikan dan Pelatihan	100 Persen	19,500,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Sekretariat DPRK beserta perlengkapannya	6 Jenis	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pedidikan dan Pelatihan	100 Persen	678,120,000	678,120,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	62 Orang	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pedidikan dan Pelatihan	100 Persen	328,935,387	425,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	62 Orang	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pedidikan dan Pelatihan	100 Persen	75,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,594,520,000	2,216,828,880		SETWAN
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan Listrik	25 Jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	25,000,000	36,602,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor serta ATK	75 Jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	200,000,000	250,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	20,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	4500 Porsi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	900,340,000	1,268,046,380	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1044 Eks	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	99,180,000	99,180,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40 Kali	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	200,000,000	360,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										580,000,000	950,900,000		SETWAN
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	100 Persen	155,000,000	525,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mebeleur	12 Jenis	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	100 Persen	425,000,000	425,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,901,493,150	2,998,893,150		SETWAN
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Lembar	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	100 Persen	7,200,000	12,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	36 Rekening	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	100 Persen	404,762,000	446,762,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	100 Persen	35,350,000	35,350,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran	3636 OB	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	100 Persen	2,454,181,150	2,504,181,150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,246,106,150	1,392,106,150		SETWAN
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	48 UB	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100 Persen	70,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48 UB	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100 Persen	254,400,000	275,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	1 Unit	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100 Persen	431,706,150	531,706,150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100 Persen	140,000,000	165,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor	4 Jenis	Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi	100 Persen	350,000,000	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										37,500,000	37,500,000		SETWAN
4	02	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan	50 Kali	Tersedianya Fasilitas dan Dokumentasi	100 Persen	15,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Fasilitas Komunikasi Kegiatan Pimpinan	3 Pimpinan	Tersedianya Fasilitas dan Dokumentasi	100 Persen	7,500,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Pimpinan	Tersedianya Fasilitas dan Dokumentasi	100 Persen	15,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										10,004,921,212	11,247,489,261		SETWAN
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRK	350 OB	Tersediannya Gaji dan Tunjangan dan Pakaian Dinas	100 Persen	9,425,680,487	10,368,248,536	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRK	125 Pasang	Tersediannya Gaji dan Tunjangan dan Pakaian Dinas	100 Persen	454,240,725	754,240,725	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK	25 Orang	Tersediannya Gaji dan Tunjangan dan Pakaian Dinas	100 Persen	125,000,000	125,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD										1,563,400,000	2,073,400,000		SETWAN
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	25 Orang	Tersedianya Fasilitas Administrasi dan Kebutuhan Rumah Tangga	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna DPRK	48 Kali	Tersedianya Fasilitas Administrasi dan Kebutuhan Rumah Tangga	100 Persen	188,400,000	188,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60 Kali	Tersedianya Fasilitas Administrasi dan Kebutuhan Rumah Tangga	100 Persen	1,300,000,000	1,800,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Rumah Tangga Pimpinan	4 Jenis	Tersedianya Fasilitas Administrasi dan Kebutuhan Rumah Tangga	100 Persen	25,000,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										6,399,366,500	7,674,266,500		SETWAN
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										999,900,000	1,130,000,000		SETWAN
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	11 Ragan	Adanya Rancangan Qanun dan Peraturan Daerah yang dihasilkan	100 Persen	50,000,000	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Rancangan Qanun DPRK Yang dibahas	11 Ragan	Adanya Rancangan Qanun dan Peraturan Daerah yang dihasilkan	100 Persen	774,400,000	875,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan																																																									
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD																																																								
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																																																												
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15				
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Peraturan Perundang-undangan	20 Kali	Adanya Rancangan Qanun dan Peraturan Daerah yang dihasilkan	100 Persen	155,500,000	160,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik	1 Naskah	Adanya Rancangan Qanun dan Peraturan Daerah yang dihasilkan	100 Persen	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran											866,916,500	866,916,500		SETWAN																																																							
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	10 Kali	Terlaksananya Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	100 Persen	51,639,500	51,639,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	10 Kali	Terlaksananya Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	100 Persen	51,639,500	51,639,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pembahasan APBK	1 Kali	Terlaksananya Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	100 Persen	441,212,500	441,212,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pembahasan APBK Perubahan	1 Kali	Terlaksananya Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	100 Persen	161,212,500	161,212,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBK	1 Kali	Terlaksananya Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	100 Persen	161,212,500	161,212,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											1,596,250,000	1,596,250,000		SETWAN																																																							
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Kali	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	605,300,000	605,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pengawasan Bidang Infrastruktur	15 Kali	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	225,300,000	225,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Kali	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	225,300,000	225,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian	15 Kali	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	225,300,000	225,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	15 Kali	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	225,300,000	225,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	JUmlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	6 Kali	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	29,750,000	29,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Kali	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN																																																								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										1,878,700,000	2,391,200,000		SETWAN
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRK Yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Legal Drafting	25 Orang	Tersedianya Bimbingan Teknis dan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli	100 Persen	801,000,000	1,201,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2 Media	Tersedianya Bimbingan Teknis dan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli	100 Persen	600,900,000	650,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	36 OB	Tersedianya Bimbingan Teknis dan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli	100 Persen	180,900,000	240,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	48 OB	Tersedianya Bimbingan Teknis dan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli	100 Persen	240,900,000	240,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Kali	Tersedianya Bimbingan Teknis dan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Penyusunan Program Kerja	2 Kali	Tersedianya Bimbingan Teknis dan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli	100 Persen	5,000,000	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										826,900,000	1,355,500,000		SETWAN
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 Kali	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	25,000,000	32,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	3 Laporan	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	801,900,000	1,323,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										20,000,000	30,000,000		SETWAN
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah pengawasan Kode Etik	6 Kali	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik	100 Persen	20,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah										139,700,000	230,900,000		SETWAN
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Fasilitasi dan Kerjasama Daerah	12 Kali	Tersedianya Fasilitasi Kerjsama daerah dan Bahan Komunikasi/Publikasi	100 Persen	25,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Bahan Komunikasi Informasi dan terbitan Berita Parlementaria	2 Jenis	Tersedianya Fasilitasi Kerjsama daerah dan Bahan Komunikasi/Publikasi	100 Persen	114,700,000	180,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD										71,000,000	73,500,000		SETWAN
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	12 Kali	Tersedianya Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Tugas DPRD	100 Persen	25,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan	6 Kali	Tersedianya Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Tugas DPRD	100 Persen	15,000,000	17,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	JUmlah Terlaksananya Tugas Badan Musyawarah	12 Kali	Tersedianya Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Tugas DPRD	100 Persen	15,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	Jumlah Fasilitasi tugas Pimpinan	18 Kali	Tersedianya Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Tugas DPRD	100 Persen	16,000,000	16,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SETWAN
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										13,447,040,386	15,162,844,621		BAPPEDA
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										13,447,040,386	15,162,844,621		BAPPEDA
5	01				PERENCANAAN										12,753,630,386	14,324,324,121		BAPPEDA
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,737,587,058	8,337,337,402		BAPPEDA
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										40,000,000	46,000,000		BAPPEDA
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja , Renja Perubahan, RKT, dan TAPKIN Perangkat Daerah	20 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	2,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RKA-SKPD	5 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	8,000,000	9,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan RKA-SKPD	5 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	8,000,000	9,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPA-SKPD	12 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan DPA-SKPD	12 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan LKIP	5 Laporan	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	2,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.633.697.608	5.049.094.247		BAPPEDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	840 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	4,597,697,608	5,009,494,247	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	15,000,000	16,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	7 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	15,000,000	16,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	12 Laporan	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	6,000,000	6,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										10,000,000	11,000,000		BAPPEDA
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15 Laporan	Tertipnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95 Persen	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										151,200,000	166,320,000		BAPPEDA
5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 Unit	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	98 Persen	5,000,000	5,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	200 Pasang	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	98 Persen	101,500,000	111,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	98 Persen	30,700,000	33,770,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	98 Persen	14,000,000	15,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										469,020,000	522,893,350		BAPPEDA
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Peralatan Listrik dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan	80 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	76,620,000	84,282,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang Disediakan	1150 Porsi	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	40,000,000	58,710,410	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan yang Dicetakan dan Digandakan	30 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	25,000,000	38,900,940	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2 Eks x 365 Hari)	730 Eks	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	2,400,000	3,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	5 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	30,000,000	33,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60 Kali	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	295,000,000	304,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										535,249,900	572,274,890		BAPPEDA
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	12 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	256,899,900	266,089,890	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	75,000,000	92,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan																																																									
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD																																																								
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																																																												
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15				
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Jenis	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	95 Persen	203,350,000	213,685,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											648,350,000	692,678,410		BAPPEDA																																																							
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang Dikirim	30 Surat	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	3,750,000	4,125,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang Dibayar	84 Rekening	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	220,000,000	242,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan OPD (26 org x 12 Bulan) dan Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (33 org x 12 Bulan)	708 OB	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	424,600,000	446,553,410	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,210,069,550	1,232,076,505		BAPPEDA																																																							
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 Bulan)	12 UB	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	39,600,000	43,560,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 unit x 12 Bulan)	24 UB	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	60,181,050	66,199,155	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	970,288,500	977,317,350	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	140,000,000	145,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	01	2.13		Penataan Organisasi											40,000,000	45,000,000		BAPPEDA																																																							
5	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Bappeda	15 Buku	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	95 Persen	40,000,000	45,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											1,799,458,868	2,195,013,958		BAPPEDA																																																							
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											799,295,375	938,601,162		BAPPEDA																																																							
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Laporan Verifikasi Renja SKPK dan Perubahan Renja SKPK	10 Laporan	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	93 Persen	112,313,500	129,160,525	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	4 Laporan	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	93 Persen	64,350,000	91,774,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum SKPD	3 Laporan	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	93 Persen	81,400,000	108,824,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe	1 Hari	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	93 Persen	181,527,475	208,951,475	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4 Laporan	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	93 Persen	29,300,000	27,426,102	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah buku RKPD dan RKPD-P	85 Buku	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	93 Persen	330,404,400	372,465,060	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA																																																								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan							
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													742,481,425	960,078,418		BAPPEDA
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Dokumen Kesepakatan Doka Murni dan Perubahan	20 Buku	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber dana Non APBK	93 Persen	330,892,225	486,750,838	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
											Jumlah Dokumen Rencana Usulan APBA/APBN	15 Buk						BAPPEDA			
											Jumlah Dokumen RK DAK	10 Buku						BAPPEDA			
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Laporan pengelolaan e-planning SIPD Kota Lhokseumawe	5 Laporan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber dana Non APBK	93 Persen	230,889,200	265,522,580	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	20 Buku	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber dana Non APBK	93 Persen	180,700,000	207,805,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													257,682,068	296,334,378		BAPPEDA
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPK	10 Buku	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	93 Persen	86,964,600	100,009,290	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	Jumlah Buku Laporan Monitoring Pembangunan	10 Buku	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	93 Persen	170,717,468	196,325,088	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
											Jumlah Buku Laporan Sismontepra	10 Buku						BAPPEDA			
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													3,216,584,460	3,791,972,761		BAPPEDA
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													516,665,410	638,131,806		BAPPEDA
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	43,055,451	53,177,650	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	23,204,202	33,326,401	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	50,430,200	60,552,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	55,531,950	65,654,150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJP, RPJMD, dan RKPD)	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	50,528,845	66,828,845	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	75,428,967	105,556,565	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	87,956,950	105,156,950	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	130,528,845	147,878,845	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										1,349,919,050	1,498,140,955		BAPPEDA
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Buku LP2KD, RIPDDA dan Buku Surve Potensi Investasi	30 buku	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 Persen	375,700,000	413,270,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi	12 Kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 Persen	240,378,350	264,416,185	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 Persen	233,840,700	265,454,770	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Buku Penyusunan Strategis Kemandirian dan Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe	10 Buku	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 Persen	300,000,000	333,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 Persen	100,000,000	111,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Buku Review Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	10 Buku	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 Persen	100,000,000	111,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										1,350,000,000	1,655,700,000		BAPPEDA
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Buku Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10 Buku	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	195,000,000	229,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12 Kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	89,000,000	118,350,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Buku Rumah Tidak Layak Huni dan Layak Huni; Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh; Survey Bangunan Negara; Land Banking	20 Buku	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	550,000,000	639,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya	10 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	75,000,000	96,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	64,500,000	79,175,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan					
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Frekuensi Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya	12 Kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	95,000,000	129,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	10 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	106,500,000	125,675,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilavahan	10 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 Persen	175,000,000	238,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										693,410,000	838,520,500		BAPPEDA	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										693,410,000	838,520,500		BAPPEDA	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										373,750,000	433,812,500		BAPPEDA	
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	60 Persen	Jumlah Buku Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	20 Buku	Meningkatnya akuntabilitas data kelitbangan dan peraturan	95 Persen	40,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	60 Persen	Rentang Waktu Pengelolaan Data Melalui Website Bappeda	12 Bulan	Meningkatnya akuntabilitas data kelitbangan dan peraturan	95 Persen	65,000,000	74,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	60 Persen	Jumlah Laporan e-database Informasi Pembangunan Daerah	15 Laporan	Meningkatnya akuntabilitas data kelitbangan dan peraturan	95 Persen	268,750,000	309,062,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
											Jumlah Laporan Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah	5 Laporan					BAPPEDA		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										160,320,000	230,368,000		BAPPEDA	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	60 Persen	Jumlah Buku Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	25 Buku	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	20 Laporan	160,320,000	230,368,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										59,340,000	59,340,000		BAPPEDA	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	60 Persen	Jumlah Buku Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 Buku	Tersedianya data penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	25 Laporan	59,340,000	59,340,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BAPPEDA	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										100,000,000	115,000,000		BAPPEDA	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Inovasi daerah	Inovatif -	Frekwensi Pelaksanaan Sayembara Inovasi Daerah	1 Kali	Tersedianya data pengembangan inovasi dan teknologi di Daerah	1 Inovasi	100,000,000	115,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	BAPPEDA	
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										25,531,813,965	25,468,846,743		BPKD	
																			BPKD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										25,531,813,965	25,468,846,743		BPKD	
5	02				KEUANGAN										25,531,813,965	25,468,846,743		BPKD	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										15,611,589,865	15,615,126,154		BPKD	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,200,000	7,920,000		BPKD	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	Rencana Kerja SKPD yang Efektif dan Efisien	100%	1,200,000	1,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	Rencana Kerja SKPD yang Efektif dan Efisien	100%	1,200,000	1,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dok	Rencana Kerja SKPD yang Efektif dan Efisien	100%	1,200,000	1,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	Rencana Kerja SKPD yang Efektif dan Efisien	100%	1,200,000	1,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	Rencana Kerja SKPD yang Efektif dan Efisien	100%	1,200,000	1,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	1 Dok	Rencana Kerja SKPD yang Efektif dan Efisien	100%	1,200,000	1,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,124,757,865	11,137,233,652		BPKD
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang waktu pembayaran gaji, tunjangan dan upah pungut pajak daerah	14 bulan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	10,094,757,865	11,104,233,652	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Buku Laporan Keuangan Semesteran	3 Jenis Buku	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	30,000,000	33,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											286,098,600	294,708,460		BPKD
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	200,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Aplikasi Keuangan	200 Peserta	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	86,098,600	94,708,460	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,136,413,100	1,250,054,410		BPKD
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	5 jenis	Tersedianya dan Terdatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15,000,000	16,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	30 jenis	Tersedianya dan Terdatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2667 Porsi	Tersedianya dan Terdatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	80,000,000	88,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Barang yang dicetak dan digandakan	5 Jenis	Tersedianya dan Terdatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	40,000,000	44,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	Tersedianya dan Terdatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,280,000	2,508,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah	49 Kali	Tersedianya dan Terdatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	295,000,000	324,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah aplikasi yang dikelola	7 Aplikasi	Tersedianya dan Terdatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	604,133,100	664,546,410	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,825,263,300	470,166,932		BPKD
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	10 unit	Bertambahnya Barang Milik Daerah Yang Memadai	100%	278,263,300	306,089,630	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	BPKD
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah gedung kantor yang dibeli	1 gedung	Bertambahnya Barang Milik Daerah Yang Memadai	100%	1,500,000,000	-	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	BPKD
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5 jenis	Bertambahnya Barang Milik Daerah Yang Memadai	100%	47,000,000	164,077,302	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	BPKD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan																																													
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan																																													
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target																																												
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15			
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			1,786,557,000				1,965,212,700								BPKD																							
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman	700 Lembar	Lancarannya Kegiatan Operasional Administrasi Perkantoran	100%	5,000,000	5,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening	Lancarannya Kegiatan Operasional Administrasi Perkantoran	100%	498,400,000	548,240,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	1800 OB	Lancarannya Kegiatan Operasional Administrasi Perkantoran	100%	1,283,157,000	1,411,472,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
											Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	600 OB					BPKD																																										
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			445,300,000				489,830,000								BPKD																							
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (7 Unit x 12 Bulan)	84 UB	Bertambahnya Umur Ekonomis Barang Milik Daerah	100%	150,000,000	165,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	Bertambahnya Umur Ekonomis Barang Milik Daerah	100%	201,500,000	221,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan pengadaan gedung kantor	5 Jenis	Bertambahnya Umur Ekonomis Barang Milik Daerah	100%	83,800,000	92,180,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 Jenis	Bertambahnya Umur Ekonomis Barang Milik Daerah	100%	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																			5,382,572,600				4,726,494,227								BPKD																							
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																			2,859,546,100				1,951,165,077								BPKD																							
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	85,000,000	93,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	78,000,000	85,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	34 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	55,000,000	60,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan yang diverifikasi	34 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	55,000,000	60,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	34 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	55,000,000	60,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	34 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	55,000,000	60,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen Qanun APBK dan Perwal Penjabaran APBK	2 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	145,000,000	159,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen Qanun Perubahan APBK dan Perwal Penjabaran Perubahan APBK	2 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	125,000,000	137,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen Pendukung Regulasi Penganggaran Daerah	4 Dok	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	540,000,000	399,664,367	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Rentang Waktu Pembinaan Penganggaran Daerah	12 Bln	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	1,666,546,100	833,200,710	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD																																									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen Standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dok	Tertibnya penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah	100%	105,000,000	115,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	Tertibnya penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah	100%	65,799,300	72,379,230	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah	12 Kali	Tertibnya penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah	100%	75,000,000	82,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										120,000,000	132,000,000		BPKD
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	Jumlah penyaluran bantuan keuangan	272 Kali	Tertatanya Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	120,000,000	132,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										2,367,355,300	2,638,147,227		BPKD
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah										2,367,355,300	2,638,147,227		BPKD
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah Buku HSPK	50 Buku	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100,000,000	115,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah buku SSH	50 buku	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	108,000,000	123,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah Buku RKBMD, RKPMD dan Perubahannya	110 Buku	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	70,000,000	82,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah Dokumen Asuransi Kendaraan, Pemeliharaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	20 Dok	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	503,955,700	559,351,270	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah Dokumen inventarisasi / pendataan tanah dibawah jalan dan sensus aset daerah	10 Dok	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	675,399,600	747,939,560	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah dokumen Sertifikasi Aset Daerah dan Surat Berharga Kendaraan Bermotor Milik Daerah	20 Dok	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	150,000,000	170,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian Barang Milik Daerah	4 Dok	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	55,000,000	64,556,397	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah Dokumen SK Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	4 Dok	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100,000,000	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD dan rekonsiliasi aset lancar	35 SKPD	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	170,000,000	187,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan BMD dan Status BMD	3 Dok	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	85,000,000	93,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	Jumlah SDM Pengelolaan Barang Milik Daerah	68 Org	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	350,000,000	385,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BPKD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan DPA-SKPD	5 Buku	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah buku LAKIP SKPD	10 Buku	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,712,303,269	8,242,474,057		BKPSDM
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3080 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	6,710,303,269	8,240,474,057	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Buku	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										2,000,000	2,000,000		BKPSDM
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Rentang Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										298,000,000	325,600,000		BKPSDM
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	170 Pasang	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	96,000,000	105,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	15 Kali	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	202,000,000	220,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										345,866,659	431,880,659		BKPSDM
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Peralatan Listrik dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan	80 Jenis	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	68,686,659	78,686,659	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang Disediakan	1650 Porsi	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	24,000,000	26,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan yang Diketak dan Digandakan	40 Jenis	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	20,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (1 Eks x 365 Hari)	365 Eks	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,140,000	1,254,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	5 Jenis	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3,040,000	3,540,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 Kali	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	229,000,000	300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										303,887,500	303,887,500		BKPSDM
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	2 Unit	Meningkatnya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	70,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Jenis	Meningkatnya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	233,887,500	233,887,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														469,002,500	469,002,500		BKPSDM
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang Dikirim	40 Surat	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,072,500	3,072,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang Dibayar	36 Rekening	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	155,000,000	155,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	348 OB	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	310,930,000	310,930,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
											Jumlah pejabat pengelola keuangan OPD	192 OB					BKPSDM				
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														155,800,000	166,380,000		BKPSDM
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 UB	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	33,300,000	36,630,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 UB	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	33,300,000	36,630,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	60,000,000	62,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	29,200,000	31,120,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														2,245,492,496	2,407,144,771		BKPSDM	
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														882,737,580	909,755,075		BKPSDM
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan/formasi ASN	1 Dokumen	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen	37,200,000	37,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Frekuensi pelaksanaan Pengadaan ASN Pemko Lhokseumawe	2 Kali	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen	770,312,180	770,312,180	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
											Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan sumpah ASN	1000 Orang					BKPSDM				
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Rentan Waktu Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	12 Bulan	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen	48,658,500	71,690,960	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah pelaksanaan evaluasi dan verifikasi tenaga honoror dan tenaga bakti	1 Kali	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen	26,566,900	30,551,935	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN														200,653,500	252,358,525		BKPSDM
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah berkas Kenaikan pangkat ASN yang dikelola	1000 Berkas	Terbnyra Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	100 Persen	95,000,000	130,857,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	8 Kali	Terbnyra Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	100 Persen	105,653,500	121,501,525	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan							
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN													660,712,116	722,478,541		BKPSDM
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan karya tulis ilmiah bagi tenaga fungsional tertentu	40 Orang	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Lhokseumawe	100 Persen	203,187,900	203,187,900	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
											Jumlah peserta bimbingan Teknis Training Of Trainer Tim Penilai Angka Kredit	100 Orang						BKPSDM			
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	1 Dokumen	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Lhokseumawe	100 Persen	287,336,400	330,436,860	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi	5 Dokumen	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Lhokseumawe	100 Persen	47,195,716	47,195,716	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti ujian dinas, penyesuaian ijazah	120 Orang	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Lhokseumawe	100 Persen	65,219,000	75,219,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
											Jumlah peserta tugas belajar, izin belajar yang dievaluasi dan diverifikasi	30 Orang						BKPSDM			
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah Dokumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Pemko Lhokseumawe	1 Dokumen	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Lhokseumawe	100 Persen	57,773,100	66,439,065	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													501,389,300	522,552,630		BKPSDM
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Kali	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemko Lhokseumawe	100 Persen	247,882,050	247,882,050	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah pelaksanaan pengelolaan dan peremajaan data penilaian SKP ASN yang dilaporkan dalam sistem e-lapkin	1 Kali	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemko Lhokseumawe	100 Persen	48,075,500	58,075,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah ASN masa purna bhakti yang difasilitasi	250 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemko Lhokseumawe	100 Persen	40,146,000	40,146,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	150 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemko Lhokseumawe	100 Persen	78,902,450	78,902,450	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah pelaksanaan Pemantauan disiplin ASN	4 Kali	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemko Lhokseumawe	100 Persen	35,883,300	39,471,630	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	Jumlah aparaturnya Pemko Lhokseumawe yang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)	350 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemko Lhokseumawe	100 Persen	50,500,000	58,075,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													3,605,667,800	450,000,000		BKPSDM
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													3,605,667,800	450,000,000		BKPSDM
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													3,605,667,800	450,000,000		BKPSDM
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15.29 Persen	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	14 Orang	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Lhokseumawe	100 Persen	3,605,667,800	450,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BKPSDM			
											Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Prajabatan	147 Orang						BKPSDM			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD		
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1				2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				INSPEKTORAT											13,096,861,418	13,096,861,418		INSPEK TORAT	
																		INSPEK TORAT	
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											13,096,861,418	13,096,861,418		INSPEK TORAT	
6	01			INSPEKTORAT DAERAH											13,096,861,418	13,096,861,418		INSPEK TORAT	
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											8,437,932,688	8,437,932,688		INSPEK TORAT	
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											16,000,000	16,000,000		INSPEK TORAT	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	4,000,000	4,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,955,000,000	5,255,000,000		INSPEK TORAT
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	696 OB	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	4,950,000,000	5,250,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	1,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											163,000,000	163,000,000		INSPEK TORAT
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Unit Mesin Absensi	1 Unit	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pakaian Dinas	80 Pasang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Auditor Yang Menyampaikan Penilaian DUPAK	35 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	98,000,000	98,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											604,000,000	604,000,000		INSPEK TORAT
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemasangan Instalasi Listrik	1 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis atk, alat kebersihan dan alat listrik yang tersedia	50 Jenis	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	130,000,000	130,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan Rumah tangga	20 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1100 Porsi	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	35,000,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	16,000,000	16,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan	24 Eksemplar	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jenis Bahan/Material	3 Jenis	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat kordinasi dan konsultasi	35 kali	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	350,000,000	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1,822,687,888	1,522,687,888		INSPEK TORAT
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Unit Mobil Jabatan	1 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang	84 Unit	515,000,000	515,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua	3 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang	84 Unit	75,000,000	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Unit Pengadaan	200 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang	84 Unit	1,232,687,888	932,687,888	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										545,244,800	545,244,800		INSPEK TORAT
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan Perangko, materiail dan Benda Pos Lainnya	500 lembar	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah tagihan rekening yang terbayar	36 Rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	140,000,000	140,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Pindah Kantor	1 Kali	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	228 OB	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	372,244,800	372,244,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
											Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	276 OB						INSPEK TORAT
											Penyediaan Sewa Gedung Kantor	1 Gedung						INSPEK TORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										330,000,000	330,000,000		INSPEK TORAT
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kenderaan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	12 UB	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kenderaan operasional yang dilakukan pemeliharaan	72 UB	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	180,000,000	180,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang di servis	420 UB	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 Kali	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	70,000,000	70,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	01	2.13		Penataan Organisasi										2,000,000	2,000,000		INSPEK TORAT
6	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Jawa Baru	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Kinerja	1 Dokumen	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										3,130,050,000	3,130,050,000		INSPEK TORAT
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										2,889,550,000	2,889,550,000		INSPEK TORAT
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 laporan	Terlaksannya Pengawasan Internal	7 Sub Kegiatan	305,000,000	305,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	77 Laporan	Terlaksannya Pengawasan Internal	7 Sub Kegiatan	460,000,000	460,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	176 Laporan	Terlaksannya Pengawasan Internal	7 Sub Kegiatan	435,500,000	435,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71 Laporan	Terlaksannya Pengawasan Internal	7 Sub Kegiatan	490,000,000	490,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	270 Laporan	Terlaksannya Pengawasan Internal	7 Sub Kegiatan	724,050,000	724,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	Jumlah laporan Kerjasama Pengawasan Internal	1 Laporan	Terlaksannya Pengawasan Internal	7 Sub Kegiatan	310,000,000	310,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	Jumlah temuan yang sudah ditindak lanjuti	100 Temuan	Terlaksannya Pengawasan Internal	7 Sub Kegiatan	165,000,000	165,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										240,500,000	240,500,000		INSPEK TORAT
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	Jumlah laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	Terlaksannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Sub Kegiatan	40,500,000	40,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	Jumlah laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	Terlaksannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Sub Kegiatan	200,000,000	200,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										1,528,878,730	1,528,878,730		INSPEK TORAT
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										794,989,000	794,989,000		INSPEK TORAT
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level Kapabilitas APIP	3 Level	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	55 Laporan	Terlaksanya perumusan kebijakan	2 Sub Kegiatan	320,000,000	320,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level Kapabilitas APIP	3 Level	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	205 Laporan	Terlaksanya perumusan kebijakan	2 Sub Kegiatan	474,989,000	474,989,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi										733,889,730	733,889,730		INSPEK TORAT
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	3 Level	Jumlah laporan Pendampingan Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Terlaksanya Pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	390,889,730	390,889,730	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	3 Level	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Terlaksanya Pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	112,000,000	112,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	3 Level	Jumlah laporan yang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi	10 Laporan	Terlaksanya Pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	3 Level	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Laporan	Terlaksanya Pendampingan dan Asistensi	4 Kegiatan	131,000,000	131,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	INSPEK TORAT
					KECAMATAN BANDA SAKTI										2,907,432,364	3,074,492,324		B. SAKTI
7					UNSUR KEWILAYAHAN										2,907,432,364	3,074,492,324		B. SAKTI
7	01				KECAMATAN										2,907,432,364	3,074,492,324		B. SAKTI
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										2,907,432,364	3,074,492,324		B. SAKTI
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,578,430,414	2,779,690,327		B. SAKTI
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Renja SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen perencanaan perangkat	100 Persen	1,210,000	1,331,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen perencanaan perangkat	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen perencanaan perangkat	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen perencanaan perangkat	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen perencanaan perangkat	100 Persen	2,000,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,935,038,414	2,128,542,255		B. SAKTI
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah ASN	378 OB	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	100 Persen	1,935,038,414	2,128,542,255	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000		B. SAKTI
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75 Stel	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										94,140,000	116,337,752		B. SAKTI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Jenis 12 Unit	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 Persen	22,000,000	33,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. SAKTI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	483 Kotak	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 Persen	6,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan diandakan	6 Jenis	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 Persen	10,000,000	15,437,752	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah surat kabar yang tersedia	365 Eks	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 Persen	1,140,000	2,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah hari pelaksanaan Pameran	6 Hari	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 Kali	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										15,000,000	10,000,000		B. SAKTI
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	8 Jenis	Kelancaran administrasi perkantoran	100 Persen	15,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										393,342,000	397,675,050		B. SAKTI
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah materiail yang diperlukan	216 Lembar	Terlaksanya kelancaran administrasi kantor	100 Persen	999,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah rekening yang dibayar	60 rekening	Terlaksanya kelancaran administrasi kantor	100 Persen	57,000,000	59,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah jasa pegawai tidak tetap (45 Orang x 12 Bulan)	540 OB	Terlaksanya kelancaran administrasi kantor	100 Persen	335,343,000	335,275,050	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										81,700,000	65,804,270		B. SAKTI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	12 UB	Meningkatnya kinerja aparatur dalam tugas kedinasan	100 Persen	25,700,000	23,804,270	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 ruang	Meningkatnya kinerja aparatur dalam tugas kedinasan	100 Persen	50,000,000	35,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	Meningkatnya kinerja aparatur dalam tugas kedinasan	100 Persen	6,000,000	7,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target	Prioritas Pembangunan Nasional
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											244,330,000	208,641,997		B. SAKTI
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											157,247,000	131,548,400		B. SAKTI
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah hari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Hari	Tercapainya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen	31,343,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	Jumlah hari pelaksanaan MTQ	5 Malam	Tercapainya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 Persen	125,904,000	111,548,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. SAKTI
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											10,220,000	10,000,000		B. SAKTI
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Frekuensi penyelenggaraan pembinaan PKK Gampong	4 Kali	Meningkatnya pelatihan/ketrampilan dan	100 Persen	10,220,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	03	2.04	Pemberdayaan Mukim											76,863,000	67,093,597		B. SAKTI
7	01	03	2.04	02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa mukim	120 OB	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah mukim dan	100 Persen	66,863,000	67,093,597	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	03	2.04	04	Pelantikan Imeum Mukim	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	Jumlah hari pelaksanaan pemilihan dan pelantikan mukim	2 Hari	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah mukim dan muspika	100 Persen	10,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											8,295,000	10,000,000		B. SAKTI	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											8,295,000	10,000,000		B. SAKTI
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan	12 Bulan	Frekuensi pelaksanaan kegiatan ketertiban dan	8 Kali	Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat di	100 Persen	8,295,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											36,000,000	36,000,000		B. SAKTI	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											36,000,000	36,000,000		B. SAKTI
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Penyelenggaraan	12 Bulan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Musyawarah	36 OB	Lancarnya koordinasi musyawarah pimpinan	100 Persen	36,000,000	36,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											40,376,950	40,160,000		B. SAKTI	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											25,216,950	25,000,000		B. SAKTI
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 gampong	Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah mukim dan gampong	18 Gampong	Terciptanya koordinasi antara camat dan masyarakat	100 Persen	25,216,950	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. SAKTI
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											15,160,000	15,160,000		B. SAKTI
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	18 gampong	Frekuensi koordinasi camat dan masyarakat (saweu dan masyarakat)	8 Kali	Terciptanya koordinasi antara camat dan masyarakat	100 Persen	15,160,000	15,160,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	B. SAKTI
															2,510,039,526	2,632,179,704		BLANG MANGAT
																	BLANG MANGAT	
7															2,510,039,526	2,632,179,704		BLANG MANGAT
7	01														2,510,039,526	2,632,179,704		BLANG MANGAT
7	01	01													2,147,286,607	2,322,456,103		BLANG MANGAT
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,200,000	1,331,000		BLANG MANGAT
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Renja dan Buku Renstra SKPD	20 Buku	Tersedianya Pedoman Kerja Kantor Camat Blang Mangat	100%	1,200,000	1,331,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											12,076,400	12,076,400		BLANG MANGAT
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyusunan RKA SKPD	20 Buku	Tersedianya Pedoman Kerja Kantor Camat Blang Mangat	100%	3,338,200	3,338,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyusunan Perubahan RKA SKPD	10 Buku	Tersedianya Pedoman Kerja Kantor Camat Blang Mangat	100%	2,700,000	2,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyusunan DPA SKPD	20 Buku	Tersedianya Pedoman Kerja Kantor Camat Blang Mangat	100%	3,338,200	3,338,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA SKPD	10 Buku	Tersedianya Pedoman Kerja Kantor Camat Blang Mangat	100%	2,700,000	2,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,504,586,822	1,694,504,816		BLANG MANGAT
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bulan x 33	462 OB	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Baik	100%	1,499,586,822	1,689,504,816	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan	2 Kali	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Baik	100%	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										60,000,000	60,000,000		BLANG MANGAT
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang di adakan	80 Stel	Kelancaran Administrasi Kepegawaian Kantor Camat	100%	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang di Data	1 Kali	Kelancaran Administrasi Kepegawaian Kantor Camat	100%	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi	1 Kali	Kelancaran Administrasi Kepegawaian Kantor Camat	100%	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										109,140,000	111,643,266		BLANG MANGAT
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang di sediakan	48 Jenis	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	22,000,000	22,363,266	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BLANG MANGAT
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	18 Jenis						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Makanan dan Minuman yang di sediakan	586 Kotak	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	6,000,000	7,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Jenis Laporan yang di Cetak dan Gandakan	8 Jenis	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-	365 Eks	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	1,140,000	2,280,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Daerah	6 hari	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	20 Kali	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										16,505,560	6,132,116		BLANG MANGAT
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di sediakan	30 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Melakukan	95%	16,505,560	6,132,116	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										397,077,825	392,008,505		BLANG MANGAT
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya yang	192 Lembar	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik	100%	999,000	1,620,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Rekening yang dibayar	72 Rekening	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik	100%	65,000,000	73,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pegawai Jasa Tidak Tetap	636 OB	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik	100%	331,078,825	316,888,505	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										46,700,000	46,700,000		BLANG MANGAT
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Mobil Jabatan yangdi Pelihara	12 UB	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90%	25,700,000	25,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang di Pelihara	2 Ruang	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90%	15,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di	16 Unit	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90%	6,000,000	6,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										5,000,000	5,000,000		BLANG MANGAT
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										5,000,000	5,000,000		BLANG MANGAT
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penyelenggaraan	12 Bulan	Jumlah Kunjungan Porcospinda / DPRK	3 Kali	Adanya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	100%	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										271,217,629	240,218,501		BLANG MANGAT	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										119,809,900	75,000,000		BLANG MANGAT	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Hari	Terlaksananya Kegiatan Masyarakat di Tingkat	100%	34,809,900	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	Jumlah Hari Pelaksanaan MTQ Jumlah Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	5 Hari 2 Jenis	Terlaksananya Kegiatan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	85,000,000	55,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BLANG MANGAT
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										10,300,000	10,000,000		BLANG MANGAT	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah Pembinaan PKK Gampong yang diselenggarakan	5 Kali	Meningkatnya Pelatihan/Ketrampilan dan	100%	10,300,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	03	2.04	Pemberdayaan Mukim										141,107,729	155,218,501		BLANG MANGAT	
7	01	03	2.04	02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah Jasa Aparatur Pemerintah Mukim (14 Org x	168 OB	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Mukim	100%	141,107,729	155,218,501	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										15,000,000	15,000,000		BLANG MANGAT	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										15,000,000	15,000,000		BLANG MANGAT	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	12 Bulan	Jumlah Penertiban dalam Wilayah Kecamatan Blang	2 Kali	Meningkatnya Ketertiban dalam lingkungan Masyarakat	100%	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	12 Bulan	Jumlah Pengajian Kantor Camat Blang Mangat	11 Kali	Meningkatnya Ketertiban dalam lingkungan Masyarakat	100%	5,000,000	5,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										10,000,000	10,000,000		BLANG MANGAT	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										10,000,000	10,000,000		BLANG MANGAT	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Penyelenggaraan	12 Bulan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Musyawarah	36 OB	Terlaksananya Koordinasi Musyawarah Pimpinan	100%	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										61,535,290	39,505,100		BLANG MANGAT	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										61,535,290	39,505,100		BLANG MANGAT	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22 gampong	Jumlah Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Mukim dan Gampong	22 Gampong 22 Gampong	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	25,350,640	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	BLANG MANGAT
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	22 gampong	Jumlah Pemilihan Kepala Desa	3 Keuchik	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	22 gampong	Jumlah Kegiatan Saweu Gampong	22 Gampong	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	26,184,650	14,505,100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	BLANG MANGAT
				KECAMATAN MUARA SATU										2,551,899,684	2,551,899,684		M. SATU	
7				UNSUR KEWILAYAHAN										2,551,899,684	2,551,899,684		M. SATU	
7	01			KECAMATAN										2,551,899,684	2,551,899,684		M. SATU	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,233,548,140	2,233,548,140		M. SATU	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,198,240	1,198,240		M. SATU	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Renja SKPD	10 Buku	Tertibnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	95 Persen	1,198,240	1,198,240	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,076,400	12,076,400		M. SATU	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku RKA-SKPD	10 Buku	Tertibnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	95 Persen	2,700,000	2,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021		Prakiraan Maju Tahun 2022		Keterangan		OPD
												Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan RKA-SKPD	10 Buku	Tertibnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	95 Persen	2,700,000	2,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku DPA-SKPD	20 Buku	Tertibnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	95 Persen	3,338,200	3,338,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan DPA-SKPD	20 Buku	Tertibnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	95 Persen	3,338,200	3,338,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,525,125,000	1,525,125,000		M. SATU				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (20 Orang x 14 Bulan)	280 OB	Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	1,525,125,000	1,525,125,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	M. SATU				
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											50,000,000	50,000,000		M. SATU				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pakaian KORPRI	62 Pasang 62 Pasang	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	95 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	M. SATU				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											99,140,000	99,140,000		M. SATU				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah penyediaan Peralatan Kantor dan Alat Tulis Kantor	22 Jenis	Kelancaran Administrasi Kantor	85 Persen	22,000,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	240 Kotak	Kelancaran Administrasi Kantor	85 Persen	6,000,000	6,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Jenis	Kelancaran Administrasi Kantor	85 Persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	365 Exsamlpar	Kelancaran Administrasi Kantor	85 Persen	1,140,000	1,140,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 Kali	Kelancaran Administrasi Kantor	85 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											26,000,000	26,000,000		M. SATU				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	6 Unit	Terciptanya Kinerja yang Baik	95 Persen	26,000,000	26,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											369,373,000	369,373,000		M. SATU				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah penyediaan benda pos	166 Lembar	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	95 Persen	996,000	996,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air,	96 Rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	95 Persen	88,117,000	88,117,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (39 Orang x 12 Bulan) Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (9 Orang x 12 Bulan)	468 OB 108 OB	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	95 Persen	280,260,000	280,260,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	M. SATU				
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											150,635,500	150,635,500		M. SATU				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	12 Bulan	Terciptanya Kinerja yang baik	95 persen	25,700,000	25,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor yangdi Rehab/dijelihara	12 Bulan	Terciptanya Kinerja yang baik	95 persen	121,135,500	121,135,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	12 Bulan	Terciptanya Kinerja yang baik	95 persen	3,800,000	3,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											208,611,344	208,611,344		M. SATU					
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											20,043,200	20,043,200		M. SATU				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Rentang Waktu Pelaksanaan Musrenbang Tingkat	1 Hari	Meningkatnya Koordinasi antara Masyarakat	95 Persen	20,043,200	20,043,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											117,407,940	117,407,940		M. SATU				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Rentang Waktu Pelaksanaan MTQ	5 Hari	Meningkatnya Koordinasi antara Masyarakat	95 Persen	117,407,940	117,407,940	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											13,519,454	13,519,454		M. SATU				
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Rentang Waktu Penyelenggaraan/Pembinaan	11 Kali	Meningkatnya Ketrampilan Masyarakat Gampong	95 Persen	13,519,454	13,519,454	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	03	2.04	Pemberdayaan Mukim											57,640,750	57,640,750		M. SATU				
7	01	03	2.04	02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Rentang Waktu Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Mukim	98 Persen	57,640,750	57,640,750	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											8,000,000	8,000,000		M. SATU					
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											8,000,000	8,000,000		M. SATU				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penyelenggaraan	12 Bulan	Frekuensi Pelaksanaan Penertiban dan Ketentraman	6 Kali	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Mukim	100 Persen	8,000,000	8,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											75,500,000	75,500,000		M. SATU					
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											75,500,000	75,500,000		M. SATU				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Penyelenggaraan	12 Bulan	Rentang Waktu Pelaksanaan Koordinasi Musyawarah	12 Kali	Terjalinnya Harmonisasi Hubungan Forum Koordinasi	12 Bulan	75,500,000	75,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											26,240,200	26,240,200		M. SATU					
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											14,095,500	14,095,500		M. SATU				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	11 gampong	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB	11 Gampong	Tercapainya pengawasan Pemerintahan Desa	95 Persen	14,095,500	14,095,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7 01 06 2.01 17	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										12,144,700	12,144,700		
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	11 gampon	Rentang Waktu Koordinasi Langsung antara Camat dan	12 Kali	Tercapainya pengawasan Pemerintahan Desa	95 Persen	12,144,700	12,144,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. SATU
											2,897,239,134	2,894,934,134		M. DUA
7 01 01 01 2.01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN										2,897,239,134	2,894,934,134		M. DUA
7 01 01 01 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,897,239,134	2,894,934,134		M. DUA
7 01 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,544,789,138	2,542,484,138		M. DUA
7 01 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Renja SKPD	10 Buku	Tertibnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	95 persen	1,165,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Penyusunan RKA-SKPD	10 Buku	Tertibnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	95 persen	2,700,000	2,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,300,000	9,300,000		M. DUA
7 01 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	10 Buku	Tertibnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	95 persen	2,700,000	2,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Penyusunan DPA-SKPD	20 Buku	Tertibnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	95 persen	3,300,000	3,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Buku Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20 Buku	Tertibnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	95 persen	3,300,000	3,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,874,952,192	1,874,952,192		M. DUA
7 01 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (30 orang x 14	420 OB	Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	1,874,952,192	1,874,952,192	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000		M. DUA
7 01 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu dan Jumlah	69 Pcs	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	95 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										98,306,000	97,166,000		M. DUA
7 01 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	20 Jenis	Lancarnya Pelayanan Administrasi	85 Persen	21,166,000	21,166,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	M. DUA
							Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis						
7 01 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	240 Kotak	Lancarnya Pelayanan Administrasi	85 Persen	6,000,000	6,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	Lancarnya Pelayanan Administrasi	85 Persen	10,000,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	365 Eksamplar	Lancarnya Pelayanan Administrasi	85 Persen	1,140,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	15 Kali	Lancarnya Pelayanan Administrasi	85 Persen	60,000,000	60,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										40,000,000	40,000,000		M. DUA
7 01 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	6 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Melakukan	95 Persen	40,000,000	40,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										371,698,400	371,698,400		M. DUA
7 01 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Benda Pos	166 Lembar	Meningkatnya Kinerja Perkantoran	95 Persen	996,000	996,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	96 Rekening	Meningkatnya Kinerja Perkantoran	95 Persen	67,165,000	67,165,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (50 Orang x 12 Bulan)	600 OB 108 OB	Meningkatnya Kinerja Perkantoran	95 Persen	303,537,400	303,537,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										96,667,546	96,667,546		M. DUA
7 01 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mobil	80 Persen	25,700,000	25,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mobil	80 Persen	67,667,546	67,667,546	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	M. DUA
7 01 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mobil	80 Persen	3,300,000	3,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										265,192,846	265,192,846		M. DUA
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										23,308,000	23,308,000		M. DUA
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 Hari	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	95 Persen	23,308,000	23,308,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										117,700,000	117,700,000		M. DUA
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah Hari Pelaksanaan MTQ	5 Hari	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	95 Persen	117,700,000	117,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										8,300,000	8,300,000		M. DUA
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Rentang Waktu Penyelenggaraan/Pembinaan	5 Kali	Peningkatan Pelatihan/ Ketrampilan dan Pembinaan	95 Persen	8,300,000	8,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7	01	03	2.04		Pemberdayaan Mukim						115,884,846	115,884,846		M. DUA			
7	01	03	2.04	02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Pemberdayaan	12 Bulan	Jumlah Jasa Aparatur Pemerintahan	120 OB	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							22,590,050	22,590,050		M. DUA		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							22,590,050	22,590,050		M. DUA		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kelurahan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong	8 Kali	Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong	100 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	M. DUA	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							23,500,000	23,500,000		M. DUA		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							23,500,000	23,500,000		M. DUA		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Penyelenggaraan	12 Bulan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Musyawarah	94 OB	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							41,167,100	41,167,100		M. DUA		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							17,667,100	17,667,100		M. DUA		
7	01	06	2.01	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	17 gampon	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB	17 gampong	Meningkatkan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							23,500,000	23,500,000		M. DUA		
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Penataan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	17 gampon	Silaturahmi Antara Aparatur Pemerintah dengan	17 gampong	Meningkatkan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	M. DUA	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							40,130,798,154	5,761,715,138		KESBANG POL		
																KESBANG POL	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							40,130,798,154	5,761,715,138		KESBANG POL		
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							40,130,798,154	5,761,715,138		KESBANG POL		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,657,415,579	2,748,743,572		KESBANG POL		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,400,000	8,956,920		KESBANG POL		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja, Renja Perubahan, RKT, dan TAPKIN Perangkat Daerah	20 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL	
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RKA-SKPD	5 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL	
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan RKA-SKPD	5 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL	
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPA-SKPD	12 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL	
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan DPA-SKPD	12 Buku	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan LKIP	5 Laporan	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,968,967,629	2,072,047,394		KESBANG POL		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	304 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	180 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Persen	98,692,200	100,466,422	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										36,000,000	39,600,000		KESBANG POL
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	23 Pasang	Meningkatnya SDM Aparatur Perencana yang Handal	98 Persen	36,000,000	39,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										171,098,450	233,413,258		KESBANG POL
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Peralatan Listrik dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan	80 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	55,258,450	71,133,258	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang Disediakan	735 Kotak	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	14,700,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2 Eks x 365)	730 Eks	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	1,140,000	2,280,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60 Kali	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	100,000,000	130,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										370,349,500	292,000,000		KESBANG POL
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang Dikirim	30 Surat	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	1,500,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Rekening yang Dibayar	60 Rekening	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	9,369,500	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Tenaga Bakti Daerah (86 Org x 12 Bulan)	1032 OB	Lancarnya Administrasi Perkantoran	95 Persen	359,480,000	275,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										102,600,000	102,726,000		KESBANG POL
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 Bulan)	12 UB	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	29,300,000	26,632,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (1 unit x 12 Bulan)	12 UB	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	23,500,000	19,974,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	3,000,000	9,320,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Jenis	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	95 Persen	46,800,000	46,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										705,674,800	669,222,000		KESBANG POL
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										705,674,800	669,222,000		KESBANG POL
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	2 Hari	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	95 Persen	24,374,800	167,297,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	100 Persen	Jumlah Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Lhokseumawe	2 Kali	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	95 Persen	16,200,000	119,656,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan toleransi, rasa solidaritas dalam kehidupan beragama dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	2 Hari	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	95 Persen	30,100,000	312,613,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ORMAS, ORSOS dan LSM	12 Kali	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	95 Persen	20,000,000	69,656,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	100 Persen	Jumlah Bantuan Dana Kegiatan SDM dan Peringatan Hari	1 Kali	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	95 Persen	615,000,000	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										35,537,500,000	773,192,800		KESBANG POL
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										35,537,500,000	773,192,800		KESBANG POL
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	persentase memilih terhadap pemilu dan pilkada	0 Persen	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Umum, Penyuluhan tentang tahapan dan tujuan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu	5 Hari	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Tujuan Pemilu	93 Persen	195,000,000	230,276,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	persentase memilih terhadap pemilu dan pilkada	0 Persen	Jumlah Operasional KIP Kota Lhokseumawe	12 Kali	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Tujuan Pemilu	93 Persen	35,190,000,000	250,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	persentase memilih terhadap pemilu dan pilkada	0 Persen	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi UU PEMILU dan Penyuluhan Perilaku Netralitas dalam Pemilu bagi Aparatur Pemerintah	2 Hari	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Tujuan Pemilu	93 Persen	57,000,000	172,916,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	persentase memilih terhadap pemilu dan pilkada	0 Persen	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penegak Hukum Pemilu dan Forum-forum Diskusi Politik	2 Kali	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Tujuan Pemilu	93 Persen	70,500,000	45,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	persentase memilih terhadap pemilu dan pilkada	0 Persen	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum bagi Pemilih Pemula	1 Hari	Terciptanya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Tujuan Pemilu	93 Persen	25,000,000	75,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										160,257,800	111,156,000		KESBANG POL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	OPD	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								160,257,800	111,156,000		KESBANG POL	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	90 Persen	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi ORMAS, LSM, Yayasan dan Lembaga Lainnya	1 Hari	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	90 Persen	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi ORMAS, ORSOS dan LSM dan Pelaksanaan Verifikasi Bantuan PARPOL	15 Kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	90 Persen	Jumlah Pelaksanaan Hibah LPN	1 Kali	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								435,256,025	668,503,778		KESBANG POL	
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								435,256,025	668,503,778		KESBANG POL	
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan pembinaan penyakit masyarakat	85 Persen	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Forum Umat Beragama (FKUB)	2 Hari	Berkurangnya Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba serta Praktek Prostitusi	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Cakupan pembinaan penyakit masyarakat	85 Persen	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba serta Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi	2 Hari	Berkurangnya Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba serta Praktek Prostitusi	95 Persen	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											634,693,950	790,896,988		KESBANG POL
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											634,693,950	790,896,988		KESBANG POL
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Pemantapan Tugas Inteligen Kewaspadaan Dini Masyarakat Terhadap Gangguan Konflik Bagi aparaturnya dan Masyarakat	3 Hari	Terciptanya Kewaspadaan Dini Terhadap Gangguan Konflik	95 Persen	123,446,300	135,790,930	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Lhokseumawe	2 Hari	Terciptanya Kewaspadaan Dini Terhadap Gangguan Konflik	95 Persen	145,832,325	208,555,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Tentang Orang Asing/Tenaga Kerja Asing	1 Hari	Terciptanya Kewaspadaan Dini Terhadap Gangguan Konflik	95 Persen	90,283,000	185,670,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	1 Hari	Terciptanya Kewaspadaan Dini Terhadap Gangguan Konflik	95 Persen	60,000,000	128,735,300	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Tim Kewaspadaan dini Terhadap Gangguan Konflik Bagi aparaturnya dan Masyarakat, Pelaksanaan Workshop Hoaks dan Ancaman Disintegrasi Bangsa	4 Kali	Terciptanya Kewaspadaan Dini Terhadap Gangguan Konflik	95 Persen	215,132,325	132,145,558	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESBANG POL
				SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA											3,402,109,599	3,883,298,373		MPU
9				UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN											3,402,109,599	3,883,298,373		MPU
9	01			KEKHUSUSAN ACEH											3,402,109,599	3,883,298,373		MPU
9	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,768,646,069	3,226,575,873		MPU
9	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,200,000	1,331,000		MPU
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja	5 Buku	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	100 Persen	1,200,000	1,331,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,071,827,144	1,213,927,933		MPU
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	196 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,071,827,144	1,213,927,933	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											50,000,000	50,000,000		MPU
9	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas Hari hari tertentu	28 Orang	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya	100 Persen	50,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											168,475,500	474,690,099		MPU
9	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah alat tulis Kantor	28 jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	50,335,500	56,437,733	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
											Jumlah jenis alat Kantor peralatan listrik dan bahan pembersih yang disediakan	60 jenis						
9	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	592 Porsi	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	27,000,000	41,668,075	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	5 Jenis	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	10,000,000	12,061,522	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang undangan	365 Eks	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	1,140,000	1,440,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 Kali	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	80,000,000	363,082,769	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,394,543,425	1,421,126,841		MPU
9	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Surat yang dikirim	20 Surat	Lancarnya Administrasi Perkantoran	98 Persen	1,000,000	1,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	12 Rekening	Lancarnya Administrasi Perkantoran	98 Persen	14,086,000	25,403,466	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	132 OB	Lancarnya Administrasi Perkantoran	98 Persen	1,379,457,425	1,394,723,375	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
										Jumlah Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan (30 Orng x 12 Bulan)	360 OB							
										Jumlah Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan (4 orang x 12 Bulan)	48 OB							
										Jumlah Tenaga Adm, tenaga THL (14 orang x 12 Bulan)	168 OB							
9	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											82,600,000	65,500,000		MPU
9	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 Bulan)	12 UB	Terjaganya nilai ekonomis barang milik Daearah	95 Persen	25,700,000	15,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan/ Operasional (1 unit x 12 Bulan)	12 UB	Terjaganya nilai ekonomis barang milik Daearah	95 Persen	53,900,000	46,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor dan mesin lainnya	10 Jenis	Terjaganya nilai ekonomis barang milik Daearah	95 Persen	3,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	03		PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH											633,463,530	656,722,500		MPU
9	01	03	2,01	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama											609,200,000	620,120,000		MPU
9	01	03	2,01	03	Pendidikan Kader Ulama	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama	50 Persen	Jumlah peserta pendidikan kader Ulama	30 Orang	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	500,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	03	2,01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama	50 Persen	Jumlah peserta Muzakkarah	100 Orang	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	43,200,000	47,520,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU
9	01	03	2,01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama	50 Persen	Jumlah penerbitan Buletin Jumatan	30200 Eks	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	40,500,000	44,550,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	MPU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan																																																									
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD																																																								
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																																																												
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15				
9	01	03	2,01	11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama	50 Persen	Frekuensi Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	30 Orang	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	25,500,000	28,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	MPU																																																								
9	01	03	2,02		Silaturahmi Ulama- Ulama										24,263,530	36,602,500		MPU																																																								
9	01	03	2,02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama	50 Persen	Jumlah kasus yang tercatat	36 kasus	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi para Ulama	90 Persen	24,263,530	36,602,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	MPU																																																								
					SEKRETARIAT BAITUL MAL										10,090,887,089	14,510,991,605		B. MAL																																																								
																		B. MAL																																																								
9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN										10,090,887,089	14,510,991,605		B. MAL																																																								
9	01				KEKHUSUSAN ACEH										10,090,887,089	14,510,991,605		B. MAL																																																								
9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,542,263,089	2,446,430,860		B. MAL																																																								
9	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,200,000	2,900,000		B. MAL																																																								
9	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RENJA dan RENSTRA SKPD	2 Dokumen	Terciptanya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD	95 Prosen	2,200,000	2,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,053,000,000	1,052,302,590		B. MAL																																																								
9	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	196 OB	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Prosen	1,052,000,000	1,051,102,590	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 Prosen	1,000,000	1,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										123,400,000	130,300,000		B. MAL																																																								
9	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	184 Pasang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	113,400,000	119,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Kali	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	10,000,000	11,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										144,644,089	126,463,700		B. MAL																																																								
9	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan serta ATK kantor	53 Jenis	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	100 Prosen	47,684,000	28,323,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman	828 Kotak	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	100 Prosen	6,000,000	7,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah bahan yang akan dicetak dan digandakan	8 Jenis	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	100 Prosen	9,820,089	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah bahan bacaan	365 Eks	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	100 Prosen	1,140,000	1,140,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	23 OK	Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor	100 Prosen	80,000,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										411,000,000	357,000,000		B. MAL																																																								
9	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional dan sepda motor	5 Unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	396,000,000	280,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pengadaan mebel	1 Jenis	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	15,000,000	77,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								
9	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										733,469,000	703,604,570		B. MAL																																																								
9	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah materiai yang tersedia	217 Lembar	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90 Prosen	1,000,000	1,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	B. MAL																																																								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah tagihan telepon dan internet	24 Rekening Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90 Prosen	15,550,000	18,631,570	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. MAL
9	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jasa operasional pendampingan dana infaq	8 Jenis	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90 Prosen	84,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. MAL
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	516 OB	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90 Prosen	632,919,000	683,473,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. MAL
9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										74,550,000	73,860,000		B. MAL
9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 UB	Meningkatnya umur ekonomis dari pada kendaraan jabatan, kenderaan operasional lapangan danbangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Prosen	29,500,000	29,760,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. MAL
9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 UB	Meningkatnya umur ekonomis dari pada kendaraan jabatan, kenderaan operasional lapangan danbangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Prosen	34,000,000	37,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. MAL
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Jenis	Meningkatnya umur ekonomis dari pada kendaraan jabatan, kenderaan operasional lapangan danbangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Prosen	5,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. MAL
9	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Jenis	Meningkatnya umur ekonomis dari pada kendaraan jabatan, kenderaan operasional lapangan danbangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	100 Prosen	6,050,000	6,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	B. MAL
9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL										7,548,624,000	12,064,560,745		B. MAL
9	01	04	2.01		Pengelolaan ZISWAF										36,750,000	40,425,000		B. MAL
9	01	04	2.01	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	Jumlah Buku Pendataan Verifikasi dan Evaluasi Mustahiq Penerima Bantuan Baitul Mal	10 Buku	Jumlah penerimaan ZISWAF	100 Prosen	36,750,000	40,425,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	B. MAL
9	01	04	2.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal										67,200,000	0		B. MAL
9	01	04	2.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi kesadaran ZISWAF	136 Peserta	Tumbuhnya kesadaran mustahiq untuk membayar ZISWAF ke Baitul Mal	90 Prosen	67,200,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	B. MAL
9	01	04	2.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF										7,444,674,000	12,024,135,745		B. MAL
9	01	04	2.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	Jumlah Pendistribusian ZIS Senif Fakir	1125 Mustahiq	Terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan kaum dhuafa	80 Prosen	675,000,000	1,350,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	B. MAL
9	01	04	2.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	Jumlah Pendistribusian ZIS Senif Miskin	300 Mustahiq	Terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan kaum dhuafa	80 Prosen	200,000,000	8,174,135,745	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	B. MAL
9	01	04	2.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	Jumlah Pendistribusian ZIS Senif Amilin	7 Senif	Terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan kaum dhuafa	80 Prosen	125,000,000	700,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	B. MAL
9	01	04	2.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	Jumlah pendistribusian ZIS senif infaq	2040 Mustahiq	Terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan kaum dhuafa	80 Prosen	6,444,674,000	1,800,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	B. MAL
					DINAS SYARIAT ISLAM DAN PEMDIDIKAN DAYAH										28.410.070.777	24.458.292.271		DSI-PD

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	OPD			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target		
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											14,125,845,100	7,654,866,577		DSI-PD
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											14,125,845,100	7,654,866,577		DSI-PD
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH											14,125,845,100	7,654,866,577		DSI-PD
1	01	07	2.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah											14,125,845,100	7,654,866,577		DSI-PD
1	01	07	2.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya status tipe Dayah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Yang mendapat Bantuan (APBK)	36 Jenis	Meningkatnya Pengelolaan pendidikan Dayah	100 Persen	5,381,000,000	6,950,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
										Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Yang mendapat Bantuan (OTSUS)	6 Jenis	DSI-PD							
1	01	07	2.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya status tipe Dayah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	Jumlah Kafilah Musabaqah Qiraatil Kutub	920 Kafilah	Meningkatnya Pengelolaan pendidikan Dayah	100 Persen	7,500,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
1	01	07	2.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya status tipe Dayah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	Jumlah Laporan Pendataan Balai Pengajian dan Dayah Kota Lhokseumawe	5 Laporan	Meningkatnya Pengelolaan pendidikan Dayah	100 Persen	75,000,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
1	01	07	2.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya status tipe Dayah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	Jumlah Pengadaan Kitab/ Buku Agama di Dayah	2 Jenis	Meningkatnya Pengelolaan pendidikan Dayah	100 Persen	12,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
1	01	07	2.01	12	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya status tipe Dayah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	Frekuensi Raker Pimpinan Dayah dan Guru Pengajian	2 kali	Meningkatnya Pengelolaan pendidikan Dayah	100 Persen	932,845,100	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
										Jumlah Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian yang berangkat Umrah	50 Orang	DSI-PD							
1	01	07	2.01	13	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Meningkatnya status tipe Dayah	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	Jumlah Pemberdayaan Badan Usaha Ekonomi Produktif Dayah	2 Dayah	Meningkatnya Pengelolaan pendidikan Dayah	100 Persen	225,000,000	389,866,577	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
										Jumlah Peserta Pelatihan Life Skill Santri	50 Peserta	DSI-PD							
9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN											14,284,225,677	16,803,425,694		DSI-PD
9	01				KEKHUSUSAN ACEH											14,284,225,677	16,803,425,694		DSI-PD
9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,206,925,677	3,429,442,187		DSI-PD
9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											12,000,000	18,000,000		DSI-PD
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Renja, Renja Perubahan	10 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku RKA- SKPD	3 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
9	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Perubahan RKA- SKPD	3 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
9	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku DPA-SKPD	15 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
9	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku PerubahanDPA- SKPD	15 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	
9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan LKJIP	5 Laporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen	2,000,000	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan							
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	OPD				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1,873,654,837	1,875,654,837		DSI-PD
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	378 OB	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	1,870,654,837	1,870,654,837	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Laporan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	1,500,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah laporan Realisasi Anggaran	4 Laporan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	1,500,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.03		Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													1,500,000	1,500,000		DSI-PD
9	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Persendian Dan BMD	1 Laporan	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95 Persen	1,500,000	1,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													95,790,000	144,390,000		DSI-PD
9	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pakaian Dinas khusus hari-hari tertentu	100 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	85 Persen	53,790,000	58,890,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
											Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	100 Orang						DSI-PD			
9	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	85 Persen	10,000,000	38,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyusunan Draf Peraturan Struktur UPTD Islamic Centre	20 Peserta	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	85 Persen	22,000,000	32,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
											Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	15 Peserta						DSI-PD			
9	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	85 Persen	10,000,000	15,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													189,940,000	165,678,821		DSI-PD
9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan Listrik	15 Jenis	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	1,500,000	1,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/alat-alat kebersihan	50 Jenis	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	26,000,000	24,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
											15 Jenis	DSI-PD									
9	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	1,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah porsi Makanan dan Minuman	900 Porsi	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	18,000,000	18,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	18,500,000	18,338,821	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	365 Eks	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	1,140,000	1,140,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Bahan Material/Pameran	5 Jenis	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	20,000,000	20,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	27 Kali	Tersedianya administrasi Umum	100 Persen	103,800,000	80,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													470.000.000	605.132.200		DSI-PD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah kendaraan Dinas atau Jabatan	1 Unit	Tersedianya Mobil Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung Gudang Kantor	88 Persen	175,000,000	197,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas /Operasional atau lapangan	2 Unit Roda Dua	Tersedianya Mobil Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung Gudang Kantor	88 Persen	225,000,000	298,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
											Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	1 Unit Pick Up						DSI-PD
9	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	Tersedianya Mobil Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung Gudang Kantor	88 Persen	70,000,000	110,132,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											493,150,000	547,537,329		DSI-PD
9	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Penyediaan Materai	300 Lembar	Tersedianya Jasa Pelayanan, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100 Persen	2,000,000	70,419,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
											Jumlah Surat yang dikirim	95 Surat						DSI-PD
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah rekening yang dibayar	36 RB	Tersedianya Jasa Pelayanan, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100 Persen	56,500,000	113,138,329	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor yan di Sewa	2 Unit	Tersedianya Jasa Pelayanan, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100 Persen	434,650,000	363,980,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
											Jumlah Penyediaan Jasa/Ikramiah Ustad Pengajian Rutin DSI PD	36 OB						DSI-PD
											Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	444 OB						DSI-PD
											Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai tidak Tetap	444 OB						DSI-PD
											Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang disediakan	240 OB						DSI-PD
9	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											68,890,840	69,549,000		DSI-PD
9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala/ Mobil jabatan	12 UB	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	32,800,000	30,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan Dinas/Operasional	36 UB	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	18,000,000	18,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan rutin/berika gedung kantor	1 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	13,090,840	13,099,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5,000,000	8,450,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	01	2.13	Penataan Organisasi											2,000,000	2,000,000		DSI-PD
9	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Belanja Operasional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Jumlah Buku Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	8 Buku	Tersedianya standar operasional prosudur	90 Persen	2,000,000	2,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH											11,077,300,000	13,373,983,507		DSI-PD	
9	01	02	2.01	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam											275,000,000	332,000,000		DSI-PD
9	01	02	2.01	01	Pelatihan Mawaris	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan mawaris bagi warga Kota Lhokseumawe dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga ahli faraidh	30 Peserta	Terlaksananya Kegiatan Wawasan Keislaman	90 Persen	75,000,000	85,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD
9	01	02	2.01	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Akhlak Remaja sesuai Syariat Islam pada Lembaga Pendidikan	65 Orang	Terlaksananya Kegiatan Wawasan Keislaman	90 Persen	100,000,000	120,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	OPD
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	01	02	2.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Siswa yang mengikuti TOT Pembinaan mental spiritual	60 Siswa	Terlaksananya Kegiatan Wawasan Keislaman	90 Persen	100,000,000	127,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran											2,952,800,000	3,547,833,425		DSI-PD
9	01	02	2.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Pembinaan Tilawatil Quan	220 Orang	Terciptanya generasi muda yang Islami	100 Persen	351,900,000	400,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.02	04	Pelaksanaan MTQ	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Kafilah dan Rombongan Pada MTQ	125 Orang	Terciptanya generasi muda yang Islami	100 Persen	2,600,900,000	3,147,833,425	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
											Provinsi Jumlah Kafilah MTQ Tingkat Kota Lhokseumawe	224 Orang						DSI-PD
9	01	02	2.04	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam											4,514,687,500	5,098,954,348		DSI-PD
9	01	02	2.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Rentang waktu Pembinaan Badan Kontak Majlis Taklim Kota Lhokseumawe	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dakwah dan Syiar Islam	100 Persen	670,187,500	670,187,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.04	05	Pelatihan Takmir Mesjid	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Takmir Masjid yang di latih	100 orang	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dakwah dan Syiar Islam	100 Persen	185,000,000	160,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.04	07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Aparat Gampong yang mengikuti Pelatihan Pembinaan Gampong Percontohan Svariah	100 Orang	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dakwah dan Syiar Islam	100 Persen	405,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.04	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana Masjid (APBK)	7 Jenis	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dakwah dan Syiar Islam	100 Persen	2,116,000,000	1,815,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
											Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana Masjid (Otsus)	2 Jenis						DSI-PD
											Rentang waktu Verifikasi Penerimaan bantuan Hibah dan Bansos	12 Bulan						DSI-PD
9	01	02	2.04	12	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Data Base Masjid, Meunasah dan Mushalla	100 Buku Data Base	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dakwah dan Syiar Islam	100 Persen	115,000,000	90,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang mendapat Bantuan	13 Jenis	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dakwah dan Syiar Islam	100 Persen	1,023,500,000	1,863,766,848	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.05	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam											1,889,500,000	2,145,263,334		DSI-PD
9	01	02	2.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah laporan monitoring evaluasi pelaksanaan Syariat Islam	4 Laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam di Tengah Masyarakat dan terciptanya Qari-qariah dan Hafizh	90 Persen	75,000,000	85,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.05	06	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	jumlah peserta pelatihan tajhiz mayat bagi warga kota Lhokseumawe	70 Orang	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam di Tengah Masyarakat dan terciptanya Qari-qariah dan Hafizh	90 Persen	90,000,000	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.05	07	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Frekuensi Raker Imam Gampong dan Dai"	2 Kali	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam di Tengah Masyarakat dan terciptanya Qari-qariah dan Hafizh	90 Persen	870,000,000	995,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
											Jumlah pengurus masjid, dan Petugas panitia Pembangunan	95 Orang						DSI-PD
9	01	02	2.05	08	Pembinaan Qari Qariah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Rentang waktu pembinaan Qari-qariah	12 Bulan	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam di Tengah Masyarakat dan terciptanya Qari-qariah dan Hafizh	90 Persen	285,000,000	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.05	09	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Hafizh-Hafizhah yang di bina	25 Orang	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam di Tengah Masyarakat dan terciptanya Qari-qariah dan Hafizh	90 Persen	569,500,000	615,263,334	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.06	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam											1,245,312,500	2,109,932,400		DSI-PD
9	01	02	2.06	03	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah Pembuatan Buku Nikah, KK dan Kependudukan Lainnya	282 Pasutri	Terwujudnya Pelaksanaan Syiar Islam	95 persen	400,000,000	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
9	01	02	2.06	05	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah draf rancangan qanun bidang Syariat Islam	2 Regulasi	Terwujudnya Pelaksanaan Syiar Islam	95 persen	145,000,000	155,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD
											Jumlah Pengadaan Buku Perundang-undangan Bidang Syariat Islam	50 Buku						DSI-PD
9	01	02	2.06	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Rentang Waktu Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	12 Bulan	Terwujudnya Pelaksanaan Syiar Islam	95 persen	150,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainq	DSI-PD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021	Prakiraan Maju Tahun 2022	Keterangan		OPD		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
9	01	02	2.06	07	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumlah pelaksanaan hari -hari besar Islam	6 hari	Terwujudnya Pelaksanaan Syiar Islam	95 persen	250,000,000	737,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
9	01	02	2.06	09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Frekuensi Raker Ikatan Persaudaraan Haji Kota Lhokseumawe	11 Kali	Terwujudnya Pelaksanaan Syiar Islam	95 persen	300,312,500	567,232,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
											Jumlah Jamaah Haji Kota Lhokseumawe	250 Orang						DSI-PD			
											Jumlah Pengajian Bulanan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	11 Kali						DSI-PD			
9	01	02	2.07	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah											200,000,000	140,000,000		DSI-PD			
9	01	02	2.07	03	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	Jumalh Pelaksanaan Zikir Tawajjuh	11 Kali	Terwujudnya masyarakat yang faham ilmu agama	90 Persen	200,000,000	140,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	DSI-PD			
											Jumlah Pelaksanaan Pengajian Rutin Masjid Agung	341 Kali						DSI-PD			

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Kinerja penyelenggaraan berdasarkan indikator dalam Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan capaian makro ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	DSI PD	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	57	0
	DSI PD	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam			70
2	DSI PD	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	59	0
3	B. MAL	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)	Rp (milyar)	9	8,8
4	MAA	Cakupan pembinaan adat Gampong	Jumlah gampong	68	0
5	MAA	Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Bulan	12	-
6	BPS	Pertumbuhan PDRB	Persen	6,80	4,10
7	BPS	Pengendalian laju inflasi (disperindagkop)	Persen	2,60	1,40
8	BPS	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	9,30	10,80
9	BPS	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	10,33	11,04
10	BPS	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp (Juta)	1,08	1,16
11	DP3A P2KB	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20	25
12	Diskop	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2323	2342

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	BPS	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	18,56	19,31
14	Set dako	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Persen	-	80,00
15	DPM PTSP	Jumlah Investor	PMDN/ PMA	336	352
16	DPM PTSP	Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3734,168	3,409
17	Dis Pora	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,16	1,23
18	Dis Pora	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	24,00	20,00
19	Dinsos	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	32,12	33,42
20	Dinsos	Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100,00	100,00
21	DKPP	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Bulan	12	12
22	DKPP	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0,74	0,75
23	DKPP	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	6,61	6,81
24	DKPP	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8,27	8,47
25	DKPP	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-	90
26	DKPP	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	-	98
27	DKPP	Persentase peningkatan produksi pertanian	Persen	-	100
29	BPS	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	76,84	77,92
	PK	Rerata nilai ujian nasional:			
30	PK	-Rerata nilai ujian nasional SD/MI	Nilai	90	95
31	PK	-Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs	Nilai	80	95
	PK	Angka Partisipasi Kasar:			
33	PK	- APK SD/MI	Angka	106	100
34	PK	- APK SMP/MTs	Angka	101	100
	PK	Angka Partisipasi Murni:			
35	PK	- APM SD/MI	Angka	99	90

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	PK	- APM SMP/MTs	Angka	84	90
37	PK	Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15	16
38	PK	Rasio ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	50,87	0,00
39	Dis Pora	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	30	7
40	DSI PD	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	16	15
41	Dinkes	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,28	71,51
42	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	0
43	Dinkes	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	70	90
44	Dinkes	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	0
45	Dinkes	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	6,62	16,72
46	Dinkes	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	persen	0	100
47	Dinkes	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	0	100
48	Dinkes	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	0	100
49	Dinkes	Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	56,2	100,00
50	Dinkes	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	0	100
51	Dinkes	Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	0	100
52	Dinkes	Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	0	100

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53	Dinkes	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	0	100
54	Dinkes	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	persen	0	100
55	Dinkes	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	0	100
56	Dinkes	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	0	100
57	Dinkes	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	0	100
58	Dinkes	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	0	100
59	Dinkes	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	0	100
60	Dinkes	Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0	0,02411
61	Dinkes	Prevelensi Balita Gizi Kurang	persen	0	1,18129
62	Dinkes	Cakupan Desa Siaga	jumlah	0	88
63	Setda	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	C	B
64	Setda	Kategori hasil evaluasi SAKIP	Kategori	C	B
65	Setda	Kategori hasil evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi
66	Setda	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Persen	0	85
67	BPKD	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
68	Inspek torat	Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	-	100
69	Inspek torat	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	persen	-	100
70	Inspek torat	Level Kapabilitas APIP	level	-	3 level
71	Inspek torat	Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	level	-	3 level

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	Kominfo	Cakupan pengelolaan Website pemerintah	Persen	100	100
73	Kominfo	Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	80	4.0
74	Kesbang Pol	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	-	-
75	PUPR	Pencapaian target nasional 100-0-100	Persen	4.13- 16.8-75- 7	4.38- 11.3- 80.4
76	PUPR	Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih	Persen	80,00	4,38
77	PUPR	Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah (Ha)	16,81	11,30
78	PUPR	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	8,45	4,38
79	PUPR	Kategori capaian kinerja infrastruktur publik	Absolut	Baik	Baik
80	PUPR	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	66,55	76,20
81	Dishub	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	43,72	51,95
82	DLH	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,82	1,15
83	DLH	Luasan RTH Publik 20%	Ha	30,73	0,00
84	DLH	Persentase sampah yang tertangani	Persen	78,72	86,80
85	PP WH	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio (Per 10.000)	47,60	38,55
86	PP WH	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	59	60
87	Kesbang Pol	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	70	-
88	PP WH	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	80	90
89	BPBD	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18,39	47,00
90	BPBD	Cakupan penanggulangan kebakaran	Persen	-	100

Sumber: Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Kinerja penyelenggaraan berdasarkan indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan ditampilkan dalam Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
		ASPEK PELAYANAN UMUM			
		Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.		Pendidikan			
1.	1.	Persentase PAUD dengan Akreditasi B	Persen	70	70
1.	2.	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	75	75
1.	3.	Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI	Persen	99.36	99.36
1.	4.	Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs	Persen	89.00	89.00
1.	5.	Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	Persen	60	60
1.	6.	Persentase Pengawas Sekolah yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah	Persen	90	90
1.	7.	Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru	Persen	40	40
1.	8.	Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan	Persen	70	70
2.		Kesehatan			
2.	1.	Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Bulan	12	12
2.	2.	Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas	Persen	100	100
2.	3.	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	0	0
2.	4.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100
2.	5.	Persentase Kecamatan/ desa sehat	Persen	5	5
2.	6.	Persentase pasar sehat	Persen	2	2
2.	7.	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat	Jumlah	1	1
2.	8.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100
2.	9.	Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT	Persen	95	90
2.	10.	Persentase desa STBM	Persen	20	20
2.	11.	Persentase Desa ODF	Persen	20	20

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
2.	12.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis	Persen	50	50
2.	13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	80	90
2.	14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	87	100
2.	15.	Cakupan Penderita diare yang ditangani	Persen	80	80
2.	16.	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	100
2.	17.	optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	Persen	100	100
2.	18.	Cakupan pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus	Persen	80	80
2.	19.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100
2.	20.	Cakupan Desa dengan posyandu lansia	Persen	95	95
2.	21.	Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia	Persen	95	95
2.	22.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Persen	0	0
2.	23.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Persen	0	0
2.	24.	Cakupan pelayanan Informasi kesehatan	Bulan	12	12
3.		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.	1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	76.2	76.2
3.	2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	4.38	4.38
3.	3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	18.44	18.44
3.	4.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	77.81	77.81
3.	5.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	71.27	71.27
3.	6.	Persentase jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	85.12	85.12
3.	7.	Persentase akses Air Minum/ air bersih	Persen	5.42	5.42
3.	8.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	86.51	86.51
3.	9.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	29.29	29.29
3.	10.	Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha	11.3	11.3
3.	11.	Cakupan dokumen perencanaan	Dokumen	3	3

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
		tataruang			
3.	12.	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	37.2	37.2
3.	13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0.083	0.083
3.	14.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	3.4	3.4
4.		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.	1.	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.32	0.32
4.	2.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.96	0.96
4.	3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	Persen	0.77	0.77
4.	4.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0.68	0.68
4.	5.	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk	Persen	0.13	0.13
5.		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
5.	1.	Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan	Persen	100	100
5.	2.	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	Persen	100	100
5.	3.	Tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	-	-
5.	4.	Cakupan dukungan kelancaran Pemilu	Bulan	12	12
5.	5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	80	80
5.	6.	Persentase penegakan Perda/Qanun	Persen	80	80
5.	7.	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat	Persen	27.88	27.88
6.		Sosial			
6.	1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	33.42	33.42
6.	2.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100	100
6.	3.	Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang menerima bantuan	Persen	90	80
6.	4.	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100
6.	5.	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat	Persen	100	100

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
		Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1.		Tenaga Kerja			
1.	1.	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	90	60
1.	2.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	80	60
1.	3.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun	Rasio	0	0
1.	4.	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja	Persen	85	85
2.		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.	1.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100
2.	2.	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	80	40
2.	3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	75.30	75.30
2.	4.	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	10	8
2.	5.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	25.45	25.45
3.		Pangan			
3.	1.	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persen	60	60
3.	2.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100
5.		Lingkungan Hidup			
5.	1.	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persen	100	100
5.	2.	Cakupan limbah B3 yang dikelola	Persen		
5.	3.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Jumlah	1	1
5.	4.	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	37.2	37.2
5.	5.	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum	Jumlah	1	1
5.	6.	Cakupan pelaksanaan keindahan dan kersian kota	Kecamatan	4	3
6.		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.	1.	Rasio Penduduk ber KTP	Persen	100	883

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
6.	2.	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	90	90
6.	3.	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	90	90
7.	1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
7.	2.	Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong	Gampong	68	68
7.	3.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100
7.	4.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	12.45	12.45
8.		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.	1.	Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga	Rata-rata	2	2
8.	2.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	2	2
8.	3.	Cakupan pelayanan reproduksi remaja	Persen	70	70
8.	4.	Rasio Akseptor KB	Persen	81.94	81.94
8.	5.	Cakupan Peserta KB aktif	Persen	81.94	81.94
9.		Perhubungan			
9.	1.	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat	Persen	80	60
9.	2.	Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ	Bulan	12	12
9.	3.	Rasio Izin Trayek	Rasio	12	12
9.	4.	Jumlah Uji Kir angkutan umum	Rasio	0.99	0.99
9.	5.	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik	Sarana	1	1
9.	6.	Cakupan pemasangan rambu-rambu	Persen	51.95	51.95
9.	7.	Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi	Persen	60	60
10.		Komunikasi dan Informatika			
10.	1.	Cakupan pengelolaan Website pemerintah	Persen	100	100
10.	2.	Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	80	80
10.	3.	Cakupan kerjasama informasi dengan mass media	Bulan	12	12
11.		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
11.	1.	Cakupan Penyediaan Dokumen DED		100%	100%
11.	2.	Cakupan pembinaan terhadap UKM	Persen	5	5
11.	3.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	40.09	40.09
12.		Penanaman Modal			
12.	1.	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jenis Media	5	5
12.	2.	Jumlah Investor PMDN/PMA	Jumlah	371	371
12.	3.	Lamanya proses perizinan	Hari	6	6
13.		Kepemudaan dan Olahraga			

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
13.	1.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	91	91
13.	2.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	15	15
13.	3.	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	30	30
13.	4.	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	Jumlah Cabor	32	32
14.		Statistik			
14.	1.	Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB	Ada / Tidak	Ada	Ada
16.		Kebudayaan			
16.	1.	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	70	40
16.	2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	1	3
16.	3.	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	Jumlah	2	2
16.	4.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola	Jumlah	1	1
16.	5.	Cakupan pembinaan adat Gampong	Jumlah gampong	68	68
16.	6.	Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Bulan	12	12
17.		Perpustakaan			
17.	1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Jumlah	2.078	3,235
17.	2.	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	Bulan	12	12
18.		Kearsipan			
18.	1.	Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	20	20
18.	2.	Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	1	1
		Layanan Urusan Pilihan			
1.		Pariwisata			
1.	1.	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1.23	1.23
1.	2.	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	30	30
2.		Pertanian			
2.	1.	Cakupan pembinaan Kelompok Tani	Bulan	12	12
2.	2.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8.4	8.4
2.	3.	Produktivitas Komoditas Pangan	Ton	15,968	15,968
2.	4.	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	Persen	0.002	0.002
2.	5.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0.748	0.748

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
2.	6.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0.748	0.748
5.		Perdagangan			
5.	1.	Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang	Bulan	12	12
5.	2.	Cakupan pengembangan pasar rakyat	Kecamatan	4	4
6.		Perindustrian			
6.	1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	19.31	19.31
6.	2.	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2,342	2,342
6.	3.	Cakupan promosi perdagangan dan keikutsertaan dalam event pameran dagang	Jumlah	1	1
8.		Kelautan dan Perikanan			
8.	1.	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Bulan	12	12
8.	2.	Cakupan pembinaan dan penegakan hukum kelautan	Bulan	12	12
8.	3.	Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan	Bulan	12	12
8.	4.	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Ton	1,756	1,756
8.	5.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	6.74	6.74
8.	6.	Cakupan sarana dan prasarana perikanan yang dikembangkan	Unit	7	7
8.	7.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah	30	30
		Layanan Penunjang Urusan			
1.		Perencanaan Pembangunan			
1.	1.	Keterbukaan informasi publik melalui website	Ada/Tidak	Ada	Ada
1.	2.	Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan	Dokumen	5	5
1.	3.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Dokumen	1	1
1.	4.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	Dokumen	1	1
1.	5.	Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana	Kegiatan	3	3
1.	6.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	9	9
1.	7.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	Bulan	12	12

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
1.	8.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	Bulan	12	12
1.	9.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Bulan	12	12
1.	10.	Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah	Laporan	4	4
2.		Keuangan			
2.	1.	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	Bulan	12	12
2.	2.	Besaran penerimaan PAD	Milyar	72.6	72.6
2.	3.	Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK	Dokumen	7	7
2.	4.	Opini BPK laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP
2.	5.	Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah	Dokumen	8	8
2.	6.	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Bulan	12	12
3.		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
3.	1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	Persen	3.81	3.81
3.	2.	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Bulan	12	12
4.		Pengawasan			
4.	1.	Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP	LHP	140	140
4.	2.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor)	ASN	50	50
4.	3.	Jumlah laporan pengawasan ASN	Jumlah	4000	4000
6.		Sekretariat Dewan			
6.	1.	Persentase Qanun yang ditetapkan	Persen	100	100
6.	2.	Persentase Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	Persen	100	100

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
7.		Sekretariat Daerah			
7.	1.	Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LLPD, IKK, dan EKPOD	Dokumen	4	4
7.	2.	Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah	Bulan	12	12
7.	3.	Cakupan Informasi publik secara elektronik	Bulan	12	12
7.	4.	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	Bulan	12	12
7.	5.	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	Bulan	12	12
7.	6.	Cakupan pelaksanaan kegiatan keagamaan	Bulan	12	12
7.	7.	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Bulan	12	12
7.	8.	Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh	Bulan	12	12
7.	9.	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Bulan	12	12
7.	10.	Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Hari Besar	8	8
8.		Kecamatan			
8.	1.	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	Bulan	12	12
8.	2.	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	Kegiatan	2	2
8.	3.	Cakupan pelaksanaan <i>Sawe</i> <i>Gampong</i>	Gampong	68	68
8.	4.	Cakupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	1
9.		Penaggulangan Bencana			
9.	1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18.39	18.39
9.	2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100	100
10.		Keistimewaan dan Kekhususan			
10.	1.	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	Bulan	12	12

NO		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
10.	2.	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	42	42
10.	3.	Jumlah Dayah dengan tipe "A"	Dayah	18	18
10.	4.	Jumlah Hafiz/Hafizah	Jumlah	25	25
10.	5.	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	42	42
10.	6.	Cakupan sosialisasi hukum Islam	Bulan	12	12
10.	7.	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Bulan	12	12
10.	8.	Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal	Kegiatan	-	-
10.	9.	Jumlah penerimaan ZISWAF	Milyar	9.15	9.15
10.	10.	Cakupan pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan	Bulan	12	12

Sumber: Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja tahun 2021. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Lhokseumawe merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD Lhokseumawe Tahun 2021. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan di masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2021 disusun setelah melalui beberapa tahapan dan koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyalarsan program dan kegiatan yang akan ditetapkan sehingga diharapkan mampu memberi pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Lhokseumawe.

Dokumen RKPK ini juga dijadikan bahan penyempurnaan proses perencanaan daerah yang diharapkan berguna untuk pelaksanaan pembangunan yang baik, selain juga ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintah dan didukung oleh masyarakat dan swasta untuk mengurangi permasalahan dan menjawab tantangan yang ada, sehingga visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe dapat terwujud secara optimal.

Akhirnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2021 ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional .

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a more complex, stylized set of strokes on the right.

SUAIDI YAHYA